

**PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP
KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KOTA MADIUN
(Studi Kasus :Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup)**

DISERTASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-3
Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Disusun oleh :

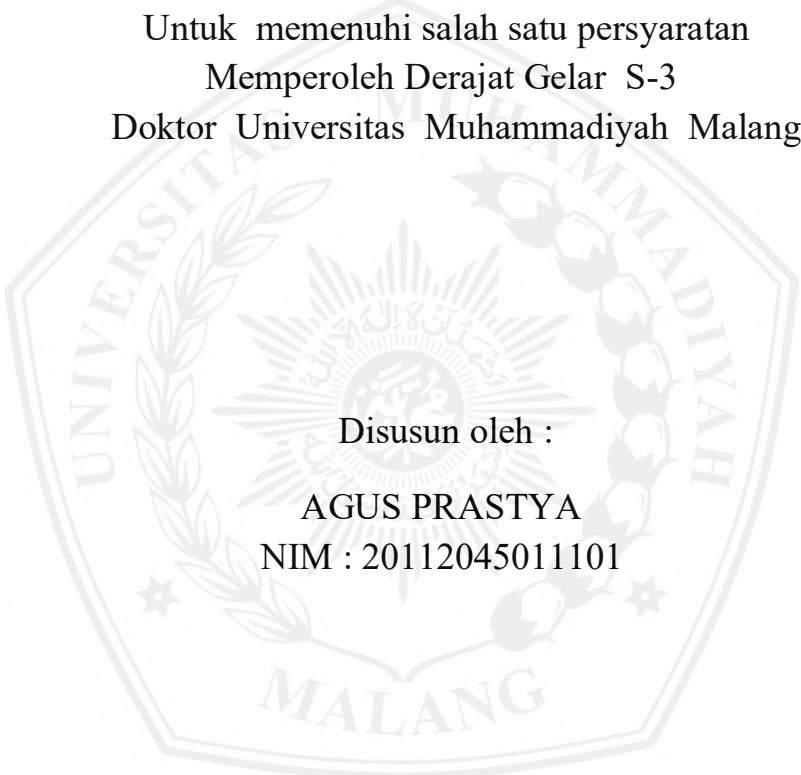
AGUS PRASTYA
NIM: 201120450111010

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DIREKTORAT PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2018**

**PERLAWANAN PEDAGANG KAKI / PKL TERHADAP
KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KOTA MADIUN**
Studi Kasus: Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-3
Doktor Universitas Muhammadiyah Malang



Disusun oleh :
AGUS PRASTYA
NIM : 20112045011101

PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DIREKTORAT PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALANG
2018

PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP
KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KOTA

(Studi Kasus:Upaya mempertahankan Lapak dalam rangka Untuk hidup)

AGUS PRASTYA
20112045111010

Promotor : Prof. Dr.Ishomuddin.MSi

Ko.Promotor I : Dr. Wahyudi, MSi.

Ko.Promotor II : Prof.Dr. Jabal Tarik, Msi

Direktur
Program Pasca Sarjana.

Dr. Latipun, M.Kes.

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Ishomuddin, MSi

PENGESAHAN

Disertasi telah dipertahankan didepan Tim Penguji dalam forum Ujian Tertutup pada hari/ tanggal, **Senin/ 23 Oktober 2017** dan telah direvisi sesuai dengan catatan dari para penguji

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Ishomuddin,MSi
Promotor
2. Prof. Dr.Wahjudi,MSi
Ko.Promotor
3. Prof. Dr. Jabal Tarik, MSi.
Ko.Promotor
4. Prof. Dr. Keppi
Penguji
5. Prof.Dr Syamsul Arifin.MSi.
Penguji
6. Dr. Vina Salviana,MSi
Penguji
7. Dr. Masduki,MSi.
Penguji
8. Dr. Rinekso Kartono, M.Si.
Penguji
9. Dr. Latipun,M.Kes.
Penguji

PENGESAHAN

Naskah Disertasi Ujian Tertutup telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada hari tanggal. **Senin** 23 oktober dan telah direvisi sesuai dengan catatan oleh para penguji.

Dewan Penguji :

Prof.Dr,Ishomuddin ,MSi

Promotor

Prof. Dr. Jabal Tarik,MSi.

Ko. Promotor

Dr. Wahjudi, MSi

Ko. Promotor.

Prof.Dr. Syamsul Arifin,MSi

Penguji

Prof.Dr. Keppy P.M.Sc

Penguji

Dr Wahjudi,MSi.

Penguji

Dr. Vina Salviana,MSi

Penguji

Dr. Masduki,MSi.

Penguji

Dr. Rinekso Kartono, MSi

Penguji

Dr.Latipun,,M.Kes

Penguji

LEMBAR PERSETUJUAN TELAH DIREVISI

Naskah Disertasi ujian tertutup telah dipertahankan didepan didepan tim Penguji pada hari Senin/ 23 Oktober 2017 dan telah direvisi sesuai dengan catatan para penguji

Dewan Penguji :

1. Prof.Dr. Ishomuddin, MSi.
Promotor.
2. Prof.Dr. Jabal Tarik,MSi
Ko. Promotor
3. Dr.Wahjudi, MSi.
Ko. Promotor.
4. Prof.Dr. Syamsul Arifin, MSi.
Penguji
5. Prof . Dr. Keppy P.
Penguji
6. Dr. Vina Salvina, Ds,MSi
Penguji
7. Dr. Masduki, MSi.
Penguji
8. Dr.Rinekso Kartono, MSi.
Penguji
9. Dr. Latipun,M.Kes
Penguji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Agus Prastya,MSi.
NIM : 201120450111010
Program : S-3 / Ilmu Sosial dan Politik
Lembaga : Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
Judul : PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAPKEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH
KOTA. (Studi Kasus: Upaya mempertahankan Lapak dalam
rangka untuk hidup)

Promotor : Prof.Dr. Ishomudin, MSi.
Co. Promotor : Dr. Wahyudi, MSi.
Co. Promotor : Prof.Dr. Jabal Tarik, MSc.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang berjudul teraebut diatas, merupakan hasil karya saya sendiri dengan bimbingan Promotor dan co. Promotor dan bukan sebagai bentuk plagiasi dari pemikiran maupun hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari ada komplain atau mempersoalkan isi maupun kesamaan jenis peneliti siap untuk mempertanggung jawabkan secara hukum. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Malang, 20 Maret 2018

Yang menyatakan

AGUS PRASTYA,

Agus Prastya, Perlawanan Pedagang Kaki Lima/ PKL Terhadap Pemerintah Kota Madiun (Studi Kasus : Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup)

Promotor : Prof. Dr.Ishomuddin,MSi.

Co Promotor : Dr.Wahjudi,MSi. Prof.Dr.Jabal Tarik, MSc.

Key Words : Pedagang Kaki Lima, Relokasi, Perlawanan. Pemkot.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa adanya perlawanan pedagang kaki lima (PKL) Kota Madiun sebagai perwujudan resistensi rakyat terhadap negara. Kota Madiun ibukota bakorwil 1 Madiun secara ekonomi berkembang pesat sehingga berdampak jumlah Pedagang kaki lima (PKL) meledak. PKL tersebut berasal dari para pengangguran dari kota-kota sekitar Madiun seperti Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, dan Kab. Pacitan yang merupakan daerah peyangga ekonomi kota Madiun. Kemajuan ekonomi di kota Madiun membuat rakyat Madiun dan sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan mencari nafkah sebagai pedagang sektor informal. Untuk menata pedagang pemerintah kota Madiun dan DPRD membuat Perda PKL. Perda PKL dimaksudkan untuk mengatur, menata PKL berjualan di kota Madiun. Namun yang terjadi perselisihan antara PKL dengan Pemkot Madiun, sehingga terjadilah perlawanan. Perda yang dibuat DPRD dan Pemkot Madiun bertujuan untuk membuat pedagang tertib, dan melaksanakan aturan, tetapi peraturan itu menimbulkan perlawanan. Penelitian ini bertujuan : (1) memahami penyebab terjadinya perlawanan pedagang kaki lima. (2) memahami makna dan tujuan perlawanan PKL terhadap satpol PP. (3) memahami bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap Pemkot Madiun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan untuk dapat menjelaskan perlawanan PKL adalah teori perlawanan dari James Scott. Hasil Penelitian menunjukkan : (1) Perlawanan terjadi karena disebabkan oleh adanya Relokasi PKL dari pusat kota ke pasar "Kotak". (2) Tujuan perlawanan terselubung adalah dibatalkan Relokasi, sehingga pedagang tetap dapat jualan di Jalan Batanghari, Jalan Barito, dan Jalan Nori (3) Relokasi menyebabkan pedagang kehilangan mata pencaharian, tidak dapat mencari nafkah, (4) Bentuk-bentuk perlawanan pedagang ada 3 (tiga) yaitu perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, dan perlawanan semi/campuran.

Kata kunci : Perlawanan, Relokasi, PKL, Peraturan Daerah, sektor informal.

FOOTWEAR TRADERSHIP (PKL) ON RELOCATION POLICY OF
MADIUN CITY GOVERNMENT
(Case Study of Keeping the Stall in order for life in)

Promoter : Prof.Dr.Ishomuddin,MSi.

Co.Promoter: Dr.Wahjudi,MSi, Prof. Dr. Jabal Tarik, MSi.

Key Words: Street Traders, Relocation, Resistance, City Government.

ABSTRACT

This research is based on the fact that there is resistance of street vendors (PKL) of Madiun City as a manifestation of people's resistance to the state. The city of Madiun, the capital of the 1 MadiunBakorwil, is economically growing rapidly, affecting the number of street vendors (PKL) exploding. The street vendors come from unemployed people from cities around Madiun such as Kab. Madiun, Kab.Ponorogo, Kab.Ngawi, Kab. Magetan, and Kab. Pacitan which is the economic peyung area of Madiun city. Economic progress in the city of Madiun has left the Madiun people and those without jobs to earn a living as an informal sector trader. To arrange the municipal government traders of Madiun and DPRD to make perda PKL. Perda PKL intended to organize, organize street vendors selling in Madiuncity. However, there was a dispute between the street vendors and the Madiun municipal government, so there was resistance. The law made by DPRD and Madiun city administration aims to make merchants orderly, and carry out the rules, but the regulations give rise to opposition. This study aims to: (1) understand the causes of PKL resistance (2) to understand the meaning and objectives of PKL resistance to Satpol PP. (3) to understand the forms of PKL resistance against Madiun city government. The approach used in this research is qualitative with the technique of data retrieval by observation, interview and documentation. While the theory used to be able to explain PKL resistance is a theory of resistance from James Scott. Research results show: (1) resistance occurs because of the existence of the relocation PKL from downtown to market "Kotak". (2) the purpose of resistance is canceled Relocation, so that traders can still sell in downtown. (3) the steps of resistance are: pre movement, awareness building, building movement, affecting target group, outcome stage, (4) forms of merchant resistance there are 3 (three) ie open resistance, closed resistance, and semi.resistance /mix.

Keyword : Resistance, Relocation, City Government, Street Trader

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan judul “Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun, dapat terwujud. Disertasi ini mengkaji tentang nilai-nilai konflik dan perlawanan pedagang yang dilakukan oleh PKL sebagai akibat relokasi ke pasar “Kotak”. Sedangkan fokus penelitian ditekankan pada pengungkapan akar masalah di lapangan yang nantinya digunakan sebagai dasar mengkonstruksi teori perlawanan sebagai produk pengembangan bidang ilmu Sosial Politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar doktor bidang ilmu Sosial Politik di Universitas Muhamadiyah Malang. Terwujudnya disertasi ini berkat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Latipun, M.Kes, selaku Direktur program Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Studi S.3. Ilmu Sosial dan Politik.
2. Prof.Dr.Ishomudin,M.Si.selaku promotor sekaligus Ketua program studi S.3 Ilmu Sosial dan Politik atas bimbingannya, perhatian dan dorongan yang telah diberikan.
3. Dr.Wahyudi,MSi selaku co-promotor yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penulisan disertasi ini.

4. Prof.Dr.Jabal Tarik,MSi, selaku co.Promotor yang telah membantu, membimbing, mengarahkan penulisan dan penyusunan disertasi.
5. Pemerintah Kota Madiun, yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian seputar kasus perlawanan pedagang kaki lima terhadap relokasi dalam kerangka mendukung disertasi.
6. Disperindagkoppar Kota Madiun yang telah membantu sepenuhnya dalam pengambilan data penelitian tentang dokumentasi PKL di Kota Madiun.
7. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Madiun, yang telah memberikan data, informasi, kondisi pedagang sektor Informal di Kota Madiun.
8. Teman dosen UPBJJ-UT Surabaya yang telah memberikan dukungan dan semangat selama studi dan penelitian di S.3 program Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Malang.
9. Teman-temn dan dosen S.3 program ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Malang.
10. Karyawan administrasi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang telah membantu selama belajar dan ujian disertasi.

Atas perhatian, arahan, bimbingan, bantuan semua pihak dalam penulisan disertasi ini, saya sampaikan terima kasih, semoga amal kebaikan mendapat balasan yang sepadan dari Allah SWT, Amiiin.

Malang, 25 Maret- 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI.....	iv	
DAFTAR TABEL.....	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii	
DAFTAR SINGKATAN	viii	
SURAT PERNYATAAN	ix	
ABSTRAK	x	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Rumusan Permasalahan Penelitian	19	
1.3. Tujuan Penelitian	20	
1.4. Manfaat Penelitian	20	
BAB II .KAJIAN PUSTAKA		22
2.1. Kajian Pustaka		
2.1.1. Pemerintah Daerah (<i>Local Governannt</i>)	22	
2.1.2. Konsep Kekuasaan	23	
2.1.3. Penelitian Terdahulu	28	
2.1.4. Konsep PKL.....	31	
2.1.5. Pengertian Sektor In formal	31	

2.1.6. Posisi Informal dalam negara.....	43
2.1.7. PKL secara Ekonomi	44
2.1.8. Perubahan Sosial (<i>Social Change</i>)	44
2.1.8.1. Pengertian Perubahan Sosial.....	46
2.1.8.2. Sumber Perubahan Sosial.....	46
2.1.9. Hubungan Sektor Informal dengan Sektor Formal	50
2.1.10 Kebijakan Pemerintah terhadap PKL	54
2.1.11. Konsep Relokasi	60
2.1.12 Kebijakan Publik	63
2.2. Teori Perlawanan James C. Scott.....	64
2.2.1. Tahap-tahap Perlawanan	67
2.2.1.1. Tahap Pra Gerakan	67
2.2.1.2 Tahap membangun kesadaran.....	67
2.2.1.3 Tahap membangun gerakan	68
2.2.1.4. Tahap mempengaruhi kelompok sasaran.....	68
2.2.1.5 <i>Out come Stage</i>	69
2.2.2. Jenis Perlawanan	69
2.2.2.1 Perlawanan Tersembunyi	69
2.2.2.2. Perlawanan Terang-terangan	69
2.2.3. Bentuk Perlawanan	70
2.2.3.1. Perlawanan Sungguh-sungguh	70
2.2.3.2. Perlawanan Isidental	70
2.2.3.3. Perlawanan Tetutup	70
2.2.3.4. Perlawanan Semi/ Campuran.....	70

2.2.3.5. Perlawanan Terbuka	70
2.2.4. Faktor penyebab Perlawanan PKL	
2.2.4.1. Faktor Biologi	71
2.2.4.2. Faktor sistem sosial	71
2.2.4.3. Faktor Kepribadian PKL	71
2.2.4.4. Faktor Lingkungan	71
2.2.4.5. Faktor Kekerasan.....	71
2.2.5. Konseptual Pemikiran Penelitian	75
2.2.6. Kerangka Penelitian	76
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Paradigma Penelitian	77
3.2. Jenis Penelitian.....	81
3.3. Pendekatan Penelitian	83
3.4. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data	83
3.4.1. Sumber Data.....	83
3.4.1.1. Sumber Data Primer	85
3.4.1.2. Sumber Data Sekunder	86
3.4.2. Tehnik Pengumpulan Data.....	87
3.4.2.1. Observasi	88
3.4.2.2. Wawancara Mendalam	89
3.4.2.3. Dokumentasi	92
3.5. Instrumen Penelitian.....	92
3.6. Tehnik Analisa.....	93
3.6.1. Data Collection	93

3.6.2. Data Reduction	94
3.6.3. Display Data	94
3.6.4. Conclusion. Verivying	94
3.7. Analisa Data	95
3.7.1. Pengujian Kredibilitas.....	95
3.7.2. Perpanjangan pengamatan.....	95
3.7.3. Meningkatkan ketekunan	96
3.7.4. Triangulasi.....	97
3.7.5. Diskusi teman sejawat.....	98
3.7.6. Analisa Kasus Negatif.....	98
3.7.7. Pengecekan Angka (<i>Member Check</i>).....	99
3.7.8. Tranferbilitas	99
3.7.9. Dependability	100
3.7.10. Comfirmability.....	100
 BAB IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
4.1. Pendahuluan	102
4.2. Kondisi Umum	103
4.3. Kondisi Umum Pedagang Kaki Lima /PKL.....	107
4.4. Stuktur dan Stratifikasi Sosial Pedagang Kaki Lima	107
4.5. Ketenagakerjaan di Kota Madiun.....	113
4.5. Sejarah Singkat Dinas Pasar Kota Madiun	120
 BAB V BENTUK-BENTUK PERLAWANAN PKL	121
5.1. Pendahuluan.....	122
5.2. Komenta PKL tentang Relokasi.....	128

5.3. Perlawanan Tersembunyi	128
5.3.1. Perlawanan dengan <i>hit and run</i>	128
5.3.2. Memberi mahar pada aparat	128
5.3.3. Pembatasan jumlah KTP luar kota oleh PKL senior.....	134
5.3.4. Mencari dukungan Ngo/ LSM	135
5.3.5. Memberi suap Satpol PP.	136
5.3.6. Perlawanan Tanam Modal	138
5.4. Perlawanan Terang-Terangan	139
5.4.1. Perlawanan Bentrokan dan Gontok-gontok di Jalan	140
5.4.2. Membakar Rombong dan Memblokade jalan	141
5.4.3. Melawan dengan Kekerasan (senjata)	142
5.4.4. Melawan secara “ Ngawur”.....	142
5.4.5. Sengaja menempati “ Red Area”.....	143
5.4.6. Melakukan Protes dan Unjuk Rasa.....	144
BAB VI TUJUAN PERLAWANAN PKL.....	146
6.1. Pendahuluan	146
6.2. Sebab-sebab Perlawanan PKL	154
6.3. Tujuan Perlawanan PKL	157
BAB VII TAHAP-TAHAP PERLAWANAN PKL	
7.1. Pendahuluan	167
7.1.1. Tahap Pra Gerakan... ..	167
7.1.2. Tahap membangun kesadaran	168
7.1.3. Tahap membangun Gerakan	168
7.1.4. Tahap mempengaruhi kelompok sasaran	168

7.1.5. Tahap <i>Out Come</i>	169
7.2. Tahap-tahap Pelaksanaan Relokasi PKL	169
7.2.1. Penerbitan surat pelaksanaan Relokasi	172
7.2.2 Pra Relokasi .PKL.	172
7.2.3. Jadwal Relokasi PKL	173
7.2.4. Tahap Reaksi PKL terhadap Info Relokasi.....	175
7.2.5. Tahap eksekusi .PKL.....	176
7.2.6 Tahap Pasca Relokasi PKL.....	179
7.2.7 Profil PKL yang “Gigih dan Semangat”	182
BAB VIII ANALISA DATA	188
8.1. Pendahuluan	188
8.2. Sebab-sebab Perlawanan PKL	191
8.3. Tujuan Perlawanan PKL	195
8.4. Tahap-tahap Perlawanan PKL	199
BAB IX KESIMPULAN	
9.1. Tujuan Perlawanan	203
9.2. Bentuk-bentuk Perlawanan	204
9.2.1. Perlawanan Tersembunyi	204
9.2.2 Perlawanan Terang -terangan	205
9.1.3. Tahap-Tahap Perlawanan	207
9.1.3.1. Tahap Pra Gerakan	207
9.1.3.2. Tahap membangun Kesadaran	208
9.1.3.3 Tahap membangun Gerakan	208
9.1.3.4. Tahap mempengaruhi kelompok sasaran.....	209

9.1.3.5. Tahap <i>Out Come</i>	210
9.4. Keterbatasan Dalam Penelitian	210
9.5. Preposisi	211
9.6. Saran	213
9.7. Implikasi Teoritik	214
9.8. Perbedaan Penelitian James C. Scott dengan Hasil Penelitian	224
9.9. Implikasi Kebijakan	224
9.10. Rekomendasi	229
DAFTAR PUSTAKA.....	232



Lampiran- Lampiran :

A. Daftar Tabel Tabel :

Tabel	.1..Penelitian Terdahulu	29
Tabel	.2. Kerangka Pikir Konseptual	71
Tabel	.3. Kaersngks Penelitian.....	72
Tabel	4. Pasar Tanah, Alamat, Luas Tanah.....	210
Tabel	5. Pedagang, Luas, Toko.	215
Tabel	6. Klasifikasi Pasar di Kota.....	216
Tabel	7. Pengurus dan anggouta PKL.....	225
Tabel	8 Tingkat Pendidikan PKL	232
Tabel	9. Kepemilikan Modal PKL	237
Tabel	10 Jenis dagangan PKL	252
Tabel	11 Jumlah anggouta PKL	247
Tabel	12 Pekerja sebelum menjadi PKL	228

B. Daftar skema :

1.Skema Koordinasi Penataan, Penertiban PKL	91
2.Skema Kerangka Pikir Konseptual	71
3.Skema Kerangka Penelitian	72

C. Daftar Bagan

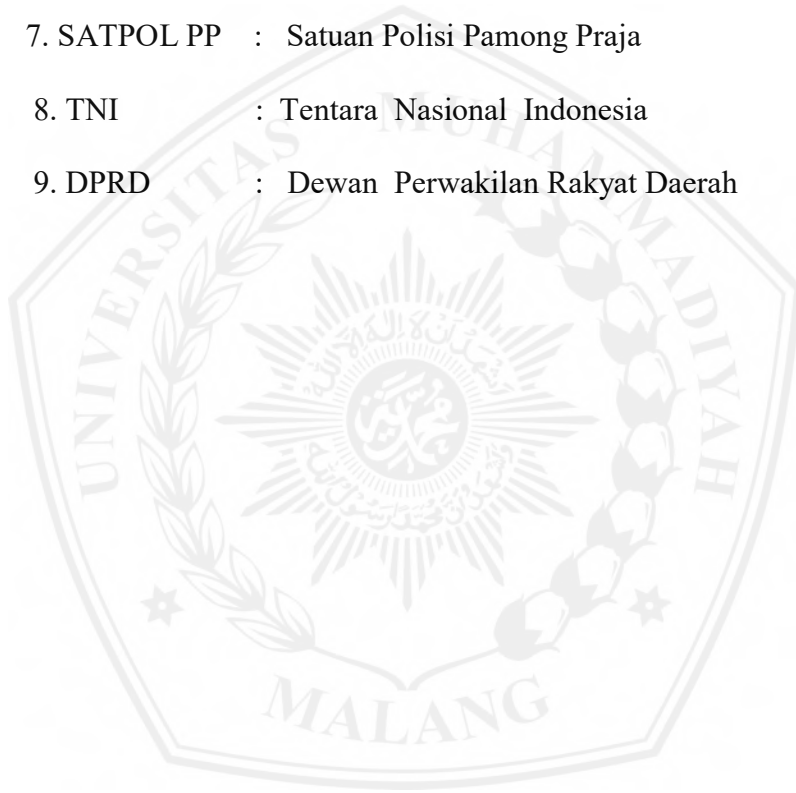
1. Bagan Macam- Teknik Pengumpulan Data.....	85
2. Bagan susunan Tim Penertiban dan Penataan.....	87
3. Pedagang Kaki Lima Kota Madiun	96
4. Bagan susunan Pengurus Paguyuba PKL.....	275
5. Bagan Struktur Pengurus Paguyuban	224
6. Bagan struktur Pengurus PKL Pasar “KOTAK”	227

D. Daftar Gambar..... 240

1 . Gambar Lokasi PKL di Jalan Batanghari	245
2. Gambar Taman Kota sebagai pengantiI	219
3. Gambar Lokasi PKL di Tempat Baru	220
4. Gambar Lokasi Baru PKL di pasar “Kotak”.....	221
5. Gambar pak MaksuM sedang jualan Kaca Mata.....	224
6. Pak MaksuM sedang melayani pelanggan kaca mata	223
7. Gambar lokasi baru di pasar “KOTAK”	224
8. Gambar lokasi PKL di tempat lama Jalan Barito.....	225
9. Gambar Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Batanghari.....	223

E. Daftar Singkatan

1. UU. : Undang-undang.
2. PERDA : Peraturan Daerah.
3. UUD. : Undang-undang Dasar
4. APBD : Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah
5. PKL : Pedagang Kaki Lima.
6. PEMKOT : Pemerintah Kota
7. SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja
8. TNI : Tentara Nasional Indonesia
9. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Aktivitas ekonomi muncul dari adanya upaya-upaya masyarakat untuk mengorganisir tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam rangka menghasilkan, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Ada 3 (tiga) konsep utama dari aktivitas ekonomi 1) bahwa ekonomi dibagi menjadi 3 sektor, primer, sekunder, dan tersier. (2002:43). Pedagang Kaki Lima (disingkat PKL) merupakan bidang ekonomi sektor sekunder yang handal, namun demikian sektor informal ini menjadi perhatian para ekonom, karena daya tahannya dalam menghadapi goncangan badai ekonomi nasional, seperti krisis moneter 1997, sehingga PKL mampu bertahan ditengah krisis ekonomi saat itu.

Penelitian sektor informal termasuk PKL, memang telah banyak dilakukan. Fokus penelitian sektor informal termasuk PKL yang telah dilakukan antara lain menekankan pada sebab-sebab kemunculannya, karakteristiknya. PKL perannya dalam ekonomi masyarakat perkotaan sangat besar. Peran dan manfaat PKL sebagai sektor informal merupakan katup pengaman ekonomi semakin meningkat, untuk ciptakan lapangan kerja baru. Ada 4 (empat) dasar mengapa studi tentang PKL tetap menarik dan relevan dilakukan, karena :

Pertama, adanya peningkatan kuantitas PKL, salah satu persoalan di berbagai kota terutama kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung, Denpasar. Hal tersebut disebabkan sedikit nya lapangan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan serta banyak nya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik

dan perusahaan. Pendataan pasti jumlah secara kuantitas PKL belum ada tetapi gejala bertambahnya terlihat yakni dengan semakin meningkatnya profesi PKL. Data pasti berapa jumlah PKL di pemerintah kota Madiun (disingkat pemerintah kota) belum ada, karena tidak tercatat secara resmi di Disperindagkoppar Kota. Peningkatan jumlah PKL dapat dirasakan dan dilihat, apalagi pasca Indonesia dilanda krisis moneter berkepanjangan sejak tahun 1997, sehingga di berbagai sudut jalan bermunculan PKL.(Disperindagkoppar: 2015)

Kedua, kebijakan Pemerintah Kota sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengatur, menata, pembina PKL mau tidak mau harus turun tangan sesuai amanat yang tersirat dalam Perda No 14/ 2012. Kecenderungan seperti ini kalau dibiarkan tanpa adanya intervensi regulasi dari pemerintah kota, akan beresiko sosial dan harus dibayar mahal. Biaya sosial ekonomi pun kelak kemudian hari sangat besar, bila berkembang secara tak terkendali, tak menutup kemungkinan ciptakan kerawanan masalah sosial. Sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa sebuah lokasi bila dibiarkan dari serbuan kaum *migrant* akan membentuk perkampungan kumuh atau *slum area*.

Ketiga, Reaksi dari PKL cenderung menolak relokasi, sudah berkali-kali pemerintah kota mengupayakan pendekatan sosial, agar PKL yang memenuhi jalan, masuk kembali ke dalam pasar, tetapi berkali-kali pula usaha tersebut tidak berhasil. Penertiban, penataan, penertiban bedak-bedak, lapak-lapak yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal, telah dilakukan pemerintah kota, namun respon pedagang sangat rendah.(Disperindag kota: 2014)

Keempat, idealnya pusat kota tidak dihiasi dengan PKL, untuk itulah PKL harus ditata dengan cara di relokasi ke tempat baru. Hal tersebut dilakukan agar keberadaannya tidak merusak, keindahan, kenyamanan, kebersihan, kesejukan kota. Kasus *over capacity* PKL, berakibat lahir kebijakan relokasi pemerintah Kota yang memindahkan PKL dari kawasan pusat kota yang selama ini mereka tempati, ke pasar “Kotak”.

Relokasi PKL dari pasar loak jalan Batanghari, jalan Nori dan jalan Barito (pusat kota) tidak berjalan lancar, tidak diterima pedagang, hal tersebut ditentang oleh pedagang karena berbagai hal. Relokasi ke pasar “Kotak” ditolak PKL, pedagang beralasan, mereka menolak karena tempat lama mereka strategis untuk jualan. Pedagang beralih sudah puluhan tahun menempati lokasi tersebut, pedagang sudah mempunyai banyak pelanggan, konsumen dan menjadi “jujukan” pembeli. Lokasinya yang strategis, jika “boyongan” ke pasar “Kotak” menjadi sangat tidak ideal, kita makan, minum apa? Inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan .

Perlawanan menurut James Scott dalam bukunya “perlawanan orang-orang kalah” yaitu perlawanan yang dilakukan dengan aksi non kekerasan atau perlawanan tersembunyi, dimana perlawanan dilakukan tidak dengan kasar seperti adu fisik, adu jatos, berkelahi, saling memukul, meyerang dengan membawa alat pentungan, senjata tajam, palu/ pisau dll (perlawanan terang-terang) tetapi perlawanan dengan tersembunyi seperti marah, berkata kotor, mengumpat, ngedumel, ngrasani, bengak-bengok, berkata kotor yang menjadi aksi mereka, menolak kerja sama, pura-pura patuh, dendam. (Scott: 1993: 50). PKL dalam relokasi tidak dapat menolak kebijakan pemerintah kota, karena secara hukum,

lokasi mereka yang selama ini ditempati ilegal. Pemerintah secara persuasive melakukan pendekatan sosial dengan para pedagang, tetapi sebagai eksekutif melaksanakan proses relokasi sesuai prosedur, meskipun ditentang pedagang.

PKL yang didukung oleh paguyuban PKL, LSM, mahasiswa tidak dapat berbuat banyak menghadapi rencana pemerintah, me relokasi PKL dari pusat kota menuju lokasi baru, pasar “Kotak”. Akibat dari hal tersebut lahirlah penolakan PKL dengan perlawanan pedagang, misalnya mencaci maki, menolak barang dinaikkan ke truck, tutup mulut, mogok bicara/ diam, biarkan lapak mangrak, protes dengan vandalisme pada tembok jalan, berkata kotor. Perlawanan pedagang diwujudkan dalam aksi menolak “boyongan pedagang PKL” ke tempat baru, ke lokasi pasar “Kotak”.

PKL di kota Madiun terus ditata, diatur agar keberadaannya menjadikan Kota tertib, nyaman, sejuk, indah, bersih kota. Untuk keperluan tersebut pedagang harus direlokasi ke pasar “Kotak” disatukan ke sebuah lokasi yang terpadu, terintegrasi, sehingga menimbulkan tertib, sehat, nyaman. Namun banyak pedagang yang menolak niat baik pemerintah kota untuk direlokasi ke pasar “Kotak” dengan berbagai alasan. (Paguyuban: 2015).

Pasar “Kotak” menjadi pusat perdagangan terpadu PKL diseluruh kota, yang selama ini bertebaran di jalan-jalan protokol. Tempat strategis di kota tidak terlepas dari incaran PKL, sehingga berakibat pada keindahan, kenyamanan, kesehatan, ketertiban. Di satu pihak kebijakan tersebut menjadi salah satu alternative tempat rekreasi, hiburan, cari souvenir untuk mencari barang antik/ *value history*. Sementara disisi lain kebijakan Pemkot tersebut mengundang

penentangan PKL, akibatnya PKL tersebar secara tidak teratur di jalan-jalan protokol di Kota.

Sebagai kota kecil, Kota Madiun perlu fasilitas pasar loak, salah satunya adalah pasar “Kotak” untuk jual beli barang loak an, sedang yang lain adalah pasar burung “Jaya” dan pasar Besi “Jaya”. Pasar loak diperlukan warga untuk melengkapi aktivitas masyarakat kota, sehingga fasilitas kota semakin lengkap, seperti ada pasar tradisional, ada matahari ritel, seperti mall, super market, pasar swalayan, Indo maret, Alfa maret. dll. Saat ini Kota Madiun menjadi pusat perkembangan perekonomian di daerah Jawa Timur bagian barat, dengan munculnya berbagai pusat perekonomian, perdagangan, wisata, seperti pusat kuliner, pasar Loak. (BPS.2015:25).

Keberadaan pasar Loak berdampak pada berkembangnya sektor informal di kota yang berakibat pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Menjamurnya pusat perbelanjaan dan tempat penginapan seperti banyak nya hotel, pusat perbelanjaan seperti, Matahari Mall, Carrefour, Sri Ratu Mall, Suncity Mall, dan pusat hiburan rakyat saat ini terjadi di kota. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terjadi, hal tersebut akan berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat dan berkembangnya pedagang sektor Informal.

Dengan alasan ketertiban dan keindahan, kenyamanan, maka pemerintah kota akhirnya memindahkan/ relokasi PKL dari pusat kota ke pinggiran kota Madiun yakni dari pusat kota ke pasar “Kotak “. Namun larangan jualan pedagang dan relokasi berjualan, mendapat perlawanan dari PKL. Pedagang masih ingin tetap berdagang dan mempertahankan lokasi jualan di tempat lama untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedang pemerintah tetap pada programnya, yakni Relokasi.

PKL yang dahulu berjualan di jalan Batanghari, jalan Nori, jalan Barito di relokasi ke pasar “Kotak”. PKL meminta ke pemerintah kota untuk memberi pesangon, kompensasi tidak dipungut restribusi selama mereka masih penyesuaian dagang di tempat lokasi jualan baru di pasar “Kotak”.(JP:1-1-2016). Namun reaksi PKL ber macam-macam ada yang menerima sepenuhnya, tidak sedikit yang menolak dengan aksi-aksi pedagang yang bertujuan menolak relokasi.

Loekman Soetrisno dalam pengantar buku “senjatanya orang-orang yang kalah” mengatakan bahwa :

Pada dasarnya kaum lemah tidak berhenti menentang ketidakadilan yang menimpa diri mereka sebagai akibat dari tindakan dan perilaku yang dilakukan segolongan manusia, baik yang berasal dari dalam masyarakat mereka sendiri, maupun kekuatan-kekuatan dari luar masyarakat termasuk dalam hal ini pemerintah dan aparat, yang memperlakukan mereka secara tidak adil. Perasaan diperlakukan tidak adil inilah yang sering memicu timbulnya konflik antar petani gurem/ miskin dengan kelompok-kelompok mapan yang mereka anggap sebagai sumber ketidakadilan tersebut.(Scott: 2003:32)

Aksi perlawanan tersebut dilakukan dengan cara terus-menerus setiap hari melawan rencana relokasi PKL dengan cara, protes, menentang, unjuk rasa baik secara verbal, maupun aksi-fisik agar tidak dipindah ke pasar “Kotak” baru. Lapak baru yang disediakan pemerintah Kota dibiarkan, jangan ditempati, tanpa direnovasi, atau dipindah tangankan ke pihak lain. Mengapa demikian, karena masih kecewa berat, marah, sakit hati, mengeluh sebab jika berjualan, pembeli sepi, pelanggan hilang, tempat baru jauh dari pusat kota. Padahal sebelumnya di

lokasi pedagang yang lama, selalu beruntung minimal pulang sore hari bawa uang. Sedang saat ini untuk makan dan beli rokok saja harus membawa modal dari rumah. (Paguyuban PKL : 2016).

Di lokasi baru, pasar “Kotak” pedagang belum tahu harus berbuat apa, karena pembeli jarang, mereka hanya jalan-jalan, hanya observasi, belum membeli sesuatu. Menanggapi hal tersebut pemerintah Kota “cuek” dan berharap hendaknya pedagang bersabar, telaten sambil menunggu konsumen, pembeli, pelanggan serta masyarakat mengenal pasar “Kotak”. Penelitian ini ingin mengupas, mengungkap mengapa PKL melakukan perlawanan terhadap Pemkot.

Sampai saat ini keberadaan PKL masih belum mendapat pengakuan eksistensinya dari pemerintah, termasuk di kota. Pedagang formal di pasar, toko-toko, pasar swalayan, super market eksistensinya diakui, berbeda dengan PKL, sehingga sewaktu waktu dapat digusur apabila mereka menolak kebijakan pemerintah seperti relokasi. Merespon hal tersebut pedagang yang menolak relokasi melakukan aksi yakni mengadakan perlawanan kepada pemerintah Kota .

Perlawanan yang dilakukan orang-seorang, bukan tindakan kolektif dan didukung oleh niat untuk bertahan, merupakan perlawanan simbolik yang hasil akhirnya tak dapat diremehkan oleh pihak yang menjadi sasaran. Tujuan perlawanan bukan mengubah, apalagi menumbangkan system dominasi. Tujuan orang-orang lemah adalah hanya untuk bertahan dalam system itu, dengan kerugian sekecil-kecilnya, dilakukan tanpa henti, bernapas panjang, itulah “itulah senjata kaum lemah” Scott, 2000:xiv)

James C.Scott, mengatakan bahwa konflik dapat saja terjadi secara terbuka atau secara tertutup, dalam konflik terbuka, para petani gurem sering mengadakan aliansi dengan kekuatan sosial-politik dari luar wilayah mereka yang juga merasa diperlakukan tidak adil, dalam menuntut keadilan. Aliansi ini mengandung positif dan negative adalah upaya petani gurem dalam menegakkan keadilan menjadi lebih terorganisir, sistematis dan memperoleh dukungan ideologis yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memobilisasi dukungan masyarakat luas.(Scott: 2002:2)

Menurut Staath (1982) dan Semsek (1986) sebagaimana dikutip oleh Evers (2000), mengungkapkan bahwa permasalahan sumber konflik PKL dengan pemerintah adalah aspek lingkungan sosial, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan, serta kesemrawutan sehari-hari. Selama ini aspek-aspek tersebut belum dapat menjelaskan perilaku protes PKL yang muncul di dalam sektor informal.

Menurut data dari Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pariwisata kota, pada tahun 2014 ada sekitar 773 perusahaan di kota Madiun yang berbadan hukum. Sekitar 39,33 persen perusahaan berbadan hukum perseorangan, 20,83 persen berbentuk *comanditeare venoschaap*/ firma, 11,83 persen berbentuk perseroan terbatas dan 2,58 persen berbentuk koperasi. Jumlah pedagang di kota pada tahun 2014 ada sekitar 786 pedagang, yang terdiri dari 65 pedagang besar, 100 pedagang menengah, 621 pedagang kecil (2014:31, BPS).

PKL tidak masuk data yang ada dalam Biro Pusat Statistik (BPS) Kota, karena data tersebut hanya pedagang formal yang ada pada Dinas Pasar Kota, sedang PKL ada pada Diperidagkoppar kota. Sebagai kota perdagangan kota Madiun didukung dengan fasilitas untuk perdagangan yang sangat memadai seperti Hyper Market, pasar swalayan, super Market, pasar besar, pasar tradisional, pasar Loak. (Bagian Ekonomi pemkot : 2015)

Penduduk Kota sesuai sensus penduduk 2014 (BPS: 2014) adalah 174.114 jiwa dengan sebaran 28.29 persen penduduk tinggal di 3 Kecamatan, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman adalah 5.940 jiwa per km². Sementara kecamatan Kartoharjo Manguharjo 5.010 dan 4.642 orang per km², secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota 5.240 km² per km.

“Kesejahteraan yang diperoleh dunia acapkali genting karena diperoleh dengan melalui praktek - praktek pertanian, kehutanan, yang menghasilkan banyak keuntungan dan kemajuan hanya dalam jangka pendek. Kini skala campur tangan kita dalam alam semakin meningkat dan dampak fisik dari keputusan meluap melampaui batas-batas geografi negara. Pertumbuhan dalam interaksi ekonomi antara bangsa memperbesar konsekuensi suatu negara. Ekonomi dan ekologi memaksa kita dalam jaring-jaring yang akan semakin meningkat. Sekarang banyak wilayah menghadapi resiko kerusakan lingkungan hidup yang tak mungkin terpulihkan yang mengancam basis bagi kemajuan manusia”(Komisi Dunia untuk LingkunganPembangunan,1988:38)

Sebagian penduduk kota bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, wiraswasta, dan sebagai PKL. Data Hasil survey angkatan kerja Nasional menurut data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota tahun 2014 dari 52.073 keluarga, yang termasuk keluarga pra sejahtera yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, sebagian besar adalah PKL. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 di Kota 5,35 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,66 persen.(BPS: 2014 kota)

Sedangkan garis kemiskinan di Kota adalah mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 280.299 (BPS 2014:172). Sebagian besar dari penduduk yang masuk garis kemiskinan adalah para penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, seperti PKL, sopir, pemulung, pengangguran. PKL bertebaran di seluruh jalan protokol dan tempat strategis Kota. Untuk itulah pemerintah Kota menempatkan PKL dengan program relokasi ke pasar “Kotak”, agar PKL terpusat

“Dimasa mendatang yang lalu kita telah dipaksa untuk menghadapi semakin meningkatnya ketergantungan ekonomi antar bangsa- bangsa dan. Sekarang kita dipaksa untuk membiasakan diri pada saling ada nya angka ketergantungan ekologi antar bangsa Ekologi, ekonomi semakin adanya saling terkait secara lokal, regional dan global menjadi sebuah jarin-jaring tak berkelimpahan yang tersusun atas sebab dan akibat.
(Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, 1988:7)

Laju pertumbuhan PDRB kota Madiun 2013 menunjukkan angka 8,07 point sedangkan kabupaten Madiun hanya sekitar 8 persen. Juga dengan angka IPM Kota Madiun lebih tinggi, dibanding kabupaten Madiun yaitu 77,82, sedangkan daerah lain hanya berskisar 70-74 point. Indeks harga konsumen kota dibanding daerah lain di Jawa Timur menempati rangking 2 setelah kota Probolinggo. Kemudian disusul kota lain seperti kota malang, kota Kediri, kota jember, kota Surabaya.(BPS :2014)

Kota Madiun mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dibanding daerah-daerah lain, yaitu dengan banyak nya pusat bisnis seperti hotel, Matahari Mall, Sri Ratu Mall, Carrefour Mall, Sun city hotel dan Mall, menjamur nya super market seperti Alfa Maret, Indo Maret. Namun demikian pusat perbelanjaan, hotel-hotel, super market tetap saja tidak dapat membantu ekonomi kalangan pelaku ekonomi bidang sektor Informal seperti PKL. Hal tersebut berakibat bertambahnya secara kuantitas PKL di Kota, karena masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat *hedonisme* terhadap kebutuhan barang dan materi, jasa.

Akibatnya pedagang sektor informal kurang diminati masyarakat kelas menengah keatas, tetapi sangat diminati kelas menengah kebawah, sebab inilah satu-satu nya jalan untuk mencari sesuap nasi yakni pada sektor informal, sehingga jumlah PKL terus bertambah, meningkat setiap hari.

Goulet dalam tulisan populer nya, *The Cruel Choise*, mendiskripsikan dampak keterbelakangan terhadap kondisi kemiskinan sebagai berikut :

Keterbelakangan sungguh mengguncangkan hati nya: kekumuhan, penyakit, kematian yang mestinya dapat ditanggihkan dan ketiadaan harapan mengenai itu semua....Pengamat yang paling mendalam baru dapat berbicara secara obyektif mengenai keterbelakangan setelah mengalami sendiri, atau ikut merasakan getirnya keterbelakangan. Goncangan budaya yang unik akan terasa manakala seseorang mulai berkenalan dengan perasaan yang hidup dalam buaya kemiskinan “budaya kemiskinan”. Perasaan yang umum yang terdapat dalam keterbelakangan ialah rasa tidak berdaya pada individu maupun kelompok, bila berhadapan dengan penyakit atau kematian, kebingungan, dan ketidaktahuan, pada saat orang meraba. Untuk memahami perubahan, penyerahan nasibnya kepada manusia-manusia lain yang keputusannya menentukan tentang apa yang bakal terjadi. Ketidakberdayaan menghadapi kelaparan yang bakal terjadi serta ketidakberdayaan mengenai terjadinya bencana alam. Kemiskinan kronis adalah neraka yang kejam, dan orang yang tidak dapat mengetahui betapa kejamnya neraka, itu semata-mata dengan menatap kemiskinan sebagai obyek belaka.(Goulet, 1971:24)

Secara makro ekonomi kondisi sosial ekonomi saat ini, mengalami peningkatan secara nasional dengan signifikan, dimana banyak dibangun pusat ekonomi seperti super market, hyper market, pusat-pusat perbelanjaan (Mall, hiper market), kemampuan ekonomi masyarakat meningkat terbukti daya beli penduduk naik. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyak mobil baru, sepeda motor baru, perumahan baru yang dimiliki oleh masyarakat, hal tersebut memberikan gambaran bahwa rakyat semakin baik ekonominya, daya beli nya meningkatkan. Namun kenyataan di tengah masyarakat banyak terjadi keluhan-keluhan sosial ekonomi seperti harga garam naik, harga kebutuhan pokok (beras) naik, mencari pekerjaan sulit, mencari sandang pangan sulit, mencari nafkah sulit, muaranya semua itu adalah pengangguran, kemiskinan, akhirnya mendorong orang menjadi PKL.

Dilain pihak telah bermunculan orang-orang kaya baru yang mengendalikan ekonomi di negeri ini, modal pada umum nya dikuasai kelompok tertentu yang merajalela menguasai ekonomi, menguasai sumber ekonomi, pusat ekonomi, pasar-pasar perekonomian. Akhirnya yang terjadi adalah terjadi kesenjangan social yang semakin melebar antara “si kaya dan si miskin” di masyarakat. Banyak nya pemutusan hubungan kerja dari pabrik, perusahaan memindahkan usaha ke Negara lain, jelas akibatnya banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan cepat atau lambat berakibat pada terjadinya pengangguran.

Hasil akhir yang akan terjadi adalah lahirnya bentuk kemiskinan, ketergantungan (*dependencia*) masyarakat negara yang sedang berkembang dan terbelakang atas komoditas seperti: cultur, habid, dan *style* negara maju sebagai obyek ekonomi produk mereka. Fenomena tersebut muncul di Negara berkembang termasuk Indonesia, dikenal sebagai obyek kapitalisme baru (*neo capitalism*) seperti banyak barang import masuk ke negara kita, mobil, sepeda motor, barang elektronik, produk makanan. Faktor ini mengakibatkan terjadinya terhambatnya produk masyarakat dan peran rakyat dalam ikut mengelola, menata ekonomi negara dan partisipasi positif yang efektif. Friedman (1992) berpendapat dampak nya kemiskinan semakin meningkat karena barang import tersebut mahal, daya beli nya berkurang, kesulitan ekonomi muncul.

Prediksi para ahli dengan berkembangnya kapitalisme model baru akan banyak masuk modal asing, investasi asing, dan tenaga kerja asing dari

negara yang berinvestasi di negara kita. Banyak rakyat yang menyadari masalah ini, tetapi tidak dapat berbuat banyak, mereka hanya mampu untuk mengekspresikan diri melalui sikap kecewa, protes sosial, unjuk rasa, umpatan, ngrasani, yang hasilnya pun belum tentu ada, Friedman mengatakan

Althout the popular sektor provide many usefull service at very low cost, the are increasingly regarded, as were their nineteent century counterparts in eruroe, as the 'dangerous class' that oblige the stateto maintain a large, if unproductive, security apparatus.
(Friedman :15)

Menghadapi situasi dan kondisi sosial ekonomi seperti saat ini, serba repot, sulit, disatu pihak menggantungan diri pada pemerintah untuk memberi solusi memberikan pekerjaan dan lapangan kerja, mustahil dan tidak mudah. Kasus yang dihadapi PKL yaitu mandiri berusaha, modal tidak ada, bekerja keras, banting kulit, berjuang keras agar diperboeh kan jualan di lokasi lama tetapi tidak boleh, padahal manusia hidup membutuhkan makan, minum, sekolah, sandang, papan, kesehatan. Solusi yang paling mudah dan dapat segera dirasakan hasilnya serta tidak merepotkan pemerintah yakni memasuki sektor informal menjadi PKL. Modal utama di sektor informal adalah kemauan, tekad, niat mandiri, adanya ijin berdagang dari pemerintah, itulah solusi yang tepat, cepat menghadapi kondisi saat ini.

PKL/ *streat traders* adalah salah satu jenis pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat di kota-kota besar, di negara-negara yang sedang berkembang, para pelakunya di lapangan kebanyakan adalah pengangguran tersembunyi. (Firmansyah:1995:93) setengah pengangguran karena mereka bekerja dari 35 jam seminggu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa PKL

sebagai parasit, patologi sosial, pelaku kejahatan atau pekerjaan yang semata-mata pekerjaan yang tidak relevan.(Roggero & Ramli, 1992).

Pendapat lain dari Bromly, mengatakan bahwa PKL adalah korban dari langkanya pekerjaan dan kesempatan kerja di kota, akibat derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota dalam banyak hal lebih menguntungkan kota/urban bias. Dengan demikian PKL merupakan alternative terakhir bagi masyarakat dan para pelaku ekonomi, untuk dapat bertahan hidup di kota (Brommly, 1991)

Sirkulasi uang yang beredar dalam lingkungan PKL yang tergabung dalam paguyuban PKL di kota cukup besar dapat mencapai 1 Milyard (Bag. Ekonomi pemkot: 2016). Sebagai contoh menurut hasil penelitian di DKI Jakarta Pendapat Asli Daerah (disingkat PAD) dari PKL mencapai Rp 480 juta pada 1991 sedang di kota Semarang mencapai 360 juta pada 1993. PKL boleh dikata sebenarnya peran sektor informal dalam membangun daerah tidak kecil, sudah saat nya pemerintah mengakui eksistensi PKL, jangan diperlukan pada waktu akan pemilihan kepala daerah (pilkada) saja, usai pemilu ditinggal.

Ruang kota secara tidak sadar, telah mengalami eksploitasi oleh berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Sebenarnya secara *master plan* kota, Kota Madiun telah di program untuk pembagian wilayah sesuai untuk keperuntukannya seperti untuk kawasan pabrik dan industri, kawasan perumahan, kawasan pendidikan, kawasan pertokoan, kawasan perkantoran. Lokasi pasar Loak yang belum ada yaitu kawasan untuk PKL, karena dalam

program pembangunan daerah PKL tidak masuk bidang yang dikembangkan oleh Pemkot. Akibatnya PKL berkeliaran di seluruh kota, yang membuat Kota Madiun semrawut, tidak teratur, merusak keindahan, kenyamanan, kesejukan, dan kesehatan.

Melalui Disperindagkopar seluruh pedagang di relokasi ke pasar “Kotak”, sehingga kota Madiun tidak kelihatan kotor, jorok, menjadi kota bersih, cantik, sejuk, nyaman, indah. Terintegrasi nya PKL di suatu tempat berarti secara keruangan posisi pedagang terhormat, karena pemerintah kota menyediakan tempat khusus bagi PKL. Dinamika ekonomi dengan perkembangan yang sangat pesat dan akibat dari masalah ekonomi nasional, jumlah PKL bertambah banyak dan butuh ruang sosial dan ruang interaksi sosial ekonomi untuk mencari nafkah bagi Pedagang PKL. (Eko S : 2014)

“Kelaparan dan keterbatasan persediaan pangan, merupakan masalah masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal, maupun global. Bertolak dari pertumbuhan penduduk dunia yang tidak berhenti, meskipun di berbagai kawasan tingkat rata-ratanya sudah sangat menurun, bahkan ada yang menerapkan konsep “pertumbuhan zero” (*zero growth*), namun kenyataan penduduk dunia jumlahnya semakin terus meningkat. Perkiraan penduduk dunia pada tahun 2025 akan mencapai 8.036 Milyard.”(2009:5.22).

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, lowongan kerja di kota, dan membengkaknya pengangguran di kota menyebabkan pelarian masyarakat memasuki dunia sektor informal. Menurut Kartasasmita lapangan kerja di Indonesia sektor pertanian 14%, sektor perdagangan 16%, sektor jasa 14%, sektor industri 10,6% (Kartasasmita:1996:254). Dengan melihat data tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja dan sektor

ketenagaan kerjaan sangat memprihtinkan. Apalagi saat ini dipicu banyaknya pabrik dan perusahaan yang henggang dari Indonesia, hal tersebut membuat lapangan kerja semakin sempit dan menimbulkan PHK.

PKL menjadi solusi termudah, untuk mencari nafkah sebagai pengganti sulitnya mencari lapangan kerja, serta menjadi penyebab membludaknya kuantitas PKL di kota-kota. Mereka dengan modal sedikit, kemampuan management berdagang minim menggelar dagangan dengan jenis dagangan apa saja, sudah dapat pekerjaan. Orang-orang mendirikan warung kopi, lapak dagangan di sembarang lokasi yang penting ramai, banyak orang kumpul tidak peduli legal maupun illegal menurut perda, yang penting dapat makan. Dengan cara itulah para PKL mencari solusi sebagai jawaban sedikit lapangan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan saat ini.

“Kondisi sosial ekonomi negara sedang berkembang kehidupan sosial ekonominya belum mendominasi kehidupan sebagian besar penduduknya, sektor pertanian, sektor informal sangat mendominasi kehidupan penduduknya. Tingkat sosial dalam bidang pendidikan, nilai gizi masyarakat nya tidak memadai dan tercermin dalam kesejahteraan, serta kondisi sosial ekonomi masih rendah tercermin dengan pendapatan perkapita yang kecil.”
(2009:5.26)

Fakta sosial yang terjadi sekarang di masyarakat menunjukkan, semakin sulitnya lapangan kerja, pengangguran meningkat tetapi jumlah orang kaya bertambah, mobil di jalan semakin banyak. Dimana-mana terjadi kemacetan, jalan sudah diperlebar, namun terasa sempit karena padat nya kendaraan bermotor, berarti daya beli rakyat tinggi. Secara makro ekonomi kondisi sebenarnya sebaliknya, banyak orang merasa hidup semakin sulit, harga-harga naik. Di masyarakat ada anekdot yakni “Yang kaya semakin

kaya, sedang yang miskin bertambah miskin” mereka menengarai ada program kebijakan pemerintah yang salah dalam system perekonomian di negara kita.

Sosial ekonomi masyarakat tersebut menjadi interopeksi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi, agar apa yang dibuat DPRD dan pemkot dapat mensejahterakan, mengayomi rakyat, jangan tidak adil. Pemerintah kota ada karena dipilih dalam pilkada mandat dari rakyat. Jangan seperti pepatah “Habis manis, sepah dibuang” pada waktu membutuhkan suara nya dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) rakyat dikejar-kejar. Jika sudah memperoleh mandat menjadi walikota, bupati, gubernur, presiden, janji-janji lupa, bahkan sengaja dilupakan.

Kasus tersebut terjadi di masyarakat saat ini, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dan pemilihan umum nasional, serta pemilihan umum untuk memilih presiden tahun 2019. Para kandidat berbondong-bondong datang, merayu, membujuk rakyat untuk memilihnya dengan janji-janji muluk, untuk mensejahterakan masyarakat Kota.

Kartasmita mengklasifikasikan pembangunan menjadi 2 (dua) kelompok besar :

1. Memberi peluang agar masyarakat modern dapat tetap maju, karena kebutuhannya diperlukan untuk pembangunan nasional, dalam hal ini termasuk peningkatan effesiensi, produktifitas dan pengembangan dan penguasaan tehnologi yang amat diperlukan untuk memperkuat daya saing.
2. Memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup diluar atau dipinggiran jalur kehidupan modern. Intinya adalah membantu rakyat agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dankemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang

dimilikinya, sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. (Kartasasmita: 196;158).

Kedua strategi tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, serta diperlukan penataan, perencanaan yang lebih baik agar menghasilkan sesuatu struktur ekonomi dan masyarakat yang sinergis menuju kearah pembangunan ekonomi yang merata, berkesinambungan diatas landasan yang kokoh bagi masyarakat.

Keberadaan PKL tidak terelakkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, tetapi perlunya penataan, pembinaan, pengawasan, agar kehadirannya di masyarakat dapat membantu perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota. Selain itu keberadaan PKL dapat menjawab permasalahan ekonomi rakyat selama ini, yakni pengangguran, kemiskinan, minim nya lapangan kerja.

Keberadaan PKL selama ini masih kurang mendapat perhatian pemerintah, sehingga diperlukan perlindungan hukum dengan peraturan perundangan-undangan yang berkekuatan hukum. Sering terjadi perlakuan tidak manusiawi terhadap PKL oleh aparat satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penataan PKL alasan nya karena ketertiban, kenyamanan, kebersihan, tetap saja bahwa pedagang masih diperlukan semena-mena. Hal inilah yang menyebabkan kan lahir konflik antara pedagang dengan aparat satpol PP, namun kasus di Kota saat ini adalah perlawanan pedagang karena adanya kebijakan Relokasi. PKL adalah rakyat yang memiliki mandataris negara, pada kenyataan kedaulatan yang dimiliki rakyat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya karena pendidikan rendah dan tidak memiliki jabatan dan tidak berkuasa.

Secara strategis, pemerintah mengambil banyak kebijakan yang terkait dengan PKL, sebagai wujud kepedulian terhadap pedagang sektor Informal khususnya keberadaan PKL. Pemerintah Kota perlu mengambil langkah langkah tersebut antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan regulasi tentang PKL, peraturan Undang-undang PKL sebagai berikut :

- 1.UU.No: 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah pasal 23 ayat 1/ memberi kesempatan berusaha dalam bentuk lokasi yang wajar bagi PKL.
- 2.PP. No 39 /2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasa 22 ayat 2 tentang pemberdayaan PKL
3. PP 125/ 2012 tentang koordinasi penataan, pemberdayaan PKL.
- 4.PP. No. 41/ tahun 2012 tentang penataan, pemberdayaan PKL.
5. Peraturan daerah No:14/ tahun 2012, tentang penataan, penertiban, PKL.

Dari uraian permasalahan dan latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil judul :

“Perlawanan PKL terhadap kebijakan Relokasi pemerintah kota Madiun”
(Studi kasus: Upaya mempertahankan “lapak” dalam rangka untuk hidup.)

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah dalam penelitian, maka yang menjadi fokus permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimanakah perlawanan PKL terhadap pemerintah kota Madiun dalam pelaksanaan relokasi” (Studi Kasus : Upaya mempertahankan “lapak” dalam rangka untuk hidup).

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan melalui beberapa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk perlawanan sebagai reaksi relokasi PKL.
2. Apa tujuan perlawanan PKL terhadap relokasi?
3. Bagaimana tahap-tahap perlawanan PKL dalam relokasi ?

1.3. Tujuan penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlawanan PKL pada pemerintah kota dalam pelaksanaan relokasi.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian bertujuan antara lain :

- 1.3.2.1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap pemerintah kota dalam proses relokasi.
- 1.3.2.2. Memahami maksud-tujuan PKL melakukan perlawanan terhadap pemerintah kota pada proses relokasi ?
- 1.3.2.3. Memahami tahap-tahap perlawanan PKL terhadap satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Pemerintah kota sebagai akibat relokasi.

1.4. Kegunaan Penelitian :

1.4.1. Manfaat Teoritis:

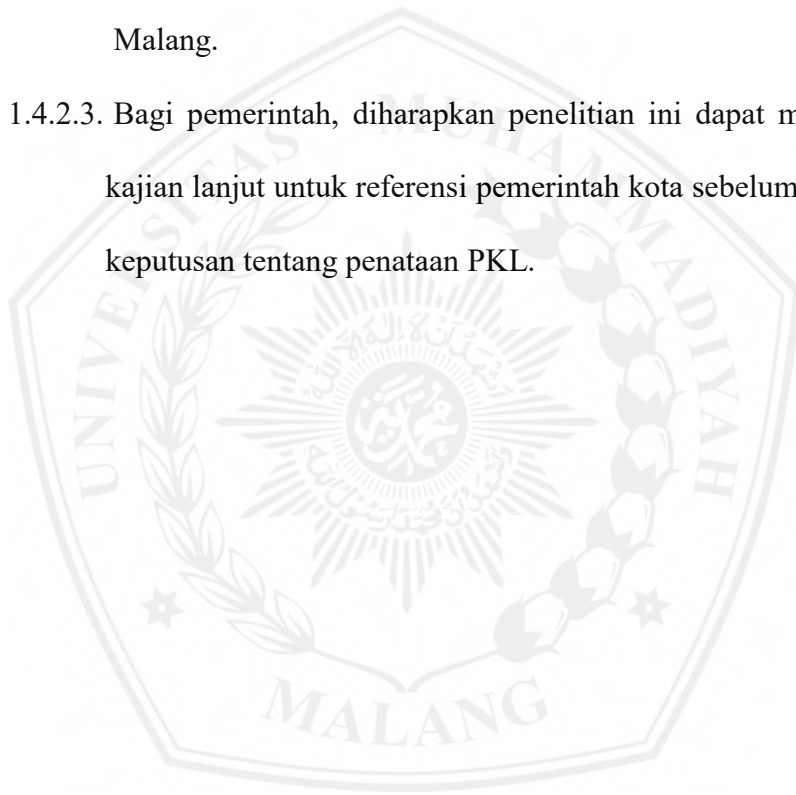
- 1.4.1.1. Menemukan teori baru untuk melengkapi teori yang ada tentang perlawanan.
- 1.4.1.2. Menyempurnakan teori yang sudah ada, tentang perlawanan Scott.

1.4.2. Manfaat Praktis.

1.4.2.1. Bagi peneliti sendiri diharapkan hasil penelitian sebagai area untuk aplikasi teori-teori yang telah diperoleh serta dapat mempertajam daya kritis sebagai seorang ilmuwan.

1.4.2.2. Bagi almamater, semoga penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Malang.

1.4.2.3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjut untuk referensi pemerintah kota sebelum pengambilan keputusan tentang penataan PKL.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pemerintahan Daerah (Pemerintahan Lokal)

Pada dasarnya terjadi reformasi pada tahun 1998, merupakan akibat dari sentralisasi kekuasaan pemerintahan di pusat, sehingga daerah tidak mempunyai kekuasaan untuk mengelola wilayah dan daerahnya. Lahirlah era reformasi di segala bidang salah satu munculnya Undang-undang No. 22/ 1999 tentang otonomi daerah (otoda). Undang-undang otonomi daerah memberikan peluang dan ruang luas bagi daerah untuk mengatur urusan sehari-hari. (*daily affair*), memberi perhatian pada partisipasi aktif masyarakat. Dalam perjalanannya selama 5 tahun otoda berjalan efektif sesuai tujuan awal, namun undang-undang tersebut cenderung liberal, rentan terhadap disintegrasi bangsa dianggap produk hukum tergesa-gesa. (2014: 10)

Pada masa sebelumnya saat pemerintah orde baru (Orba), pemerintah menggunakan UU.No.5/ 1974 yang dalam implementasinya mengarah pada dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik, kekuasaan pemerintah pusat atas daerah, institusi daerah lemah tergantung dan tidak mandiri. Legislatif mandul tidak memiliki hak politik dan yuridis yang cukup untuk berpartisipasi secara wajar. Perilaku negara cenderung otoriter birokratis dengan kekuasaan hegemoni, dominasi, serta keputusan ditentukan secara tersentral, daerah seolah-olah hanya perpanjangan tangan pusat, tanpa memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memutuskan.

Saat ini pemerintah telah memberikan wewenang dan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk ikut mengelola, mengatur, melaksanakan pemerintahan di daerah, perubahan dari model sentralisasi ke desentralisasi. Pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyusun kebijakan, peraturan daerah dalam membangun daerah demi kesejahteraan, kemakmuran rakyat, seperti Perda tentang penataan, pengaturan, penertiban, dan pengawasan kegiatan pedagang sektor informal yaitu PKL. Kesempatan ini, hendaknya dimanfaatkan oleh kepala daerah dan jajarannya untuk membangun wilayah sehingga dicapai masyarakat sejahtera, makmur, adil. Jangan sampai pimpinan daerah menjadi penguasa yang hegemoni, otoriter, diktator kepada rakyat, menjadi raja-raja yang arogan dalam memimpin daerah seperti dalam mengelola PKL. (UU.23/ 2004)

2.1.2. Konsep Kekuasaan

Konsep politik yang banyak dibahas dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di daerah maupun di tingkat pusat adalah masalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu sosial dan politik pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada masa orde baru politik (*policy*) menjadi panglima dianggap sebagai kekuasaan. Banyak sekali definisi tentang kekuasaan, sehingga beberapa ahli menganggap kekuasaan sebagai sesuatu konsep yang dipertentangkan (*a contested concept*) yang artinya kekuasaan merupakan hal, yang tidak dapat dicapai kesepakatan consensus (W.Connonly (1983) dan S.Luker (1974)

Perumusan yang umumnya dikenal bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, pada perilaku orang lain, sehingga

perilaku nya sesuai dengan keinginan dari perilaku orang yang memiliki kekuasaan. Dalam perumusan perilaku biasanya perorangan atau individu atau kelompok/ kolektif. Kekuasaan umum nya sekurang-kurangnya melibatkan 2 (dua) pihak, jadi hubungan relasi antara dua pihak atau lebih.

Weber dalam bukunya *Wirtschaftund Gesselschaff* (1992) mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Ahli politik lain yang pemikiran sama adalah Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mendefinisikan kekuasaan dengan rumusan klasik: Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok lain kearah tujuan, dan kemauan dari pihak pertama.

Definisi serupa disampaikan oleh Barbara Goodwin (2003) berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara, oleh bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

Sedangkan menurut Tallcot Parsonns, kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu system organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan maka pelaksanaan sanksi-sanksi negative dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan. (Meriam: 20012:63)

Pada umumnya kekuasaan diselenggarakan (*exercise of power*) melalui isyarat yang jelas, sering dinamakan kekuasaan manifest (*manifest of power*). Namun kadang kala isyarat tersebut tidak ada, Carl Frederick menyebut '*the rule of anticipated action*' bentuk kekuasaan tersebut sering dinamakan kekuasaan implisit. Essensi kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi, sedangkan caranya berbeda-beda dalam menyelenggarakan kekuasaan dan upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik, melalui coercion/ koersi yaitu melalui ancaman akan sanksi, yang lebih lunak adalah cara persuasive yaitu cara menakutkan, beargumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli/ *expert advice*.

Pada kasus perlawanan PKL pada proses relokasi, terlihat sekali peran kekuasaan yang diperagakan oleh pemegang kekuasaan yakni pemerintah. Pemerintah kota, pihak eksekutif yang membina, menata, menertiban PKL di kota, satpol PP. menggunakan kekuasaan untuk memenuhi tugas sebagaimana tercantum dalam Perda No: 14. Tahun 2012 yakni membina, menata, menertiban, mengawasi PKL. Kebijakan penataan PKL tidak salah jika pemerintah kota mengadakan relokasi pedagang ke pasar "Kotak", sebagai menjalankan amanat Perda.

Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan/ jabatan atau kepercayaan, kekayaan, agama, sebagai pemimpin formal keagamaan seperti 'alim 'ulama', pemimpin adat atau suku di daerah yang mempunyai kekuasaan. Dalam suatu hubungan kekuasaan (*power relationship*) selalu ada pihak yang lebih kuat dari pada pihak lain, sehingga selalu ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. Ketidak seimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan, ketimpangan

hubungan dan ketergantungannya antara PKL dengan Pemkot, hal ini sering disebut dengan hegemoni, dominasi, dan pendudukan.

Di beberapa daerah banyak muncul ketimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan otonomi daerah, lahirilah raja-raja kecil bagaikan seekor singa yang haus dan lapar. Demokrasi disalah artikan kebebasan yang mutlak tanpa batas, sehingga *euphoria* kebebasan berakibat pada citra dan gaung demokrasi menjadi bebas tanpa batas, muncullah gerakan-gerakan yang tanpa kendali hingga merusak reformasi. Kebebasan demokrasi tersebut juga berimbas pada jiwa dan konsep hidup PKL, mereka merasa saat ini ada dalam era kebebasan, masa demokrasi sehingga berdagang berjualan di mana saja asal di kota dibolehkan, dan tidak melanggar aturan Pemkot. Pengertian demokrasi hakekatnya, bahwa kebebasan tersebut adalah bebas, tetapi tetap bertanggung jawab tanpa mengganggu hak orang lain dan hukum harus tetap dita'ti, bahkan hukum sebagai panglima.

Masyarakat hendaknya mengendalikan diri dengan situasi dan kondisi kebebasan dan demokrasi saat ini, rakyat harus memahami bahwa demokrasi harus berjalan secara alami, jangan ciderai, dikotori dengan tindakan anarkhis merusak hukum. Otonomi daerah dimaksud agar kekuasaan tidak sentralisasi tetapi desentralisasi ke daerah, agar pemerintah tidak dinikmati orang-orang pusat saja, tetapi sekarang daerah dapat mengelola daerah, wilayah sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk menjadi pemilik, tuan dirumah sendiri, dan hal tersebut tidak pernah dijumpai di masa orde baru, sampai dengan adanya otonomi daerah.

Era reformasi sekarang ini jangan dijadikan pula kesempatan kepala daerah untuk, menguasai, menghegemoni, mendominasi kekuasaan secara

berlebihan, sehingga kekuasaan dibagi-bagi bagaikan bagi-bagi kue kepada saudara, anak, isteri, kerabat secara berlebihan “Murka”. Kasus beberapa kepala daerah yang menimpa nya saat ini, namun ujung-ujungnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan me“makan” uang rakyat lewat korupsi APBD, seperti yang dialami beberapa bupati dan walikota saat ini.

Inilah negative nya otonomi daerah (otoda) yang salah kaprah, dengan dalih demokrasi, kepala daerah menyalah gunakan kekuasaan, sedangkan rakyat yang seharusnya disejahterakan sesuai janji kampanye, omong kosong yang tertinggal hanya kata-kata retorika belaka. Pembangunan ekonomi yang digadang-gadang untuk mensejahterakan tidak terpenuhi, dampak rakyat menjadi korban seperti PKL.

PKL, sebenarnya tidak ada niatan melawan negara dan pemerintah dengan melakukan perlawanan program relokasi PKL. Mereka hanya ingin dapat hidup, dapat makan, dapat sekolahkan anak, sehingga jalan satu-satunya adalah menjadi PKL, bila ada pekerjaan lain, barang kali tidak mau menjadi PKL tetapi bagaimana lagi tidak ada pilihan lain selain menjadi pedagang sektor informal. Inilah tugas, tanggung jawab, kewajiban pemerintah kota dan jajarannya untuk mencari solusi pemecahaan terhadap penataan PKL. Pemerintah kota, sudah menjadi tugas, kewajiban, suatu keharusan untuk membantu, mensejahterakan, warga nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memberi pekerjaan, buka lapangan kerja, agar dapat hidup untuk keluaragnya.

2.1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang PKL sudah banyak dilakukan baik dalam perorangan maupun kelembagaan, namun permasalahan PKL tidak kunjung terselesaikan. Peristiwa, kasus yang menimpa pedagang selalu muncul di mass Media, koran, radio maupun televise. Isi berita nya selalu memilukan hati, menimpa PKL yakni penggusuran, relokasi dan penyitaan, pengusiran paksa, represif terhadap PKL.

Dibawah ini beberapa penelitian disertasi yang telah dilakukan, tentang kasus PKL di beberapa daerah, ditinjau dari aspek yang berbeda antara lain sosial, ekonomi, budaya, politika antara lain sebagai berikut :

Penelitian disertasi yang sama pernah dilakukan oleh Alisyahbana (mantan sekda Kota Surabaya tentang perlawanan PKL di Surabaya. Dalam penelitian yang berjudul tentang Perlawanan Rakyat Terhadap kebijakan pemerintah Surabaya. Dilaksanakan pada tahun 2005 menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu, bagaimana menata, menertibkan PKL. Penelitian tersebut bertujuan menata lokasi jualan pedagang, agar tidak ditindak satpol PP dengan represif, melainkan dengan tindakan persuasif toh pedagang juga warga Surabaya, mereka menjadi pedagang bertujuan mempertahankan hidup supaya dapat makan, anak-anak dapat sekolah, dapat memiliki papan, sandang.

Penelitian lain oleh Hotman Siahaan yaitu tentang “Pembangkangan terselubung pada petani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di desa Papar. Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”. Hasilnya yaitu bahwa tindakan yang dipilih oleh petani tebu rakyat intensifikasi merupakan pilihan rasional petani, merupakan pilihan rasional dan individu, meskipun dalam pelaksanaannya, tidak terorganisir

dan terbuka. Penelitian ini merupakan hasil disertasi Prof. Dr. Hotman Siahaan guru besar Sosiologi Universitas Airlangga tahun 1987.

Penelitian yang lain berkaitan dengan PKL adalah penelitian disertasi yang dilakukan oleh Eko Handoyo berjudul tentang: “Eksistensi PKL terhadap Kontribusi modal Modal Sosial di Semarang”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014 di Semarang merupakan penelitian disertasi. Hasilnya yaitu, perlawanan PKL terhadap pemerintah kota Semarang, karena sulitnya ekonomi akibat kebijakan terhadap PKL. Modal dalam berdagang untuk mencari nafkah merupakan faktor penentu keberhasilan PKL, sehingga tanpa modal kegagalan berdagang akan terjadi.

Penelitian tentang PKL lainnya yaitu dilakukan oleh Alfian dengan judul “Perpolisian Polsek Tanah Abang dalam menangani konflik antar pedagang di Blok B – E dengan pengelolaan pasar Tanah Abang. Penelitian ini dilakukan oleh Alfian pada tahun 2007. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi kesepakatan tentang pembagian lokasi jualan PKL di Blok E-B pasar Tanah Abang. Rekomendasi tersebut setelah diselenggarakan setelah musyawarah antara pengelola dengan PKL.

Disamping penelitian tersebut diatas ada penelitian lain tentang PKL yakni “Rakyat miskin dan Perebutan tata ruang kota di Surabaya pada tahun 1900-1960”. Penelitian disertasi ini dilaksanakan pada tahun 2015. Oleh Purnawan Basundoro.

Hasil penelitian nya rakyat miskin hanya dijadikan obyek oleh media sebagai bukti eksistensi negara terhadap rakyat kecil. Penggusuran, pengusiran gubuk liar

pedagang menimbulkan perlawanan PKL di Surabaya. Berikut ini tabel penelitian terdahulu model disertasi tentang perlawanan PKL.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Hasil	Judul
1.	Alisiahbana	2005	Perlawanan Pedagang Kaki Lima kepada pemerintah Kota Surabaya, bertujuan agar pedagang tidak ditertibkan dengan represif, dan berjualan untuk mempertahankan hidup.	Perlawanan Rakyat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya (Studi kasus: Upaya mempertahankan Lapak, untuk hidup)
2.	Eko Handayo	2014	Perlawanan PKL terhadap pemkot , karena sulitnya ekonomi akibat kebijakan pemkot, menurut mereka resistensi karena sulitnya hidup.	Eksistensi Pedagang Kaki Lima (Studi tentang Komtribusi Modal Sosial terhadap resistensi PKL di Semarang
3.	Alfian	2007	Setelah melalui musyawarah dengan pemerintah DKI Jakarta akhirnya konflik dapat diatasi, diajaknya tokoh-tokoh pedagang rapat.	Perpolisian Oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B- E dengan pengelola pasar.
4.	Purnawan Basundoro.	2015	Rakyat miskin hanya dijadikan obyek oleh media sebagai bukti eksistensi negara di tingkat lokal. Penggusuran, pemukiman liar, gubuk-gubuk terjadi setiap hari, hidup sulit, maka mereka perlawanan.	Rakyat miskin dan perebutan ruang kota di Surabaya tahun 1900-1960.
5	Siahaan, Hotma	1987	.Pembangkangan Terselubung dilakukan Petani peserta TRI, merupakan pilihan yang rasional dan individu, tidak terbuka dan terorganisir.	Pembangkangan Terselubung Petani Tebu Rakyat Intensifikasi di desa Papar Kec.Papar,Kedir

2.1.4. Konsep Pedagang Kaki Lima/ PKL.

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnyanya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagangnyanya ditambah tiga “kaki” (sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah Kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang ‘mangkal’ secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah PKL berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan waktu itu mengharuskan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki atau sekitar 1,5 meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas-ruas jalan tersebut dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalanan, sekarang menjadi PKL. Di beberapa tempat, PKL keberadaannya dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci, yang menyebabkan banjir, polusi lingkungan.

Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa PKL dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial

dapat dilihat bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL dapat membantu suatu kota menciptakan budaya nya sendiri. Firdausi (1995) merangkum PKL menjadi 4 (empat) aspek yaitu, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, karakteristik PKL ditandai ciri-ciri sebagai berikut: meliputi berbagai usaha yang luas dan mudah dimasuki oleh pengusaha baru, bermodal relatif kecil konsumen lokal, berpendapatn menengah ke bawah, teknologi sederhana, tanpa teknologi, dan jaringan usaha terbatas. Sementara itu dalam sosial budaya PKL dicirikan sebagai berikut : tingkat pendidikan rendah, terdiri atas *migran*, jumlah anggota rumah tangga besar, bertempat tinggal di daerah kumuh di kota dan jam kerja relatif lama. Jika dilihat dari aspek lingkungan, PKL memiliki ciri-ciri, kurang mengutamakan kebersihan, jorok, kotor, serta lokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Menurut Kartono dkk, PKL(1980,3-7) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) merupakan pedagang sekaligus produsen, (2) ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau *stand* yang tidak *permanent* serta bongkar pasang. (3) menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lain tahan lama. (4) pada umumnya bermodal kecil, kadang hanya sebagai imbalan jerih payahnya. (5) kualitas barangnya rendah dan biasanya pada umumnya tidak berstandars. (6) peredaran uang tidak seberapa besar, pembeli pada umumnya berdaya beli kecil.(7) usaha kecil berupa *family* (perusahaan keluarga) dimana ibu,

anak, turut serta membantu baik langsung maupun tidak langsung. (8) tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi khas pada usaha pedagang kaki lima. (9) dalam melaksanakan pekerjaan ada yang secara penuh, sebagian lagi pada waktu senggang/ longgar ada pula yang melaksanakan pekerjaan musiman. (10) barang yang dijual biasanya *convenience goods* (bermutu umum) jarang sekali *specialy goods* (bermutu khusus). (11) seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang diliputi rasa takut kalau tiba-tiba ada operasi oleh Tim Penetiban Umum dari satpol PP Kota.

Subangun menyatakan bahwa sektor informal dan sektor non formal menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan. Sektor formal memiliki ciri-ciri, seperti: (1) seluruh aktifitasnya bersandar pada sumber daya sekitarnya, (2) ukuran usahanya berskala kecil dan aktifitasnya merupakan usaha keluarga. (3) untuk menopang usahanya digunakan teknologi tepat guna dan memiliki sifat padat karya. (4) tenaga kerja yang bekerja dalam aktifitasnya umumnya terdidik, terlatih dalam pola-pola tidak resmi. (5) seluruh aktifitasnya dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah. (6) aktifitas mereka bergerak dalam pasar yang bersaing.

Sedangkan sektor Informal ditandai dengan ada nya ciri-ciri: (1) seluruh aktifitasnya umumnya pada umumnya bersandar pada sumber daya sekitarnya. (2) ukuran usaha nya besar dan memiliki badan hukum, (3) untuk menjalankan roda aktifitasnya ditopang oleh tehnologi padat modal dan biasanya merupakan hasil import. (4) umumnya tenaga kerjanya dapat pelatihan dan pendidikan di lembaga formal. (5) tenaga kerja di sektor ini bukan saja bersifat formal tetapi umumnya

tenaga ahli asing (*expatriat*) dan (6) seluruh aktifitasnya berlaku dan berjalan dalam pasar yang terlindungi (misalnya: tarif, kouta, lisensi).

Berdasarkan uraian diatas, PKL posisinya dalam sistem ekonomi Nasional Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan posisi mereka kadang kala dianggap sebagai *pembuat ke onaran, semrawut, kumuh, ketidaktertiban, perusak keindahan* sebagai perwujudan sebagai akibat pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran. Sebagai parasit sosial, sumber pelaku kejahatan, sampah masyarakat, penghambat pembangunan, perusak citra kota, sejajar dengan pengemis, pelacur dan pencuri. Dengan tidak diakuinya PKL dalam sistem ekonomi, maka negara dengan mudahnya melakukan kesewenang-wenangan, seperti penggusuran, pengngusiran, relokasi, bahkan kadang kala dengan tindakan yang *represif*.

Kebijakan tata ruang yang diterapkan cenderung berpihak pada kaum pemilik modal, menganggap kaum miskin kota sebagai pihak yang mengganggu tata ruang kota sehingga perlu digusur atau di relokasi, dipindah. Padahal sebenarnya motivasi PKL berjualan, berdagang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, mengisi perut, menghidupan anak-isteri dapat sekolah beli baju, bukan untuk beli rumah, mobil.(20114:45)

Menurut Subangun (1994:53-54) menyatakan bahwa sektor informal dan sektor formal menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan. Sektor informal memiliki ciri-ciri : (1) seluruh aktifitasnya bersumber pada apa adanya. (2) ukuran usahanya umumnya kecil dan aktifitasnya merupakan usaha keluarga. (3) untuk menopang usahanya dipergunakan tehnologi tepat guna dan memiliki sifat padat karya. (4)

tenaga kerjanya yang bekerja dalam aktifitasnya sektor pada umumnya terdidik, dan terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi. (6) seluruh aktifitasnya mereka dalam sektor ini berada dijalur yang diatur oleh pemerintah. (7) aktifitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing.

Sedangkan sektor formal dengan ciri-ciri : (1) seluruh aktifitasnya pada umumnya bersumber pada sumber daya sekitarnya. (2) ukuran usaha berskala besar dan berbadan hukum. (3) untuk menjalankan usaha ditopang oleh teknologi padat modal dan biasanya merupakan hasil *import*. (4) tenaga kerja sektor ini umumnya mendapat latihan dan pendidikan di lembaga formal. (5) Pra tenaga kerja yang terlibat sektor ini bukan bersifat formal tetapi kadang tenaga kerja asing. (6) aktifitasnya berlaku dan berjalan didalam pasar yang terlindungi.

Gambaran sektor informal dan sektor formal tersebut, betapa sektor informal tidaklah bersifat *homogen* tetapi sangat *heterogen*. Sejumlah ilmuwan sosial membagi sektor informal dan sektor formal perkotaan menjadi dua sub sektor, antara lain : *pertama* kegiatan ekonomi keluarga berskala kecil dengan pendapatan sangat bervariasi tetapi terjadi akumulasi modal sebagai hasil keunggulan kompetitif dan atau kelihaian berdagang.

Ekonomi mereka tidak menentu hanya bersifat subsistem mengingat kebanyakan mereka hanya berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang berstatus rendah dengan ketrampilan rendah pula. Pendapat lain menyebutkan sub sektor diatas sebagai sub sektor *intermediate* yang merupakan kelompok *enteprenuer* yang dinamis. *Kedua*, komunitas miskin yang merupakan fenomena kelebihan tenaga kerja surplus. Kelompok ini berpendapat bahwa sektor informal sebagai

bentuk usaha bersifat *temporer* karena masih berharap dapat beralih ke sektor formal. Sedangkan yang pertama memperlakukan sektor informal sebagai sebagai pekerjaan *permanent* karena menjanjikan perkembangan ekonomi (Surbakti:77).

2.1.5. Pengertian sektor Informal

Ada 2 dua hal pendapat para ahli ekonomi tentang sektor informal yaitu ;

1. Sektor in formal pada hakekatnya merupakan konsep ekonomi, sehingga kegiatan atau individunya dapat dikelompok menurut lapangan usaha.
2. Dalam sektor in formal yang dianalisa adalah perilaku ‘unit usaha’ dan bukan keluarga, individu. Terhadap unit usaha ini yang skalanya paling kecil/ swakarya atau mandiri, maka perilakunya adalah unit usaha akan identik dengan individu (Hidayat: 1996:6)

Aktivitas-aktivitas informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan perusahaan berskala kecil di pinggiran kota besar, tetapi bahkan meliputi berbagai aktivitas ekonomi, yang bercirikan antara lain :

1. Mudah untuk dimasuki.
2. Bersumber pada sumber daya lokal.
3. Usaha milik sendiri.
4. Operasi nya berskala kecil.
5. Padat karya dan tehnologi bersifat adaptif.
6. Ketrampilan-ketrampilan diluar system sekolah formal.
7. Tidak terkena langsung oleh regulasi.
8. Pasarnya bersifat kompetitif. (Alisyahbana 2002 : 10)

Sethurman melihat sektor informal dari sisi produk dan sirkulasi barang,, berikut ini pendapat nya:

Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya sangat dihadapkan berbagai kendala seperti masalah modal, factor pengetahuan, dan faktor ketrampilan (Sethurmann, 1981).

Dalam konteks sektor-sektor informal, kota menjadi primadona bagi kaum migrant yang ingin mengadu nasib. Tetapi pada umumnya, ada ruang yang dipenuhi oleh kaum *migrant* dan kelompok marginal, kondisi sosial ekonomi tetap melingkari nasib terpuruk kalangan level bawah. Hal tersebut disebabkan karena upah, penghasilan, kemampuan, profesionalisme dan produktifitas rendah, cepat atau lambat, berdampak pada peningkatan penduduk warga, tetapi kota-kota besar pada umumnya lebih pesat pertumbuhannya dibanding tempat-tempat urban yang lebih kecil.

Sektor informal kehadirannya tidak dikehendaki dalam pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari pembangunan sektor formal. Tetapi sektor informal jelas berbeda dengan sifat, ciri khas sektor formal. Sifat-sifat sektor informal yang mencerminkan adanya pertentangan dengan sektor formal antara lain : a) dari sisi pemasaran, transaksi tawar menawar diluar system hokum formal dengan aktifitas sosial budaya menonjol. (b) Perilaku sosial pelaku berhubungan erat dengan daerah asal. (c) Merupakan kegiatan ilegal, sehingga selalu terancam penertiban..(d) Pendapat para pelaku ekonomi sektor ini, syah tetapi disembunyikan disebut *black economy* atau *under groud* ekonomi. (5) Secara umum dipandang melakukan peran peripheral dalam

ekonomi kota dan beraneka ragam kegiatan. (6) Dalam menjalankan usaha terjadi persaingan ketat diantara pelaku ekonomi di dalam masyarakat terjadi persaingan untuk memperebutkan posisi kompetitor ini. (g) Kebanyakan berusaha sendiri, tidak terorganisir, keuntungan kecil dan (h) Kegiatan ekonomi di sektor informal tumbuh dari rakyat miskin dikerjakan oleh rakyat miskin dan sebagian konsumsinya adalah rakyat miskin. (Pramono, dkk)

Sektor informal pada dasarnya dikenal bersamaan dengan dinamika keberadaan masyarakat itu sendiri. Ketika dalam masyarakat terjadi persaingan untuk memperebutkan posisi prestisus dan bergengsi yang lazimnya posisi ini. Sebagian besar ada pada sektor informal seperti di bidang militer, pendidikan dan lain-lain, mereka yang gugur berkompetisi harus bersaing dalam sektor informal.

Lipton dalam artikel *“Urban bias and Food Policy in Poor Countries; Food Policy”* (1975) mengilustrasikan :

Ketika pembangunan masih dianggap sama dengan pertumbuhan, pada waktu yang lalu orang melihatnya sebagai sesuatu yang bergantung kepada industrialisasi dan urbanisasi. Baru belakangan dengan dilancarkan kritik-kritik terhadap model-model, pertumbuhan yang awal, orang memberikan perhatian pada dampak kebijakan perkotaan atas sektor-sektor lain dalam perekonomian. Namun ketika pembangunan didefinisikan secara luas, mulailah bermunculan pertanyaan tentang dampak kebijakan perkotaan terhadap sektor-sektor dalam perekonomian, khususnya wilayah pedesaan. Yang kita persoalkan sekarang, apakah pembangunan perkotaan dan pedesaan dapat diawasi dan direncanakan sedemikian rupa hingga keduanya berinteraksi secara positif dan bukan saling membatalkan.

Berbagai diskusi tentang pertumbuhan kota-kota di dunia khusus pada negara berkembang sering diawali dengan deretan angka-angka yang menakutkan, terkait dengan implikasi dari gerak sosial tersebut. Pada umumnya tema yang muncul tentang kemiskinan, penyakit sosial/ patologis sosial, kawasan kumuh,

pengemis, gelandangan serta bermacam hambatan tentang akibat yang ditimbulkan akibat dari pembangunan perkotaan. China mengalami migrasi tertinggi terus menerus, dan kini diatas 31 kotanya memiliki populasi 1 Milyard penduduk. Dan lebih 17 kota yang padat penduduk berasal dari kaum *migrant*. sisa nya dari kelahiran bayi.

Angka-angka tersebut memberikan indikasi bahwa belum siapnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dalam mengimbangi strategi industrilisasi nasional. Sektor pertanian masih menjadi pilihan utama karena tidak mengisyaratkan kualifikasi dan profesionalisme ketat. Dengan demikian dengan lahan pertanian semakin menyempit menimbulkan migrasi tenaga kerja dari desa ke kota untuk mencari rizki, situasi ini embrio dari sektor informal di perkotaan, seperti maraknya PKL.

Berbagai dinamika pertumbuhan kota di negara berkembang seringkali muncul disertai terjadinya arus migrasi penduduk dari desa ke kota, sebagai akibat dari situasi dan kondisi desa yang miskin, lahan pertanian sempit, sedang fasilitas di kota menarik, karena ada lapangan kerja, pekerjaan. Lahirlah pemukiman baru, pengemis, gelandangan, kawasan kumuh, dikota. Inilah awal dari sumber permasalahan di kota-kota, lambat laun mereka menjadi pedagang sektor informal.

Istilah sektor informal pertama kali dipakai oleh Keith Hart dalam penelitiannya di Accra dan Nima, Ghana pada tahun 1971 (Alisyahbana, 2003:10). Selanjutnya, konsep sektor informal ini dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO) dalam penelitian selanjutnya di 8 (delapan) kota Dunia ketiga

yang meliputi Free Town (Sierra Leon. Lagos dan Kana (Nigeria), Kumasi (Ghana), Colombo, Jakarta, Manila, Cordoba, dan Campina (Brazil) (Hart:61-89).

Secara Sosiologis PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat sekelompok menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, budaya asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama.(Sarjono.2005:5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku.

Sektor informal, dicirikan melalui terminologi, yang meliputi :Aktifitas-aktifitas informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan berskala kecil di pinggiran kota besar, tetapi bahkan meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ini adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan : (a) mudah untuk dimasuki.(b) sering bergantung pada sumber daya lokal.(c) usaha milik sendiri. operasi berskala kecil.(d) padat karya dan teknologinya bersifat adaptif.(e) Keterampilan dapat diperoleh diluarsistem sekolah formal. (f) Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Aktifitas-aktifitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, bahkan sering diatur oleh aturan ketat dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah. (Alisyahbana, 2003:10)

Lebih lanjut badan dunia *International Labour Organization* (ILO), mengidentifikasi ciri-ciri sektor informal sebagai usaha kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok

menciptakan kesempatan kerja dan pendapat bagi diri sendiri dan dalam usahanya dihadapkan pada kendala factor modal., pengetahuan, ketrampilan. Munculnya sektor ini di latarbelakangi oleh keterbatasan sumber ekonomi (Gibson dan Kelly, 1994). Pelaku sektor ini jadi PKL karena tidak memiliki alternative lain, jika mereka menemukan lapangan kerja yang baru dan menghasilkan keuntungan lebih banyak dari sektor informal, mereka memilih akan meninggalkan pekerjaan ini. Sektor informal di perkotaan merupakan problem sosial dalam kerangka issue politik dan pemerintahan, meskipun pada hakekatnya problem tersebut dapat dipandang sebagai suatu proses sosial yang manusiawi dan rasional. Dalam hal ini Kabra (1995) sebagai sektor informal tidak terorganisir, terjadi karena ada surplus tenaga kerja akibat modernisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sektor informal dianggap sebagai sebuah panggung persaingan antara rakyat dengan pemerintah, yang sebenarnya didasari oleh benturan antara dua cara pandang berbeda. Dari pemikiran ini, keberadaan sektor informal harus dipandang sebagai bukan sebagai persoalan, karena suka tidak suka, sektor pasti ada. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya memanadag sektor informal sebagai mitra kerja untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Sumber daya manusia potensi PKL sebagai pelaku mandiri telah terbukti, tanpa bantuan modal dari pemerintah, mereka berusaha sendiri, dikelola sendiri, utang sana hutang sini dengan tujuan agar dapat hidup, dapat makan, anak dapat sekolah, punya papan.

Maka kehadiran PKL jangan dianggap sebagai, pencipta kota kumuh, perusak lingkungan, pencetus kriminalitas di perkotaan, pembuat daerah kumuh/ *slum area*. Selanjutnya pemerintah menggunakan kata “Demi ketertiban,

kebersihan, keindahan, kepetingan publik sebagai senjata dan alasan untuk menggusur, mengngusir, merelokasi ke tempat di luar kota. Deutch melihat urbanisasi sebagai seni dari transformasi orang desa ke kota, maka kehadiran *urban art* nampak mengganggu kebijakan pemerintah sebagai otoritas pemegang kekuasaan.

Bernabe (2002) membagi 3 (tiga) terminologi sektor informal antara lain :

1. Model Dualis, yang mendeskripsikan kesempatan yang sama antara sektor informal dan formal dalam memperoleh pendapatan, karena mereka adalah sesama warga kota yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Model ini mendasari cara pandang terhadap sektor informal merujuk pada keadaan ekonomi masyarakat kota yang miskin dan marginal yang memproduksi barang dan jasa bagi rakyat.
2. Model Kontinum Informal – Formal, yang melihat sektor ini sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri, menjadi bagian dari system kapitalis, dengan karakter masing-masing. Sektor informal sering dipandang dari: bentuk usahanya, ada ijin atau tidak, tempatnya dimana dan siapa orangnya. Dari pandangan ini, menciptakan posisi informal berhadapan dengan sektor formal di masyarakat.
3. Model Rekonsiliatif, merupakan gabungan dari keduanya. Pandangan ini mengkedepankan hubungan antar keduanya. Rekomendasi yang dikedepankan adalah perlunya penguatan atas hubungan mereka.

Pemerintah hendaknya melindungi sektor informal, selama ini yang mendapat perhatian dan pengakuan hanya pedagang sektor formal dengan fasilitas lokasi, akses perbankan, sedangkan pedagang sektor informal belum mendapat perhatian dan perlindungan sepadan. Padahal potensi pedagang informal sangat besar jumlah mereka banyak, sebenarnya jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke pemerintah kota Madiun yang signifikan. Pemerintah kota sampai hari ini masih gagal dalam memperlakukan PKL sejajar dengan mengintegrasikan sektor

informal kedalam system ekonomi formal yang mempunyai persamaan hak dan kewajiban.

Ada 2 (dua) alasan mengapa terjadi peningkatan jumlah pekerja sektor informal di negara berkembang :

1. Pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan menyebabkan terjadinya “urbanisasi prematur” deformasi struktural dalam ekonomi (dalam Arif Sasono).
2. Adanya perbedaan produktifitas yang menyolok antara sektor formal dan sektor informal yang telah mengakibatkan keragaman struktural.

2.1.6. Posisi Informalitas dalam negara.

Dalam pembangunan tidak senantiasa identik dengan penciptaan lapangan kerja, karena pembangunan yang dilaksanakan menyangkut multi aspek baik sosial ekonomi, budaya politik, pendidikan, pertahanan keamanan. Sektor informal sebagai bentuk lapangan kerja hanya sebagian dari dampak adanya pembangunan. PKL lahir, karena dapat diartikan sebagai mereduksi pembangunan dan menghilangkan peran pekerja setingkat *worker* (kurang trampil) yang lebih mengandalkan dominasi kekuatan fisik semata.

Sektor informal posisi nya dalam perekonomian nasional belum mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah, buktinya sektor informal dalam pembahasan formal antara pemerintah dengan DPRD belum pernah ada pembahasan untuk pengakuan secara formal. Karena status secara hukum belum ada, maka dengan mudah pemerintah memperlakukan sektor informal seenaknya

sendiri, seperti menggusur, merelokasi, menindak dengan represif PKL. Moir dan Soetjipto (1977 dalam Ali Syahbana, 2003:115) melaporkan dalam penelitiannya bahwa 75 % kaum *migrant* Jakarta berasal dari daerah pedesaan.

Kaum *migrant* sangat tergantung pada obyek mata pencahariannya, karena mereka datang di kota tersebut dengan niatan untuk mencari nafkah. Mereka sangat memperhatikan waktu yang paling efisien untuk pulang kampung. Prinsipnya yang dipegang tidak akan mempertaruhkan hilangnya pelanggan dan dalam waktu lama, maka lokasinya akan ditempati oleh pedagang lain. Sehingga pemerintahan memandang sektor informal tidak bersifat permanent tetapi hanya sementara, karena butuh pekerjaan, bila ramai berdaganglah, jika sepi liburlah dagangannya.

Kepekaan tinggi kepada kaum pedagang jenis makanan, minuman, jasa keamanan, parkir dan lain sebagainya. Para pelanggan dan pengguna jasa tidak segan mencari pengganti bila karyawan dan pemasok barang meninggalkan untuk waktu lama. Bila hal tersebut terjadi, maka *migrant* yang bersangkutan harus siap merintis karier mulai nol, dan hal tersebut bukan pekerjaan mudah/ gampang.

2.1.7. PKL secara Ekonomis.

Munculnya PKL di kota-kota besar, disebabkan masalah ekonomi yang disebabkan oleh ekonomi mikro, maupun makro ekonomi secara nasional. Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK, pengangguran melahirkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Dengan hilangnya pekerjaan secara otomatis, orang lari ke sektor informal, karena peluang tersebut jalan termudah untuk mencari pekerjaan. PKL bukanlah semata-mata kelompok masyarakat yang gagal masuk dalam

system ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perekonomian di kota. PKL pelaku dalam transformasi ekonomi perkotaan yang tidak pernah terpisahkan dari system perekonomian perkotaan. Munculnya PKL memberikan nilai sosial ekonomi, seni budaya tersendiri bagi masyarakat dan merupakan alternative pilihan bagi rakyat untuk mencari barang yang murah dan terjangkau.

Dampak muncul nya PKL antara lain:

1. Barang yang dijual PKL mempunyai harga murah, karena harga murah.
2. Keberadaan PKL sebagai obyek wisata yang cukup menjanjikan, sehingga jumlah pedagang kaki lima terus bertambah.
3. Hasil produk PKL harga terjangkau efisien, ekonomis. meskipun kualitas barang rendah, tetapi mode cukup bagus.
4. Berbelanja di PKL, barang cukup menarik, bernilai *history*, barang antik/kuno yang jarang ditemui di pasar formal, apalagi Mall.

Menurut Sethurman, keunggulan PKL, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keunggulan tersebut disebabkan usaha-usaha PKL bersifat subsisten dan modal nya milik sendiri/ mandiri.

Assosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) mencatat hingga 2012 terdapat 23.4 Pedagang Kaki Lima diseluruh Indonesia (Tempo.co.5/9/2012). Agar lebih bermartabat, Kementrian Koperasi dan UKM telah menginstruksikan pergantian istilah PKL dengan Pedagang Kreatif Lapangan kepada pimpinan daerah. Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang

koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penggunaan istilah tersebut belum dapat digunakan.

2.1.8. Perubahan Sosial. (*Sosial Changes*)

Perubahan sosial merupakan proses sosial dalam interaksi manusia yang tidak dapat dihindari dari kehidupan di dunia ini. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu dengan lainnya, melalui proses interaksi tersebut manusia mendapat kawan teman, juga mengalami konflik. Interaksi sosial menyebabkan perubahan sosial di masyarakat menyangkut masalah nilai, sosial, ekonomi politik, seperti peristiwa konflik PKL dengan aparat pemerintah kota.

Perubahan sosial akan mampu mengantarkan manusia kepada hakekat kehidupannya yang dicita-citakan yaitu suasana kehidupan damai, sejahtera, serasi, dan kebahagiaan. Perubahan sosial selalu terjadi masyarakat, karena pengaruh sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya baik secara nasional, regional maupun internasional. Kasus perubahan sosial dalam masyarakat tidak dapat terhindari karena dinamika perekonomian nasional, seperti naiknya harga BBM, harga beras, cabe, naik turu kurs rupiah terhadap dollar dan banyak nya PHK dalam sektor buruh dan tenaga kerja.

2.1.8.1. Pengertian Perubahan Sosial.

Pengertian perubahan sosial, menurut Kamus bahasa Indonesia diartikan sebagi suatu hal atau keadaan yang berubah, peralihan, dan pertukaran. Dengan demikian perubahan sosial yaitu adalah sebuah proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena mengalami dinamika sosial dalam masyarakat dan perubahan atau pertukaran.

Perubahan sosial mencakup perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial, sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Pada dasarnya perubahan sosial dan perubahan budaya merupakan konsep yang saling berkaitan satu sama lain meskipun mempunyai perbedaan (Horton:1989)

Ogburn (1982) memberi batasan terhadap makna perubahan sosial hanya pada unsur-unsur kebudayaan. David (dalam Sukanto 1974) berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadilah perubahan antara buruh dan majikan, selanjut perubahan-perubahan pada organisasi sosial dan politik.

Perubahan mempunyai aspek luas, termasuk didalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Menurut Koentjaraningrat, perubahan sosial sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial sendiri digunakan untuk menyatakan hubungan antar manusia dalam pergaulan, hal ini terjadi ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, hingga mengakibatkan perubahan pada masyarakat.

Perubahan adalah proses sosial yang dialami masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan unsur system sosial, dimana semua tingkatan kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur eksternal meninggalkan

pola-pola kehidupan budaya dan system sosial. Lama kelamaan kemudian menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan system sosial baru. (Bungin: 2006). Perubahan sosial sebagai suatu hal atau keadaan berubah, peralihan dan pertukaran, maka perubahan itu terjadi membutuhkan suatu proses. Sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Jadi perubahan adalah suatu proses yang berakibat keadaan sekarang berbeda dengan sebelumnya.

Dalam kehidupan akan selalu berubah, seiring dengan perkembangan budaya manusia, perubahan sosial ekonomi saat ini berakibat manusia mengalami perubahan khususnya kaitannya dengan mata pencaharian. Zaman dahulu orang mencari nafkah tidak sesulit saat ini, meskipun zaman lebih modern, lebih maju, perkembangan ilmu dan teknologi demikian pesat. Dengan perubahan sosial budaya, ekonomi seperti sekarang justru mencari nafkah, uang, rizki, sulit, karena sulit lapangan pekerjaan. Akhirnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mencari pekerjaan menjadi PKL dalam bidang sektor informal. Sehingga mengapa orang berfikir, tidak pilih-pilih dalam kerja, karena sedikit lapangan kerja, sulitnya mencari uang meskipun berijazah sarjana.

Gillin dan Gillin mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu variasi atau sesuatu yang lain yang timbul dari cara-cara hidup yang telah diterima.

Sesuatu yang baru tersebut dapat disesebabkan perubahan kondisi geografis maupun komposisi penduduk. Perubahan sosial dapat pula mempunyai pengertian sebagai adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kehidupan manusia sebagaimana di kemukakan oleh Samuel Koenig. Hal tersebut berarti bahwa perubahan merujuk pada adanya modifikasi-modifikasi dari faktor

eksternal maupun internal. Sedangkan Selo Soemardjan mengatakan bahwa perubahan sosial mencakup semua aspek perubahan dalam lembaga suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi system sosial termasuk nilai, sikap, dan pada perilaku kelompok dalam masyarakat, lebih lanjut bahwa perubahan sosial dapat terjadi pada lembaga masyarakat sehingga dapat mempengaruhi struktur masyarakat yang bersangkutan. (2012: 59).

2.1.8.2. Sumber Perubahan Sosial.

Sumber perubahan sosial adalah perilaku kita ataupun dalam ukuran yang lebih luas adalah struktur budaya dan budaya masyarakat kita, tetapi secara garis besar factor-faktor tersebut dapat kita bedakan sebagai sumber perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat atau luar masyarakat (soekanto: 1990:317). Faktor dari internal dalam perubahan yakni perubahan kependudukan, adanya penemuan, konflik dalam masyarakat, sedangkan faktor internal penyebab perubahan sosial adalah, lingkungan, perang, pengaruhnya kebudayaan lain.

“Perubahan dalam kehidupan merupakan gejala yang akan selalu ada dalam masyarakat karena masyarakat selalu berubah dalam aspek terkecil sekalipun. Perubahan sosial dan budaya merupakan dua konsep berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, dimana perubahan sosial mengacu pada struktur sosial sedang perubahan budaya mengacu pada segi budaya masyarakat.” (Soekanto. 2002:23)

PKL, merupakan akibat tidak langsung dari adanya perubahan sosial di masyarakat sebagai akibat dari adanya dinamika sosial ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Kompetisi dalam dunia usaha, ekonomi memaksa para pengusaha pelaku ekonomi memuar otak, agar roda investasinya dapat tetap berjalan dengan baik dan usahanya dapat tetap berjalan di tengah badai ekonomi

yang meng global. Pengurangan tenaga kerja, karyawan, pegawai dilakukan supaya roda perusahaan dapat berjalan, dampak kebijakan tersebut muncullah pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana. Akibat PHK, para pekerja lari tunggang langgang, pulang kampung untuk menghindari tidak dapat hidup, dapat makan seadanya di daerah. Manusia hidup perlu makan, sandang, papan, pendidikan demi kelangsungan hidup, supaya tetap dapat mempertahankan eksistensi nya. Modal yang diperoleh dari pabrik, perusahaan tempat bekerja, digunakan untuk usaha mandiri, dengan modal kecil, compang camping masuklah pekerja tersebut ke dunia sektor informal menjadi PKL.

Selain hal tersebut diatas, saat ini di Indonesia terjadi over tenaga pekerja dan *out put*/ lulusan berlimpah dari lulusan sekolah, lulusan perguruan tinggi, yang membutuhkan pekerjaan. Pemerintah telah berusaha mendatangkan investor luar negeri, investor nasional untuk menanamkan modal diberbagai sektor sehingga dapat membuka lapangan kerja mencegah pengangguran di daerah. Saat ini jumlah pencari kerja tidak berimbang dengan jumlah lapangan kerja yang ada, pemerintah telah berusaha, tetapi belum berhasil, dan jalan cepat, mudah, praktis mengatasi lapangan kerja adalah masuk sektor in formal menjadi PKL. Profesi PKL akhir nya menjadi alternatif paling efektif untuk mencari pekerjaan, selagi sektor lain sulit diperoleh, sedangkan perut, anak, isteri perlu hidup dan makan, sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan fakta sosial di masyarakat sektor informal dalam struktur ekonomi nasional terkesan sangat lemah dan dipinggirkan, tidak diakui *eksistensinya*, tidak dapat perlindungan hukum. Bahkan menurut pemerintah

dianggap negatif bertentangan dengan praktik ekonomi, patologi sosial, tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan dan sektor ekonomi bayangan yang selalu ditekan agar tidak berkembang. Seiring dengan perkembangannya masyarakat, kegiatan ekonomi sektor informal berkembang dan mengambil berbagai macam bentuk, salah satu diantaranya adalah PKL.

Menurut Soedjana (1981) secara spesifik yang dimaksud PKL adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi/ pinggir jalan. Dan sekitar pusat perbelanjaan/ pertokoan, pasar pusat rekreasi/ hiburan menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau tidak resmi di pusat perkantoran dan pusat pendidikan.

Umumnya secara menetap atau setengah menetap berstatus tidak resmi atau setengah resmi dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Karakteristik sektor Informal diperkenalkan pertama kali oleh organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 1973, dalam laporan resmi mengenai misi tenaga kerja di Kenya. Sektor tersebut disebut informal sebab berbeda dengan karakteristik sektor formal.

Beberapa alasan mengapa disebut informal sebagai berikut (Hansenne, 1977 : 7)

1. Sektor informal tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam statistik resmi.
2. Sektor ini cenderung memiliki sedikit atau tidak sama sekali akses pada pasar yang terorganisasi/ pangsa tidak jelas.
3. Institusi/ lembaga kredit, pendidikan formal dan lembaga pengajaran atau jasa dan fasilitas publik.
4. Sektor informal tidak dikenal, tidak didukung atau diatur oleh pemkot.
5. mereka dipaksa oleh keadaan untuk beroperasi diluar hukum dan menghormati aspek-aspek hukum

tertentu, dimana mereka berada diluar batasperlindungan hukum perundang-undangan buruh dan tindakan perlindungan di tempat kerja.

2.1.9. Hubungan sektor Informal dengan sektor Formal

Keberadaan PKL senantiasa menjadi problema tersendiri bagi pemerintah daerah, sebab PKL datang tiba-tiba dan langsung menempati tempat yang menurut mereka strategis tanpa melihat legal atau illegal lokasi tersebut. Namun demikian bagaimanapun juga PKL sebagai pelaku ekonomi patut diancungi jempolan dan bermanfaat bagi ekonomi secara makro ekonomi serta bermanfaatnya bagi kehidupan kota. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada dagangan dan jasa dari sektor Informal.

Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran berbagai produk sektor formal tidak dapat dipandang sebelah mata peranannya dalam perekonomian untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi perkotaan. Sektor informal sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang berada di sektor formal, seperti pemilik toko yang sore hari jualan bakmi disamping toko nya. Alasannya karena mudah dijalankan tanpa prosedur yang macam-macam dan sering kali efektif untuk menarik pembeli. (Rachbini, 1994 : 8).

Menurut Mc.Gee, dan Young. PKL mempunyai pengertian sama dengan '*hawkers*', berarti sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum terutama di pinggir jalan atau trotoar. Sesungguhnya sektor informal menjadi sebuah dilema, pada satu sisi sektor ini dapat menyerap banyak pekerja yang tidak tertampung dalam sektor formal. Disisi lain sektor ini dapat merusak lingkungan, lingkungan kumuh, jorok, tidak sehat, kotor yang dapat

menggagalkan pemerintah meraih piala adipura. Sehingga ada upaya pemerintah untuk tidak memperhatikan masalah PKL, dibiarkan hidup sendiri saja mereka pasti pelan-pelan punah dan musnah.

Menurut Todaro (2000:351-352), ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar memiliki produksi berskala kecil, aktifitas-aktifitas dimiliki oleh perorangan atau keluarga dan menggunakan teknologi sederhana.
2. Umumnya para pekerja di sektor informal bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal.
3. Produktivitas pekerja dan penghasilan cenderung lebih rendah dari pada sektor formal, para pekerja sektor informal tidak dapat merasakan dan menikmati perlindungan seperti yang dapat dari sektor formal.
4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pensiunan.
5. Kebanyakan pekerja yang bekerja di sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
6. Motivasi mereka pada umumnya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan serta hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
7. Mereka berupaya sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut peran serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan, meskipun mereka bekerja dalam waktu panjang.
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan pemukiman liar (*sceltter*) yang umumnya kurang tersentuh layanan

pelayanan jasa seperti listrik, air, jasa transportasi, jasa kesehatan dan kesempatan pendidikan.

Menurut Wiro Sardjono (dalam Suri:2003:27) ciri-ciri sektor Informal, antara lain :1. Pola kegiatannya tidak teratur dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaan dalam kegiatannya. 2.Tidak termasuk oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dikatakan liar. 3. Modal, peralatan dan kelengkapan maupun *omzetnya* biasanya kecildan diusahakan atas dasar hitungan harian. .4. Tidak mempunyai tempat yang *permanet*, di lokasi tertentu. 5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yangpendapatan rendah. 6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja. 7. Umumnya satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, berasal dari daerah sama. 8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

2.1.10. Kebijakan pemerintah terhadap keberadaan PKL.

PKL di kota besar keberadaannya selalu dipermasalahkan karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya : 1). Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya karena ada yang dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri. 2). PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau. 3).Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yakni dilihat dari aspek kebersihan, keindahan, dan kerapihan kota. 4). Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL 5). PKL menyebabkan kerawanan sosial, karena terjadinya persaingan tidak sehat

antara pengusaha dengan pedagang sektor informal dalam aktifitas ekonomi di masyarakat dapat terjadi.

Berkembangnya PKL dipicu oleh kegagalan pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pemerintah berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat dengan menyiapkan dana sebagai modal bagi PKL yang direlokasi ke pasar “Kotak”. Sebagai upaya untuk mencegah pengangguran karena gagalnya sektor riil. Saat ini diprediksi ada 40 juta orang menganggur di negara kita. (BPS, 2011).

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan langsung PKL yakni Perda No:14/ tahun 2012 tentang kewajiban warga bidang kebersihan di tempat-tempat umum, dijelaskan di pasal 5 dan pasal 6 adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 5 : Setiap orang berjualan menetap atau berkeliling sebagai pedagang kaki lima dan para pedagang di tempat umum wajib menyediakan tempat sampah dan buangan air, dan selanjutnya PKL wajib membuang sampah ke tempat pembuangan atau tempat penampungan sampah dan buangan air yang telah disediakan. Pasal 6 : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 5. PKL yang berjualan secara menetap hanya diperbolehkan menempati lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi penempatan PKL ditetapkan melalui keputusan Walikota Madiun dengan memperhatikan: (a) rencana umum tata ruang kota.(b). kepentingan pemakai jalan.(c) aspek lingkungan.(d) aspek sosial ekonomi.
- (3) Penempatan PKL dapat dipindahkan karena adanya perubahan tata ruang kota.

Sedangkan untuk ketentuan larangan tertuang dalam pasal 7 ayat c dan d. yaitu :

- a. Menempati lokasi pada bahu jalan atau trotoar jalan dengan atau tanpa mendirikan bangunan dari bahan apapun, baik yang bersifat sementara atau permanent yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha.
- b. Berjualan atau melakukan usaha dalam bentuk lainnya, di jalan-jalan umum, diperempatan jalan maupun bagian jalan lainnya yang dapat mengganggu arus lalu lintas, pejalan kaki yang menggunakan trotoar untuk aktivitas.

Sejumlah dana telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk, provinsi dan kabupaten/ kota untuk menata, mengatur, menertibkan, membina PKL. Oleh karena sangat wajar sekali, fenomena sosial PKL merupakan dampak dari sulit sosial ekonomi rakyat Indonesia. PKL merupakan pelarian untuk mendapatkan pekerjaan karena sulit mencari kebutuhan hidup. PKL tingkat pendidikan rendah, kemampuan ekonomi rendah, lapangan kerja secara definitive dan permanent tidak ada. PKL, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk membiayai keluarga, anak isteri, mereka harus berdagang menjadi PKL, karena sektor informal tersebut mereka mampu bekerja sesuai dengan kemampuan, ilmunya, modal yang dimiliki.

Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan PKL dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah kota untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih, indah, dan tertib. Untuk keperluan tersebut pemerintah kota membuat peraturan daerah (perda) untuk menata, menertibkan, mengatur PKL, perda tersebut adalah Perda No 14/ tahun 2012. Di kota Madiun saat ini terjadi adanya perlawanan pedagang, karena tindakan pemerintah merelokasi PKL dari jalan Batanghari, Jalan Nori,

dan Jalan Barito. Pendekatan *persuasif* telah dilakukan Pemkot agar bersedia di relokasi, karena tempat lama menyalahi Perda, dan digunakan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). PKL enggan pindah karena sudah puluhan tahun berjualan di tempat tersebut dan pembeli, pelanggan, konsumen sudah banyak. Lokasi PKL di tempat baru pasar “Kotak” lokasinya sepi, pembeli, pelanggan hilang, akhirnya susah dapat uang karena tidak ada yang membeli.

Pemerintah Kota menata, menertibkan ke lokasi baru yang lebih tersentral untuk pedagang sektor informal yakni pasar “kotak” dengan maksud dan tujuan :

1. PKL dipindah lokasikan ke tempat yang telah tersedia.
2. Kios-kios tersebut disediakan gratis, untuk menampung seluruh PKL yang saat ini tersebar di pusat kota, pusat keramaian, jalan-jalan protokol.
3. Setiap kios gratis selama masa percobaan 3-4 tahun, selanjutnya diatur penataan kios pedagang sesuai dengan dinamika yang ada..
4. Bagi pedagang yang tidak bersedia pindah dikenai sanksi, tidak diijinkan berdagang di kota.
5. Memudahkan pembinaan, penataan, menertibkan PKL.

Pemerintah kota, menganggap kebijakan relokasi merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL, karena seluruh PKL terkumpul menjadi satu di pasar “Kotak” dimana lokasi nya dekat dengan pusat perbelanjaan, perdagangan yakni, *Sun City*, *Carefour*, pasar burung, pasar Loak Besi Jaya. Nama pasar “Kotak” kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, asing bagi masyarakat Rejomulyo,

Kecamatan Kartoharjo, lebih-lebih bagi pendatang yang bukan orang Madiun.

Menurut Kepala kelurahan Rejomulyo Roch sebagai berikut :

Pasar Kotak relatif pasar baru dibandingkan dengan pasar Jaya, pasar Loak Jaya, juga pasar burung Jaya, Pasar Loak Jaya. Pasar burung Jaya, yang lebih dahulu dikenal masyarakat seantero Jawa Timur, keduanya menjadi tempat jujugan para pedagang, pembeli, untuk menjajakan barang dagangannya ke masyarakat. Sedangkan pasar Burung Jaya, pasar Loak sudah terkenal sejak dahulu. Pasar “Kotak” merupakan lokasi baru yang dibangun pemerintah daerah untuk menampung para pedagang sektor Informal yang selama ini berkeliaran di jalan-jalan pusat Kota.

Sedangkan menurut Dan, kepala Disperindagkoppar Kota Madiun, bahwa:

Pasar “Kotak” menjadi pusat kegiatan pedagang informal di kota bukan hanya penduduk di kawasan pasar “Kotak”, tetapi juga penduduk dan PKL masyarakat sekitarnya yang telah lama berdagang. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan, dalam penelitian ini membatasi pengertian pasar “Kotak” hanya terbatas pada lokasi berdagang bagi PKL hasil relokasi pedagang di jalan Batanghari, jalan Barito, Jalan Nori (pusat kota) Madiun.

Menurut Did, Kabag.TU Disperindagkoppar Kota, mengatakan bahwa :

Alasannya karena pasar “Kotak” bertempat di kompleks pasar burung dan pasar Loak Jaya, Rejomulyo Kota Madiun. Menurut sejarahnya pasar “Kotak” Rejomulyo Kartoharjo Kota Madiun dulu bagian dari pasar Burung Jaya, lokasi tersebut sepi karena tempat nya di pojok barat pasar burung, dekat ‘kuburan. Sebelum nya lokasi ini sangat sepi, dibelakangnya merupakan sawah bengkok desa Rejomulyo yang subur ditanami padi oleh penggarap sawah, sebelum tempat tersebut dibangun menjadi pusat perbelanjaan modern yakni Sun City, super market/ mall, hotel, taman bermain modern seperti saat ini, sehingga pasar “Kotak” yang dahulu tidak dikenal, kedepan menjadi tempat strategis bagi pedagang untuk jualan. Kebijakan walikota untuk menempatkan PKL, hasil relokasi dari pusat kota ke pasar “Kotak” sangat tepat untuk berdagang karena kedepan lokasi tersebut sangat strategis.

Berdasarkan catatan data tentang sejarah Pasar “Kotak” dan juga *oral history* yang berkembang dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Kota bermaksud baik. Untuk mengumpulkan seluruh PKL di satu tempat penampungan di pasar “Kotak” kompleks “Jaya” Rejomulyo. Tujuannya agar pembinaannya mudah, pengawasan pedagang efektif, kebersihan, keamanan mudah dikontrol masyarakat Kota maupun dari luar Kota. Disamping itu bila seluruh pedagang informal di tempatkan di pasar “Kotak” mudah untuk mencari dimana pusat berdagangnya PKL di Kota.

Perlawanan antara aparat satpol PP pemerintah Kota dengan PKL dalam relokasi dapat dihindarkan, karena mereka pada posisi berlawanan, disatu pihak satpol.PP menegakkan peraturan sebagai aparat penegak Perda. PKL sebagai rakyat mencari nafkah demi anak dan keluarga. PKL berjualan dengan lokasi yang menurut mereka legal berdagang di semua tempat, asal ramai, ada pembeli, selama di tempat strategis.

Menurut Ralf Dahrendorf, salah satu tokoh teori konflik berpendapat bahwa :

Dalam setiap masyarakat beberapa nggoutanya akan menjadi menjadi korban pemaksaan oleh anggouta lainnya. Artinya bahwa konflik kelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari sehingga perubahan sosial tidak dapat terelakkan.(2010: 4)

Peraturan undang-undang tidak demikian aturannya, ada lokasi yang boleh untuk jualan dan ada tempat yang dilarang, perbedaan pemahaman antara aparat satpol PP dengan PKL merupakan sumber perlawanan. Untuk itu diperlukan komunikasi sosial yang efektif serta sosialisasi intensif kepada PKL baik secara individu maupun kelompok, melalui organisasi yang menaungi PKL, yakni

“Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Madiun”. Selama ini pemerintah kota belum maksimal sosialisasi tentang perda penataan, penertiban PKL. Karena tingkat pendidikan pedagang, waktu terbatas, untuk itu secara persuasif komunikasi, sosialisasi Perda No : 14 tahun 2012. harus dilakukan seefektif mungkin oleh Disperindag Kota Madiun.

2.1.11. Konsep Relokasi

Relokasi adalah pemindahan lokasi seseorang beraktivitas dari suatu ke tempat lain untuk *inovasi* kegiatan, dalam rangka menciptakan dinamika ekonomi, sosial, politik yang terjadi pada wilayah tersebut. Relokasi pada umumnya karena adanya perubahan dalam dinamika sosial manusia yang disebabkan manusia dalam berinteraksi sosial memerlukan tempat baru. Berkembangnya kuantitas dan kualitas kegiatan manusia. seperti yang terjadi pada kasus Relokasi pemukiman di Kalijodo, Jakarta relokasi pemukiman, hunian di Penjaringan Jakarta. Seperti pada kasus relokasi PKL dari jalan Batanghari, jalan Nori, jalan Barito di kota Madiun timbulkan adanya relokasi.

Relokasi berarti penempatan kembali seseorang atau kelompok ke tempat yang baru dan meninggalkan tempat lama, disebabkan adanya bencana alam. Sebagai contoh ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, perang, adanya konflik baik militer maupun sipil. Kasus relokasi bencana gunung Sinabung, kasus gempa bumi dan Tsunami Aceh, dan kasus perang Timur Tengah. Kasus konflik sektarian antara etnis Pengungsi Rohingnya Burma dll. Kasus-kasus tersebut merakan contoh terjadi pemindahan orang baik secara individu maupun kelompok

untuk menghindari bencana baik perang, bencana alam, maupun konflik sektarian dan etnis di suatu daerah.

sebagaimana pendapat David Tuerney :

Dilema besar saat ini adalah bahwa penduduk dunia telah mencapai pada tingkat ketergantungan terhadap teknologi untuk mempertahankan dan menopang kehidupan-kehidupan secara berkelanjutan. Namun demikian penerapan praktis teknologi dan intervensinya dalam menunjang hidup cepat, atau lambat, akan merusak sumber daya alam (SDA). Dalam menghadapi dilema yang demikian, dibutuhkan kita manusia menjadi tiga kali lipat, kita harus menguasai teknologi, kita harus menekan jumlah penduduk, mengembangkan tatanan sosial yang mampu hidup produktif dan sejahtera secara terpadu, dalam ekosistem seimbang.”(David Tuerney: 1972:34).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBHI) oleh Poewodarminto, Relokasi mempunyai arti penempatan kembali atau pengembalian pemukim lama ke tempat baru. Hal tersebut dalam rangka inovasi aktivitas karena kebijakan pemerintah, atau bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi. Penempatan kembali ke lokasi baru disebabkan tempat lama kurang layak, tempat lama rusak oleh bencana alam. Lokasi lama atau pemukiman lama digunakan untuk program lain, karena lahan lama bukan milik PKL secara legal tempat lama melanggar hukum. Sebab lahan lama bukan lokasi resmi untuk berjualan, merupakan sebuah trotoar jalan yang fungsi dan keperuntukaannya bertentangan dengan fungsinya yakni untuk lewat pejalan kaki.

Relokasi berasal dari kata, Re yang berarti kembali dan Lokasi berarti tempat manusia berkegiatan/ aktivitas secara ekonomi, sosial, politik. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai mata pencaharian tetap, contoh : lokasi pedagang di pasar besar Kota Madiun, lokasi berjualan di pasar Loak “Sri Jaya” Kota, relokasi jualan pedagang di pasar “Sore”. Tempat berdagang secara

hukum resmi dan diperuntukkan untuk kegiatan berdagang oleh pemerintah Kota, dalam rangka menampung para pekerja sektor informal, yakni pasar khusus untuk PKL sangat dibutuhkan .

Barang dagangan, jenis dagangan, pelaku dagang mempunyai kekhususan maka PKL, harus di lokasi ke tempat yang khusus pula, untuk menjawab tantangan tersebut, maka seluruh PKL harus disatukan terlebih dalam satu lokasi yakni pasar “Kotak”. Pemindahan, boyongan, re-settlement pelaku ekonomi sektor informal tidak dapat terelakkan, mengingat jika dibiarkan beraktivitas di jalan-jalan protokol akan menimbulkan masalah, yaitu kebersihan, keindahan, kesehatan dan ketertiban serta menimbulkan kerawanan kamtibmas. Relokasi PKL ke tempat baru sebagai jawaban permasalahan sektor informal di kota, merupakan jalan keluar satu-satunya pemecahan, dan PKL harus menerima secara ikhlas.

Pemerintah kota, masih mempunyai niat baik maksud dan tujuan relokasi, karena potensi sektor informal sangat besar dalam membangun sosial, ekonomi, budaya, politik di daerah. Relokasi PKL, merupakan satu-satu cara agar masyarakat dapat cepat mendapat pekerjaan tetap, meskipun sebagai PKL serta prospek secara ekonomi sangat menjanjikan baik dalam kaca mata pemerintah maupun warga. PKL Kota, jika dikelola dengan baik InsyaAllah memberikan masukan ke APBD.

2.1.12. Kebijakan Publik.

Kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. (2007 : 17) Konsep tentang kebijakan publik oleh Eyestone sangat luas dan kurang pasti karena apa yang ditawarkan banyak mencakup banyak hal. Sedangkan menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. (2007 : 17) Batasan yang diberikan Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah.

Seorang pakar ilmu politik lain, Richards Roose bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi nyabagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Definisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Pendapat lain tentang kebijakan publik oleh Carl Friedrich yaitu suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. (2007:18).

Sedangkan Anderson berpendapat bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan, sementara

Amir Santoso mengkomparasikan pendapat para ahli tentang kebijakan publik menyimpulkan bahwa kebijakan publik kedalam dua wilayah yakni kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Dan kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan akibat yang dapat diramalkan. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2. Konsep Teori Perlawanan James C.Scott.

Kajian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa terjadinya perlawanan disebabkan oleh beberapa hal yang melatar belakangi. Untuk analisis secara teliti, dituntut melakukan telaah terhadap factor-faktor penyebab terjadinya perlawanan PKL terhadap pemerintah kota. Faktor-faktor penyebab tersebut berfungsi mempersiapkan kondisi sosial-ekonomi-politik dan psikologis bagi munculnya ketidakpuasan dan frustrasi PKL kepada pemerintah kota Madiun.

Pendekatan teoritik yang mencuat untuk memahami realitas sosial perlawanan PKL terhadap pemerintah kota Madiun, yaitu teori yang dikemukakan oleh James C. Scott. Seorang Guru Besar ilmu Politik pada Yale University, Scott menyelesaikan S3 di Universitas Harvard Wahington D.C. karya nya yaitu,

The Moral Economy in Southeast Asia, Comparative Political Corruption, and Political Ideology in Malaysia.

Konsep yang ditawarkan oleh Scott adalah perlawanan sehari-hari :

everyday forms of resistance

yaitu perjuangan biasa-biasa saja, namun terjadi terus menerus antar petani dan orang-orang yang berusaha menarik tenaga kerja, makanan, pajak sewa dan

keuntungan dari mereka. Kebanyakan perlawanan jenis ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh orang yang tidak berdaya, mengambil makanan, menipu, berpura-pura patuh, mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase dan seterusnya. (Scott, 2000 : 40).

Dalam definisi lain, Scott, 2000: 40) mendefinisikan perlawanan sebagai setiap/ semua tindakan para anggota kelas atas terhadap masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan pemerintah. (mis: sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan oleh kelas atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan sendiri. (misalnya lahan, pekerjaan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atas ini.

Berdasarkan definisi tersebut ada tiga benang merah yang patut digaris bawahi, *pertama* tidak ada keharusan bagi perlawanan untuk mengambil bentuk aksi bersama. Aksi bersama yang dilakukan dapat bersifat individu, spontan, dan tak terorganisasi. *Kedua* tujuan-tujuan perlawanan dibentuk, yakni agar ada reaksi balik dari pihak yang dilawan, dalam aksi tersebut berupa tindakan yang melunakkan atau menghilangkan segala bentuk tuntutan yang dibebankan kepadanya. *Ketiga* perlawanan yang dimaksud mengarah pada perlawanan simbolis atau idiologis, misalnya gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, menarik kembali sikap hormat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlawanan kelas bawah. (Scott : 1993 : 303).

Menurut James C.Scott (1993:303). Perlawanan merupakan tindakan yang sekurang-kurangnya melibatkan suatu pengorbanan perorangan, kolektif jangka pendek dan upaya memperoleh keuntungan bersama yang berjangka panjang, kerugian-kerugian jangka panjang dari pemogokan, pemboikotan atau bahkan penolakan memperoleh pekerjaan atau tanah garapan merupakan bentuk pengorbanan jangka pendek yang diharapkan mampu memberi keuntungan jangka panjang.

Berdasarkan definisi tentang perlawanan ada 3 (tiga) pengertian perlawanan, *pertama* tidak ada keharusan bagi perlawanan untuk mengambil aksi bersama. Aksi dilakukan dapat bersifat spontan, individual, dan tak terorganisir. Tujuan perlawanan dibentuk yakni agar ada reaksi balik dari pihak yang dilawan. *Kedua* Reaksi tersebut berupa tindakan yang melunakkan atau menghilangkan segala bentuk tuntutan yang dibebankan kepadanya. *Ketiga*, perlawanan yang dimaksud lebih mengarah pada perlawanan simbolis atau (idiologis, gossip, fitnah, penolakan, terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali rasa hormat, sebagian yang tidak terpisahkan.(Scott,1993: 303).

2.2.1. Tahap-tahap terjadinya perlawanan

2.2.1.1. Tahap pra gerakan (*premovement stage*)

Tahap ini muncul karena ada tekanan dan diskriminasi sosial, kondisi bersinergis dengan meningkatnya harapan, ketika harapan terus menerus meningkat suatu gerakan sosial akan berkembang menjadi perlawanan. Kedua faktor tersebut baik tekanan maupun harapan yang meningkat berkombinasi menghasilkan suatu pergerakan. Jadi tahap pergerakan adalah suatu tahap adanya

tekanan struktur atau kondisi sosial yang tidak memuaskan, yang dialami oleh individu, kondisi ini mengarah pada situasi tidak nyaman. Massa mejadi gelisah dan ini awalnya munculnya keresahan yang menyebabkan gerakan sosial. Pada tahap ini PKL berkumpul dan mulai merasakan adanya tekanan struktur atau kondisi sosial, himpitan ekonomi, dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak/BBM, kebencian sosial akan memicu terjadinya gerakan revolusioner. Dengan kondisi demikian pada diri individu pedagang muncul kondisi tidak harmonis seperti *issue-issue* moral dan keadilan.

2.2.1.2. Tahap-tahap membangun kesadaran.(*awakening stage*)

Pada tahap ini terjadi membangun kesadaran untuk melakukan “mobilisasi” yaitu para pemimpin paguyuban PKL yang kharismatik dan proses re-sosialisasi. Dibutuhkan pemimpin untuk proses penggemblengan individu-individu pedagang, sehingga mereka berani, tidak takut, untuk melakukan langkah-langkah yang diarahkan pimpinannya dalam suatu proses gerakan perlawanan. Pada tahap ini dibutuhkan upaya resosialisasi, upaya untuk membangun keyakinan seorang pemimpin atau kepercayaan diri yang memadai, ini diperlukan karena mereka terhimpit begitu saja menerima bahwa mereka lebih rendah dan tidak berharga. Dengan demikian mereka mampu melakukan gerakan perlawanan karena tergugah atas kemampuan sendiri, membangun kesan negative orang kecil.

2.2.1.3. Tahap membangun gerakan (*movement building stage*)

Pada tahap ini meliputi pengorganisasian gerakan, perumusan tujuan, dan strategi mobilisasi aksi. Pada tahap ini PKL saling mengenal satu sama lain. Pada

tahap ini para pimpinan paguyuban PKL saling mengenal dan membagi perasaan satu sama lain. Pada saat ini pimpinan gerakan mempunyai peranan sangat penting untuk mempengaruhi PKL, meminta dukungan pihak lain untuk simpati dengan perjuangan PKL. Pada tahap ini terjadi proses pengorganisasian dalam bentuk formal, eksis, pemimpin jelas, tujuan semakin jelas, program rutin dan jelas.

2.2.1.4. Tahap mempengaruhi kelompok sasaran (*Influence Stage*)

Pada tahap ini diharapkan terbentuk semacam ideologi atau cita-cita perubahan. Aspek yang ditanamkan untuk mempengaruhi kelompok sasaran adalah segala perubahan yang ingin dicapai oleh PKL. Kemudian dicarikan perekrutan atau pencarian anggota, simpatisan gerakan misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dapat di ajak untuk mewujudkan cita-cita perubahan yang ingin dicapai. Pada tahap ini tugas gerakan adalah mengubah “public lawan” dari partisipan pasif menjadi kekuatan aktif.

2.2.1.5. *Outcome stage*

Pada tahap ini dilakukan pengkonsolidasian atau pelestarian hasil capaian. Fase ini akan memunculkan bila gerakan yang dilakukan berhasil dan mampu diintegrasikan dalam sejumlah struktur sosial dari masyarakat. Hasil dari gerakan perlawanan ini dapat menjadi fenomena sosial di masyarakat yaitu perilaku kolektif PKL.

2.2.2. Jenis perlawanan

Jenis perlawanan ada 2 (dua) yakni perlawanan terang-terangan dan perlawanan tertutup .

2.2.2.1. Perlawanan terang-terangan

adalah perlawanan dilakukan dengan menggunakan fisik secara langsung tanpa tanpa basa basi berhadapan dengan satpol PP pemerintah kota Madiun dan aparat.

2.2.2.2. Perlawanan tersembunyi

adalah perlawanan non fisik dimana dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terus terang, ngrundel, marah-marah, tanpa fisik, ngrasani terhadap kebijakan yang diambil pemerintah kota..

2.2.3. Bentuk-bentuk perlawanan.

James. C. Scott membagi perlawanan menjadi 5 (lima) tipologi besar, yaitu perlawanan sungguh-sungguh, perlawanan secara isidental, perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, perlawanan semi/ campuran.

2.2.3.1. Perlawanan sungguh-sungguh yaitu (a) tanpa pamrih. (b) serius tidak main-main (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, (d) mengandung gagasan atau tujuan.(Scott, 1993 : 305).

2.2.3.2. Perlawanan secara Isidental. (a) tidak terorganisir, tidak sistematis. (b) bersifat untung-untungan, dan sifat nya berpamrih. (c) tidak mempunyai akibat revolusioner. (d) penyesuaian dengan system dominan yang ada.

2.2.3.3. Perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan tertutup dicirikan dengan oleh sikap pura-pura patuh pada saat aparat melakukan penertiban.

2.2.3.4. Perlawanan terbuka/ tertutup (semi) dicirikan sudah ada penentangan dalam bentuk perang urat syaraf melakukan protes terbuka.

2.2.3.5. Perlawanan terbuka yang ditandai dengan perlawanan fisik, berupa memakai benda tajam, palu, pisau, adu otot, adu fisik, penahan lapak.

2.2.4.. Faktor-faktor penyebab perlawanan PKL

2.2.4.1. Faktor budaya

Faktor system budaya yang tidak sama antara PKL dengan pemerintah dalam memandang suatu permasalahan, seperti masalah lokasi jualan, trotoar, badan jalan, waktu jam jualan. Pemerintah kota Madiun meletakkan nilai-nilai keindahan dan ketertiban sebagai dasar permasalahan, sedang PKL melihat dari sektor ekonomi.

2.2.4.2 .Faktor system social.

Sistem sosial yang tidak kondusif, faktor sistem sosial yang tidak kondusif sebagai contoh dalam interaksi sosial sehari-hari PKL dengan satpol PP. Aparat keamanan maupun pemkot.

2.2.4.3. Faktor kepribadian PKL yang aktif dan agresif, factor kepribadian PKL sebagai yang aktif dan kreatif, agressif tidak diarahkan pada kepribadian yang taat hukum dan aturan.

2.2.4.4. Faktor system biologis yang kurang memadai yang diakibatkan pengaruh lokasi tempat jualan yang tidak sehat, panas, dingin, debu, asap kendaraan dan lokasi pemukiman yang tidak sehat.

2.2.4.5. Perlawanan dapat berkembang menjadi aktif, bahkan menjurus kearah tindakan kekerasan bilamana tuntutan yang diharapkan tidak terpenuhi.

PKL mengambil pembangkangan secara pasif, sabotase secara halus, menghindarkan diri dan tipu menipu. Perlawanan PKL tidak ditandai oleh konfrontasi besar-besaran dan menantang, tetapi lebih berupa aksi menghindarkan

diri secara diam-diam, yang tidak langsung dampaknya dan seringkali jauh lebih efektif. (Scott : 2000 : 4).

Scott, menjelaskan bahwa tujuan perlawanan sehari-hari adalah untuk menyedot dengan tekun sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga dapat memukul balik, bahkan mampu mendapatkan keringanan dalam hal eksploitasi, menghasilkan negosiasi yang mampu melahirkan perkembangan yang menguntungkan dirinya. Perlawanan PKL mempunyai motivasi yang beraneka ragam baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.

Dalam *weapons of The Weak*, Scott mampu menunjukkan bahwa akibat dari perubahan sosial terutama transformasi cultural lewat penetrasi negara ke dalam kehidupan kota, dan lahir sebuah realitas dari kaum miskin untuk membentuk kesadaran melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang merupakan pembelotan cultural. Realitas sosial perlawanan petani terhadap hegemoni negara sebagaimana digambarkan oleh James Scott, setidaknya untuk menguatkan pendapatnya. Studi James C.Scott mampu menunjukkan akibat bahwa petani mampu membangun perlawanan sehari-hari (*everyday forms resistance*) terhadap hegemoni negara yang dirasakan dalam sebagai bentuk *everyday forms of repression* (Scott : 1985 : 241). *Weapons of Theweek* (senjata orang lemah) menunjukan bahwa kaum lemah sebenarnya memiliki senjata di dalam membangun perlawanan menghadapi hegemoni pemerintah.

PKL dengan senjatanya sendiri dan caranya sendiri dapat melawan seperti perusakan, berlaku tidak jujur, mencopet, masa bodoh, membakar, sabotase ternyata mempunyai kekuatan sendiri yang dapat dirasakan oleh petani dalam

melampiaskan kekecewaan nya. Dengan kata lain, sikap perlawanan yang dilakukan oleh PKL disebabkan oleh struktur kehidupan yang terjepit dan harus menyelamatkan diri, berkaitan dengan peran otoritas moral dalam perlawanan.

Scott berkeyakinan bahwa terdapat suatu norma etik tertentu yang berlaku dalam masyarakat yang digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan protes sosial. Jika ekonomi terancam mereka kan mencoba untuk mempertahankan diri dengan melakukan perlawanan sosial. Dalam pandangan Scott (1993), pola-pola kegiatan yang telah ditentukan oleh institusi (Pemerintah Kota Madiun) dianggap oleh PKL sebagai hal yang membahayakan kelangsungan hidup pedagang. Tidak heran bila PKL tidak mau menyesuaikan diri dengan peraturan itu dan akhirnya melakukan perlawanan.

Menurut James C.Scott, apabila perlawanan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang demikian mendesak seperti keamanan fisik, makanan, tanah, atau pendapat maka para pedagang bisa saja melakukan perlawanan yang relative aman yakni berada digaris perlawanan yang bersifat lunak. Scott dalam tulisannya berjudul *weapons of the weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*. mengatakan bahwa terdapat dua model perlawanan yaitu “*open and hidden forms resistance*” Lebih lanjut, James C. Scott mengajukan pandangan bahwa :

“Nature of resistance is greatly influence by the existing forms of labor control and by beliefs about the probability and severity of retaliation”

(Scott,1985:34). Lebih lanjut James C. Scott, menguraikan secara tegas perlawanan sebagai berikut :

Any act by members of a subordinat class that is or are intended either to mitigate or deny claims (for example, rent, taxes, prestige) made on that class bu superordinat classes (for example landlords,

large farmer, the state) or to advance its claims (for example work, land, charity, respect) vis-avis those superordinat classes).

Bentuk resistensi menurut (Scott,:1990), dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, pertama yakni pertama *public transcrip*: adalah bentuk resistensi terbuka, misalnya pertunjukkan di atas pentas dibaratkan pemain theater yang harus di dunia panggung sandiwara, yakni dunia nyata sehari-hari dan dunia berpura diatas panggung. Kedua. *Hidden transcript* yaitu bentuk *resistenci* yang dilakukan tersembunyi/ terselubung atau tepatnya dibelakang. Bila dibelakang lawan resistensinya berpura-pura bersikap baik di depan lawannya, dibelakang mereka PKL menggossip, memfitnah, mengumpat.(artikel:2012:5).

James.C.Scott berpendapat bahwa perlawanan petani merupakan akibat meluasnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau. Kebijakan Relokasi PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” di kota Madiun melahirkan sumber perlawanan sebagai upaya mempertahankan dan menjaga eksistensi nya sebagai PKL meminjam istilah yang dikemukakan oleh James C. Scott (1993:277) adalah : “perlawanan sehari-hari”.

Kajian perlawanan PKL dalam kasus relokasi pedagang ke pasar “Kotak”, tidak terlepas dari keterlibatan aktor, baik perorangan maupun individu untuk menunjukkan akan eksistensi nya sebagai orang yang dirundung tekanan. Bentuk-bentuk perlawanan seperti ini menurut James.C.Scott (1993:271) merupakan bentuk monolog diri pribadi, secara tipikal berusaha menghindari konfrontasi dengan penguasa atau norma elit.

Perlawanan akan muncul dikalangan pedagang dan menjadi kenyataan ketika perubahan yang diharapkan dalam kehidupannya tidak terwujud, tidak

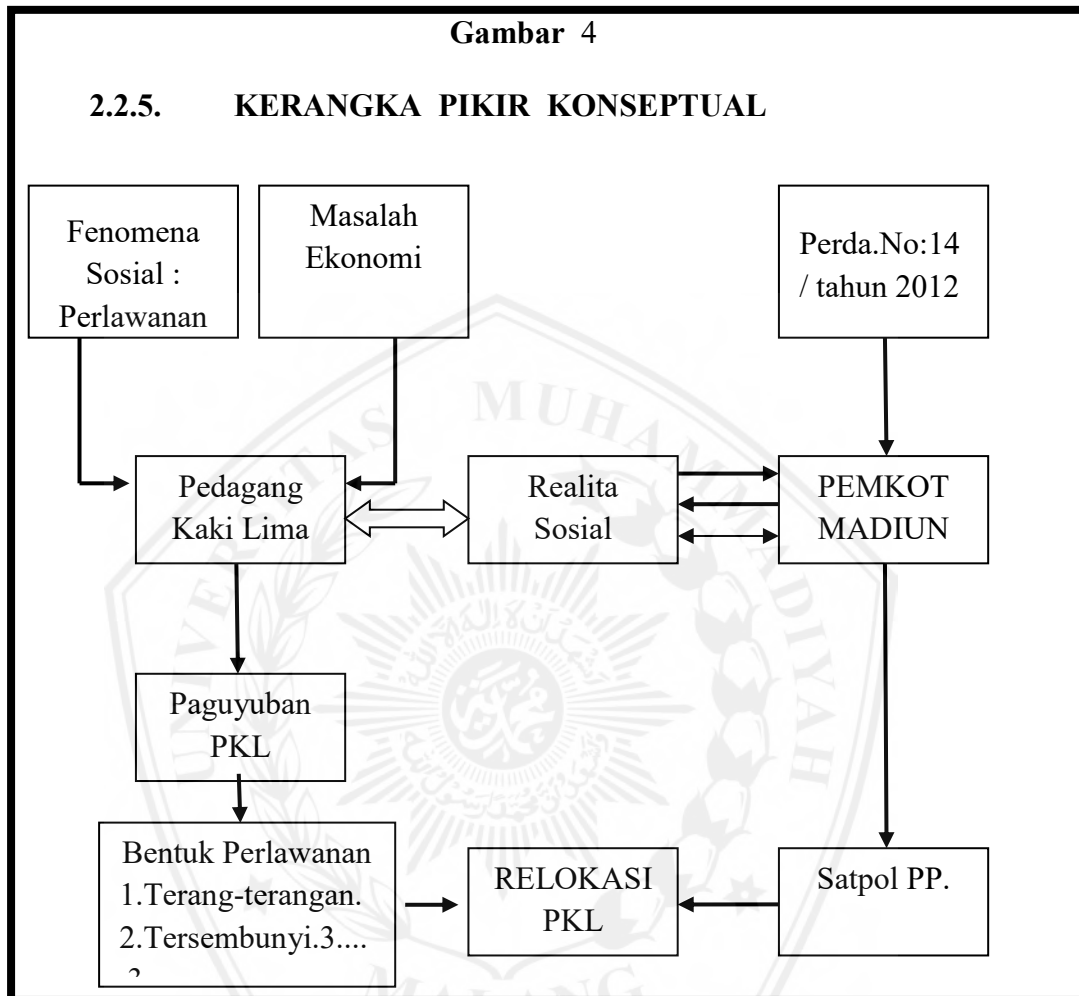
sesuai dan dianggap membahayakan hidupnya. Tindakan pedagang yakni menghindari kegagalan yang akan terjadi dalam kehidupannya dan bukan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan menghindari resiko (Scott, 1981:7). Lebih jauh James C. Scott menjelaskan bahwa tindakan petani enggan ambil resiko (*riskavers*) petani memenuhi banyak subyektif.

James C. Scott, menegaskan dahulukan selamat terhadap petani di Asia Tenggara karena enggan mencari untung mengacaukan kegiatan-kegiatan subsisten petani yang terjadi di masa lampau.(Bagong, Karnaji: 2002). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktor-aktor penting, dalam perlawanan dan sebab perlawanan/ *resistensi* PKL terhadap kebijakan pemerintah Kota.

Dari teori perlawanan kaitannya dengan fenomena sosial, serta melihat realitas, situasi dan kondisi di lapangan, maka pemikiran kerangka teoritis, sbb : Studi ini mengadaptasi atau melakukan ekspansi teori dari teori perlawanan yang dikembangkan dan dibangun dari basis komunitas perilaku petani. Akibat teori-teori perlawanan yang dibangun kalangan petani untuk menghadapi perlawanan masyarakat di daerah kota. Hal tersebut didasarkan adanya kesamaan karakteristik didalamnya yang sama-sama dalam posisi marginal, akibat tindakan oleh negara dalam melaksanakan program pembangunan.

Pertimbangan melakukan ekspansi teori perlawanan dan masyarakat desa ke kota bukan didasarkan pada latar belakang geografis dari teori itu dibangun yaitu pedesaan. Tetapi didasarkan pada konteks perlawanan itu sendiri yang terkait dengan factor factor penyebab, pemicu. Siapa yang terlibat, sarana apa

saja, usaha apa saja, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan itu menjadi sebuah realitas, berikut ini skema kerangka teoritik perlawanan PKL.

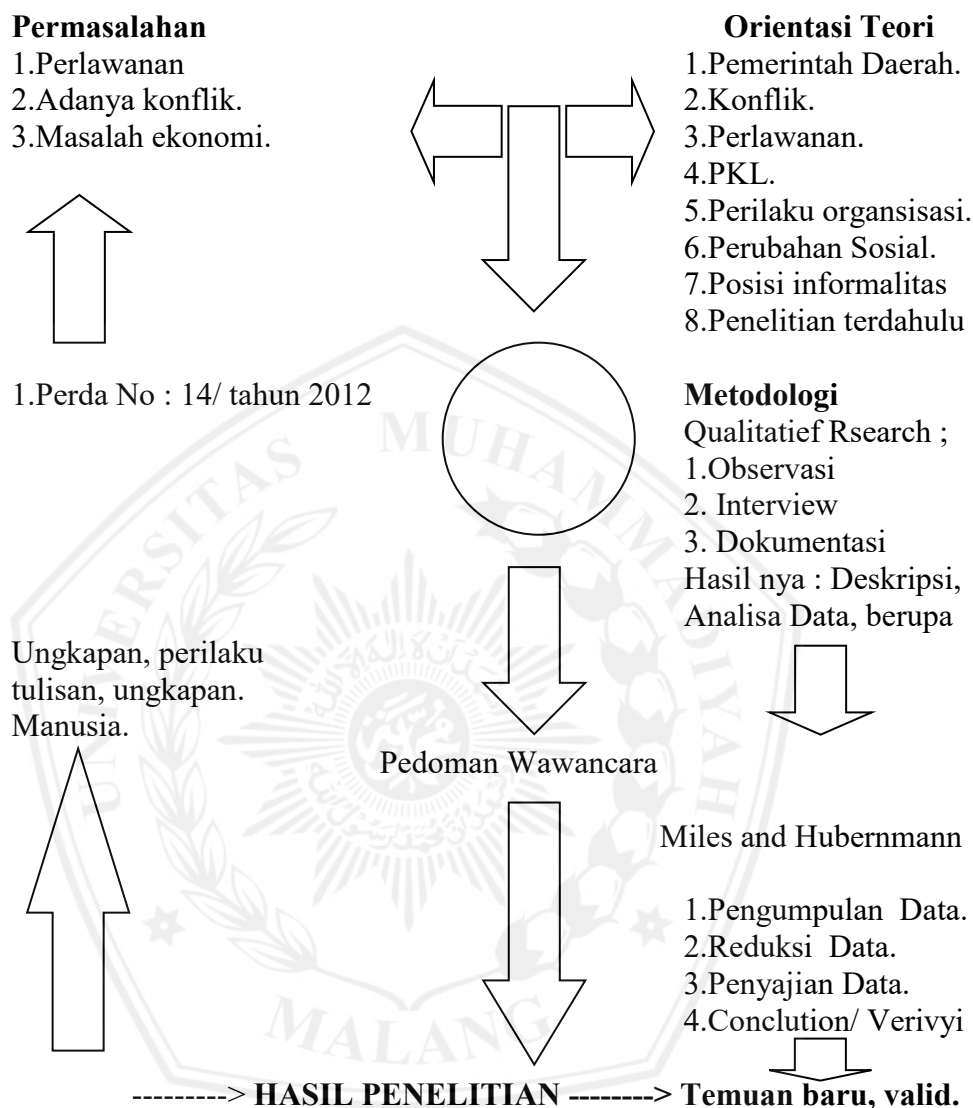


Gambar 2.9. Kerangka Pikir Konseptual

Dari kerangka teori diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi fenomena sosial yakni perlawanan PKL terhadap satpol PP, yang disebabkan masalah ekonomi. Pemerintah kota melaksanakan relokasi sebagai melaksanakan amanah UU. No. 14/ tahun 2012, tentang penataan, penertiban, pembinaan PKL. Paguyuban PKL, sebagai wakil PKL melakukan perlawanan terhadap Satpol PP.pemerintah Kota secara terus menerus setiap hari.(*everiday form resistance*). PKL berharap relokasi dibatalkan atau ditunda, sehingga PKL dapat berdagang lagi.

2.2.6.

KERANGKA PENELITIAN



Penjelasan gambar : Kasus perlawanan PKL terhadap pemerintah kota lahir, karena adanya relokasi pedagang, masalah ekonomi menyebabkan terjadinya perlawanan. Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan teori perlawanan, teori konflik, yang didukung materi perubahan sosial, konsep PKL, pengertian sektor informal, apa itu pemerintah daerah (*local government*). Sedangkan pengambilan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui observasi, indepth interview, dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan model Interactive, Miles and Hubermann melalui tahap-tahap : Data Collection, Data Reduction, Data Display. Untuk mendapatkan data agar valid memenuhi standar keilmiah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil yang diharapkan data penelitian valid, reliabilitas tinggi, dapat hasilkan temuan baru tentang perlawanan, harapan, konflik dapat diakhiri.

BAB : III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Menurut Harmon (dalam Moleong, 2004:49), paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas dalam penelitian. Bogdan & Biklen (dalam Makenzie & Knipe, 2006) menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar sejumlah dari asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarah cara berfikir dan penelitian. Sedangkan Baker (dalam Moeleong, 2004:49) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang (1) membangun atau mendefinisikan batas.(2) menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil.

Cohen & Manion (dalam Mackenzie & Knipe, 2006) membatasi paradigma sebagai tujuan atau motif filosofis pelaksanaan suatu penelitian. Berdasar definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian.

Berdasarkan paradigma yang dianut, seorang peneliti akan menggunakan salah satu dari ketiga yang dilakukan Creswell (dalam Emzir:2008:9), yaitu: kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan. Menurut Emzir (2008:9) perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam ketiga pendekatan ini dapat ditinjau melalui 3 (tiga) elemen kerangka kerja (*knowledge claim*), prosedur umum penelitian

(*strategies of inquiry*) dan prosedur penjaringan dan analisa data serta pelaporan (*research method*).

Tuntutan penegetahuan meliputi asumsi-asumsi filosofis mengenai ontology (apa itu pengetahuan), epistemologi (bagaimana pengetahuan itu diperoleh, aksiologis (nilai-nilai yang terkandung didalamnya), dan retorika (proses pengkajian). Dengan demikian tuntutan pengetahuan berhubungan dengan asumsi-asumsi peneliti tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana hal tersebut dipelajari tuntutan selama penelitian berlangsung. Creswell (dalam Emzir, 2008:11) menggambarkan atau asumsi-sumsi tersebut pada table berikut :

Creswell (dalam Emzir:, 2008:9) menggambarkan bagaimana ketiga elemen tersebut berpadu membentuk ketiga pendekatan penelitian pada table berikut :

Tabel 3: Asumsi Paradigma Kuantitatif dan Kualitatif

Asumsi	Pertanyaan	Kuantitatif	Kualitatif
Ontologis	Apakah hakekat Realitas itu?	Realitas-obyektif tunggal, terpisah dari peneliti	Realitas subyektif danjamak, bagaimana dilihat oleh partisipasi dalam studi
Epistemologi	Apakah hubungan peneliti dengan yang diteliti	Peneliti bebas dari yang diteliti	Peneliti berinteraksi dengan yang diteliti
Aksiologi	Apakah peran nilai-nilai.	Bebas nilai dan tidak bias.	Tidak bebas nilaidan bias.
Retorika	Apakah bahasaPeneliti.	Formal,berdasarkanSerangkaian definisiImpersonal.GunakanKata-kata kuantitatifYang berterima.	Informal,keputusan berkembang,personal,kata-kata kuantitatif yang dapat

Asumsi	Pertanyaan	Kuantitatif	Kualitatif
			diterima.
Metodologis	Apakah proses Pengkajian.	Proses deduktif, sebab akibat, desain statis Kategori disiapkan Sebelum studi, bebas studi, bebas konteks, merupakan generalisasi, mengarahkan prediksi penjelasan dan pemahaman, akurat, dan reliable melalui validitas dan reable	Proses Induktif, factor-factor yang membentuk secara simultan, desain berkembang, kategori di identifikasikan selama proses penelitian, terikat konteks teori, pola dan dikembangkan untuk dapat pemahaman, ukuran reliable melalui verivikasi

Paradigma Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan untuk penyusunan konstruksi teori atau proposisi melalui pengungkapan fakta penelitian. Paradigma penelitian ini disebut juga dengan pendekatan konstruktifis, naturalistic atau inpretatif (*konstruktivist, naturalistic or interpretative approach*), atau perspektif post-modern.

Dengan demikian penelitian ini lebih menekankan kepada pentingnya perencanaan tentang perlawanan PKL di Kota, terkait dengan tempat jualan, estetika tampilan, keindahan kota, kebersihan dan penataan kota, ketertiban. Keberadaan PKL bukan hanya dianggap sebagai penghambat pembangunan, tetapi lebih jauh lagi yakni dianggap sebagai bagian dari pembangunan di Kota,

sebab PKL dapat memberikan masukan ke kas daerah, meskipun nilai nya kecil tetapi tugas pemerintah untuk membuka lapangan kerja sudah terjawab sebagian.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk studi kasus yang difokuskan pada fenomena sosial tentang Perlawanan PKL pada pemerintah di Kota. Penelitian studi kasus merupakan serangkain kegiatan ilmiah untuk mencari, mengexplore, membongkar, menemukan solusi suatu masalah dianggap penting, memiliki hal-hal khusus, menarik, unik, dan menjadi perhatian publik. Kasus yang terjadi mempunyai setting yang menarik, nilai-nilai sosial, ekonomi, politik lokal maupun nasional, masyarakat luas berkepentingan. Peristiwa tersebut terjadi pada Relokasi PKL dari pusat Kota pada tanggal 31 Desember 2105 dan 1 Januari 2016. Kasus perlawanan tersebut diteliti melalui pendekatan metode kualitatif, sehingga kajian permasalahannya dan penerapan metode penelitiannya menjadi pilihan argumentatif.

Penelitian difokuskan pada fenomena sosial tentang perlawanan PKL pada pemerintah Kota. Peristiwa tersebut terjadi pada relokasi PKL dari pusat Kota ke pasar “Kotak”. Kasus perlawanan tersebut diteliti melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*). Sehingga dalam proses penggalan data dilapangan dilakukan penalaran induktif dan dialektif. Hal ini dilakukan sebagai control dalam kerangka mengidentifikasi dan membatasi masalah (*identifikasion and limit the problem*) yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur

serta interaktif komunikasi sebagai alat mengumpulkan data, terutama dalam wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan status peneliti menjadi *instrument* utamanya. Sedangkan data bersifat subyektif, sedangkan data penelitian berbentuk pernyataan kata-kata, narasi, maupun dokumentasi yang relevan. Data dianalisis dalam terminologi respons-respon individual secara deskriptif. Selanjutnya data diidentifikasi sesuai kategori untuk menyortir dan mengorganisasikan data. (*sorting organizing data*). Semua itu bertujuan mengorganisasikan data ke dalam makna atau interpretasi, agar dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.

Oleh karena isi temuan dalam penelitian ini bersifat unik, karena fenomena nya bersifat kompleks dan rumit, sehingga dibutuhkan analisis triangulasi sumber data. Sedangkan simpulan hanya dimaksudkan untuk menggeneralisasi pada fenomena khusus sesuai fokus penelitian dan atau yang dimiliki karakteristik relative sama. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan fenomenologi yang lebih bersifat induktif dan dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami PKL (subyek) selama perlawanan, termasuk interaksinya dengan kelompok lain. Hal ini sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha mengungkap fenomena tentang alasan mengapa perlawanan terjadi. Hal tersebut terjadi antara PKL dengan aparat satpol PP dalam relokasi PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” Kecamatan Kartoharjo kota Madiun, serta bagaimana tujuan perlawanan tersebut.

3.3. Pendekatan Penelitian

Danim, S.: 2002. Menyebutkan beberapa ciri dalam penelitian Kualitatif sebagai berikut : 1. Sumber data langsung, berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrument kunci, 2. Bersifat deskriptif, 3. Lebih menekankan makna proses dari pada hasil, 4. Analisa data bersifat induktif, dan 5. Makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian. Dasar teoritis dalam penelitian ini membentuk makna (*meaning*) dan deskripsi lain berhubungan dengan alasan mengapa perlawanan PKL dengan aparat satpol PP Pemkot. Sehingga akan menentukan paradigma yang memberikan orientasi tentang cara berfikir peneliti dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

Dalam penelitian tentang studi kasus ini, penelahan berbagai sumber data dibutuhkan dengan berbagai macam *instrument* pengumpulan data, mulai dari wawancara mendalam (Indepth), observasi partisipan, dokumentasi-dokumentasi. Ragamnya *instrument* yang digunakan, dengan demikian akan membuat lengkapnya data secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang *representative*.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami makna peristiwa terjadinya perlawanan. Serta interaksi pada orang-orang yang terlibat langsung dalam situasi konflik termasuk organisasi dan masyarakat yang terdampak. Disamping hal tersebut, pendekatan ini diharapkan dapat memunculkan sejumlah asumsi yang terkait dengan temuan fakta atau penyebab perlawanan di lapangan.

Peneliti lebih menekankan pada pemikiran subyektif, karena data informasi dari peristiwa di lapangan lebih menekankan pada subyektifitas dari berbagai sumber yang diterima dan bersifat simbolis. Hal tersebut memberikan peluang terhadap individu sebagai subyek penelitian (informan penelitian). Selanjutnya dilakukan *intepretasi* sampai mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena terjadinya perlawanan. Selanjutnya peneliti mencoba mendeskripsikan fenomena-fenomena peristiwa dilapangan dan menganalisis untuk dikemas menjadi sebuah asumsi sehingga memunculkan preposisi-preposisi.

Dengan melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh konsep-konsep, metode/ cara serta analisis secara *holistik* dengan tujuan mempertahankan keutuhan atau *wholness* dari obyek. Keutuhan yang dimaksud adalah faktualisasi data secara empiris, peran obyektifitas peneliti dalam melakukan informasi terhadap paguyuban PKL. Analisis data yang dilakukan melalui tahapan mereduksi data (*data reduction*), menampilkan/ mengeksplorasi data (*data display*) memilih simpulan data penelitian. (*Conclusion/ Verification*).

3.4. Paradigma dalam penelitian ini adalah Definisi Sosial

Paradigma definisi sosial justru bertolak dari proses berfikir manusia itu sebagai individu. Dalam merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial. Individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas, tetapi tetap bertanggung jawab. Artinya dalam bertindak atau berinteraksi seseorang dalam bertindak ada dibawah bayang-bayang struktur sosial dan pranata-pranata sosial di

dalam masyarakat. Tetapi fokus perhatian paradigma ini terletak pada individu dengan tindakannya.

Menurut paradigma ini proses aksi dan interaksi yang bersumber pada kemauan individu itulah yang mejadi pokok persoalan. Paradigma ini memandang bahwa hakekatnya dari realitas sosial dalam banyak hal lebih bersifat subyektif dibanding obyektif menyangkut keinginan individu. Tindakan individu dengan kata lain realita sosial lebih didasarkan pada definisi-definisi subyektif pelaku-pelaku individual. Tindakan sosial tidak pertama-tama menunjuk pada struktur-struktur sosial, tetapi sebaliknya. Struktur sosial itu merujuk pada agregat definisi (makna tindakan) yang telah dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat. (Veeger, 1993:24-25 dalam Wirawan: 2011:95)

3.4. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data disesuaikan dengan tujuan penelitian yang sumber data terpilih. Dan mengutamakan pada *perspektifemic*, artinya mementingkan pandangan informan. Berkaitan dengan kasus penelitian ini maka peneliti mengkaji dan mendalami tentang alasan mengapa perlawanan terjadi. Mengapa relokasi terjadi dan bagaimana mereka memaknai perlawanan yang terjadi.

Data diperoleh dari pengalaman para pelaku perlawanan yang terlibat dan pandangannya para pimpinan, pengurus paguyuban PKL. Bagaimana anggota paguyuban dalam memaknai perlawanan yang selama ini terjadi. Setidaknya

peneliti bisa memaksakan kehendak untuk mendapatkan data yang diinginkan dan semuanya akan berjalan sesuai dengan pandangan dan pengalaman informan. Sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan sebagai sumber-sumber informasi dan teknik pengumpulan data, adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan data tentang mengapa perlawanan terselubung antar pedagang dengan aparat terus terjadi. Maka dilakukan wawancara secara mendalam kepada para pelaku konflik dari masing-masing yang bertikai, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, Deperindag Kota. Sedangkan teknik pengumpulan data digunakan melalui buku dokumen paguyuban, dokumen Disperindag, dokumen rekaman suara dan video, foto aktivitas relokasi pedagang, serta hasil wawancara mendalam (*indepth Interview*) dan hasil diskusi kelompok paguyuban (*focus group discussion*).

Untuk mendapatkan data penelitian tentang bagaimana memaknai perlawanan yang terjadi, datanya dari pelaku perlawanan, PKL, aparat satpol.PP, pengurus masing-masing paguyuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penafsiran tentang perlawanan PKL dari informan. Untuk mendapatkan data tentang apa yang menjadi sumber penyebab perlawanan diperoleh dari sumber informan pelaku terlibat perlawanan. Serta data pendukung dari pengurus paguyuban pedagang, Disperindag dan masyarakat di sekitar kejadian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, *observasi*, dan dokumentasi.

Semua informasi data diperoleh melalui hasil wawancara, sejumlah dokumen yang terkait langsung dengan kasus relokasi pedagang ke pasar Loak

“Pasar Kotak”. Tujuan utama penelitian adalah memperoleh data, sedangkan data fokus penelitian diperoleh melalui *survey* lokasi. Hasil penelitian orang lain *issue-issue* yang berkembang terkait kasus perlawanan pedagang dalam relokasi ke pasar “Kotak” seperti informasi dari berita dari berbagai media massa. Antara lain media Koran, rekaman *audio-visual* kejadian, penelusuran dari berbagai jurnal melalui internet, buku-buku sejarah PKL tentang peran dan manfaat bagi perekonomian daerah dan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang terjadinya perlawanan pedagang tersebut.

Berikut ini nama, alamat, pekerjaan, umur/ usia, data primer dan sekunder yang menjadi subyek penelitian:

3.4.1.1. Data Primer.

Tabel 3.1 : PKL menjadi nara sumber.

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Umur	Ket
1.	Kayeen	Pedagang	Nglames Raya Madiun	54 Tahun	Ketua
2.	Maksum Nur	Pedagang	Desa Demangan	52 Tahun	Wakil Ka
3.	Senin	Pedagang	Nambangan Kidul	55 Tahun	
4.	Mono	Pedagang	Nambangan Lor	53 Tahun	
5.	Suaeb	Pedagang	Manisrejo, Kec.Taman	40 Tahun	
6.	Nanik	Pedagang	Jalan Barito,Pandean 8	50 Tahun	
7.	Panggeh	Pedagang	Jalan Ardi Manis, Manisrejo	60 Tahun	
8.	Menik	Pedagang	Jalan Srindit, Nambangan	49 Tahun	
9.	Tuminah	Pedagang	Taman Kota Madiun	50 Tahun	

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Umur	Ket
10.	Darto	Pedagang	Jalan Nori Madiun	51 Tahun	
11.	Marto	Pedagang	Jl:Panglima Sudirman	45 Tahun	
12.	Saminah	Pedagang	Kejuron,Jl,K Saputro	40 Tahun	
13.	Suroyo	Pedagang	Jln, Kawung Mojorejo	50 Tahun	
14.	Ambar	Pedagang	Jl. Sekolahan, Banjarejo	54 Tahun	
15.	Sya'roni	Pedagang	Rejomulyo.Kartoharjo	49 Tahun	
16.	Parto	Pedagang	Jl. Rawa Bhakti,Taman	50 Tahun	
17.	Tuminah	Pedagang	Banjarejo,Taman Madiu	60 Tahun	
18.	Sholihin	Pedagang	Jl, Diponegoro,Oro2 o	50 Tahun	
19.	Amir	Pedagang	Jl.Thamrin,Klegen Kota	53 Tahun	
20.	Bambang	Pedagang	Jl.Salak,Ngrowo.	49 Tahun	
21.	Yanto	Pedagang	JL. Nias Kartoharjo	50 Tahun	
22.	Darno	Pedagang	Jl.Jalan Serayu Taman	50 Tahun	

3.4.1.2. Data Sekunder

Tabel 3.2 : Tokoh Masyarakat

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Umur	Ket
1.	Ruslani	Lurah	Jl. Cokroaminoto	65 Tahun	
2.	Santoso	Satpol PP	Jl. Sila Bhakti	55 Tahun	
3.	Didik K	Ka.TU.Disperindag	Jl. Salak	58 Tahun	
4.	Dandy	Ka.Disperindag	Jl. Taman Asri	52Tahun	
5.	Bambang S.	Kasat Pol PP	Jl. Parikesit 42	56 Tahun	

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Umur	Ket
6.	Rochaini	Ka. Kartoharjo	Jl. Pelitatama 41	51 Tahun	
7.	Yoga	Satpol PP	Jl. Cokroaminoto	26 Tahun	
8.	KH.Sutoyo	MUI Kota	JL.Dr.Cipto	55 Tahun	

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data.

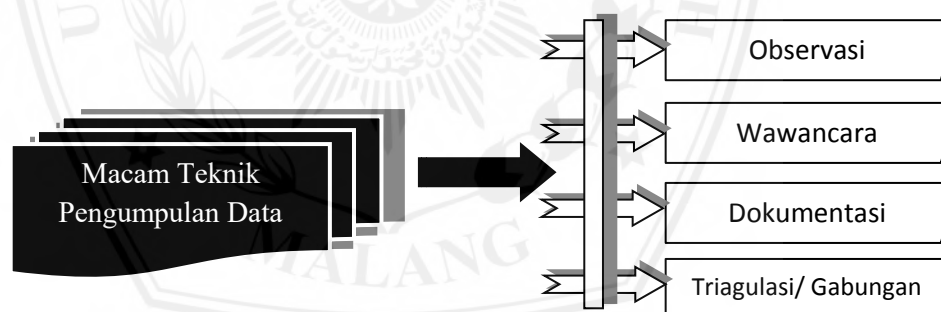
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara sistematis yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama pengumpulan data adalah memperoleh data yang *valid*, sedangkan data fokus penelitian diperoleh dari hasil *survey* hasil penelitian orang lain, issue-issue yang berkembang terkait masalah yang diteliti, dokumen historis, document perjalanan munculnya konflik (kepolisian), TNI (Kodim) wawancara diskusi group dan penafsiran hasil wawancara. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan dilakukan peneliti melalui beberapa tahapan yang disesuaikan dengan fokus penelitian tentang perlawanan pedagang yang dilakukan karena relokasi pedagang sebagai bentuk studi kasus. Tahapan tersebut diawali dengan melakukan pengamatan (*observation*) terhadap lokasi pedagang di tempat asal yaitu, jalan Barito, jalan Batanghari, jalan Nori kota Madiun dan lokasi tempat baru relokasi yakni jalan : Imam Bonjol, Pasar ‘Kotak’ Kartoharjo Kota.

Selanjutnya penggalan data diperoleh melalui wawancara (*interview*) pada informan kunci (pelaku terlibat konflik), informan utama (Kadisperindag Kota,

kabag ekonomi pemkot) dan informan pendukung (pengurus paguyuban, pedagang). Dalam wawancara ada yang terstruktur dan non struktural, namun lebih banyak dilakukan yang non structural karena informasi bisa berkembang dan terkesan *fleksibel*. Tahap berikutnya melakukan penyebaran angket (*quasioner*) yang diberikan kepada informan yang dianggap memiliki kredibilitas dalam kaitannya dengan fokus penelitian. Terakhir pengumpulan data melalui dokumentasi yakni beberapa dokumen kasus perlawanan sebelumnya (berita TV, Koran, foto-foto, dokumen data kejadian konflik dari Kepolisian) dan gabungan keempatnya sebagai bentuk triangulasi dari data-data yang dapat dijadikan sebagai data penelitian.

Dalam rangkaian pengumpulan data penelitian tersebut, maka dapat disusun sebagai bentuk konsep teknik pengumpulan data sebagai berikut :



Bagan : . Macam Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara alami (*natural setting*), sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer. Karena sumber data langsung memberikan data melalui wawancara kepada peneliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada *responden* (utamanya pelaku perlawanan yang terlibat, tokoh masyarakat, LSM, tokoh paguyuban pedagang, pedagang, pengurus paguyuban Kota Madiun).

3.4.2.1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini difokuskan kepada semua *instrument* yang bisa memberikan informasi empiris di lapangan terkait dengan tempat, kejadian, alat, sumber maupun makna perlawanan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan partisipasi dengan obyek di lapangan. Hal ini karena peneliti senantiasa terlibat langsung dalam penggalian informasi. Dengan observasi partisipasi data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku informan yang nampak khususnya kepada para pelaku perlawanan dan informan lainnya.

3.4.2.2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Dalam upaya memperoleh informasi data, peneliti berusaha terlibat langsung dengan para informan kunci khususnya, hal ini dimaksudkan agar data bersifat empiris dan original. Untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam perlu melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan subyek hingga dapat memunculkan pemaknaan informasi-informasi yang beragam, menjadi sebuah penafsiran atau asumsi. Pengumpulan data mengacu pada jenis wawancara tak terstruktur. Hal ini agar memungkinkan pertanyaan dapat berkembang dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Sebagaimana wawancara dengan pelaku konflik di lapangan, mereka akan bercerita tentang pengalamannya dari sumber pemicu perlawanan hingga terjadinya konflik massa. Namun demikian bukan tidak mungkin masih banyak hal non teknis yang berkembang dan terjadi diluar pengamatan.

Dalam melakukan wawancara, peneliti selalu mengacu pada pedoman wawancara atau pokok-pokok masalah yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum tentang sumber pemicu dan seputar terjadi perlawanan pedagang terhadap relokasi pedagang. Kemudian pertanyaan mulai diarahkan lebih *spesifik* sesuai fokus penelitian. Dalam wawancara tidak terstruktur ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tidak terikat pada pertanyaan kaku.

Hal tersebut memungkinkan wawancara berlangsung secara luwes dan tidak menjenuhkan, konsep ini menjadi salah satu alternative teknis wawancara yang dilakukan dalam mencari penggalian informasi data penelitian dengan harapan informasi akan lebih banyak yang diserap dan berlangsung secara kekeluargaan. Selama proses penggalian data penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data berupa : *tape recorder* untuk merekam informasi data dan camera untuk mengabadikan *moment* atau obyek penelitian. Semua dilakukan dengan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan disetujui informan.

Melalui wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengamati dan mencatat respon-respon yang *efektif* yang terlihat selama wawancara berlangsung, kemudian peneliti memilah-milah, termasuk terhadap pengaruh pribadi yang sangat mungkin mempengaruhi hasil wawancara. Secara psikologis, wawancara ini bersifat obrolan (*non formal*) sehingga lebih bebas dan tidak melelahkan informan.

Dalam memilih *informan* sebagai sumber data, *pertama* adalah mereka yang terlibat langsung sebagai pelaku dengan pengalaman perlawanan di lapangan

dalam pengetahuan tentang permasalahan relokasi PKL. Penggalan informasi lebih difokuskan pada sumber pemicu terjadinya perlawanan, mengapa konflik terjadi, bagaimana mereka memaknai perlawanan dan apa yang mendorong mereka terlibat dalam perlawanan. Tentunya pertanyaan ini menjadi porsi pelaku perlawanan relokasi pedagang ke Pasar Kotak, Kartoharjo.

Sedangkan perlawanan yang selama ini telah berlangsung akan menjadi prioritas utama pertanyaan yang diajukan kepada pimpinan paguyuban, pimpinan Disperindag Kota. Selanjutnya pengurus paguyuban, tokoh masyarakat, akademisi, LSM tanpa kecuali para pelaku yang terlibat konflik. Selanjutnya peneliti meminta petunjuk dan informasi informan berikutnya yang harus dimintai informasi terkait data yang dimiliki.

Agar diperoleh data obyektif untuk melengkapi data dan informasi yang disampaikan informasi kunci. Hingga data yang diperoleh terasa cukup sesuai yang dibutuhkan atau dengan kata lain data tersebut telah jenuh. Informasi yang diperoleh dari wawancara jadi bias, karena informasi yang disampaikan menyimpang dari fokus permasalahan, bahkan lebih banyak cerita tentang pengalaman pribadi di jalur fokus penelitian.

Data tersebut tentunya telah menyimpang dari seharusnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut subyektif dan tidak akurat. Keberadaan data seperti ini sebenarnya akan tergantung pada pewawancara, yang diwawancarai (*informan*), serta situasi dan kondisi pada saat wawancara. Untuk menghindari wawancara yang bias maka peneliti selalu berupaya mengembalikan dan mengarahkan pada fokus permasalahan penelitian atau pokok pertanyaan.

3.4.2.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang peneliti. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih *kredibel* dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulisan akademik yang pernah ada. Terkait dengan dokumentasi yang dimaksud, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *handy cam* untuk merekam kejadian. Agar data valid, akurat camera bahkan kadang HP juga difungsikan untuk mengambil gambar berupa hasil wawancara dengan informan. Pelaku perlawanan yang terdiri dari pelaku konflik, masing-masing pimpinan paguyuban dan pengurus, tokoh masyarakat.

Sedang dokumentasi lainnya adalah berupa berbagai data yang diperoleh meliputi letak geografi wilayah Kota Madiun. Antara lain meliputi topografis dan batas wilayah, demografi, surat-surat berharga dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan kasus terjadinya perlawanan PKL dan pola terjadinya perlawanan.

3.4. Instrumen Penelitian

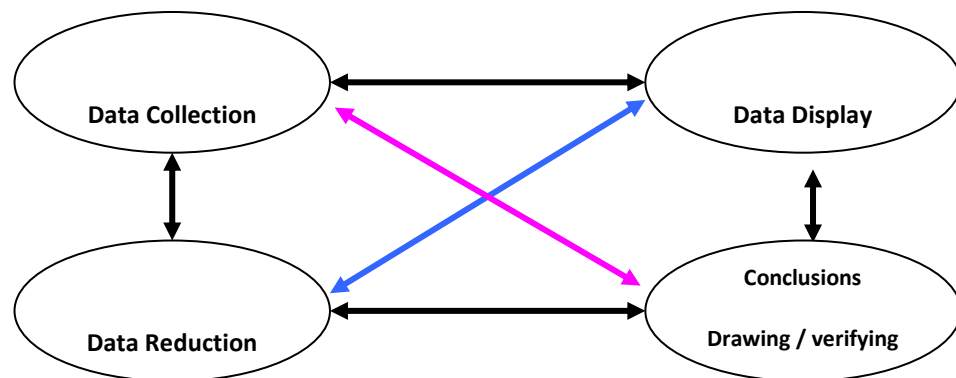
Dalam penelitian ini sebagai *instrument* utama adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu sebagai *instrument* harus *validasi* seberapa jauh pemahaman peneliti untuk kesiapan melakukan penelitian. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti selain berperan sebagai pengelola penelitian juga tidak dapat digantikan oleh *instrument* lainnya seperti kuasioner. Keterlibatan peneliti sebagai *instrument* utama bukan berarti menghilangkan *essensi* manusiawinya. Tetapi kapasitas jiwa raganya dalam mengamati, bertanya, melacak, mengeksplor, memahami, menilai,

mengkoreksi, mengabstraksikan. Hal tersebut merupakan alat utama yang tidak dapat diganti oleh siapapun atau dengan alat manapun. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, akan dikembangkan instrument penelitian sederhana berupa pedoman wawancara dan studi dokumentasi yang siap. Setelah seluruh instrument lengkap diharapkan dapat digunakan untuk memertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

3.5. Analisa Data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang dilakukan secara interaktif. Dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas, dan datanya sampai jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tentu akan mempengaruhi jumlah data informasi yang direkam dan hal ini mengakibatkan variasi datanya cukup tinggi. Oleh karena itu sering peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan analisis karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Interactive dari Miles dan Huberman yaitu: *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification* seperti dilukiskan pada gambar.



Gambar:3.1.

Pengolahan data *Model Interactive Miles dan Hubermann*.

3.5.1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (Triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun dengan dokumentasi. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

3.5.2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.

3.5.3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men *display* kan data. *Display* data dapat dalam bentuk tabel, grafik, *chard* dan sejenisnya. Melalui

penyajian data dalam bentuk *display*, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3.5.4. *Conclution / Veryvying* (Kesimpulan)

Dengan demikian simpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karenaseperti telah dikemukakan semula bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian masih bisa berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Simpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru, jika yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi suatu obyek atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Temuan hasil penelitian ini akan berupa abstraksi preposisi yang dibangun melalui alasan, adanya perlawanan anterselubung berkepanjangan dan tujuan perlawanan anterselubung yang selama ini terjadi.

3.6. Keabsahan Data.

Untuk keabsahan data penelitian, maka serangkaian penelitian/ kegiatan uji keabsahan akan dilakukan sebagai berikut:

3.6.1. Pengujian Kredibilitas Data.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi sumber-sumber data, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*. antara lain :

3.6.1.1. Perpanjangan pengamatan.

Perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk kembali ke lapangan dalam rangka melakukan pengamatan. Mewancarai lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan diharapkan antara peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab semakin terbentuk *raport* dan saling mempercayai. Hal ini sesuai dengan pendapat Susan Staiback(1988) yang menyatakan bahwa *rapport is a relationship of mutual and emotional affinity between two or more people*.

Demi keabsahan sebuah data, peneliti melakukan pengamatan secara berulang kali hingga peneliti merasa data yang dikendaki telah cukup. Sedangkan lama waktu perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, kelulusan dan kepastian data. Kedalaman yang dimaksud adalah peneliti ingin menggali data hingga tingkat makna. Makna berarti data dibalik yang tampak yang diberikan arti (*meaning*) hingga terjadi sebuah penafsiran. Keluasan berarti, banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. Sedangkan kepastian adalah data yang valid yang sesuai dengan yang diperoleh.

Dari batasan waktu penelitian yang ditetapkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Madiun yaitu selama delapan bulan yang terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Mei 2016. Kemudian tambahan 6 bulan lagi sampai Desember 2016. Waktu selama 6 (enam) bulan tersebut untuk peneliti lakukan untuk mencari, menemukan informan dan merekam semua informasi melalui wawancara di lapangan. Jika ternyata data-data yang diperoleh dirasakan belum cukup sehingga harus dilakukan perpanjangan waktu penelitian. Untuk tahap

pertama selama enam bulan berikutnya, yaitu sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Desember 2016. Waktu perpanjangan tersebut ternyata juga sudah memenuhi tuntutan data yang dikehendaki oleh peneliti, sehingga perpanjangan kedua tidak diperlukan.

3.6.1.2. Meningkatkan Ketekunan

Penelitian ini selain memakan waktu juga diperlukan peningkatan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pengujian *kredibilitas* dengan meningkatkan ketekunan ini telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar kembali hasil rekaman wawancara. Jika belum jelas membaca kembali seluruh catatan hasil penelitian secara cermat hingga dapat diketahui berbagai kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan peneliti telah dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis. Mengapa perlawanan terus-menerus terjadi secara berkepanjangan, padahal mereka itu berdagang pada lokasi milik pemerintah daerah Kota tanpa sewa, tanpa bayar pajak di lahan milik pemerintah kota bagaimana mereka memaknai perlawanan tersebut.

3.6.1.3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi tehnik peneliti dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi tehnik yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber peneliti melakukan dengan cara menanyakan

hal sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini sumber datanya adalah ketua paguyuban, tokoh masyarakat, dan para pedagang. Sedangkan Triangulasi waktu dilakukan oleh peneliti dengan pengumpulan data pada berbagai kesempatan, pagi, siang, sore bahkan malam hari. Dilakukan nya triangulasi ini maka berbagai data yang diperoleh dari para nara sumber telah dapat diselaraskan dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti dan nara sumber itu sendiri.

3.6.1.4. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara kepada teman-teman sejawat seperti para dosen Universitas Terbuka, dosen UMM Malang dosen Politeknik Negeri Madiun dan kolega tutor di lingkungan UPBJJ-UT Surabaya. Melalui diskusi-diskusi ini banyak pertanyaan, pernyataan dan saran yang diberikan.

Hasil diskusi memberikan banyak masukan terkait dengan fokus penelitian dan sebagai pertanyaan yang berkenaan dengan data yang belum bisa terjawab oleh peneliti menyebabkan peneliti harus kembali ke lapangan untuk mencari jawaban. Ini dilakukan dengan harapan bahwa data yang diharapkan diperoleh dari informan menjadi semakin lengkap.

3.6.1.5. Analisa Kasus Negatif

Kasus negative merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Sebagaimana data yang diperoleh dari informan terkait dengan janji wawancara, isi materi informasi yang diberikan kadang lebih banyak cerita pada

pengalaman di luar fokus penelitian, sejarah perjalanan paguyuban pedagang.

Setelah dikonfirmasi dengan para nara sumber, maka data yang negative tersebut mendapat arahan dan para nara sumber, maka data yang negative tersebut mendapat arahan dan kesepakatan sehingga berubah menjadi data yang tidak berbeda. Namun demikian masih ada beberapa kasus yang sangat ekstrim perbedaannya, hingga hal ini menjadi catatan bagi peneliti untuk mengembangkan lebih lanjut terutama dengan para sesepuh paguyuban PKL. Sejauh ini peneliti terus melakukan pengembangan agar data tersebut dapat dikonfirmasi dengan para pedagang yang sudah lama menjadi anggota paguyuban.

3.6.1.6. Pengecekan anggota (*Member Check*)

Pengujian kredibilitas data dengan *member check*, dilakukan oleh peneliti dengan acara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data yaitu pimpinan Paguyuban PKL, tokoh masyarakat, Disperindag Kota, LSM, dan para tokoh pelaku perlawanan tersebut. Melalui diskusi tersebut para nara sumber masih saja ada yang menyanggah atau menambah data, dan menghendaki beberapa informasikan data yang harus dihilangkan dan ditambahkan. Ini kemudian diklarifikasi lagi untuk mendapatkan kepastian sebagaimana yang diharapkan.

3.6.1.6. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian studi kasus, Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi partisipan ketika sampel tersebut diambil sebagai

informan. Transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan hingga tahap mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian ini menyoroti masalah konflik terselubung dan perlawanan terselubung antar pedagang dengan aparat satpol, maka peneliti perlu menguraikan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya pada bab II pembahasan berikutnya, sehingga dapat diaplikasikan dalam situasi sosial lain yang memiliki kesamaan karakter dan kemiripan kasus.

3.6.1.7. Dependability

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit tersebut telah dilakukan oleh *auditor independen* juga oleh pembimbing terhadap keseluruhan aktifitas penelitian, mulai dari ketika menentukan masalah/ fokus penelitian, memasuki lapangan menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai membuat simpulan dan membangun preposisi.

3.6.1.8. Comfirmability

Dalam penelitian ini uji *confirmability* telah dilakukan bersamaan dengan tujuan *dependability* karena menguji *comfirmability* berarti menguji hasil penelitian, diikatkan dengan proses yang dilakukan. Karena hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *comfirmability*.

BAB: IV

LOKASI PENELITIAN

4.1. Pendahuluan.

Kota Madiun merupakan kota Madya, merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Madiun, sebagai pusat kota memiliki ciri-ciri masyarakat perkotaan. Sejak zaman kolonial Belanda, wilayah kecamatan Kota akhirnya dijadikan menjadi wilayah Kota Madiun, dimana orang-orang Belanda bermukim dan tinggal. Kota Madiun wilayah nya relatif sempit, hanya mempunyai 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo.

Namun demikian, Kota mempunyai lokasi dan letak geografis yang sangat strategis sebagai ibukota pembantu gubernur di Madiun, yang mencakup wilayah Kabupaten Pacitan, kabupaten Ponorogo, kabupaten Magetan, kabupaten Ngawi, dan kabupaten Madiun, saat ini berpusat di Caruban. Selain itu Kota Madiun menjadi pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, perindustrian, perekonomian dan militer di wilayah Jawa Timur bagian barat.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 7 LS – 8 LS dan 111 BT – 112 BT, diapit oleh Gunung Lawu bagian barat, Gunung Wilis di bagian Timur serta pegunungan Kendeng di bagian selatan dan gunung Pandan di utara. Kota Madiun berbatasan dengan Kecamatan Nglames di bagian utara, Kecamatan Jiwan di bagian barat, kecamatan Wungu di bagian Timur, dibagian selatan Kecamatan Geger. Mengingat wilayah sempit maka kebijakan pemerintah

menciptakan perekonomian, pendidikan, perdagangan, sebagai skala prioritas untuk memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Luas Kota Madiun 33,23 km², terbagi menjadi 3 kecamatan, kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km, kecamatan Taman 12,46 km, kecamatan Kartoharjo 10,73 km. Tinggi daratan Kota Madiun rata-rata 69 m dari permukaan laut hujan, hujan merata sepanjang tahun, kecuali bulan Agustus dan bulan September tidak turun hujan. Dalam satu bulan rata-rata 174 mm, hari hujan paling banyak terjadi bulan Januari dengan curah hujan tertinggi 430 meter. Keadaan iklim di kota Madiun hampir hujan sepanjang tahun.

Secara administratif Kota Madiun terbagi 3 wilayah kecamatan, 27 kelurahan, 267 RW dan 1009 RT. DPRD Kota Madiun berjumlah 30 orang terdiri dari 20 orang laki-laki, 10 orang perempuan. DPRD Kota Madiun telah menghasilkan 13 Keputusan DPRD, 5 Keputusan pimpinan DPRD dan 51 Keputusan rapat. Pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Madiun mencapai 5.078 orang 6,85 persen dari 174.144 jumlah penduduk. Tingkat pendidikan pegawai S1 dan S 2 ada 58,45 persen atau S1, 2699 orang, S2,269 orang. Jumlah penduduk Kota Madiun adalah 174.144 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing 5.010 orang per km² dan 4.642 orang/km² (BPS, 2014).

Kota Madiun saat ini sedang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga Kota Madiun menjadi pusat bisnis, ekonomi masyarakat, khususnya di Jawa Timur bagian barat. Menurut data dari Disperindag Kota Madiun ada sekitar 773 perusahaan yang berbadan hukum, 39,33 persen perusahaan milik perorangan, 20,83 berbentuk *comanditerai venosschaap*/ Firma, 11, 83 berbentuk PT, dan 2,58

berbentuk koperasi. Jumlah pedagang di Kota Madiun 786 pedagang yang terdiri pedagang besar 65, pedagang menengah 100 orang, pedagang kecil 621 pedagang kecil. (BPS 2014). Sebagai Kota perdagangan, Kota Madiun didukung dengan fasilitas untuk perdagangan yang sangat memadai seperti pasar tradisional, pasar-pasar modern. Sedangkan pasar pedagang sektor Informal dan barang bekas atau pasar loak, yakni pasar Loak Besi, pasar burung dan pasar “Kotak” khusus PKL.

Banyak nya pedagang menurut wilayah kecamatan di Kota Madiun antara lain di kecamatan Manguharjo pedagang besar 24 orang, pedagang menengah 25, pedagang kecil 155 orang, dikecamatan Taman pedagang besar 24 orang, pedagang menengah 46 dan pedagang kecil 270, sedangkan di Kecamatan Kartoharjo, pedagang besar 17 orang, pedagang menengah 29 orang pedagang kecil 196 orang. Sedangkan banyaknya pasar antara lain, pasar umum 12 buah, pasar desa 3 buah dan pedagang tetap 3453 orang. (sumber : Dinas Pasar Kota Madiun 2015).

Kegiatan ekonomi dan pendidikan yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah yakni berdirinya Super Market Sri Ratu, Super Market Matahari, Super Market *Carrefour*, dan super Market *Sun City* di dekat pasar “Kotak”. Selain itu banyak bermunculan hotel, jumlah hotel di Kota Madiun hotel non berbintang 28 buah sedangkan yang berbintang 6 buah antara lain, Hotel Aston, hotel Amaris, Hotel Sun City, Hotel Abdul rahman, Hotel Sarangan dan Merdeka.

Selain pasar modern yang menjadi target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD, kota Madiun tetap memperhatikan pelaku ekonomi tradisional dan

modal kecil seperti pasar besar Madiun, pasar Sleko, pasar Mojorejo, pasar Kawak, pasar Loak Jaya, dan pasar “Kotak”. Tidak benar jika pemerintah daerah hanya berorientasi pada pengusaha, pedagang pemilik modal saja, buktinya pasar Loak, pasar relokasi PKL pasar “Kotak” juga menjadi perhatian Pemkot Madiun.

Sedangkan bidang pendidikan Kota Madiun memiliki banyak lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta sebagai wadah mencerdaskan anak bangsa. Ada 2 perguruan Tinggi Negeri seperti Politeknik Negeri Madiun, Sekolah Tinggi Kereta Api (STIKA) dan beberapa perguruan tinggi swasta seperti IKIP PGRI Madiun Universitas Merdeka Madiun, Universitas Widya Mandala, UII Madiun, FISIP Muhamadiyah Madiun, Akbid Muhamadiyah, STIKES Husada Bhakti Madiun., dan, 4 SMK, 6 SMU. Menjamurnya PKL bertebaran di sekolah-sekolah, lembaga kursus, akademi, bimbingan tes, kursus lain yang berakibat pada sektor Informal seperti PKL(Disbudpora kota : 2014).

Kota Madiun saat ini kewalahan menghadapi meledaknya jumlah PKL yang tidak *permanent* seperti di Alun-alun Kota, jalan-jalan protokol, yang diyakini kebanyakan mereka tidak ber KTP Kota. Pedagang ini sifatnya sementara berjualan di pusat keramaian yang mereka anggap banyak pembeli, orang kumpul seperti di Alun-alun Kota, Bundaran Timur Serayu, sepanjang jalan H.Agus Salim (kuliner). Dampak negatif dari kehadiran PKL, mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang terbuka, jalur hijau, ruang terbuka dan ruang kota lainnya yang tidak diperuntukkan pedagang sehingga tempat jualan PKL *illegal*. Akibatnya adalah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL.

Kehadiran PKL di trotoar jalan dapat mengakibatkan pejalan kaki terganggu, timbul tindakan kriminal (pencopetan), dan barang dagangannya mutu rendah.

Perlindungan hukum, Pasal 27 UUD 1945 ayat (2), tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 13 UU Nomor 09 / 1995 tentang usaha kecil. Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan undang-undang dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, dan lokasi yang wajar bagi PKL serta lokasi lainnya. b. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

4.2. Kondisi Umum PKL di pasar “Kotak”

Menurut data dari badan pemberdayaan masyarakat, KB, dan Ketahanan pangan Kota 2014, keluarga para sejahtera ada 52.073 keluarga. atau 0,72 keluarga miskin. Sebagaimana karakteristik umumnya pasar tradisional, pasar “Kotak” merupakan pasar, pedagang bermodal kecil, barang dagangannya kualitas rendah, pendidikannya rendah, stratifikasi sosial (ekonomi lemah), modal berdagang kecil, tempat jualan (lapak) bukan milik sendiri (milik Pemkot). Berbeda dengan pedagang yang di pasar besar, pasar tradisional, pasar modern, toko pinggir jalan raya semuanya miliknya dan mempunyai modal untuk berdagang. Ketika memasuki pasar PKL pasar “Kotak” suasana amburadul, bangunan lapak apa adanya luas petak hanya 2,5 x 3 meter, jorok, tidak teratur, dagangannya barang rongsokan, barang bekas.(BPM : 2014)

Profil PKL dari pasar Loak Batanghari nampak seperti orang yang kesulitan modal, hanya modal nekad, lusuh kadang kala dagangannya tidak laku. Saat ini mereka di tempat baru yakni pasar “Kotak”, akibatnya pelanggan hilang semua, dagangannya tidak laku, pedagang awali dari nol untuk jualan di pasar “Kotak”, sedang pemerintah daerah tidak memberi ganti rugi atau uang pesangon kepada PKL hasil relokasi jalan Batanghari, Jalan Barito, Jalan Nori.

Menurut data dari paguyuban PKL, hasil relokasi dari tempat lama ada 90 pedagang dari Jalan Batanghari, 30 pedagang Jalan Nori, 10 pedagang dari jalan Barito. Semua pedagang tersebut sudah pindah dari tempat lama (Jalan Batanghari, Jalan Nori) tetapi belum semua sudah jualan secara reguler. Menurut informasi dari paguyuban banyak pedagang belum jualan karena kesulitan modal, pembeli di pasar “Kotak” relatif sedikit sekali, tingkat pengunjung rendah kecuali hari minggu, sehingga pedagang tidak dapat uang untuk dibawa pulang, ada lapak yang dipindah tangan ke pihak ke 3 (tiga). Pemerintah kota ternyata hanya memberi tempat jualan, itupun sementara tanpa memberi modal, baik simpan pinjam, maupun kredit, akhirnya yang terjadi “hidup enggan mati tidak mau”.(Disperindagkoppar : 2014).

Miskipun pasar “Kotak” berdampingan dengan pasar Loak dan burung, berseberangan dengan pasar besi loak “Jaya” pasar modern *Sun City*, pasar *Carrefour*, tetapi pedagang enggan, keluh kesah, putus asa, kecewa dengan lokasi baru hasil relokasi. Masalah nya tidak ada nya modal dan sepinnya pembeli. Berbeda dengan di tempat lama, jalan Batanghari, Jalan Nori, lokasi dekat Alun-alun Kota Madiun, dekat pasar besar, dekat dekat Sri Ratu, Matahari Mall. Yang

membuat pasar loak Batanghari jadi jujukan, dilewati orang dan mudah diakses untuk sekedar, jalan-jalan, *refreshing* lihat barang antik. Khusus untuk pedagang dari Jalan Nori mereka cenderung tidak segera membangun lapak walaupun sudah tersedia lokasinya, dengan alasan tidak ada modal untuk mbangun lapak, sedang biaya pindah saja sudah mengeluarkan uang banyak sedangkan uang pesangon yang dijanjikan tidak segera diberikan. (Paguyuban PKL : 2015).

George Eliot, Daniel Derondan, (James C.Scott: 2000:179)

“Tidak gerak mundur, bahkan kalau itu dipaksakan pada orang yang tidak berdaya dan terluka sekalipun, yang tidak mempunyai sisi buruk, sengatan matahari yang ditarik kembali itu sedang mengumpulkan bias/ racun.”

Banyak kebutuhan pedagang, mulai makan/minum setiap hari, biaya sekolah, biaya seragam sekolah, dari pada saya mbangun lapak tetapi anak kleler an, ora mangan, ora sekolah, aku biarkan lapakku, kecuali ada bantuan dari pemerintah kota. Sedangkan pedagang yang di jalan Barito ada yang relokasi ke pasar “Kotak” dengan alasan sudah 30 tahun berjualan rawon, nasi pecel sifatnya turun temurun, kalau saya pindah makan apa bapak? Yang penting bersih, tidak kotor dan patuh kepada satpol PP. Hal tersebut di komentari oleh pedagang yang rumahnya Jl : Barito, “Pemerintah ora adil, sing Eny di biarkan yen aku di obrak-abrik”.Demikian lah komentar yang muncul dari pelaku ekonomi PKL yang di relokasi, hampir sama dengan kasus Pulo Gadung, dan pasar ikan Penjaringan Jakarta, dimana manusia diperlakukan seperti hewan tanpa ada perasaan, rasa manusiawi.

PKL sebenarnya memahami keberadaannya bukan tanpa peran dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), meskipun kecil modal, kualitas barang dagangannya mutu rendah, tetapi nilai peredaran uang oleh PKL cukup besar. Hal tersebut dapat terlihat dengan jumlah pedagang semakin banyak dari hari ke hari, baik di Alun-alun Kota, pasar “Kotak”, pasar dadakan di perempatan Jalan Serayu Timur, pedagang kuliner sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan H. Agus Salim, semua itu menunjukkan dinamika ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Sehingga pemerintah kota melalui Disperindag diharapkan lebih peduli dalam pembinaan, penyuluhan PKL agar menjadi pedagang yang profesional, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat ikut serta menjaga keindahan, Madiun sehat, nyaman, kebersihan kota mengantarkan Kota meraih, mempertahankan piala Adipura.

Lain kisah yang dialami PKL asal Jalan Nori Kota Madiun, Santoso salah satu korban relokasi :

“ Mas minta tolong panjenengan matur pak sekda kot bahwa PKL dari jalan Nori perlu bantuan modal untuk mengawali jualan di pasar “Kotak” barang melalui bapak beliau kerso mendengar jaritan tangis hati para pedagang. (Mas minta tolong bapak bilang ke pak sekda jika pedagang kaki lima dari jalan Nori, perlu bantuan modal untuk mengawali jualan di pasar “Kotak”).

Dijalan Nori jualan ramai pelanggan banyak, tempat nya strategis sedang disini pelanggan hilang, konsumen sedikit ramainya hanya hari minggu, biasanya waktu masih di jalan Nori setiap hari dapat untung dan membawa uang, inilah komentar pedagang bu Ruslani tersebut:

“Neng kene blass mas ora nggowo duit nambah tombok kanggo mangan, tuku bensin. (Disini tidak ada sama sekali penghasilan, tetapi harus bayar, untuk makan dan beli bensin.)

PKL akan terbebani lebih parah lagi bila air minum PDAM tidak dapat dipindah ke pasar kotak, tetapi untuk listrik PLN tidak mau harus pasang lagi waah berat mas mohon minta tolong, jenengan sing koncone sekretaris daerah kota (Sekdakot).(Waah berat mas, minta tolong bapak yang kenal sekdakot karena kenal beliau). Singkatnya dapat dikatakan bahwa fenomena sosial PKL di Kota merupakan potret dikotomis.

Jumlah PKL banyak, seluruh *grassroot* masyarakat berjiwa wiraswasta, mandiri, *enteprenuer* yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, tetapi selama ini mereka miskin modal, secara ekonomi tidak mampu, ekonominya “senin-kamis”, termarginalkan secara ekonomi, itulah kondisi pedagang sektor Informal di Kota Madiun. Apalagi kondisi PKL yang berjualan di pasar “Kotak” hasil relokasi pedagang dari jalan Batanghari, Jalan Nori, Jalan Barito. Orang nya sehat-sehat, besar gempal, berotot, tetapi masalah ekonomi, modal, membuat pedagang tersebut menjadi orang “sakit” secara ekonominya.

Faktor penyebab adanya perlawanan yaitu relokasi dari pusat kota ke pasar “Kotak” kelurahan Rejomulyo. Relokasi PKL atas kebijakan walikota, dari tempat yang selama ini mereka tempati, sebagai kehidupan, menyebabkan PKL melakukan perlawanan. Pedagang bukan tanpa alasan pedagang melawan, karena sudah puluhan tahun tempat sumber hidup ditempati terus, harus ditinggalkan begitu saja tanpa ada kompensasi, ganti rugi, pesangon sedikit. Meskipun secara hukum mereka salah menempati lahan milik Pemkot dengan tidak memiliki selebar surat, apalagi sertifikat.

Di tempat baru semuanya mulai dari nool, pelanggan hilang, konsumen pergi, pembeli tidak ada karena belum tahu dimana pasar “Kotak”? pantaslah pedagang melakukan perlawanan, perlawanan tersembunyi dan perlawanan tertutup. Mengingat rasa senasib, sepenanggungan pedagang terhadap kondisi sosial ekonomi dan permodalan, tidak heran mereka tumpahkan lewat curahan perasaan. Melalui air mata, marah-marah, berkata kotor, mengumpat, ngrasani, ngrundel, mengeluh sebagaimana hasil wawancara, *interveiw*, observasi di lapangan baik di lokasi baru pasar “Kotak” maupun di tempat berdagang semula.

Kurangnya sosialisasi dalam relokasi pedagang dan minimnya informasi tentang maksud, tujuan, visi, misi relokasi dari pemerintah kota, dipandang sebagai faktor pemicu perlawanan terselubung pedagang. Jika relokasi pedagang kaki lima di Solo, sewaktu era nya wali kota Jokowi dari pasar Tirtonadi ke pasar Banjaransari proses sosialisasi antara Pemkot Solo dan paguyuban pedagang diadakan sebanyak 60 x pertemuan, (Humas Pemkot Solo, 2012).

Pemerintah kota Solo dengan paguyuban PKL dicapai kata sepakat “Relokasi”, dengan informasi yang jelas tentang kemana, dimana, untuk apa, bagaimana di tempat baru. Relokasi pedagang di Solo berjalan lancar, tanpa gejolak, tidak ada protes, semua satu kata sepakat “yes”. Terciptalah senyum, tanpa air mata, tidak ada marah-marah, berkata kotor/ misuh-misuh, tidak ada perlawanan. Inilah salah satu kesalahan penguasa dalam memecahkan masalah sosial melalui pendekatan kekuasaan dan otoritas sempit.

Jangan seperti kasus Pulogadung dan kasus pasar ikan di Penjaringan Jakarta, pendekatan yang digunakan bukan pendekatan sosial (manusiawi), tetapi

pendekatan kekuasaan dan militer. PKL, manusia biasa, mempunyai keluarga, anak isteri, dan punya perasaan, harga diri. Janganlah diperlakukan tidak manusiawi seperti hewan, binatang, barang, agar tidak ada protes, dendam, sakit hati, mengumpat para petugas satpol PP.

4.3. Struktur dan Stratifikasi Sosial PKL di pasar“Kotak”

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa PKL juga manusia biasa, bukan manusia super atau manusia *ghaib*, sehingga perlu mendapat perlakuan yang layak seperti anggota masyarakat lainnya. Peneliti memilih PKL di pasar “Kotak” sebagai lokasi penelitian yang merupakan representasi dari masyarakat yang bekerja sektor informal. PKL merupakan rakyat ekonomi lemah, masyarakat miskin, tanpa modal, tanpa pekerjaan tetap, pendidikan rendah yang berjuang mendapatkan sesuap nasi untuk bertahan hidup, agar keluarga, anak dapat hidup, makan, minum, sandang, papan ala kadarnya.

Karena tuna harta, tuna modal maka PKL nekad, bonek, mempertahankan hidup, berjuang untuk hidup meskipun harus berhadapan dengan aparat, satpol PP melawan petugas. Sehubungan dengan pemilihan lokasi penelitian di pasar “Kotak” maka dalam profil tentang struktur dan stratifikasi sosial di pasar “Kotak” hanya data dari tempat tersebut yang diungkap. Khususnya yang berkaitan dengan PKL hasil relokasi dari Jalan Batanghari, Jalan Nori, Jalan Barito Kota Madiun. Profil dan karakteristik PKL akan dimulai dari persoalan struktur sosial, baru kemudian mengenai stratifikasi sosial, sehingga data nya bersifat umum.

Samsudin (2000) mengatakan bahwa salah satu bentuk perubahan sosial yang sering menjadi perbincangan di negara yang sedang berkembang adalah perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan (modernisasi). Pembangunan adalah merupakan sebuah proses peralihan dari kehidupan lama tradisional kepada kehidupan yang maju (modern). Rogers sebagaimana dikutip oleh Nasution (1995) mengartikan modernisasi pembangunan adalah merupakan proses terjadinya pada level atau tingkatan-tingkatan system sosial, sedang kan modernisasi menunjukkan pada proses terjadinya pada individu, oleh karena itu perubahan yang dialami oleh seluruh masyarakat.

Menurut Susanto (1979) banyak hal yang menyebabkan perubahan itu pada masyarakat, diantaranya adalah : a) Perubahan akibat kemajuan ilmu dan teknologi. b) Perubahan yang disebabkan oleh kemajuan komunikasi dan transformasi. c) Perubahan yang disebabkan oleh urbanisasi masyarakat. d) Perubahan yang disebabkan karena bertambahnya tuntutan dan harapan masyarakat.

Perubahan sosial tersebut terjadi pada manusia setidaknya ada 4 (empat) factor yang merangsang perubahan pada diri manusia, antara lain, a) manusia secara terus menerus berupaya untuk memodifikasi sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. b) upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya melengkapi dan menyempurnakan perubahan yang secara berkelanjutan tercipta dalam lingkungan manusia. c) proses kompetitif untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi. d) dalam hal disorganisasi yang

sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. (Dahana dan Bhatnagar, 1980).

Perubahan sosial yang menyangkut struktur sosial, sosial ekonomi, sosial budaya, juga terjadi di kota Madiun, karena dinamika masyarakat akibat revolusi ilmu dan teknologi, adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang mengalir bagaikan deras nya mengalir dari hulu ke muara, dalam bidang sosial ekonomi

Struktur sosial yang dapat dicermati adalah terkait dengan struktur tingkat sosial budaya, tingkat pendidikan, mata pencaharian sebelum PKL, jenis dagangan, kepemilikan modal, jumlah anggota keluarga, pendapatan pedagang masyarakat sektor informal (PKL) di pasar “Kotak”.(Tabel di lampiran). Pasar “Kotak” lokasi baru tempat relokasi PKL mempunyai karakteristik sendiri baik secara administrasi, letak geografi, topografi, demografi, sarana-sarana transportasi, yang bersifat mikro.

“Struktur Sosial diartikan merupakan jaringan saling keterhubungan sosial yang ada dimasyarakat. Struktur sosial merupakan keterjalinan hubungan dikarakteristikan oleh adanya organisasi dan stabilitas. Ada 3 (tiga) kelompok status sosial di masyarakat yakni ascribed status, achieved status, dan master status.(2005;7.22)

Stratifikasi sosial adalah suatu konsep tentang bagaimana melihat anggota masyarakat dibedakan berdasar status yang dimilikinya, bahwa anggota masyarakat secara individu maupun secara kelompok dibedakan posisinya di masyarakat, perbedaan tersebut dapat secara vertikal, ada memiliki kedudukan

lebih tinggi dan ada yang memiliki kedudukan lebih rendah, contoh pengusaha, walikota dan buruh dan PKL. Status ini diberikan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.(Kamanto Sunarto,2000:85).

Pedagang pasar “Kotak” memiliki perbedaan dan persamaan dalam hal terkait secara makroekonomi. Aspek inilah yang membuat peneliti membahas struktur dan stratifikasi sosial untuk sumber data penelitian ini. Jumlah pedagang hasil relokasi yang menempati pasar “Kotak” ada 200 pedagang dengan aneka dagangan yang dijual.(Paguyuban PKL 2016)

Secara keseluruhan pedagang di pasar “Kotak” mata pencaharian nya berdagang baik makanan, minuman, alat sepeda motor, barang bekas onderdil motor, barang bekas alat rumah tangga, kaca mata, warung kopi, warung makanan, warung Mie ayam/ Bakso. Sedangkan pendidikan PKL bervariasi yaitu, SD, SMP, SMK/SMU, yang S1 jarang bahkan ada pedagang yang tidak pernah menempuh pendidikan SD sekalipun, karena tingkat pendidikan rendah cara berfikir pedagang cenderung sempit tidak luas/ lapang dalam menghadapi masalah, termasuk relokasi.

Sosial ekonomi PKL menurut stratifikasi sosial berada pada tingkatan *lower class*, bukan *middle class*, apalagi *High Class*. Sehingga PKL termasuk penduduk yang ada digaris kemiskinan atau orang perlu mendapat bantuan dari pemerintah kota baik bantuan jamkesmas, jamkesmasda.

Maka seharusnya pemerintah daerah memberikan bantuan pesangon, pinjaman modal, kepada pedagang yang mengalami relokasi ke pasar “Kotak”. Secara budaya pun kebanyakan peranan sosial di masyarakat sebagai rakyat biasa

bukan sebagai tokoh, ulama', pendekar, mempunyai gelar bangsawan karena masih kerabat darah biru (pendekar silat). Namun demikian tidak menutup kemungkinan PKL ada dari keluarga pendekar.

PKL pada umumnya masyarakat umum yang tidak mempunyai status sosial tertentu, baik *middle class*, *Hihgt class*. Mereka kebanyakan orang kecil secara ekonomi, hidupnya pas-pas an, penghasilan tidak tetap, pekerjaan sambilan tidak punya, basic ekonomi keluarga sebagai orang wiraswasta, tanpa kerja tidak makan. Oleh karena itu PKL hasil relokasi melakukan perlawanan kepada pemerintah kota karena memang kebijakan tersebut sengsarakan pedagang, karena sulit cari uang, pelanggan, hilang.

4.4. Ketenagakerjaan di Kota Madiun

Menurut data hasil survey angkatan kerja Nasional tahun 2013, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2013 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu angka 62,53 menjadi 66,80. Artinya pada tahun tersebut dari setiap 100 orang terdapat sekitar 67 orang merupakan angkatan. Seiring dengan peningkatan angka TPAK. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menurun 0,05 point dibandingkan tahun 2012 sebesar 58,13 persen dari jumlah angkatan kerja di kota Madiun jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki jenis kelamin.

TPAK penduduk perempuan lebih rendah dibanding penduduk laki-laki, dikarenakan lebih banyak penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja. Sementara Tingkat pengangguran Terbuka penduduk laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 7,33 untuk penduduk laki-laki, dan

5,72 untuk penduduk perempuan. Pada penduduk 15 tahun keatas sebanyak 73,89 persen penduduk bekerja berusia antara 25-54 tahun dan 12,24 persen berusia lebih dari dari usia 55 tahun.

Menurut data lapangan pekerjaannya sebagian besar penduduk bekerja di sektor jasa, yaitu sekitar 84,81 persen. Sebesar 12,66 persen bekerja di sektor industri dan hanya 2,53 persen penduduk bekerja sektor pertanian. Sebesar 68,06 persen dari total angkatan kerja di kota Madiun memiliki pendidikan SLTA keatas, 16,17 persen berpendidikan SLTP dan 23,17 persen berpendidikan SD kebawah. Sedangkan dari 78.124 penduduk yang berumur 15 tahun keatas dan bekerja, sebanyak 67,29 persen memiliki pendidikan SLTP dan sebanyak 23,64 persen berpendidikan SD kebawah.

Besarnya jumlah pengangguran saat ini merupakan salah satu masalah kependudukan yang secara umum terjadi di wilayah perkotaan, hal tersebut yang berakibat meledaknya jumlah PKL di Kota. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan penduduk Kota yang berumur 15 tahun keatas dan termasuk pengangguran terbuka sebagian besar memiliki pendidikan SMA/ SLTA atau diatasnya. Sementara itu dari dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota diperoleh data mengenai pencari kerja dan penempatannya menurut jenis kelamin dan pendidikan.

Pencari kerja yang terdaftar didominasi lulusan SLTA ke atas yaitu sebanyak 2,216 orang, sementara lulusan SD kebawah dan SLTP hanya sedikit masing-masing 109 orang dan 43 orang. Dari 2.315 orang pencari kerja terdaftar terdiri atas 1.143 laki-laki dan 1.174 perempuan. Dari jumlah tersebut hanya

1.606 orang saja yang ditempatkan, 637 laki-laki dan 960 perempuan. (Dinas Tenaga Kerja, Sosial, Transmigrasi. Kota Madiun 2014).

4.5. Sejarah Singkat Dinas Pasar Kota Madiun

Sebagai pembanding para pedagang sektor Informal di kota, bersama ini peneliti informasikan, sajikan tentang dinas pasar kota Madiun, sebagai pengelola pasar daerah. Pada awalnya dikelola oleh unit pelaksana teknis pasar – pasar yang berada dibawah Dinas pengelolaan aset daerah yang dibentuk dengan surat keputusan Walikota Madiun tanggal 10 April 1980 Nomor SK 021.22/249/SK. Sehubungan dengan makin luasnya dan kompleksnya jangkauan tugas dalam pelayanan karena fungsi pasar, maka status unit-unit pelaksana teknis pasar-pasar tersebut ditingkatkan menjadi Dinas Pengelola Pasar Daerah berdasarkan peraturan daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 tahun 1988.

Guna mendukung terwujudnya penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka pemerintah menetapkan pengelolaan pasar dalam dinas pasar Kota berdasarkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2000 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas daerah, selanjutnya dilaksanakan penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Madiun Nomor 04 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah.

a. Landasan Hukum.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah.

b. Landasan Operasional

- 1). Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2008D tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pasar daerah Kota Madiun.
- 2) Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Pasar.

c. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi. Sumber Daya Manusia Dinas Pasar Kota Madiun.

Dalam mengelola pasar, dinas pasar seluruh Kota Madiun didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat akademisi berbeda, Jumlah karyawan honda dan kontrak 3, PNS : 113 orang, sedangkan tingkat pendidikan, S1 : 18 orang, D.3 : 6 orang, SMA : 42 orang, SMP : 23 orang, SD:24 orang, Honda SMP:1, Kontrak SMA:2 orang.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pedagang Dinas Pasar Kota Madiun khususnya pasar besar dibantu oleh unsur masyarakat oleh tenaga pengaman pasar sejumlah 21 orang petugas dan tenaga kebersihan pasar besar sebesar 20 petugas yang bertugas setiap hari berdasarkan *shift* dan jam kerja masing-masing.

BAB : V

BENTUK-BENTUK PERLAWANAN PKL PADA RELOKASI KE

PASAR “KOTAK”

5.1. Pendahuluan

Merintis asal-usul sejarah PKL ibarat mencari emas di tengah padang pasir, karena hampir diseluruh dunia memiliki ciri khas PKL yang menyerupai pedagang formal seperti, depot, warung, kantin, tetapi mereka berijin dan resmi. Sedangkan PKL pedagang sektor non formal, tidak berijin, tidak resmi dasar kegiatan karena motivasi individu dalam rangka untuk mencari mata pencaharian. Namun demikian secara filosofi manusia mempunyai nafsu naluri untuk mempertahankan hidup, mata pencaharian hidup dan memperjuangkan kehidupan (*survival of living*).

PKL, sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan perlawanan terhadap aparat satpol PP. Pemerintah kota, sebab mereka sudah mengetahui hasil nya jika melakukan perlawanan. PKL mempunyai keluarga, anak isteri, sehingga membutuhkan makan, minum, sandang pangan, papan, kesehatan, mereka melawan karena sudah tidak ada pilihan lagi, harus bagaimana menghadapi relokasi. PKL, jika bertahan di lokasi lama, jelas akan ditindak aparat dengan paksa, bahkan bila membandel tidak “boyongan” ke lokasi baru pasti ditindak secara represif, tetapi pindah ke pasar “Kotak” jualan nya tidak laku, pembeli tidak ada, tenaga keluar, hasil ‘muspro’. Yach dilematis nasib PKL hasil relokasi. maka langkah yang paling utama adalah dahulukan selamat akhirnya jalan paling

buruk dipilih yakni *everiday forms resistance*, yaitu bentuk perlawanan setiap hari meskipun pada awalnya juga melalui proses perlawanan terang-terangan, dan perlawanan tersembunyi.

5.2. Komentar PKL terhadap relokasi.

Berikut ini komentar salah seorang pedagang, tentang adanya kebijakan Pemkot Madiun tentang relokasi, bu Mimin memberikan jawabannya:

“Aku adoh-adoh soko Magetan aku golek pangan neng Mediun kanggo openi anak, bojo lan keluarga, akhire kon pindah padahal dodolanku wis suwikira-kira 20 tahun, mboso wis mapan kon boyongan, yoo nasib. Muga2 Gusti Allah nulung aku golek rizki lan sandang, pangan lan maringi kebapak pejabat maringi bantuan kanggo dodolan neng lokasi anyar”
(wawancara : 20 Juni 2016)

(Saya jauh-jauh dari kabupaten Magetan mencari nafkah cari m anak, suami, dan keluarga, akhirnya disuruh pindah, padahal jualan saya sudah 20 tahun, sekarang sudah baik disuruh pergi, yaa nasib. Semoga Gusti Allah menolong saya, mencari rezki dan pakaian, rumah dan member ke pejabat memberi bantuan untuk jualan di lokasi baru”)

Berawal dari filosofi inilah manusia akan selalu berfikir dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk tetap bertahan hidup (*survival*), walaupun harus menghadapi tantangan alam yang keras, penertiban oleh satpol PP, Polisi, dan preman. Hal tersebut menggambarkan bahwa perjuangan anak manusia untuk memperebutkan sesuap nasi harus dilalui meskipun harus konflik dengan pihak lain yakni melawan aparat satpol PP, Polisi. Berbeda dengan tanggapan pak Anom

“Yoo, pemerintah duwe hak noto, ngatur, pedagang kaki lima sing ono kotatermasuk, sing ono kene Jalan Nori/ wong awak e dewe nunutnumpang asset Pemkot, ora bondo blass, modal dengkul, karo bondo nekatkon ngaleh yaa ngaleh, sing penting iso golek panganm sandang, papanduwik sekolah bocah-bocah, yen aku patuh, ta’at, melok aturan ne Pemkotyen mbandel diusir kon minggat sosko wilayah Pemkot, yoo kojuur mas.
(wawancara: 25 Juli 2016)

(Pemerintah mempunyai hak mengatur hak untuk menata, Pedagang kaki lima yang ada di Kota Madiun, termasuk yang ada di jalan Nori, Kita hanya ikut numpang asset nya yakni trotoar jalan, kita tidak mempunyaimodal sama sekali, kita modal dengkul, dan modal nekat,. Disuruh pergiyaa pergi, yang penting masih dapat cari makan, rumah, biaya sekolah, jika menolak pedagang disuruh pergi dari kota, yaa repot”

Pandangan diatas menggambarkan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang selalu berpikir dan ingin terus berkembang(*homo sapiens*). Dalam proses memperjuangkan kehidupan mereka, selalumemperjuangkan, menciptakan sesuatu hingga dijadikan filosofi hidup, dimana untuk bisa bertahan hidup maka harus menghadapi tantangan hidup dalam hadapi perjuangan untuk mencari makan.

Bagaimana pendapat bapak Mono, Jalan Nori tentang relokasi pedagang ke pasar “Kotak”

“Berat, berat kalau pedagang di relokasi ke pasar “Kotak” sebab lokasi baru, jauh dari tempat lama kondisi nya masih amburadul, belum tertata rapi, sarana dan prasaranan belum lengkap, di pasar “Kotak” tempat yang ada masih dalam bentuk lapak-lapak 2x3 Meter yang kososng mlompong belum ada apaanya. Suatu malapetaka bagi pedagang kaki lima yang pindah ke pasar “Kotak”, miskipun lokasi sederhana menempati trotoar, jalannya sempit, tetapi lokasi di Jalan Batanghari Jalan Nori, dan Jalan Barito sangat strategis dekat Alun-alun, mudah terjangkau oleh pembeli. Maka pedagang kaki lima di lokasi sewaktu mendengar akan dipindah ke pasar “Kotak” bagaikan mendengar petir di siang bolong, sedih, marah, menangis, karena mereka terancam tidak makan, tidak dapat uang, rizki nya lepas.” (wawancara Sabtu 22 Mei 2016)

Dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa rakyat dijamin hak nya untuk mencari kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bumi, air, tanah dikelola oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Sehingga manusia Indonesia dijamin hak nya untuk mencari kehidupan demi

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Termasuk didalamnya profesi pedagang sektor Non Formal (PKL).

PKL mendapat pengarahan sebelum pelaksanaan relokasi di pasar “Kotak” Kota Madiun dan hasil forum diskusi Group (FGD) antara pemerintah kota, akademisi, dan TNI. Polisi di gedung Pendidikan dan Latihan Kota Madiun 5 Agustus 2016. Pertemuan tersebut untuk penyamaan persepsi tentang apa, maksud, tujuan dilaksanakan relokasi PKL dari Jalan Batanghari, Jalan Nori, Jalan Barito dan jalan Merpati ke pasar ‘Kotak’. Akhirnya disepakati tentang peraturan dan penataan pedagang di tempat baru, hari, waktu, sarana, prasarana alat transportasi yakni tanggal 31 Desember 2015, pukul 06.00 Wib ke lokasi baru yakni di pasar “Kotak” Kartoharjo Kota Madiun.

Peter Berger menyatakan bahwa control sosial adalah cara dipakai oleh masyarakat untuk mengembalikan anggoutanya yang berjalan dijalur yang salah, artinya control sosial akan berfungsi ketika seseorang melakukan tindakan yang menyimpang, sedangkan menurut Roucek bahwa proses yang direncanakan atau tidak direncanakan, dimana individu diajari, dibujuk atau dipaksa untuk conform terhadap nilai-nilai dari kelompok terebut. (2005:6.56)

Banyak pedagang di pasar loak jalan Batanghari, Jalan Barito, Jalan Nori memindahkan dagangannya ke pasar “kotak” Kartoharjo. Memang lokasi baru menyatukan semua PKL agar menjadi satu “*Integrated Market*” mudah pembinaan, mudah mengawasi, mudah penataan, tetapi pedagang belum faham dibalik ide pemerintah kota Madiun. Sehingga dibalik relokasi tersebut yang ada hanya perasaan tidak puas, marah, jangan-jangan tidak ada pembeli di tempat baru. Untuk itulah diperlukan sosialisasi terus kepada pedagang bahwa rencana relokasi tersebut sangat prospektif dilihat dari lokasi, konsumen, pembeli. Hal ini

tidak terlepas dari tingkat pendidikan pedagang yang rata-rata lulusan SD, SMP saja, sehingga cara berfikirnya relative pendek, takut tidak ada pembeli, ramainya masih lama mas. Berikut pendapat Sueb, tentang relokasi PKL dari pasar Loak Batanghari ke pasar “Kotak”

“Sebenarnya jika tempat lokasi, rame, pembeli banyak, mudah dijangkau tidak menjadi masalah, yang menimbulkan masalah yakni sepi pembeli, jauh dari lokasi, belum tertata rapi, lokasi setengah, dekat dengan pusat perbelanjaan, tetapi jauh dari pusat kota, karena tempat lama menjanjikan pendapat banyak sedang tempat jualan baru sangat jauh, masig amburadul, belum tertata dengan baik, maka pedagang sedih, marah, berkata kotor, keberatan sewaktu ada informasi akan dimutasi.”(wawancara :Hari/tanggal Minggu tang 12 Mei)

Perlawanan PKL dipicu oleh tindakan pemerintah kota me relokasi PKL, sehingga terjadi gesekan antar pedagang dengan aparat Satpol PP dalam proses nya. Pemerintah daerah merasa sudah memberi tahu bahwa *deadline* waktu tanggal 31 Desember 2015 bagi pedagang di Jalan Batanghari dan Jalan Nori.PKL di jalan Barito dealine tanggal 31 Januari 2016. PKL ada yang belum faham tentang relokasi, maka terjadi perlawanan diantara PKL tersebut.

Menurut Marx kebutuhan paling mendasar manusia dan individu adalah materi, sedangkan menurut Weber kebutuhan mendasar selain materi, manusia juga membutuhkan kekuasaan atau power, prestise dan kehormatan. Kebutuhan dasar ini sifatnya langka, maka semua individu akan bersaing untuk mendapatkannya. Keberhasilan individu untuk mendapatkannya caranya berbeda-beda. Mereka selalu merasa tidak puas dan akan berusaha mengambil milik orang lain, disinilah persaingan yang akhirnya menjadi konflik. (2005:9.16)

Gambaran ungkapan tersebut menunjukkan bahwa PKL yang menghuni lokasi baru di pasar “Kotak” Kecamatan Kartoharjo” belum siap 100% dengan adanya relokasi tempat jualan mereka. Secara psycologis PKL yang selama ini berjualan di pusat kota yakni Jalan, Batang hari, jalan Barito, dan jalan Nori.

Mereka merasa tidak ikhlas, berat hati, grundle dengan adanya kebijakan pemerintah kota yang memindahkan pedagang ke pinggir kota yakni kelurahan Kartoharjo. Lokasi pasar “Kotak” sangat strategis untuk perdagangan, karena dekat dengan pusat perbelanjaan *Sun City*, Pasar Burung, pasar Loak jalan Diponegoro, tetapi untuk PKL tidak demikian sebab lokasi terpisah dari pasar loak modern, pasar tradisional.

Ada informasi bahwa relokasi dikatakan sebagai korban orang yang tidak bertanggung jawab karena memprovokasi pedagang untuk menolak di relokasi. Kebetulan tempat tersebut selama ini basis lawan politiknya walikota Madiun yakni kantong PDI.P. Terlepas dari masalah politik memang tempat baru Pedagang Kaki Lima jauh sekali dari tempat semula walau masih dalam kota Madiun.

Lewis Coser, mengatakan bahwa konflik mempunyai fungsi positif bagi masyarakat, konflik merupakan perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka, hal ini bertujuan untuk menetralkan, menciderai atau melenyapkan lawan. Sedangkan fungsi positif dari suatu konflik adalah meningkatkan adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu, meskipun adaptasi tersebut dilakukan dengan terpaksa. (2005: 9.22)

Mengapa pedagang melakukan perlawanan tidak puas, konsumen hilang, tetapi untuk memulihkan pembeli yang hilang butuh waktu lama sehingga pedagang tersebut melawan walau tersembunyi atau samar-samar, pura-pura sebagaimana disampaikan oleh James Scott, bahwa perlawanan ada 3 (tiga) yaitu perlawanan. Terbuka, perlawanan tertutup, perlawanan campuran (terbuka dan tertutup).

Sebagian besar pedagang masih belum mapan dengan tempat khususnya yang dari jalan Batanghari, sedangkan yang dari jalan Nori, selatan Alun-alun masih berbenah. Keadaan seperti ini membuat mereka saling curhat, tumpahkan perasaan, membentuk sikap solidaritas antara pedagang akhirnya sama membantu memasang, mendirikan, renovasi lapak-lapak baru di lokasi yang diperuntuk

pedagang dari jalan Batanghari dan Barito. Pemindahan PKL ke lokasi baru jika difikirkan mendalam sebenarnya relokasi di pasar Kotak” sangat baik untuk masa 5 tahun mendatang, sebab tempat tersebut “ *Integrated Market*” dengan pasar modern dan tradisional yakni carrefour, Sun City, pasar Jaya.

Secara tidak langsung antara sesama pedagang dan telah membentuk kebersamaan anggota pedagang bahwa mereka satu nasib, sehingga saling membantu adalah wajib, khususnya dalam menafsirkan makna solidaritas. Penafsiran tersebut bisa jadi konstruksi kebersamaan perjuangan agar dapat mencari penghidupan bersama telah mereka alami selama bertahun-tahun baik suka, duka, senang, susah.

Pernyataan yang terkesan membela diri sesama PKL penghuni baru pasar “Kotak” Kartoharjo rupanya sudah terbentuk lama sejak mereka jualan di Jalan Batanghari, jalan, Nori, jalan Barito. Ungkapan tersebut telah memberikan motivasi kepada pedagang untuk berani, tidak takut pada siapapun. Sebagaimana tercantum dalam falsafah paguyuban PKL Kota Madiun bahwa “ Berani karena benar takut karena salah, manusia bisa dihancurkan, manusia bisa dimatikan tetapi manusia tidak bisa dikalahkan selama ada solidaritas antar sesama PKL, seperti dalam mencari nafkah untuk keluarga dengan menjadi PKL”. Pernyataan-pernyataan yang senada cukup banyak saya trima, sehingga saya mencoba mensinyalir makna dari terjadinya perlawanan PKL di dalam relokasi pedagang ke pasar “Kotak”, mengapa ada perlawanan walau sifatnya tersembunyi.

Sullivan (2004) menjelaskan bahwa masyarakat dibentuk oleh persaingan kelompok-kelompok dalam menguasai sumber-sumber yang bersifat langka, keberadaan kurang mendapat perhatian karena individu dibentuk oleh institusi sosial dan posisi kelompok-kelompok mereka dalam masyarakat, dan perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi dalam setiap masyarakat. (2005:9.20)

Berdasarkan data yang diperoleh lapangan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL antara lain : meliputi perlawanan secara tersembunyi dan perlawanan terang-terangan.

5.3. Perlawanan Tersembunyi.

Selain perlawanan terang-terangan, perlawanan secara tersembunyi juga menjadi alternatif aksi PKL dalam mempertahankan eksistensinya dan subsistensinya. Jika perlawanan secara terang-terangan cenderung mengambil bentuk aksi-aksi yang “provokatif” yang melibatkan “kontak fisik langsung” dengan pemerintah, khususnya dengan aparat penertiban dalam hal ini dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja (satpol PP) kota Madiun. Perlawanan secara tersembunyi justru menghindari bentrokan fisik tersebut. Perlawanan secara tersembunyi dilakukan melalui cara, antara lain: 1) kucing-kucingan dengan aparat pemerintah. (2) bekerja sama dengan “orang dalam”. (3) Menebus barang dagangan yang telah disita oleh dalam operasi penertiban sebelumnya. (5) Mencari tempat yang agak tersembunyi.

5.3.1. Perlawanan “hit dan run” sebagai perlawanan sehari-sehari.

Relokasi PKL dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015 jam 06.00 wib, pada waktu suasana di pasar “Loak” masi sepi-sepi nya karena pedagang belum datang semua di lapak0lapa mereka jalan “Barito dan Batanghari” Waktu itu, suasana panas sudah terasa dengan banyak hadir nya aparat Kepolisian,

TNI, satpol PP di jalan HOS Cokroaminoto, jalan Delima. Pada jam 07.00. disusul kedatangan truck bak terbuka, aparat kepolisian, TNI, mengangkut petugas mendarat di kawasan pasar “Loak” Jalan Batanghari kota Madiun. Suara orang dari PKL, masyarakat yang peduli nasib pedagang informal bersaut-sautan dengan kata “ a yoo boyongan konco-konco” disertai dengan umpatan-umpatan yang terkesan protes relokasi.

Mereka berkumpul di barat kantor Penggadaian Cabang Kota Madiun tepatnya di jalan, HOS Cokroaminoto lokasi yang menuju jalan Batanghari dimana lapak-lapak PKL berdiri dengan membawa perlengkapan pengamanan suatu operasi penertiban umumnya. Sedang anggota satpol yang lain didukung oleh kendaraan angkut berat misalnya truck bak terbuka, truck bak tertutup alat berat bacoe untuk merobohkan lapak-lapak yang selama di tempati PKL. Sedang aparat keamanan Polisi, TNI, anggota LSM hanya berdiri di samping jalan Batanghari menyaksikan pembongkaran lapak.

Demikianlah gambaran awal, proses terjadi “pemindahan “ PKL yang dilakukan oleh satpol kota pada waktu operasi boyongan PKL dari pusat kota ke lokasi baru pasar “Kotak”. Lokasi jualan PKL tersebut merupakan trotoar jalan Batanghari bagian selatan dan utara sisi kanan kiri yang selama menjadi titik kesemrawutan di Jalan Batanghari. Lokasi berdagang PKL di jalan Batanghari bukan tempat resmi, lokasi itupun berstatus liar karena tidak ada izin hanya dijadikan mangkal PKL yang telah berlangsung puluhan tahun secara turun temurun dari keluarga mereka.

Pelan tetapi pasti dengan pendekatan yang terorganisir dari aparat satpol PP. proses relokasi PKL berlangsung dengan didukung aparat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan semua bangunan lapak-lapak PKL di robohkan, kemudian diangkut dengan truck terbuka ke pasar “Kotak”. Begitulah gambaran salah satu korban yang dilakukan oleh satpol PP. kota terhadap PKL yang akan diboyong ke tempat baru, sebagai aparat penegak perda, satpol PP. Pemkot patuh perintah atasan dalam hal ini walikota Madiun dilaksanakan. PKL yang bermukim di Jalan Batangharai dan sekitarnya tidak dapat menolak program relokasi, karena itu merupakan keharusan.

Dengan di iringi suara-suara protes PKL, keluarga, simpatisan, proses pemindahan pedagang terus berangsur, meskipun perlawanan tersembunyi terdengar seperti marah-marah, umpat petugas, ngrsani, ngomel, misuh, meluncur dari mulut PKL yang hari itu juga harus pindah, pergi, boyongan ke pasar “Kotak”. PKL kaget juga dengan dipaksakannya relokasi, karena para pedagang sudah berusaha mati-matian untuk mencoba menggagalkan rencana tersebut dengan melobby tokoh-tokoh masyarakat agar menunda atau dibatalkan relokasi tersebut, yaa minimal setelah pilkada 2018.

PKL-PKL benar-benar uji pemerintah kota tentang penertiban, penataan, pembinaan, pengawasan PKL dengan melakukan pendekatan ke walikota, DPRD, agar rencana relokasi ditunda. PKL, mengirim perwakilan paguyuban PKL sowan, silaturahmi ke para pejabat, ulama, tokoh informal, akademisi, dengan maksud dan tujuan sama yakni batalkan program relokasi PKL. PKL di Jalan Batanghari sudah puluhan tahun, jika harus pergi akan

menghilangkan sejarah pasar “Loak” Batanghari, kami berjualan disini status seperti sudah seperti rumah sendiri, keluarga sendiri, maka berat hati untuk dipindah ke lokasi baru. Banyak pedagang yang kembali berjualan di tempat lama, meskipun sudah diumumkan lokasi akan digunakan untuk taman kota atau ruang terbuka hijau, pagi-pagi tanggal 1 Januari 2016 PKL yang membandel coba-coba, *come back* berjuang, berjualan di pasar Loak Jalan Batanghari. Aksi PKL yang ingin kembali merupakan sifat dasar manusia untuk berjuang mencari kehidupan agar dapat makan, minum, sandang dan papan. Meskipun dengan sedikit melakukan perlawanan meskipun tersembunyi.

PKL-PKL benar main peta umpet dengan pemerintah kota dengan mencoba kembali ke lokasi lama, meskipun sebagian besar PKL sudah boyongan ke pasar “Kotak”. Konsumen, pelanggan, masyarakat yang sudah biasa dolan jalan-jalan, mencari hiburan barang bersejarah masih banyak, setia untuk datang membeli barang antik, meskipun barang lama tetapi harga miring, mutu lumayan, walau model kadalu warsa. Mereka pelanggan belum mengetahui jika pasar Loak Batanghari sudah pindah, dibenak hatinya bahwa pasar loak di kota itu yaa, pasar Loak Batanghari, bahkan mereka pelanggan bertanya mengapa kok di pindah di sana (pasar Kotak) karena jaraknya cukup jauh antara Jalan Cokroaminoto dengan Jalan Diponegoro. Strategis nya lokasi menjadi jujukan konsumen dari berbagai daerah, yaa hanya 100 meter dari perempatan Tugu di sebelah selatan rumah dinas walikota Jalan Pahlawan. PKL tidak melakukan perlawanan terang-terangan atau terbuka, mereka hanya adakan aksi sembunyi-sembunyi

Sudah menjadi budaya orang Madiun bahwa, rakyat harus ta'at kepada 'umara' karena pimpinannya (walikota) nya, sebab merupakan pilihannya, sehingga meskipun hati terasa "panas". marah, sakit hati para pedagang hanya melawan dengan aksi-aksi tersembunyi. Pendapat James Scott jenis perlawanan ada 2 (dua) yakni perlawanan terang-terangan/ terbuka dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (2003:90). Begitulah perilaku PKL di kota, mereka ta'at patuh kepada pemerintah, meskipun hati panas, emosional, tetapi kepala tetap dingin yang paling-paling grundle, ngrasani, ngomel, berkata kotor terhadap kebijakan relokasi. Jalan Cokroaminto, jalan Barito meskipun sudah kosong PKL tetapi tetap menjadi kenangan, lebih-lebih di Jalan Barito, masih ada PKL yang bertahan, tidak mau pindah seperti Mbak Eny, penjual Rawon Barito. PKL ini beranggapan bahwa lokasi tidak kumuh, tidak kotor, semrawut alias bersih, rapi seperti di Jalan Batanghari. Dia beralih lokasinya telah bertahun-tahun warisan orang tua, pelanggan sudah banyak, kasihan konsumen.

Begitulah ritme kehidupan PKL di kota, mereka berpindah dari satu tempat ke lokasi lain, demi sesuap nasi karena hanya seperti itulah yang mereka mampu. Masalah sosial ekonomi yang dialami PKL yang membuat mereka tidak mampu mandiri secara ekonomi meskipun semangat untuk bekerja membara, selama PKL menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pemerintah terutama fasilitas untuk jualan. Pemerintah kota seharusnya menyediakan sarana dan prasarana berdagang sebagai pedagang formal seperti pasar, supermarket Mall. Dengan demikian saat ini jika mereka jualan di sembarang tempat yaa tidak salah karena fasilitas resmi untuk PKL dalam berdagang belum ada, perlunya disini

pengakuan resmi pemerintah bahwa sektor formal itu ada dan perlu lokasi permanet untuk kegiatan tersebut.

Pemerintah kota, setiap hari mengeluarkan dana cukup besar untuk menertibkan PKL, operasi penertiban secara reguler dan rutin mereka adakan, anggaran uang digelontorkan dalam rangka penertiban, operasi yustisi PKL yang jualan di sepanjang jalan-jalan trotoar dan protokol. Sarana pasar PKL yang permanen jika ada, tidak perlu lagi ada obrakan-obrakan PKL di trotoar jalan, pinggir jalan tidak ada lagi konflik dengan PKL. Energi pemerintah keluar Cuma hanya untuk mengejar, menggusur, mengobrak-abrik PKL yang dianggap melanggar hukum. Hal ini juga diakui oleh beberapa PKL yang pernah mengalami kasus ber “tempur” dengan satpol PP, aparat.

Model-model operasi penertiban aparat pemerintah kota selama ini belum efektif dan tidak “mujarab”, mereka pedagang tetap/ permanent yang menggelar dagangannya di pinggir jalan protokol, karena disitulah PKL mencari mata pencaharian, bekerja demi sesuap nasi. Perkembangan di lapangan jumlah PKL terus bertambah dari hari ke hari, lokasi jualan merambah ke pinggiran kota, asal banyak orang, PKL hadir. Kasus terakhir terjadi di jalan Serayu, suatu kawasan pinggir selatan kota, setiap pagi jam 05.00 – 10.00 Wib dibanjiri PKL dari berbagai kota. Bagi pemerintah kota, kumpul nya PKL di Bunderan di jalan . Serayu Banjarejo mengembirakan karena sektor informal berkembang. Namun perkembangan ini sangat memprihatinkan, sebab dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan sangat besar misal kekumuhan, kemacetan, kejahatan, kebersihan dan kenyamanan, kamtibmas, serta berbagai masalah perkotaan yang merepotkan.

5.3.2. Memberi “mahar” oknum aparat

Gula-gula di pusat kota Madiun merupakan sumber menarik bagi PKL, untuk terus mengembangkan diri, salah satu usahanya. Untuk terus membangun usahanya adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak luar mulai dari paguyuban PKL, LSM, Disperindagkoppar. Perlawanan tersembunyi dilakukan PKL dengan memberi angpau” kepada petugas, model ini untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan dengan urusan birokrasi pemerintahan. Model selain memberi angpau yaitu memberi grtaifikasi kepada petugas dengan “uang rokok”, serta meberikan tips tertentu agar mereka tidak digusur, atau barang diangkut ke truck, dan dibolehkan jualan di lokasi lama.

5.3.3 Menebus barang dagangannya untuk berjualan lagi.

Setelah proses relokasi PKL ke pasar Kotak, banyak kejadian dialami pedagang antara lain, lapak nya di sita satpol PP, dagangannya di rampas, lapaknya dirusak. PKL adalah pedagang dengan status sosial ekonomi kelas lemah, modal kecil, pendidikan rendah, basic ekonomi keluarga juga kelas ekonomi rendah. Dagangan dan lapak yang rampas aparat, merupakan asset berdagang yang sangat berharga untuk memulai hidup lagi dengan modal berdagang yang dimiliki. Semangat yang membara seorang PKL untuk mendapatkan lagi milik nya yag dirampas merupakan modal dasar pedagang meraih kehidupan dengan lapak, barang dagangang patut di apresiasi.

Peristiwa yang terjadi dengan penyitaan barang, lapak, barang dagangan pada saat proses relokasi tanggal 31 Desember 2015, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh PKL. Situasi dan kondisi di lapangan yang

mencekam, tarik ulur pedagang satpol PP, petugas yang represif, suara tangis, protes terhadap relokasi, merupakan peristiwa yang terjadi saat itu. Barang dagangan, lapak-lapak yang rusak dan hilang terjadi terjadi sebab semua orang menginginkan nafsu nya tersalurkan sesuai dengan keinginan seperti kelompok PKL menolak relokasi, sedang pemerintah menginginkan relokasi segera dilaksanakan, agar perda No: 14/ tahun 2012 dapat terealisasi.

5.3.4. Membatasi jumlah PKL yang tidak ber “KTP” orang kota Madiun.

Menurut Mon, penataan selain dilakukan petugas satpol PP, juga dilakukan yang terlebih dahulu menemati suatu tempat PKL yang telah terlebih dahulu menempati lokasi tersebut merasa ‘takut’ jumlahnya semakin banyak dan dianggap akan mengundang Pemkot untuk menentibkannya. “Penertiban yang dilakukan oleh pengusaha senior “pengusaha” yang lebih senior oale yen orangono, malah digusur kabeh”. Ketakutan yang melanda PKL nantinya seluruhnya akan digusur, merupakan alasan pertama mengapa PKL yang lebih senior melarang PKL lain berjualan di tempat yang sama, ada juga yang melarang PKL berjualan di tempat lama. Pembatasan jumlah PKL di Kota Madiun dilakukan oleh tokoh-tokoh paguyuban yang mengusulkan agar pemerintah kota melarang pendatang baru yang tidak ber KTP kota Madiun. PKL yang dapat menjadi PKL dan berdomisili, mangkal di Kota Madiun adalah orang Kota Madiun asli, sehingga tidak terjadi over PKL, yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat.

Pembatasan PKL upaya mengurangi meningkatnya PKL yang akhir-akhir ini “meledak” karena serbuan orang luar kota yang memasuki kota Madiun dengan dalih mencari rizqi, hal tersebut merupakan upaya PKL mempertahankan

eksistensinya dan subtensinya. Dengan sedikit PKL yang ada di kota maka tidak memancing satpol PP untuk menertibkan, selain itu dengan sedikit PKL keuntungan dan kompetisi antar pedagang dapat dihindarkan. Model perlawanan yang masih si tipe ini dengan model ini yaitu dengan cara menempati suatu wilayah dengan cara menggusuusur , yakni bertahap sedikit demi sedikit. PKL umumnya tidak menduduki sekaligus dalam jumlah banyak, tetapi berangsur-angsur agar tidak menyolok.

5.3.5. Mencari dukungan NGo.

Ada berbagai keluhan yang disampaikan PKL kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun mahasiswa. Ada diantara mereka meminta kepada LSM atau mahasiswa untuk memperhatikan nasibnya. Sebagaimana keluhan Ky, PKL yang berkedudukan sebagai ketua paguyuban beralamat di Jalan Raya Tiron tepatnya di desa Nglames, mengatakan “ tolonglah perhatikan nasib kami, rakyat kecil, jangan hanya demi keindahan, taman kota rakyat harus kelaparan dan ketakutan. Juga bu Nah, ia berharap kepada LSM atau mahasiswa bersedia menolong dirinya agar dapat berjualan di tempat semula Jalan Batanghari.

Menanggapi keluhan banyak mahasiswa dan LSM yang melakukan advokasi terhadap PKL, camat Kartoharjo mengatakan : bahwa kita sebetulnya melakukan operasi terus menerus setiap hari, ada kekhawatiran LSM-LSM itu muncul, pak orang jualan ko di tindak represif, akhir saya melakukan “operasi persuasif” Metode pendekatan kepada PKL dengan persuasif akan mendapat simpati, mahasiswa, LSM mendukung nya.

Menurut camat Kartoharjo, ternyata mereka juga tidak mempunyai konsep yang jelas dan merasa bingung saat ditanya konsepnya. LSM, mahasiswa karena terdesak kemudian menawarkan kerja sama, dengan kecamatan dengan mengatakan sudah begini saja pak, mereka biar berjualan di jalan Batanghari, jika ada operasi tolong PKL diberitahu, nanti saya beritahu hasilnya nanti sebbagaian untuk camat, mendengar hal tersebut, dimana ujung-ujung duit, camat marah dan mengusir LSM dan mahasiswa.

5.3.6 Men-sogok oknum aparat dan kumpulan uang untuk ‘pengamanan’

Untuk memperkuat posisi PKL dalam melakukan aktivitas nya, banyak PKL yang membuat paguyuban. Kota Madiun tercatat beberapa paguyuban PKL, antara lain Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Selain itu terdapat paguyuban PKL yang hanya beranggota PKL d lokasi tertentu, seperti paguyuban PKL pasar “Kotak”. Paguyuban PKL Bunderan Serayu, paguyuban PKL Metro di alun-alun kota, dan paguyuban PKL pasar “Burung” Rejomulyo. Bagi Nur, paguyuban dapat digunakan untuk memperkuat kelompoknya dalam menghadapi operasi penertiban aparat satpol PP. Paguyuban PKL mengkoordinir kegiatan pedagang ang berkaitan dengan organisasi paguyuban seperti arisan, pengajian, halal bi halal, rukun kematian, dasa wisma, sosial kemasyarakatan, keamanan PKL. Setiap hari jika berjualan pedagang ditarik iuran untuk organisasi paguyuban sebesar Rp 1000,- untuk keamanan dan kebersihan di lokasi pasar.

Paguyuban PKL merupakan simbol kekompakan, soliditas, persatuan, persaudaraan pedagang dalam memperjuangkan nasib, membela kepentingan paguyuban dan PKL. Selain itu, paguyuban dapat berfungsi sebagai pengayom

organisasi dan profesi dengan visi dan misi yang sama yakni paguyuban PKL pasar “Kotak”. Bagi Ky, dengan organisasi paguyuban yang kuat, maka terjadi solidaritas yang militan tinggi mempunyai persaudaraan yang sehingga disegani oleh masyarakat dan aparat. Persatuan yang kuat, kompak, solid pihak aparat hitung-hitung jika akan mengobarak abrik PKL di kota.

5.3.7. Perlawanan “ menggunakan modal ekonomi”.

Bentuk perlawanan tersembunyi lainnya adalah gelontor modal PKL diukur besar kecilnya modal atau uang yang dimiliki. Semakin besar modal PKL, maka resistensinya akan semakin kuat karena pertaruhan juga besar. Pertaruhan disini dalam artian jumlah pendapatan yang mereka dapatkan sehari-hari, seperti pengakuan Rn setiap harinya dapat mendapatkan keuntungan Rp 1 juta. Sedangkan PKL dengan modal pas-pasan, maka kehilangan kursi atau meja saja akan membuat mereka kesulitan.

Lha iya, katanya PKL orang kecil, waktu di Alun-alun Kota yang jualan saya ambil barangnya dagangannya sama KTP nya ternyata besok sudah jualan lagi, bawa lebih banyak lagi, orang yang jualan ganti. Hal ini diakui oleh Camat Krt, Camat capek menghadapi perilaku PKL yang “kaya” seperti kasus tersebut, dimana banyak PKL yang tidak jujur dengan perilakunya, dimana mereka bohong terhadap profesinya.

5.4. Perlawanan secara terang-terangan.

Sebagaimana disadari bersama, bahwa posisi kaum miskin kota semakin hari makin lemah, hal tersebut karena langkanya lapangan kerja yang berakibat pada semakin lebarnya disparitas antara distribusi pendapatan masyarakat. Masyarakat miskin perkotaan semakin tidak berdaya, dalam arti semakin tidak mempunyai kekuatan politik untuk mengekspresikan kepentingan mereka. Selain masyarakat miskin kota juga semakin termarginalisasi artinya lapangan pekerjaan tidak dapat atau tidak menggunakan tenaga kerja mereka.

Masalah kemiskinan kota disebabkan oleh kebijakan ekonomi negara yang tidak menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, akses pemukiman, akses ruang tempat tinggal, ruang tempat mereka berjualan mencari kehidupan. Akibatnya mereka menjadi pedagang sektor informal yakni menjadi PKL dengan menempati lokasi sembarangan, seadanya yang penting dapat untuk berjualan, meskipun ilegal menurut hukum dan pemerintah.

PKL memasuki sektor informal menjadi jalan satu-satunya karena pemerintah tidak menyediakan pekerjaan, akibatnya jalan-jalan, trotoar-trotoar dipenuhi PKL, demi mencari sesuap nasi. Munculah kawasan kumuh kota, kotor, tidak bersih karena lapak-lapak pedagang yang berdiri di sepanjang jalan, lahir lah semrawut, kawasan menjadi *slum area* yang rawan kamtibmas seperti pencopet, pencuri, pengemis dan penyakit sosial lainnya.

Berdalih demi pelaksanaan perda No,14/ tahun 2012, aparat satpol PP, menggelar operasi yustisi terhadap PKL timbulah konflik dan perlawanan PKL.

baik secara terang-terangan maupun perlawanan tersembunyi. Sedangkan perlawanan secara terang-terangan atau terbuka antara lainnya :

5.4.1. Melawan dengan “adu otot” saat ditertibkan.

Perlawanan secara terbuka yang dilakukan oleh PKL terjadi pada saat awal proses relokasi pedagang dari tempat lama yakni Jalan Batanghari, hal tersebut tidak terhindarkan lagi karena harus “boyongan” yang dipksakan oleh pemerintah kota. Awal proses relokasi seluruh pedagang berkumpul dengan keluarga, teman-teman PKL, LSM, melihat lapak-lapak dirobohkan, dihancurkan dengan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Secara manusia orang akan melawan, berteriak keras-keras, berkata kotor, mengumpat, marah, jika menemui kasus seperti itu. Sedangkan bangunan-bangunan itu adalah sumber kehidupan, mata pencaharian untuk mempertahankan hidup, maka lahirlah perlawanan yang bersifat terang-terangan, terbuka PKL. Perlawanan terang-terang yang dilakukan PKL antara lain :

5.4.2. Bentrokan dengan “gontok-gontok an” di Jalan.

Jalan Cokroaminoto Kota, merupakan jalan protokol yan penting berjarak 200 M dari Alun-alun kota, rumah Dinas walikota, perempatan Tugu yang terkenal itu. Lokasi tersebut bergandengan dengan Jalan Batanghari, dimana PKL berjualan, dan didepan kantor Penggandaian cabang Kota. Diawali dengan cekcok mulut antara PKL dengan satpol yang melarang PKL mendekati lapak-lapak yang akan dirobohkan konflik terang-terangan terjadi, tangisan ibu-anak, rebutan barang/ lapak, penambilan paksa oleh petugas berlangsung. Akhirnya

terjadi rebutan, gontok-gontok an, saling mempertahankan terjadi di pasar Loak lama di Jalan Batanghari.

Perlawanan terang-terang terjadi, dimana PKL saling mempertahankan barang dagangannya yang diangkut ke truck DKP yang telah disiapkan. PKL melawan barang diambil paksa aparat, sedang satpol PP, sudah tidak sabar menunggu PKL selamatkan barang nya, karena *deadline* waktu sudah hampir habis sedang tindakan persuasif sudah lama diberikan kepada PKL. Adu otot, adu fisik, gontok-gontok an, rebutan barang antara satpol PP, dengan PKL tidak terhindarkan lagi korban luka-luka berjatuh, meskipun tanpa kematian. Seluruh peristiwa diatas merupakan bentuk-bentuk perlawanan terang-terangan pedagang dalam merespon tindakan represif petugas.

5.4.3. Membakar “lapak” dan membakar ban di jalan.

Sedang di ujung barat dari Jalan Batanghari, terjadi aksi PKL membakar lapak-lapak yang dirobohkan, dihancurkan aparat satpol sebagai unjuk kemarahan PKL. Dengan dibakar lapak-lapak mereka, mencerminkan isi hati nya terbakar karena kebijakan yang tidak populis di mata pedagang yakni relokasi PKL. Meskipun banyak protes kebijakan tersebut pemerintah tetap pada sikapnya yakni “Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu” walau banyak air mata bercucuran, keluhan, keberatan, protes pedagang relokasi terus berjalan demi perda.

Bagi ibu, penjual soto, nasi rawon, nasi pecel, service kaca mata, service jam/ arloji, lapak-lapak merupakan lambang rumah tempat berteduh, lokasi mencari nafkah, mempertahankan kehidupan, memperpanjang umur. Jika lapak

sudah dirobohkan, diratakan dengan tanah berarti sudah tamat lah riwayat mu sebagai tempat berteduh, tempat mencari nafkah, lokasi mencari sesuap nasi, dan PKL harus migrasi ke tempat mulai menyusun hidup baru di tempat yang benar-benar baru.

5.4.4. Melawan dengan “senjata tajam”

Perlawanan PKL yang terkena relokasi, tidak cukup sampai disitu, mereka juga melawan dengan senjata tajam sewaktu berhadapan dengan satpol PP. PKL mengintimidasi petugas dengan senjata tajam yang dianggap musuh seperti yang terjadi di pasar Loak di Jalan Pelitutama Kartoharjo kota. PKL memanggil tema-temannya untuk melawan satpol PP pada saat operasi ketertiban. Aparat satpol kemudian mengamankan PKL yang membawa senjata tajam dibalik baju. Senjata tajam PKL dipergunakan oleh pedagang dalam rangka mempertahankan diri seperti pisau, arit, pedang, sangkur. Aksi-aksi seperti ini menunjukkan, bahwa Para PKL cenderung memaksakan sendiri, tindakan yang bersifat kekerasan yang berbahaya.

5.4.5. Melawan secara “ngawur”.

Perlawanan dengan menggunakan kekerasan adalah bentuk perlawanan dalam tataran yang sangat ekstrim. PKL pasar Loak mengekspresikan dirinya dengan cara melempari petugas dengan batu, dan pot-pot bunga, pengalaman ini di alami oleh Yoga angouta satpol PP kota dalam melaksanakan tugas. Kekerasan tersebut dipicu oleh sikap provokatif kedua belah pihak, baik aparat maupun PKL yang emosi sewaktu pada saat operasi penertiban pedagang. Apalagi sebelumnya

para PKL sudah merasa bingung karena dan marah karena asset-asset ekonomi di ambil oleh satpol PP yang menyebabkan kesulitan ekonomi keluarga.

Bentrokan antara aparat dengan PKL tidak dapat dihindari pada proses penertiban pedagang terjadi di Jl. Coko Aminoto Utara antara petugas gabungan dengan satpol PP, Polwiltabes, TNI. Untung peristiwa tersebut tidak sampai memicu kekerasan lebih lanjut dengan melibatkan massa, masyarakat yang sedang melintas di kawasan Alun-alun Kota. Provokator yang sedang memancing di air keruh dapat di ringkus oleh aparat yang sigap di kawasan Jalan Cokro Aminoto.. Perilaku kekerasan merupakan puncak kejengkelan PKL terhadap upaya penertiban dan penataan PKL sesuai dengan Perda : No.14/ tahun 2012. Tensi ekonomi yang sangat tinggi membuat PKL menyebabkan pedagang berbuat nekad, yakni melawan terhadap aparat dengan membabi buta, meskipun membahayakan dirinya an masyarakat.

5.4.6. Sengaja berjualan di *red territorial* (tempat terlarang).

Tuntutan ekonomi yang tinggi, para PKL dengan sengaja berjualan di lokasi yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah kota. Kondisi seperti terjadi di kawasan stadion Wilis dimana lokasi memang sangat strategis. Para PKL memenuhi halaman barat stadion yang jelas dilarang untuk berjualan, yang membuat pembeli membludak ke jalan-jalan di sekitar stadion dan mengganggu kamtibmas. Hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat umum, dan pengguna jalan umum karena tempat tersebut sebenarnya trotoar pejalan kaki, dan banayak tanaman hias stadion Wilis, sarana olah raga termegah di barat Jawa Timur.

Tindakan nekad pedagang tersebut dibenarkan oleh Mn, karena sebagai pelaku ekonomi PKL belum mempunyai lokasi tempat jualan yang permanen, pengakuan yang resmi sejajar dengan pelaku ekonomi lain seperti pedagang sektor formal di pasar. Selama ini PKL tidak pernah mendapatkan ruang di tempat-tempat umum, hal tersebut dikeluhkan oleh pedagang, demikian pejalan kaki yang lewat di barat stadion Wilis.

PKL seharusnya, menjadi semut-semut yang senantiasa bergotong royong dengan pemerintah kota untuk mewujudkan *win-win solution*, sehingga masyarakat, pemerintah, pengguna jalan tidak dirugikan. Bukan sebaliknya PKL menjadi beban masyarakat, pemerintah daerah, pembuat tidak bersih, ketidaknyamanan, semrawut, kumuh, kotor.

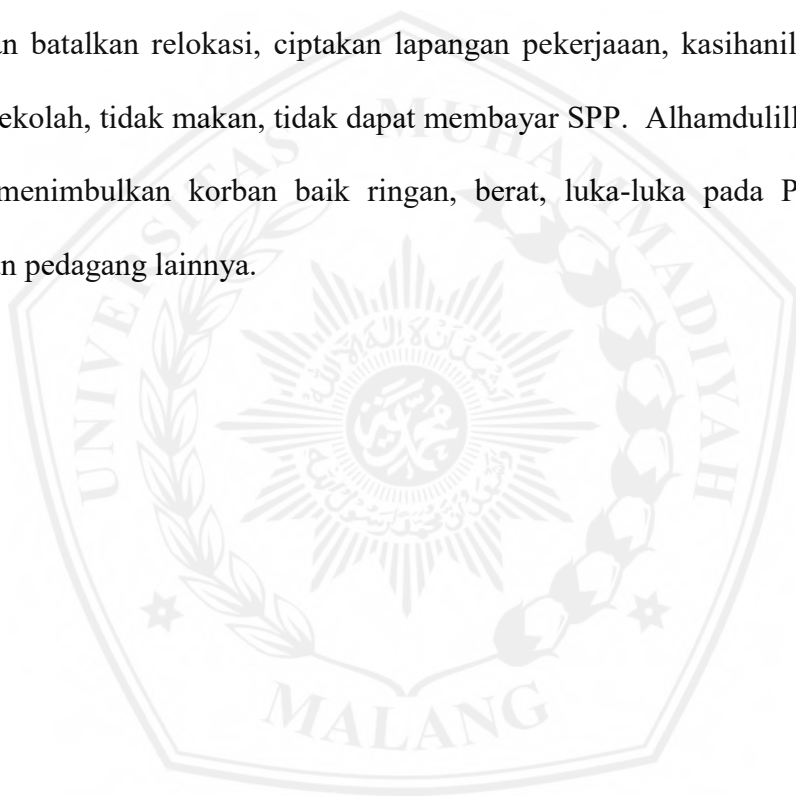
5.4.7. Melakukan turun ke jalan “Unjuk Rasa”

Perlawanan secara terang-terangan, yang sangat menarik perhatian publik, masyarakat, pemerintah, politisi, akademisi adalah ungkapan isi hati melalui demonstrasi. Unjuk rasa PKL di depan DPRD pada Mei 2016 menuntut Pemkot membatalkan rencana relokasi PKL yang tidak aspiratif. Unjuk rasa tersebut diikuti oleh ribuan PKL, pedagang asongan dari paguyuban Asongan Kereta Api, mereka menuntut keadilan dan tempat jualan yang *permanent* dari Pemkot seperti pedagang lain di pasar formal.

Pada saat bersamaan pedagang asongan di PT. Kereta Api juga sedang mengalami nasib sama tetapi lebih menyedihkan karena dilarang jualan di kawasan stasiun, apalagi di dalam kereta api. Terjadi konflik terbuka antara asongan dengan manajemen PT. Kereta Api, kemudian bergabunglah mereka

unjuk rasa di DPRD Kota memperjuangkan nasib nya. PKL, Asongan membawa spanduk yang ber isi kata protes relokasi, batalkan relokasi, batalkan larangan jualan di PT.Kereta Api.

Demonstrasi PKL, di isi orasi oleh tokoh pedagang, wakil rakyat, LSM, dan tokoh masyarakat yang intinya, bela rakyat kecil, berilah pekerjaan, PKL butuh makan, minum, sandang pangan, dan mata pencaharian. Harapan PKL, asongan batalkan relokasi, ciptakan lapangan pekerjaan, kasihanilah anak-anak tidak sekolah, tidak makan, tidak dapat membayar SPP. Alhamdulillah unjuk rasa tidak menimbulkan korban baik ringan, berat, luka-luka pada PKL, asongan maupun pedagang lainnya.



BAB : VI

TUJUAN PERLAWANAN PKL

6.1. Pendahuluan

Sebenarnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No:14 tahun 2012 Kota Madiun telah diatur lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang dan lokasi yang tidak boleh untuk jualan. Jalur bebas PKL yang tidak boleh untuk jualan di pinggir jalan antara lain : Jalan Pahlawan, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan Cokroaminoto, Jalan Mastrip, Jalan Letjen Haryono, Jalan Ponorogo. Pada saat satpol PP masih berjaga PKL tidak ada yang berani membandel buka lapak jualan, tetapi jika sudah malam hari dimana satpol ngantuk penat, mereka kembali. Permainan seperti petak umpat ini merupakan model perlawanan tersembunyi PKL, dalam mensikapi perilaku pedagang yang membandel, namun demikian satpol.PP pemerintah kota dihadapi dengan pendekatan humaniora dan persuasif.

Profesi menjadi PKL, lahir karena jalan satunya untuk dapat hidupi keluarga karena sulit mencari pekerjaan di kota. Andaikan ada pekerjaan lain yang dapat mengganti menjadi PKL, mereka akan memilih menjadi pekerja selain di disektor informal. Di kota-kota besar banyak terjadi konflik karena perbedaan kepentingan sebagai contoh antara pemerintah dengan pedagang sektor informal PKL di kota. Konflik dipicu perbedaan menafsirkan suatu kebijakan seperti tentang Relokasi. Tujuan dan maksud pemerintah baik, untuk menata, menertibkan, membina mengangkat harkat, martabat pedagang, agar lebih nyaman, tenang, tidak di kejar-kejar Tim Tantib Pemkot, mereka dikumpulkan di

suatu lokasi yang menetap, legal, tidak melanggar hukum, tidak menggunakan trotoar jalan untuk berjualan, jelas pelanggaran hukum, tetapi mereka salah faham, relokasi diartikan dibuang, di buang di tempat yang ter-marjinalkan, akhirnya lahirlah konflik, yang menimbulkan perlawanan antara PKL dengan Pemkot Madiun (satpol PP.)

Andaikan tingkat pendidikan cukup, kondisi sosial ekonomi baik, tingkat emosional tidak tinggi, tidak saling curiga dalam diri PKL, maka tidak perlu terjadi perlawanan, seperti yang diungkapkan oleh Wes Sharrock (1977) :

“Pandangan konflik dibangun diatas dasar asumsi bahwasetiap masyarakat ...dapat memberikan kehidupan baik luar biasa bagi sebagian orang, tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena kebanyakan orang tertindas dan ditekan....Oleh sebab itu perbedaan kepentingan dalam masyarakat sama pentingnya dengan kesepakatan atas kepentingan dalam masyarakat sama pentingnya dengan kesepakatan atas aturan nilai-nilai dan sebagian masyarakat diorganisasi sedemikian, sehingga masyarakat tersebut tidak hanya memberikan manfaat lebih besar bagi sebagian warga lainnya. Manfaat lebih besar bagi sebagian yang lain yang tidak mendapat kemudahan.” (Pip Jones 515-516).

Hal tersebut melahirkan konflik, sedangkan konflik kasus relokasi PKL adalah dalam bentuk perlawanan. Menurut teori konflik, terdapat kepentingan antara warga masyarakat yang memiliki kemudahan dan tidak memiliki kemudahan, dimana konflik tersebut inheren dalam hubungan mereka.

6.2. Tujuan Perlawanan PKL.

Pada suatu hari peneliti, berjumpa salah satu subyek ditempat ibadah di pasar Sleko tepatnya masjid Muhajirin setelah jama'ah sholat dhuhur sekitar jam 12.00, untuk mengetahui pendapatnya tentang Relokasi PKL dengan identitas sebagai berikut: Nama : Kayeen. Pekerjaan : Pedagang. Alamat : Nglames.

Pak Kayeen selaku Ketua paguyuban Pedagang bercerita banyak tentang proses terjadinya relokasi.

Peneliti mengajukan soal-soal tentang, awal terjadinya relokasi dengan 3 (tiga) pertanyaan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi sebagai berikut :

Apa tujuan utama pedagang melakukan perlawanan pak Kayeen?

“ Menolak Relokasi, tidak setuju relokasi, menentang relokasi demi agar dapat mencari nafkah, demi sesuap nasi, sebab jualan pedagang tidak dapat penghasilan”

Menurut Shimon Fisher, bahwa dinamika konflik ada 4 tahapan (2001:88), yang meliputi pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik. Pra konflik, periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik, terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak untuk menghindari konflik, kontak satu sama lain. Konfrontasi suatu tahap dimana konflik terbuka mulai terjadi, lading pertikaian atau kekerasan mulai terjadi diantara dua belah pihak. Krisis adalah puncak konflik. Konflik mulai pecah dimana dalam bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massa, pasca konflik adalah situasi diselesaikannya dengan cara mengakhiri konflik, kekerasan, ketegangan dan hubungan mengarah ke lebih normal”

Sebenarnya kami seharusnya berterimakasih kepada Pemkot Madiun yang telah memperhatikan PKL dengan menyediakan tempat untuk mencari nafkah. Selama ini saya bersama teman-teman telah melanggar hukum menempati lahan yang bukan miliknya tanpa ijin dari pemilik, tahu-tahu sudah jualan. Selama ini sebenarnya tidak ada konflik, yang ada hanya perbedaan pemahaman tentang relokasi.

Menurut Wes Sharrock (1977), bahwa makna konflik :

“Yang melekat pada masyarakat yang tidak setara adalah konflik kepentingan yang tak terhindarkan antara “yang mempunyai dan yang tidak mempunyai”

Setelah menemui sang ketua paguyuban PKL, kami bersilaturahmi ke Nur M, Jalan Setinggil, Desa Demangan untuk mewancarai salah satu tokoh pedagang yang setiap hari jualan dan service kaca mata di pasar “Kotak”, dengan tangan terbuka kami diterima di rumahnya, kemudian proses wawancara berlangsung sebagai berikut: ?

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan pak Nur ?

“Sebagai ungkapan ketidak setujuan, menolak Relokasi, karena dengan adanya relokasi mata pencaharian terancam hilang. Sebab tempat baru belum dikenal, jauh dari pusat kota, pelanggan kabur, pembeli belum mengetahui dimana pasar “Kotak” lokasi baru mereka”.

Tokoh muda PKL yang mempunyai “bolo” banyak dan sangat konsisten terhadap perjuangan PKL dan menjadi pengurus paguyuban adalah pak Suaeb, berdomosili di Takeran Magetan 20 Km dari kota. Pedagang dengan anak 3 yang masih sekolah di tingkat SD, SMP, SMA memberi jawaban dengan jelas, gamblang, cerdas tentang seputar masalah Relokasi, berikut hasil wawancara yang terjadi, apa tujuan mereka melakukan perlawanan?

“Ketidak setujuan relokasi, menolak relokasi, agar relokasi dibatalkan karena relokasi dianggap menghilangkan mata pencaharian untuk carinafka, tidak dapat jualan lagi di tempat lama, padahal pedagang sudah puluhan tahun menempati lokasi bahkan sudah turun temurun dari orang tua mereka. Padahal pedagang sudah banyak pelanggan, lokasi menjadi jujukan pembeli untuk mencari barang loakan, atau sekedar untuk jalan melihat barang yang bernilai sejarah?

Pada hari Minggu siang usai sholat Dhuhur, kami temui pak Senin, usia kira 70 tahun. Pekerjaan : Pedagang. Alamat : Takeran, Magetan. Seorang pini sepuh paguyuban PKL yang masih sehat, meskipun sudah berusia lanjut, tiap minggu pagi jam 06.00 sudah menempati lapak nya dengan barang loakan, didampingi isteri nya. Motivasi kuat untuk mencari nafkah demi keluarga, sangat terlihat pada pak Senin, sebab tanpa berjualan di pasar “Kotak” tidak makan, tidak dapat uang. Karena itulah segala usaha dilakukan untuk sekedar dapat makan, pakaian dan sekolah, berikut hasil wawancara dengan Senin

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan pak Senin?

“Tolak relokasi, ora gelem boyongan ke panggonan anyar, sebab lokasi adooh banget, sepi, urung dikenal pembeli. Supayo iso mangan lan iso nyekolah ke anak, bojo mas, menawi pindah neng pasar ‘Kotak’ dodolan mati, ora ono sing tuku.”

Salah satu pedagang wanita yang getol tolak Relokasi adalah bu Ambar, karena sudah puluhan tahun jualan makanan soto di Jalan Batanghari, setelah pasar “Kotak” menjelang usai sholat Ashar, kami wawancarai tentang komentarnya tentang Relokasi, Berikut hasil wawancara nama Ambar, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Srindit Nambangan.

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan mbak Ambar?

“Satu tujuan mereka menolak relokasi, biar dapat mencari nafkah jualan sebagai lokasi baru sepi, pembeli belum mengetahui, lokasi jauh. Wis pokok e mati sandang pangane neng panggonan anyar, anak, bojo kleleran ora iso mangan, sekolah ngesak ne to mas.”

Mbak Puji berdomisili di jalan Srindit, Desa Nambangan Kidul Kota Madiun, sudah 15 tahun berprofesi sebagai pedagang kaki lima di Jalan

Batanghari. Sebagai Sri Kandi di pasar “Kotak” sangat getol memperjuangkan teman-teman sesama pedagang mendapat hak untuk dapat “dodolan”. Sebab hanya itulah, berdagang lah satu-satu nya ketrampilan yang dimiliki, sering mengungkapkan penolakan adanya Relokasi. Pada hari Sabtu pagi jam 10.00 pagi di lapak tempat bu Puji jualan, wawancara dilakukan disela-sela warung “Soto” nya, dengan perasaan berat hati dan raut muka pasrah keadaan sosial ekonomi bu Puji menjawab pertanyaan dengan sinis tentang kebijakan Relokasi pemkot, berikut ini hasil wawancara nya: Nama Puji Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Manisrejo Kota Madiun. Menurut Dahrendorf asumsi utama perspektif konflik ada 4 (empat) yakni :

1. Setiap masyarakat tunduk pada perubahan.
2. Disensus dan konflik ada dimana-mana.
3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat.
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya. (2005: 9.23)

Apa Tujuan perlawanan bagi pedagang ?

“Batal-batal, batalkan Relokasi pak, sebab mata pencaharian hilang, anak ku dan keluarga ku mangan opo, oro iso sekolah piye mbayar SPP ne, dodolan sepi pembeli”

Mbah Nah, demikian panggilan setiap hari di pasar “Kotak” berjualan makanan di pojok utara dengan beralasan tikar seadanya berjualan gorengan. Raut muka kelihatan orang yang kesulitan ekonomi. Berusia sudah tua/ sepuh kira 80

tahunan peneliti pura-pura membeli sepotong dua potong tahu, tempe goreng, sebagai awal dari pembicaraan sebelum wawancara.

“Pertentangan merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan, Pertikaian terjadi karena adanya beberapa factor yang mendukung, Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertkaian diantaranya adalah adanya perbedaan pendirian dan perasaan individu-individu dalam masyarakat, adanya perbedaan kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan, munculnya perubahan sosial yang sanagat cepat di masyarakat (Soekanto, 2002)

Berikut ini hasil wawancara dengan mbah Nah, dibalik lugu dan kepolosannya sebagaiberikut : Tukinah, Umur:75, Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan?

“Nuntut relokasi dibatalkan, menolak boyongan ke pasar “Kotak” oleh dodolan maneh neng lokasi lawas.”

Menurut Soekanto dalam Pengantar Sosiologi mengatakan bahwa :

“Pertentangan memiliki beberapa khusus, bentuk-bentuk khusus tersebut antara lain perbedaan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan kelas, pertentangan sosial dan politik, pertentanagn idiologi dan pertentangan internasional.(Soekanto: 2002).

Pak Panggeh adalah profil PKL yang ulet, kuat, pantang menyerah, didampingi oleh isteri nya di lapak baru di pasar “Kotak” melayani pembeli dengan ramah dengan beberapa pertanyaan dijawab nya, berikut beberapa pertanyaan?

Nama: Panggeh, Pekerjaan Pedagang Kaki Lima, Alamat : Manisrejo, Taman

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan “

“Tujuan utama adalah menolak relokasi, batalkan relokasi, karena hal tersebut mematikan mata pencaharaan, pekerjaan hilang, ora mangan bocah-bocah ora sekolah, mas”

Bu Menik, berasal dari Nambangan Lor, sudah puluhan tahun “dodolan” di Jalan Nori, selatan alun-alun Kota, dengan ciri khas yakni warung Rawon. Bu

Menik salah seorang pengkritik keras dan vocal terhadap kebijakan relokasi, karena rumah dan lapak selama ini di Jalan Nori, sehingga harus pergi ke pasar “Kotak” sejauh 15 Km tiap hari untuk jualan. Waktu jam 12.00 WIB, bu Menik menjawab pertanyaan dengan lantang dan tegas, dengan sikap menentang Relokasi.

Menurut perspektif konflik bahwa setiap system dipersatukan oleh dominasi kelompok yang kuat bukan oleh kesepakatan nilai. Karena menurut perspektif ini tidak ada kesepakatan nilai dan yang ada adalah pemaksaan terhadap nilai-nilai dari kelompok yang berkuasa. Dominasi terbentuk karena kekuatan individu dan kelompok berbeda dalam mendapatkan kebutuhan dasar yang bersifat langka. Kebutuhan dasar tersebut adalah materi, power, privilege, dan prestise. (2005:9.18)

Berikut tanggapan bu Menik, pekerjaan pedagang, alamat, Rejomulyo. Relokasi.

Apa tujuan perlawanan Pedagang?

“ Menolak relokasi, batalkan relokasi, ingin jualan di lokasi lama”

Bu Ron, penjual Soto, Mie Goreng, Kopi. Jualan sudah puluhan tahun di Jalan Barito, Kelurahan Pandean. Seorang ibu muda yang didukung suaminya mencari sesuap nasi, sebagai tambahan untuk mencari nafkah setelah suami nya kena PHK Sekitar jam 14.00 usai monitoring di Ngawi, memberikan jawaban sekitar terjadinya Relokasi. Berikut hasil wawancara yang diberikan bu Ron.

“Kerja sama timbul apabila orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan juga mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri terhadap diri nya sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan bersama dan organisasi merupakan fakta yang penting dalam manfaat kerjasama “ (Soekanto, 2002:72-73)

Sebenarnya tidak ada maksud tertentu dan tujuan PKL melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun mereka hanya bermaksud dapat mencari nafkah, agar dapat hidup, makan, dan sekolahkan anak, dan apa arti perlawanan pada pemerintah pasti kalah, pasti rugi. Pedagang takut lokasi baru membuat mata pencahariannya hilang, tidak dapat cari uang, tidak dapat makan. Padahal di jamin oleh Undang-Undang Dasar bagi rakyat untuk mendapat kehidupan layak sebagaimana pasal 27 UUD 1945 ayat 2. Sebagaimana isi pasal tersebut, :

Pasal 27 ayat 2 : Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kemudian secara perundang-undangan dalam mengelola sumber daya ekonomi negara telah mengamanatkan bahwa segala sumber daya alam, air, udara dikelola oleh negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga tidak alasan lagi bagi negara dan pemerintah untuk melarang suatu kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengelolala sumber daya alam, air, udara, tanah oleh rakyat. Kaitannya dengan kasus relokasi pedagang kaki lima di kota Madiun, Perda No 14/ tahun 2012 tentang penataan, penertiban, pembinaan pedagang kakai lima (PKL), tidak ada yang salah dengan program relokasi tooh tujuan untuk kepentingan, kesejahteraan, kenyamanan, ketertiban pedagang.

Dibawah ini Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang berkaitan kesejahteraan rakyat:

1. Pasal 33, ayat 1. : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
2. Pasal 33, ayat 2 : produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
3. Pasal 33, ayat 3 : Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Pasal 33, ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Namun karena lokasi baru, tempat baru, suasana jualan baru, apalagi belum dikenal, pembeli belum mengetahui, rasa pesimis pedagang, ketakutan pedagang telah menghantui mereka, jangan-jangan tidak ada pembeli, pulang tidak membawa uang. Karena sejak awal pedagang kaki lima hasil relokasi dihadapkan pada masalah modal, kemampuan ekonomi, maka yang menjadi tujuan utama adalah jualan dapat uang, anak-istri senang, dapat maka, membayar SPP sekolah, apalagi pemerintah kota Madiun tidak memberi modal atau pesangon kepada pedagang hasil Relokasi. Alasan pemerintah Kota, pedagang tidak memiliki sertifikat secara resmi tentang lapak, tempat jualan yang mereka tempati. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa :

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kemiskinan yang menjadikan pedagang kaki lima/ PKL, sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan hidup, diakibatkan karena tidak ada pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah.

Berikut ini komentar PKL tentang perlawanan pedagang pada kasus relokasi ke pasar “Kotak”. Nama ; Ron, Pekerjaan Pedagang, Alamat, Pandean

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan ?

“Menolak relokasi, menentang adanya relokasi, ingin tetap jualan di lokasi lama”

Sebagaimana pendapat Erving Goffman tentang interaksi, dengan pendekatan dramaturgi yang mengatakan bahwa kehidupan dalam interaksi sosial seperti panggung sandiwara, dimana bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan fakta subyektif dan obyektif dari interaksi sosial. Bahwa sosial establishment, tempat interaksi sosial meliputi back region/ back stage, tempat penyampaian ekspresi dalam interaksi sosial disebut front region, dan individu yang melihat disebut audience, penampilan pihak yang tampil disebut team of performers, dan orang yang tidak melihat disebut outsider.(2005; 2.39)

Salah satu tokoh, PKL dari Jalan Nori adalah pak Mono, jualan merencanakan kebutuhan pokok, menempati lapak di depan dari pasar “Kotak” usia kira 60 tahun. Sering temu sekadot di jalan Nori, karena punya usaha di tempat itu sering dijanjikan bantuan kaitannya dengan Relokasi. Memberikan jawaban kaitannya dengan relokasi peneliti wawancara jam 09.00. sewaktu jualan berikut ini jawabannya seputar relokasi?. Nama: Mono, usia, 50.

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan?

“Tidak setuju relokasi, agar relokasi dibatalkan, agar diijinkan dapat jualan di lokasi lama”.

Menurut Leopold beberapa bentuk antara lain, penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan dan mengacaukan rencana pihak lain, menyangkal, memaki-maki lewat selebar, mencera, memfitnah, menghasut, menyebar desas-desus. Mengecewakan pihak lain., khianat, mengganggu pihak lain.(2005:2.29)

Setiap pagi sampai jam 10.00 warungnya ramai pembeli untuk sarapan Nasi Pecel Nasi Rawon dan sayur Bali khas nya. Rawon mbak Anik sangat terkenal dan sudah turun temurun dari ibu nya bu Anik, sudah 25 tahun. Usai sarapan nasi rawon di mbah Anik wawancara dilakukan. Berikut hasil wawancara nya : mbak Anik, Pekerjaan Pedagang, Alamat : Jalan Barito, Kota.

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan?

“Menentang relokasi, menolak relokasi, batalkan relokasi pedagang, agar diijinkan jualan di Jalan Barito, karena sudah jujagan pembeli dan mangan opo yen aku pindah, lapak iki warisan ibu ku, mbah ku lan wis puluhan tahun mas.

Perlunya komunikasi yang baik antara paguyuban PKL dengan Disperindagkoppar Kota Madiun, juga harus ada komunikasi antara satpol PP.pemkot dengan para pedagang agar kedepan tidak terjadi konflik secara terus menerus, sebab ada perlawanan pedagang atas kebijakan relokasi karena antara keduanya tidak duduk dalam satu meja dalam menghadapi permasalahan relokasi. Pemerintah sebagai regulator kebijakan yang berkaitan dengan penataan, penertiban pedagang mempunyai kewenangan untuk mengatur menempatkan

pedagang kaki lima termasuk kebijakan relokasi. Terjadinya miss komunikasi antar pedagang kaki lima disinyalir sebagai penyebab terjadinya konflik antar satpol PP. dengan pedagang.

Soekanto (2002) berpendapat bahwa arti penting dari komunikasi adalah pemberian tafsiran, atas penyampaian informasi oleh orang lain. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk bahasa gerak atau pembicaraan tubuh atau sikap. Setelah menafsirkan, orang tersebut kemudian memberikan reaksi. Salah satu cara kontak sosial adalah dalam 3 (tiga) bentuk yakni interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Sekitar jam 07.00 pagi hari Minggu, peneliti bertemu pak Tomo, pedagang alat onderdil sepeda motor untuk melihat, mencari onderdil yang barangkali cocok dan harga murah. Mencari barang bekas merupakan sesuatu yang menarik dan hiburan disamping membantu pedagang dapatkan uang dengan cara membeli dagangannya. Berikut wawancara tentang Relokasi ke pasar “Kotak” pak Tomo, Pekerjaan Pedagang, Alamat Ngrowo, kota Madiun.

Apa tujuan perlawanan pedagang?

“Pedagang takut tidak dapat cari nafkah, mara pencaharian hilang dan menentang relokasi, menolak relokasi, batalkan relokasi, agar diijinkan tetap jualan di lokasi alam”

Profil orang yang termarginalkan, mbah Sri seorang pejuang keras pantang menyerah mulai subuh, pagi siang sampai Sore membuka lapaknya sekedar mencari sesuap nasi sebagai pedagang kaki lima sebagai mata pencaharian, hanya satu harapan ijin jualan di lokasi jangan di relokasi, itulah harapan seorang

nbah berusia 81 tahun jualan nasi pecel, nasi rawon, nasi lodeh. Di sela-sela waktu longgar peneliti wawancarai seputar Relokasi, ini jawabannya?

Mbah Sri, Pekerjaan Pedagang Kaki Lima, Alamat Ngrowo

Apa tujuan perlawanan ?

“Tolak relokasi, batalkan relokasi, menentang relokasi, biarkan kami jualan di Jalan Barito, Jalan Batanghari, Jalan Nori?

Sore hari selepas sholat Ashar, kira jam 15.30, kami temu pak Totok, seorang tokoh PKL Jalan Barito penjual onderdil sepeda motor, pekerja keras, bagaimana respon terhadap Relokasi menurut pak Totok, Kejuron:

Apa tujuan perlawanan ?

“Tolak relokasi, tantang relokasi, batalkan relokasi, ijinan dapat jualan berdagang di lokasi lama”

Sebenarnya tidak ada niatan PKL untuk mbandel, konfrontasi dengan aparat pemkot Madiun. Satu keinginan yang diharapkan biarkan mencari sesuap nasi, dan dapat berdagang di tempat lama, hentikan Relokasi, sengsarakan pedagang. Itulah kata-kata yang terucap sewaktu diwawancarai tentang Relokasi dan dampaknya bagi pedagang kaki lima di pasar “Kotak”.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gramsci yaitu bahwa :

“orang-orang elite mengendalikan sektor-sektor ideologis dari masyarakat, seperti budaya, agama, pendidikan dan mass media dan karena dapat merekayasa persetujuan untuk pemerintahan mereka, kaum proletar lebih diperbudak ditingkat gagasan dari pada di tingkat perilaku.” (Scott; 200:54)

Abdullah, pekerjaan pedagang, alamat: Desa Kuncen, inilah komentar Relokasi?

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan?

“Relokasi batal kan, relokasi ditunda, relokasi dihentikan, agar pedagang dapat mencari nafkah, untuk menghidupi anak,

isterinya”Sebagaimana dicatat oleh Utsa Patnaik, Komsumsi tak adalah pekerjaan diperlukan secara historis, bagian dari keluaran netto yang diizinkan oleh produsen-produsen kecil sebagai hasil perjuangan kelas pengambil surplus.”(Scott: 2000:60

“Saya sama sekali tidak ingin mengemukakan bahwa aksi kekerasan yang dilahirkan dari sikap balas dendam, kebencian, dan kelemahan tidak memainkan peran sama sekali, hanya semuanya itu tidak meliputi seluruh pokok persoalan sebagaimana dikemukakan”.(oleh Zola, dalam Scott, 2000: 51)

Seorang pendekar silat yang disegani, pedagang onderdil, assesoris HP, alat elektronik, di pasar “Kotak”. Peneliti temu pada hari Minggu pagi jam 10.00. di sela-sela waktu longgar melayani pembeli, apa komenatar pak Hery tentang Relokasi, bagaimana akibat nya bagi keluarga? pak Hery,Pekerjaan. Pedagang Alamat jalan Salak 25 kota Madiun. Apa tujuan utama pedagang melakukan perlawanan ?

“Pedagang menginginkan boikot relokasi, gagalkan/ tolak relokasi, menentang relokasi, batalkan relokasi, hentikan relokasi, karena menyengsarakan pedagang tidak mencari nafkah, kanggo openi anak isteri opo mas, yen dodolane sepi pembeli,mugo-mugo para pejabat melek moto ne.”

Sudah 25 tahun sebagai PKL di lokasi lama, mbak Anik anik peneliti temui pada waktu pagi hari sabtu jam 08.00 di lapak nya di pasar “Kotak” dengan tetesan air mata di ungkapkan nasib nya di lokasi jualan yang baru pasar “Kotak”, kemudian memberikan jawabannya atas beberapa pertanyaan?

“Bentuk perlawanan PKL sehari-hari ini tidak menjadi berita besar, sebagaimana jutaan binatang kecil dilaut, mau tidak mau, menciptakan karang, demikian ribuan perlawanan individu menciptakan suatu tembok karang politik atau ekonomi, jarang sekali terjadi konfrontasi yang dramatis, yaitu moment yang secara khas diarahkan dapat dijadikan berita, jarang sekali orang yang melakukan tindakan-tindakan kecil itu berusaha menarik perhatian orang kepada dirinya. Sebab keamanan mereka terletak pada anominitas mereka” (Scott, 2000: 49)

Ini komentar, Bu Anik, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Nori 40. Kota

Apa tujuan pedagang melakukan perlawanan?

“Supaya dapat mencari nafkah dengan jualan d tempat lama, karena langganan banyak, relokasi batalkan, relokasi hentikan, tolak relokasi”

Beralamat di jalan Gedong No: 23 Banjarejo Kota Madiun, di rumahnya yang sederhana bertembok gedeg, beralasan tanah, sangat miskin secara ekonomi. Mata pencaharian jualan makanan gorengan bercerita tentang nasib, kondisi, sulit nya cari makan., anak tidak dapat sekolah untuk SPP apa, untuk membeli seragam pakai apa padahal anak-anak perlu dapat ilmu dan pengetahuan melalalui sekolah kemudian bu Anik memberikan jawaban tentang Relokasi pedagang ke pasar “Kotak”?

Dalam pasal 31 UUD 1945 dijelaskan tentang pendidikan dan hak warga negara dapat pendidikan dan pengajaran sebagai berikut :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Pemerintah memajukan ilmu dan pengetahuan, tehnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kemiskinan, kondisi sosial ekonomi lemah, ketidak punya modal yang membuat PKL tidak berdaya menghadapi hantaman kebijakan pemerintah Kota. Relokasi bermaksud baik, mengangkat martabat, kehormatan, citra dan kepastian hukum dalam berdagang, karena jika di pinggir jalan tetap menjadi sasaran

penertiban, penggusuran, tindakan represif aparat satpol PP. Pemkot. Sebenarnya pedagang hanya ingin dapat mencari nafkah, mempertahankan hidup dengan jualan, demi keluarga anak-anak dapat makan, minum bayar sekolah. Pemkot Madiun seharusnya tetap mngusahan bantuan dana agar mereka anak pedagang dapat sekolah, sebab jika tidak pemerintah mengingkari UUD 1945 pasal 31. ayat 1, dan 2.

Mereka berdagang karena tidak ada pilihan lain, keahlian tidak punya, sekolah tidak mempunyai uang, mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai, jalan satu-satunya adalah dengan menjadi pedagang kaki lima, sedang modal secara ekonomi yang menjadi prasyarat berbisnis yaa juga tidak punya dan tidak ada pekerjaan tetap yang berpenghasilan cukup, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok nya yaitu memasuki dunia sektor informal. Mereka memilih bidang tersebut karena menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, kemampuan yang di miliki PKL.

Sektor dunia usaha, bisnis, serta berbagai jenis usaha di masyarakat yang semula tidak menjadi prioritas, sekarang menjadi dapat menjadi utama karena terjadi perubahan dan pola pikir masyarakat. Logika yang terjadi adalah sulitnya mencari kerja sedang pemerintah sendiri yang menjadi harapan rakyat tentang lapangan kerja tidak kunjung datang, maka yang terjadi yakni berfikir selamat dahulu. Kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan rakyat tidak kunjung datang yaitu pekerjaan, padahal anak-isteri, perut sangat menanti, sebab hidup harus terus berjalan yang penting dapat kerja, bentuk apa tidak penting yang dapat makan, hidup, pelariannya akhirnya sektor informal.

Masyarakat tidak membutuhkan janji-janji, program diatas kertas yang penting dapat makan, karena kemiskinan rakyat di lapisan bawah sudah pada titik nadir, akan makan, minum, sehari sudah sulit apalagi berfikir membiayai anak sekolah yach tinggal “angan-angan”, Kartasamita mengklasifikasikan kemiskinan menjadi 4 (empat) kelompok yakni :(a) pendidikan rendah. (b) derajat kesehatan rendah.(c) terbatasnya lapangan kerja dan (d) kondisi ketreisolasian. (Kartasamita : 1996:240-241)

Lapangan kerja dan pengangguran yang menimbulkan dan akibatkan kemiskinan tersebut menyebabkan keseluruhannya dialami terjadi dan dialami oleh PKL, sehingga menyebabkan mereka migrasi dari desa-desa, kota kecil ke kota, bahkan saking sulitnya mencari pekerjaan memutuskan untuk mencari kerja di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Memang tidak dapat kita ingkari, kondisi sosial ekonomi masyarakat amburadul, kemiskinan penyebab tingkat pendidikan rendah, kemiskinan menyebabkan tingkat kesehatan menurun, kemiskinan menyebabkan anak-anak kurang gizi, kemiskinan menyebabkan gangguan kejiwaan meningkat. (Dinas Kesehatan kota, 2016)

Bagaimana mengatasi kasus tersebut, dan jalan satu-satunya adalah memasuki dunia sektor informal, dan apakah pembangunan perkotaan dan pedesaan dapat direncanakan, dipersiapkan dengan demikian, sehingga keduanya tidak saling membatalkan serta dapat berinteraksi secara positif. (Lipton: 1975: 41-52).

Pada kasus PKL yang mengalami relokasi ke pasar “Kotak” di Kota Madiun, mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kota Madiun karena

kondisi mental, sosial, ekonomi sangat memprihatinkan dalam istilah “Mati Suri”. Salah satu tantangan bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja/ usaha yang layak bagi rakyat, sehingga kemiskinan dapat ditekan dan, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Maka sewaktu dicetuskan program relokasi pedagang dari pusat kota ke pasar “Kotak” reaksi perlawanan muncul. Karena mereka PKL berpenghasilan minim, tidak mempunyai pekerjaan dan harus pindah jualan ke lokasi baru yang kurang strategis, sepi, jauh dari ramai. Inilah tahap-tahap relokasi komentar pedagang pada waktu itu. dilaksanakan :

“Karena nasibnya hampir selalu kalah dan akhirnya dibantai secara massal, maka pemberontakan yang besar sama sekali tidak taktis untuk mencapai suatu hasil yang lestari. Pertarungan yang sabar dan diam-diam yang dilakukan dengan tekad yang kuat oleh masyarakat-masyarakat desa selama bertahun-tahun akan lebih banyak mendatangkan hasil dai pada percikan-percikan gelora seketika.” (Marc Bloch. French Rural History dalam Scott. 2000:38).

Sebagaimana ungkapan seorang ibu pedagang sebagai berikut bu Tum,

Pekerjaan PKL, Alamat Kejuron, apa tujuan Perlawanan ?

“Menolak. Relokasi, menentang relokasi, batalkan relokasi, agar saya dan teman dapat jualan dan mencari nafkah?

Peneliti silaturahmi ke rumah nya di Jalan Candisari Patihan No 21 Madiun sekitar jam 13.00. pada saat menghitung untung rugi nya jualan hari itu, pak San bercerita banyak tentang sepi pembeli, sedikit nya pelanggan, dan tidak ada modal berdagang. Pak San, memberi jawaban tentang akibat Relokasi bagi keluarga?

“Perlawanan kelas, memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klai, misalnya: sewa pajak, gengsi,) yang dibuat oleh kelas ats misalnya, tuan tanah, petani kaya, negara berhadapan dengan kaum kalah.” (Scott: 2000:382)

Pak Darno, Pekerjaan Pedagang, Alamat Manisrejo Madiun., kota Madiun, berikut komentarnya.

Apa tujuan PKL mengadakan Pelawanan ?

“Batalkan relokasi, hentikan relokasi dan ijinan jualan di lokasi lama”

Usia 65 tahun, seorang kakek dari cucu 5 orang ditemani isteri yang setia berusia 60 tahun dengan pasrah bercerita tentang jualan nya saat ini di pasar “Kotak”. sambil makan, minum teh hangat pak Panggeh jawab pertanyaan tentang Relokasi dan akibat nya bagi teman-teman.?

“Perlawanan sebagai aksi yang menyangkut sedikit-tidaknya pengorbanan jangka pendek seseorang atau sekelompok orang, untuk mencapai tujuan janagak panjang yang menguntungkan. Kerugian-kerugian langsung akibat pemogokan, pemboikotan, atau bahkan penolakan untuk saling bersaing dengan sesama anggota kelas bawah, guna menapatkan tanah garapan.” (Scott: 2000:383)

Pendapat Langgeng, Pekerjaan Pedagang. Alamat Kanigoro, kota Madiun, pendapatnya tentang relokasi, apa tujuan utama pedagang melakukan perlawanan?

“Tolak relokasi, batalkan relokasi, gagalkan relokasi, agar dapat jualan di lokasi lama, anak, isteri dapat makan, dan sekolah.”

Dengan modal pas-pas an, kondisi modal yang sedikit, bu Nanik hanya berjualan makanan gorengan seperti, tempe, tahu, pisang goreng. Pada waktu masih di jalan Nori, rame pembeli, pelanggan, tetapi setelah di pasar “Kotak”

tidak ada pembeli kecuali hari Minggu, Senin sampai Jumat sepi, kosong blong.

Itulah komentar bu Nan sambil menjawab pertanyaan ?

“Secara pasti bukan waktu disini. Untuk berargumen “moralitas” adalah suatu wilayah otonom daripilihan dan kehendak manusia, yang timbul secara terpisah dari proses sejarah. Pandangan moralitas tersebut tidak akan pernah cukup membumi, dan arena itu sering turun mutunya jadi inersia hebat. Dan kadang-kadang kekuatan revolusioner itu yang cukup besar disimpulkan menjadi suatu fiksi idealistic yang bersifat khayalan. Sebaliknya dikatakan bahwa setiap kontradiksi adalah suatu konflik nilai disamping konflik kepentingan. Di dalam setiap “need” terdapat pengaruh atau “want” yang dalam keadaan menjadi “ought”(kepatutan) dan demikian pula sebaliknya bahwa dalam pada itu setiap perjuangan kelas adalah perjuangan nilai.” (E.P.Thomson, The Poverty of Theory dalam Scott, 2000:1)

Berikut komentar bu Nanik tentang apa yang dialami sewaktu terjadi relokasi

Pada tanggal.31/12/2015.Nama:Nan. Pekerjaan: Pedagang, Alamat:Taman/

(wawancara17/6/2016). Apa tujuan perlawanan Pedagang?

“Menolak adanya relokasi, menentang relokasi, batalkan relokasi, ijin kan saya bersama teman pedagang jualan di lokasi lama, agar anak dan keluarga dapat makan, sekolah?

“Perlawanan real; bersifat a) organik, simpatik, dan kooperatif.b) berprinsip, atau tidak memetingkan diri sendiri.(c) tidak bersekoensi revolusioner, dan atau(d) mencakup mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri, perlawanan insidental bersifat sekunder. Adalah : (a) tidak teratur, tidak simpatik dan terjadi secara individual., (b) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri., (c) tidak berkonsekuensi revolusioner, dan atau menyiratkan dalam maksud atau arti mereka, akomodasi terhadap dominasi.” Scott: 385)

BAB : VII

TAHAP-TAHAP PERLAWANAN PKL

7.1. Pendahuluan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No:14/ tahun 2012, tentang penataan, penertiban, pembinaan, dan pengawasan PKL yang meliputi antara lain : 1.penetapan kebijakan penataan PKL). 2. penetapan lokasi dan kawasan tempat usaha PKL.3. penataan PKL melalui kerja sama dengan pemerintah.4. pengembangan kemitran dengan dunia usaha dan 5. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL kedalam dokumen perencanaan daerah.

Rencana pelaksanaan perda No: 14/ tahun 2012 di kota Madiun dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas terkait yakni : Disperindagkoppar Kota. Sedang pelaksanaan pengawasan dan penertiban, penegakan hukum dilaksanakan oleh Satpol PP kota, bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI.

7.2. Tahap-tahap perlawananan PKL dalam relokasi Pedagang

Sedangkan tahap-tahap perlawanan PKL dalam kasus relokasi pedagang menurut kejadian di lapangan ada 5 tahap, hal ini selaras dengan pendapat James C. Scott antara lain :

7.2.1. Tahap pra gerakan (*premovement stage*) taitu tahap sebelum perlawanan di mulai atau tahap persiapan perlawanan yang dilakukan oleh PKL. pada tahap seluruh pedagang diberitahu oleh paguyuban PKL bahwa, semua PKL harus “boyongan” keluar dari pasar loak jalan Batanghari, jalan Barito, dan jalan Nori. Masa persiapan ini diikuti oleh semua PKL dengan tujuan menyamakan visi, misi, gerakan yang akan dipilih untuk menjawab aksi pemerintah yaitu relokasi.

7.2.2. Tahap membangun kesadaran (*awekening Stage*)

Tahap pemahaman oleh PKL tentang maksud dan tujuan diadakannya perlawanan, ketua paguyuban memberikan materi dan memberi orasi tentang aksi PKL melawan pemerintah kota. Setelah mengikuti sosialisasi tentang rencana aksi perlawanan PKL diharapkan ada satu kata sepakat, satu visi, misi, dan satu tujuan perlawanan oleh pedagang, sehingga pelaksanaan tidak menyimpang sesuai maksud tujuan awal yakni penolakan terhadap pemindahan PKL ke pasar “Kotak”.

7.2.3. Tahap membangun gerakan (*Building stage*)

PKL setelah paham tentang tujuan diadakan perlawanan, kemudian dibentuk panitia untuk pelaksanaan aksi perlawanan, yang diorganisir oleh paguyuban PKL pasar Loak Madiun. Dengan dibentuk penanggung jawab, aksi perlawanan maka secara organisatoris satu komando ada pada ketua paguyuban dan seksi orator gerakan di lapangan, seluruh anggota harus mengikuti dan bertanggung terhadap aksi perlawanan menolak relokasi.

7.2.4. Tahap mempengaruhi kelompok sasaran (*Influency stage*)

Ketua paguyuban mengajak seluruh PKL sukseskan aksi perlawanan menolak relokasi dengan orasi nya, himbauannya, sosialisasi kepada PKL dan keluarganya. Masing-masing komandan lapangan didekati oleh ketua pengurus paguyuban untuk sukseskan gerakan aksi perlawanan khusus pada tanggal 31 Desember 2018

7.2.5. Out come / Hasil perlawanan.

Out come, adalah hasil keluaran yang diharapkan dengan adanya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh pedagang. Semua pekerjaan harus ada hasilnya

demikian pula dengan aksi perlawanan PKL, target mengadakan perlawanan yaitu agar pemerintah membatalkan rencana “boyongan PKL” ke tempat baru yakni pasar “Loak Kotak”. Hal tersebut, selaras dengan tahap-tahap perlawanan oleh James Scott dalam bukunya berjudul, “perlawanan orang-orang kalah”.



BAB : VIII

TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN RELOKASI PKL

8.1. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi relokasi PKL

Tahap –tahap dalam penataan dalam Relokasi PKL oleh satpol PP.

Pemerintah kota, prosedur pelaksanaannya meliputi antara lain :

Tahap penataan dalam Relokasi PKL ke pasar “Kotak”

8.1.1. Pembinaan secara lisan.

Pembinaan secara lisan merupakan langkah awal dalam penataan, penertiban, pembinaan pedagang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang peraturan daerah (Perda) tentang No:14 tahun 2012 yang mengatur tentang penataan, pembinaan, pengawasan, penertiban pedagang, sebagaimana hasil wawancara dengan Komandan satpol PP kota Madiun yakni Bambang Subanto:

“Dalam penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan Pedagang, kami selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan dengan para pedagang, baik secara individu maupun paguyuban dengan tujuan jelaskan apa saja yang larangan-larangan dalam berjualan, dan selalu mengingatkan kerapian, ketertiban, keamanan barang dagangannya dan menjaga kebersihan. Anggoa kadang berkeliling menggunakan mobil dengan menggunakan microphone, HT, hand phone untuk tidak jualan di trotoar, bahu jalan, kecuali tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jam operasional pedagang yang telah diatur dalam perda. (wawancara 10 Juni 2016)

Metode pendekatan yang kami lakukan adalah dengan cara persuasive dan edukatif toh mereka, para pedagang juga warga Kota Madiun, mengingat masyarakat lapisan bawah dengan pendidikan rendah dan sosial ekonomi lemah.

Dalam hal khusus, waktu senggang petugas mengadakan pembinaan dari lapak ke lapak (*door to door*), dimana petugas memberikan informasi tentang peraturan yang ada sesuai perda. Sebab model tersebut mudah difahami dan cepat dimengerti oleh pedagang. Seperti yang dialami Sarwo satpam penjaga parkir pasar “Kotak”.

“Petugas satpol hampir setiap hari berkeliling lapak-lapak untuk memberikan rasa aman, jaga ketertiban, kebersihan, untuk jangan buang sampah sembarangan, jangan jualan di trotoar, ta’at peraturan, jaga barang” (wawancara 15 Juli 2016)

Pembinaan pedagang juga disampaikan melalui sarana kultum sholat dhuhur, sebab ini lokasi pasar loak ada musholla kecil sekedar untuk sholat dan berdo’a, inilah wawancara dengan KH. M ufro’il Aida, di sela lapak burung nya kosong pembeli :

“Keamanan terjamin mas, satpol PP, petugas pasar, berkeliling menjaga pasar, dan mengingatkan ikuti aturan yang elah ada, ojomelanggar tata tertib, jaga barang dagangan, banyak copet, ojosholat e jaga kebersihan, ketertiban, patuhi jam jualan”

Katz dan Khan (1978) dalam buku *The sosial Psycology of Organization* mengatakan bahwa :

“Organisasi bukanlah badan yang trpencil sendiri, Organisasi hidup berdampingan dengan banyak lembaga, kelompok, tradisi lain dalam masyarakat. Sesungguhnya organisasi merupakan bagian dari suatu system yang sangat luas yang mencakup sesuatu ciri masyarakat yang mempengaruhinya. System inilah yang lingkungan suatu organisasi. Analisa keorganisasian makin menekankan pengaruh lingkungan terhadap cara-cara organisasi menjalankan fungsinya dan terhadap jens-jenis kebijakan yang berkembang. (Katz dan Khan, 1978).

Dalam konteks ini seyogjanya satpol PP, bertindak penuh dengan kearifan edukatif, kepak an, persuasive, tanpa kelihatan arogan, koersif dan sopan

santun, dan rasa kekeluargaan yang tinggi penuh tanggung jawab. Jangan bertindak represif terhadap PKL, agar tidak melahirkan perlawanan, baik terbuka maupun terselubung, tetapi informasi dari salah seorang pedagang yaitu Dono, asal Trenggalek yang mengadu nasib di pasar “Kotak” berjualan barang bekas alat pompa tentang perilaku satpol PP :

“Baik, pembinaan, pengawasan, dari aparat satpol PP, mereka sangat sopan tidak sombong sangat kekeluargaan, dalam mengingatkan penuh dengan edukatif, etis, sangat persuasive. Jangan lah melanggar aturan bapak karena demi kebaikan seluruh pedagang kaki lima/ PKL. Yaa kita sebagai warga harus ta’at hokum, toh semua untuk kepentingan para pedagang, jika ada masalah laporkan, komunikasikan, diskusikan dengan petugas baik keamanan maupun petugas pasar” (wawancara Minggu , 30 Juli 2016)

Lebih lanjut petugas satpol Anton, berpesan kepada pak Dono :

“Kebijakan Relokasi dari pasar loak lama di jalan Batanghari, Jalan Barito dan Jalan Nori, sudah suatu keharusan, karena tempat tersebut jauh dari patut, memenuhi syarat jualan disamping lokasi nya illegal karena menempati trotoar, emperan warga, serta kumuh, kotor, semrawut. Maka syukurilah di lokasi pasar “Kotak” meskipun saat ini masih sepi, belum banayak pembeli suatu hari pasti ramai, sebab lokasi strategis dekat Sun City, pasar Burung dan pasar loak besi “Jaya”. Yakinlah bahwa niat pemkot Madiun baik, demi masa depan Pedagang Kaki Lima/ PKL, Toh semua gratisan lokasinya, tanpa bayar, hanya tinggal menempati, tidak dikejar-kejar lagi petugas.”

8.2. Penerbitan surat peringatan.

Dalam pelaksanaan penataan, penertiban, penindakan PKL terasa sulit untuk memberikan informasi tentang pengumuman pada suatu kasus, contoh masalah ketertiban jam jualan masalah kebersihan lapak, dan masalah iuran listrik menjaga keamanan lingkungan. Yang lebih sulit memberikan pemahaman tentang status kepemilikan lapak, sewa, gratis, Cuma-Cuma, boleh tidak dipindah tangan atau dijual. Bila sudah demikian sulitnya diberi pengarahan maka langkah selanjutnya yakni surat peringatan, agar pedagang memberikan perhatian serius, bila masih mbandel dilaporkan ke Ketua paguyuban dan Disperindagkoppar.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota satpol PP Wawan :

“ Tujuan kami teman satpol PP kota Madiun mengadakan patroli terus menerus, adalah menjamin bahwa peraturan yang tertuang dalam perda dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik oleh Pedagang Kaki Lima penghuni pasar “Kotak”, Bila terjadi pelanggaran akan ditindak dengan aturan hukum yang berlaku. Tugas satpol PP Pemkot Madiun adalah menjaga, mengawal perda No 12/ tahun 2012.”(wawancara: 10 Juli 2016).

Dalam kasus relokasi PKL ke pasar “Kotak”, satpol PP. Kota Madiun secara persuasive kepada pengurus paguyuban pedagang secara organisasi maupun kepada para pedagang, toh anggota nya tidak banyak kira hanya 100 pedagang. Selain menyampaikan secara formal dengan surat resmi dari satpol PP.pemkot Madiun, Disperindag dan satpol PP memberikan informasi kepada pedagang melalui surat elektronik ke pedagang, dan melalui pendekatan sosiologis melalui sowan, silaturahmi ke pedagang kaki lima dan pengurus paguyuban.

Melalui cara dengan pendekatan kekeluargaan ternyata lebih berhasil karena model tersebut lebih manusiawi, kekeluargaan, lebih akrab, lebih dapat diterima oleh para pedagang. Sehingga tidak perlu surat peringatan yang kadangkala menakutkan tetapi dengan pemberitahuan melalui forum silaturahmi, pengajian, kumpul-kumpul pedagang/arisan ternyata lebih familiar.

Berikut komentar, salah seorang satpol PP. Kota Madiun Yoga berkaitan dengan informasi Relokasi pedagang yang dikeluarkan Pemkot:

“Seluruh pedagang sudah menerima informasi tentang adanya program relokasi sejak awal kira bulan Juni 2015, bahwa Pemkot Madiun akan adakan pemindahan lokasi jualan Pedagang Kaki Lima/ PKL dari jalan Batanghari, jalan : Nori, Jalan: Barito pada akhir tahun 2015, dan agar diharapkan seluruh pedagang memahami kebijakan tersebut, sedang secara surat nya akan menyusul. Sehingga tidak benar jika sosialisasi nya mendadak, Satpol PP. sebagai penegak perda akan konsekuen untuk melaksanakan rencana Relokasi. (wawancara : 15 Juni 2015)

8.3. Proses Relokasi

Pemerintah kota Madiun mempunyai program menata, menertibkan, membina PKL, untuk keperluan tersebut Pemkot mengintegrasikan pedagang sektor informal menjadi satu, yakni di pasar “KotaK” Pedagang sektor informal yang berkeliaran, bertebaran, di seluruh jalan protokol kota Madiun dikumpulkan menjadi satu, agar pembinaan, pengawasan, penertiban mudah dan tidak bertele-tele. Program relokasi yang digagas pemerintah Kota Madiun harus dilaksanakan, demi harkat dan martabat pedagang, selama ini mereka berjubel, jualan ditrotoar jalan, bercampur aduk dengan penduduk dan mengganggu pengguna jalan.

Program relokasi sejak awal bulan Januari 2016 telah disampaikan kepada PKL bahwa akan diadakan relokasi pedagang yang berjualan di Jalan

Batanghari, Jalan Nori, dan Jalan Barito. Informasi tersebut diberikan kepada peguyuban PKL, pedagang secara perorangan, Kepolisian, dan Kodim/ TNI. Disamping itu relokasi diperkuat dengan SK, Walikota Madiun sebagai pelaksanaan perda No 14/ tahun 2012, karena sifatnya wajib seluruh pedagang yang berjualan, berdagang, mempunyai lapak di tempat tersebut harus pindah. Jika ada yang menolak, menentang maka satpol PP kota akan mengadakan pendekatan secara persuasive.

Langkah satpol PP sebagai aparat penjaga perda, para pedagang diberitahu jika akan ada relokasi, kemudian diadakan lobby kepada pedagang, paguyuban pedagang, baik lewat Disperindag, satpol PP Kota. Meskipun ada yang menolak relokasi, tetapi satpol PP, tetap adakan relokasi, meskipun ada perlawanan dari pemilik lapak-lapak. Mereka mengadakan perlawanan karena takut tidak adapat mencari nafkah jika harus relokasi ke tempat baru, apalagi pedagang belum mengetahui lokasi baru tersebut. Berikut ini komentar mbak Puji PKL yang mengalami relokasi ke pasar “Kotak”.

“ Dos pundi mas dodolane kon ngaleh, soko pasar Loak Jalan Nori, Jalan Batanghari dan Jalan Barito, mangan opo yoo sesuk, duit, oro duwe, dodolan sepi, bakulane dipindah adooh. Wong wis suwi lho dodolan neng kene ano 25 tahun keluarga bakulane, turun temurn, soko bapak, ibu, mbah ku. Ojo gelem pindah neng pasar “Kotak” panggone sepi, sing tuku ora ono, pokok e ojo gelem.” (wawancara Hari Sabtu 18 Juni 2016)

(Bagaimana mas jualannya harus pindah dari pasar Loak Jalan Batanghari, jalan Nori, Jalan Barito, makan apa untuk besok, uang tidak punya, jualan tidak ramie, jualan dimohon pindah, jauh. Sudah lama jualan kira 25 tahun keluar jualan secara turun temurun dari bapak, ibu mbah.. Jangan mau jika suruh pindah ke pasar “Kotaklokasi nya sepi,pembeli tidak ada, pokok nya jangan mau”)

Selain itu ada jawaban dari satpol PP pak Kadiman tentang Relokasi?

“Sebagai instansi pengawal Perda, kami bersama teman-teman aparat akan menjaga proses, persiapan, kamtibmas pasca operasi Relokasipedagang ke pasar “Kotak”, hal tersebut demi kebaikan kota”. (wawancara : Hari/ tanggal, Sabtu 30 Desember 2016).

Johannes, salah seorang korban relokasi berasal dari Jalan Nori, memberikan pendapatnya tentang relokasi ?

“Waah repot mas, yen kon boyongan dodolane neng pasar “Kotak” ahhlokasi ne adooh, panggone semrawut, kotor, kumuh, blsss ora strategispelanggan ora ngerti pasar “Kotak”, wis bakal ora mangan iki, klamben ora sekolah anak-anak e,”(wawancara Minggu, 20 Juni 2016)

(Waah repot, kalau disuruh pindah jualan ke pasar “Kotak”,Ahh tempat nya jauh, lokasi semrawut, tidak bersih, kumuh, tidak strategis,komsumen tidak tahu, akan terjadi tidak maka, tidakdapat beli baju, anak-anak tidak sekolah)

8.4. Jadwal pelaksanaan Relokasi

Pelaksanaan relokasi pedagang dilaksanakan pada akhir tahun 2015 sebagai perwujudan tahun baru 2016 dengan lokasi jualan pedagang yang baru, semangat baru, menata masa depan di tempat baru. Tahap-tahap relokasi ke pasar “Kotak” sebagai berikut :

Untuk proses relokasi ada masa sosialisasi selama 1 tahun dimulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 kepada Pedagang Kaki Lima. Pada saat sosialisai disampaikan informasi tentang tujuan dan maksud diselenggarakan Relokasi. PKL diberi waktu selama 1 tahun untuk memahami, berfikir, mengetahui mengapa, dilaksanakan relokasi.

8.5. Tahap Reaksi pedagang terhadap informasi Relokasi

Untuk mengetahui jawaban, tanggapan, isi hati pedagang tentang makna, tujuan, harapan Relokasi pedagang kaki lima dipersilakan memutuskan dengan teman-teman sesama pedagang kaki lima dan paguyuban PKL. Setelah semua pedagang sepakat relokasi kemudian diputuskan menerima atau menolak relokasi yang diwakili oleh paguyuban PKL. Ini komentar dari mbah Darmi, penjual Soto di pasar “Kotak” ;

“ Wis enak-enak, dodolan neng Jalan Batanghari, kong ngaleh nengpasar “manuk” panggone sepi, adooh soko Alun-alun Kota, lokasisempit luas e kira namung 2x3 meter podo nggone mayit, pokok e wisora siip deh. Urung pembeline ora ono wong lokasi ne wae ora ngerti opo maneh arep tuku, wis bakal “poso” sak anak bojo pak.Yoo muga2.Panggonan sing anyar besok bakal rame, sing tuku akeh, rizki ne ngaliranak bojo iso mangan, klamben, yen udan ora panas lan basah, muga2.”
(wawancara Minggu 30 Desember 2017)

“Sudah baik-baik, jualan di Jalan Batanghari, disuruh pergi k pasar “Burung” lokasi tidak ramai, jauh dari Alun-alun Kota, lokasi nya kecil. Sempit luas nya kira 2x3 meter, seperti tempatnya mayit. Yang jelas tdkstrategis deeh. Belum pembeli nya tidak ada, lokasinya saja tidak tahuapalagi akan membeli. Yaa jadi “puasa” anak, isteri, pak. Semoga lokasi yang baru jadi ramai, yang membeli banyak, rizki melimpah, anak isteri dapat makan, memakai baju, bila hujan tidak panas dan basah, semoga”

Berikut pendapat dari PKL, seorang tukang jam dan jualan, arloji di lokasi lama Jalan Batanghari:

“Repot pemerintah iku, kok ora ngesakne wong cilik koyo aku lan bolo nandure dodolan neng kene puluhan tahun, langganan wis akeh, nggone kepenak/ strategis, kon ngaleh piye pemkot iku, mentolo banget, terus e mangan opo, yoo muga ora sido boyongan, repot, repot yen kudu lungo Muga 2 pemkot weneh I sangu, mosok mentolo DAU akeh duit diumba Kanggo mbangun bangunan, rakyat e, kleleran ora iso mangan, ngombe Yooo bangetan, kok mentolo karo rakyat (wawancara 25 / 12/ 2015).

(Bagaimana Pemkot Madiun itu, tidak kasihan kepada rakyat kecil, spt saya dan teman-teman pedagang, sudah lama jualan puluhan tahun disin Langganan banayak, lokasi strategis. Tetapi disuruh relokasi, bagaiman Pemkot Madiun, sulit kalau disuruh pergi. Semoga Pemkot member uan pesangon, Uangnya banyak, hanya untuk membangun bangunan, rakyat lapar tidak dapat makan, minum yaa keterlaluhan dengan rakyat nya.”)

“Jika orang kaya mengira bahwa penduduk miskinlah yang pada umum nya harus dipersalahkan yang menjadi penyebab timbulnya masalah tenaga kerja, maka penduduk miskin berfikir bahwa penduduk kaya lah yang harusnya dipersalahkan yang menjadi penyebab timbulnya metode mekanisasi” (Scott 1993:225).

“Orang miskin tidak dapat (mengeluh). Jika saya mengalami sakit atau memerlukan pekerjaan, saya mungkin harus meminta kepadanya lagi. Saya marah dalam hati.” (Scott: 1993:255)

8.6. Tahap Eksekusi Relokasi.

Pelaksanaan relokasi pedagang di selenggarakan pada 31 Desember 2015, di lokasi yakni, Jalan Batanghari, Jalan Barito, Jalan Nori, menuju ke pasar “Kotak” jam 00.00 sampai selesai. Pada waktu pelaksanaan relokasi, di pimpin oleh Kepala Disperindagkoppar kota Madiun, dengan satpol PP, sebagai pelaksana eksekusi dibantu oleh Kepolisian dan TNI. Dengan truck angkut milik Satpol PP dan DPU Kota, barang dibawa 4 kendaraan, dengan dikawal polisi dan TNI. Jerit tangis meledak saat barang, lapak-lapak dinaikkan ke truck karena usaha-usaha nya untuk mencari nafkah di lokasi lama berakhir. Padahal sudah puluhan tahun pedagang kaki lima berjual, berdagang di lokasi tersebut. Akhirnya muncullah perlawanan pedagang kaki lima pada waktu relokasi, baik perlawan terbuka, perlawanan tertutup dan perlawan campuran/ semi.

Dibawah ini pendapat ketua paguyuban PKL pak Kayeen tentang relokasi pada saat eksekusi :

“Yoo piye eneh arep opo awak e dewe, ora duwe kuasa opo-opo koksing duwe wewenang lan kuasa yaa Pemkot Madiun, kita mungsak dermonglakoni, wong awake dewe iku nunut Pemkot, manggonilokasi dodolan ora bayar namung ngawulo, yooo nasib-nasib, wis orausah nangisi, nesu-nesu, adu fisik, adu otot, ditampo wae konco-konco“
(wawancara : 31-12-2017)

(Bagaimana lagi akan apa kita, sebab kita tidak mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekuasaan Pemkot Madiun, kita hanya melaksanakan, sebab kita ikut Pemkot nempati lokasi tanpa bayar, yaa nasib-nasib, tidak perlu menangis, marah-marah, ngontok-gontokan adu fisik”)

Lebih lanjut, ini komentar dari seorang PKL yang menjabat wakil ketua paguyuban yakni Nur Maksun inilah pendapatnya pada waktu eksekusi :

“Pripun maleh pak, kita Derek Pemkot Madiun dos pundi sae nipun, kita orang alit mboten nggadah menopo-nopo naming rogo lan nyowo, lintunipun mboten kagungan, bondo, barang dodolan, arto kosong. Mlamilokita Derek mawon sing penting taksehi di perhatosaken Pemkot kanti panggenan kangge dodolan, sing penting saged kangge pados nedo lanngombe, klamben, omah kanggo iyup-iyup anak, bojo, putu.”
(wawancara: 31/ 12/ 2015)

“Bagaimana lagi pak, kita mengikuti Pemkot Madiun saja bagaimana baiknya, kita rakyat kecil tidak mempunyai apa-apa hanya punya badandan nyawa tidak mempunyai harta, barang, uang kosong, Maka dari itu kita mengikuti , yang penting masih dapat untuk mencari makan dan minum, berpakaian, rumah untuk berteduh.”

Pernyataan diatas merupakan ungkapan pimpinan paguyuban PKL atas terjadinya proses eksekusi pada tanggal 31 Desember 2015, dimana seluruh pedagang kaki lima dan pengurus paguyuban pedagang kaki lima tidak mampu

menentang, menolak, meskipun jerit, tangis anak, isteri, menghiasi proses eksekusi. Pedagang merasa khawatir lokasi baru tidak rame, sepi pembeli, jauh dari pusat kota, yaa mereka tidak dapat jualan, sehingga tidak dapat makan, minum, biaya sekolah anak-anak karena jualan tidak ada pembeli. Hal-hal tersebut yang menimbulkan perlawanan terselubung pedagang karena tidak dapat mencari nafkah dengan normal, pulang tidak membawa uang. Apalagi Pemkot Madiun jelas bersikap tidak memberikan uang pesangon sedikitpun juga, meskipun untuk modal di tempat baru. Sebagaimana pendapat James Scott sbb:

“Saya percaya bahwa semua revolusi yang kita lihat di bumi ini sudah ditakdirkan dari atas. Revolusi berikutnya sudah ditulis. Sejak zaman Zapata, telah banyak mencoba, tetapi tidak terjadi apa-apa. Semua nya hancur karena tuhan belum memberikan sabdanya. Kemudian tiba-tiba kita akan melihat revolusi kaum miskin melawan kaum kaya di Meksiko . Tidak sekarang, menurut saya, tetapi akan tiba saatnya. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang akan menjadi pemimpin, tapi harus ada seseorang.” (1993:142)

8.7. Tahap pasca Relokasi.

Mulai 1 Januari 2016, seluruh PKL sudah berkumpul di pasar “Kotak” berjumlah sekitar 100 pedagang. Dengan kondisi yang masih amburadul, semrawut lapak-lapak dibangun, dipetak-petak berukuran 2 x 3 meter, oleh paguyuban PKL yang dipimpin oleh Kayeen dan Nur Maksum, sebagai ketua dan wakil ketua.

Dengan kemampuan sosial ekonomi pedagang hasil relokasi, lapak-lapak pedagang masih kelihatan kosong mlompong tanpa isi barang dagangannya hanya barang kuno yang ada mengisi ruang mereka. Untuk mengisi lapaknya perlu isi

barang baru dengan modal tidak sedikit, apalagi pedagang tidak diberi pesangon oleh Pemkot Madiun.

Berikut ini hasil wawancara pedagang yang telah “boyongan” ke tempat baru ibu Ambar.(wawancara:Minggu,23Maret 2016) sebagai berikut :

“Rekoso-rekoso mas neng panggonan anyar, nggone sepi lapak-lapak amburadul, manyare urung dadi lapak resmi, isih noto dewe. Pemkot naming nyediake panggonan tok, kon dandani dewe-dewe, waah dodol wae urung mlaku wis kudu ndadani lapak-lapak sing dadi lapak, bakal panggoane, susah-susah, ngimpi opo awak e.”
(sengsara-sengsera mas, di tempat baru, lokasi nya masih sepi amburadul, semrawut, ternyata belum jadi masih kaplingan-kaplinga lapak 2x3 meter.Pemkot hanya menyediakan lahannya, tetapi disuruh memperbaiki sendiri. Jualan belum tetapi disuruh memperbaiki sendiri.”(wawancara:20 Juli 2016).

PKL hasil relokasi kebanyakan berekonomi lemah, modal tidak punya, hanya tekad, niat serta semangat dari pada tidak kerja saja maka sewaktu dipindah ke pasar “Kotak” langsung protes pedagang tersebut. Sudah modal kecil, omset rendah, tidak mempunyai modal, disuruh membiayai sendiri renovasi dan perbiakan yang ada di lapak-lapak baru di pasar “Kotak”. berikut komentar dan keluhan salah satu pedagang bu Mamik, pedagang Rawon/ Pecel.

“Kasihannya saya mas, sudah lokasi jualan di relokasi, modal tidak ada, tempat jualan baru masih sepi pembeli. Konsumen belum mengetahui jika pasar Loak di Jalan Batanghari di pindah, bantuan pemerintah Kota tidak ada, masih disuruh memperbaiki lapak-lapak lokasi jualan, yach nasib pemerintah kota kok mentolo, sebenarnya Pemkot Madiun memberi bantuan ke pedagang yang di relokasi. Khan banyak pos-pos yang dapat diprogramkan kepada pedagang. Kasihan mereka, sudah lokasi baru, masih sepi, modal tidak punya bantuan pemerintah tidak ada.” (wawancara: tanggal 15-Mei 2016)

Sebagaimana tanggapan Alvan Everitt dalam “Moral Ekonomi Petani”

James C.Scott tentang satu prinsip moral yang dihimbau kaum miskin :

“Oleh karena manusia menduduki tempat atau peringkat yang sudah ditentukan oleh negara, maka setiap orang mempunyai hak untuk menuntut agar negara menyediakan sumber-sumber nafkah baginya transaksi-transaksi atau kontrak-kontrak yang berlawanan dengan haknya atas subsistensi, dalam keadaan yang bagaimanapun, adalah tidak adil dan tidak sah. Bagi kebanyakan orang, himbauan paling akhir adalah kepada kewajiban sosial, sebagai kontras dari kewajiban ekonomi.” (Scott: 1994).

Secara rutin diselenggarakan pembinaan kepada PKL dengan berkoordinasi dengan Paguyuban PKL melalui berbagai forum silaturahmi, arisan, pengajian, dan pembinaan langsung dari Disperindag Kota Madiun melalui Tim Pembinaan penataan dan pemberdayaan PKL seperti terlihat dalam diagram:

DISPERINDAG → Koordinasi → SATPOL PP, KEPOLISIAN, TNI →

Paguyuban PKL → Penertiban PKL → Penataan PKL → Smart City

(Sumber : Satpol PP Kota Madiun 2015)

SUSUNAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

KOTA MADIUN

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Madiun

Sekretaris merangkap angouta : Satuan Satpol PP.

Anggota : Kepala SKPD Satuan Polisi PP.

Disperidangkoppar, Dispenda kota,

Dinas Koperasi dan UMKM kota,

Pelaku usaha, Depnaker, Asosiasi,

Kepolisian/ TNI.

(Sumber: Pemkot Madiun tahun 2015)

8.8. Profil PKL yang berhasil

Banyak profil PKL yang telah berhasil, dan memiliki depot besar di Kota Madiun, seperti warung mbah Wir, mbak so wong Solo, warung pecel Pojok, serta warung pecel mbok Mbroat di pasar Besi Jaya. Tetapi PKL yang relokasi ke pasar “Kotak” dari Jalan Batanghari, Jalan Nori, Jalan Barito, belum ada yang berhasil seperti di tempat lain. Yang menonjol belum nongol karena seluruh pedagang yang relokasi bermodal kecil, berekonomi lemah. Maka belum ada profil pedagang kaki lima yang ditampilkan patut ditonjolkan, karena masih belum ada yang berhasil.

Berikut contoh, pedagang yang sukses yaitu Bu Eny.

“ Aku wis suwe, dodolan rawon lan nasi pecel neng jalan Barito, kira-kira 25 tahun warisan mbok ku, dadi yen saiki bakulan laris yoo wajar sebabe sing tuku wis apal karo warung ipun mbok kula sing jenenge Nasi Rawon lan Nasi pecel mbak Eny, dadi yen aku ben dino sing tuku antri-antri lumrah lah, nandure bakulan wis suwe. (wawancara Minggu, 21 Juli 2016).

(Sudah lama, saya jualan nasi rawon dan nasi Pecel di Jalan Barito, kira-kira, 25 tahun yang lalu warisan ibuku, jadi sekarang jualan banyakk laku yaa wajar, sebab pmebeli sudah hafal dengan warung ibu ku, yang namanya nasi rawon dan nasi pecel mbak Enya. Jadi kalau setiap hari yang membeli sampai antri-antri yaawajar menanamnya sudah lama).

Berapa banyak cabang lokasi jualan yang ibu Eny miliki selain yang ada di Jalan Barito ini, mbak sebagai wujud keberhasilan ibu?

“waah tidak banyak mas, hanya 5 cabang semuanya di Madiun, di kota Madiun 3 cabang di kabupaten Madiun 2 cabang di Mejayan dan di Caruban. Yang penting rizki lumintu dan dapat untung serta dapat membayar pembantu, dan membelikan baju, membayar sekolah anak-anak serta,jualannya tetap laris manis diberi kesehatan, umur oleh Allah SWT ” (wawancara: tanggal 12 Juli 2016).

Dalam kegiatan relokasi di pasar “Kotak” pada tanggal 31 Desember 2016, ada 3 (tiga) tahap dan bentuk perlawanan PKL yakni, pada masa pra relokasi, masa relokasi, dan masa purna relokasi. Aksi PKL tersebut sebagai jawaban dan respon kebijakan pemerintah Kota Madiun, peneliti mengamati, mendokumentasi peristiwa tersebut. Adakah hubungan nya dengan teori perlawanan James C. Scott aksi-aksi tersebut, peneliti analisis sebagai berikut :

PKL mengadakan unjuk rasa, demonstrasi, protes program Relokasi, dengan memasang spanduk, coret-coret, pemogokan, pemboikotan, plester mulut menjelang eksekusi pelaksanaan relokasi lapak, bangunan, dagangan milik PKL. Pada titik kulminasi saat alat-alat berat milik Pemkot beraksi terjadi saling gontok-gontok an, adu otot, adu fisik, tetapi tanpa membuat cedera, terluka satu dengan lainnya.

Perlahan tetapi pasti, seluruh lapak-lapak pedagang, barang dagangan diangkut ke truk-truk satpol PP., truck Dinas Kebersihan dan Pertamanan, truck Dinas Pasar. Persitiwa tersebut berlangsung sekitar 10 jam mulai jam 01.00 wib sampai jam 10.00 Wib dengan aparat Polisi, TNI, mengawasi dari kejauhan. Pedagang akhirnya menyerah melawan aparat satpol PP. tanpa dapat berbuat banyak, karena pedagang tidak mempunyai kekuatan baik peralatan maupun legalitas hukum.

Hal tersebut merupakan perlawanan terbuka sesuai menurut teori Scott. (Scott: 1993 : 23).

“Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macamada kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Misalkan antara buruh dan majikan karena satu menginginkan upah kerja yang rendah, sedang buruh menginginkan sebaliknya(soekanto, 2005:99)

Perlawanan terang-terangan tersebut merupakan aksi pedagang sebagai ungkapan marah terhadap suatu masalah yakni adanya relokasi. Dalam kasus relokasi pedagang dari Jalan : Batanghari, jalan Nori, jalan Barito kawasan pusat kota antara pemerintah Kota dengan PKL yang tergabung dalam “Paguyuban Pedagang Kaki Lima” Pemerintah bermaksud untuk menata pedagang kaki lima disuatu tempat yakni Pasar Kotak, sedangkan pedagang menolak relokasi karena tempat baru jauh dari pusat kota, konsumen sepi, perlu waktu untuk menyakinkan pelanggan seperti lokasi lama, sehingga perlawanan terbuka terjadi.

Perlawanan PKL dengan aksinya unjuk rasa, demonstrasi, adu fisik, adu otot, rampas lapak, merusak taman, tanaman merupakan ekspresi pedagang dalam merespon kebijakan relokasi PKL ke pasar “Kotak” oleh Pemkot Madiun. Setelah proses observasi, *indepth interview* serta mempelajari dokumentasi yang ada baik di Disperindagkopar kota Madiun, paguyuban PKL sub pengurus pasar ‘Kotak’ disimpulkan sebagai berikut : Relokasi PKL dari pusat kota (Jalan Batanghari, Jalan Nori Jalan Barito) ke pasar “Kotak” bertujuan proram penataan, penempatan pedagang, secara terpadu/integral dalam rangka menciptakan keindahan, kenyamanan, sejuk ketertiban, ciptakan Kota sehat. Program Relokasi tersebut bagi PKL, membuat kecewa, sakit hati, marah, sulit jualan, perjuangan hidup, karena lokasi jauh dari pusat kota, lokasi masih sepi, konsumen lama

hilang. Lahirlah perlawanan pedagang yang disebabkan relokasi di tempat baru, hal tersebut disebabkan pedagang takut jualan tidak laku, tidak dapat uang.

Sedangkan perlawanan dalam kasus relokasi PKL melakukan perlawanan terbuka terhadap kebijakan pemerintah Kota Madiun yakni Relokasi, sedangkan pemerintah melakukan tindakan persuasive. PKL memberikan respon dengan melakukan perlawanan yang bersifat perlawanan terbuka, pada proses relokasi pedagang pada tanggal 31 Desember 2015, hal ini sesuai dengan teori perlawanan terbuka James C Scott. Program Relokasi oleh pemerintah kota Madiun merupakan langkah legal secara hukum dalam melaksanakan program penataan yang diamanatkan oleh Perda. Sedangkan reaksi PKL bermacam-macam selaras ungkapan isi hati mereka yaa masih emosi.

Konflik yang berawal dari perbedaan pandangan ini rupanya berkembang menjadi sebuah persoalan, ketika merambah kepada kepentingan sepihak sesuai tujuannya. Pemerintah kota Madiun menjalankan Perda No 14/ tahun 2012 tentang, penertiban pedagang salah satunya relokasi seluruh pedagang ke pasar Kotak agar menjadi satu semua PKL dan terbentuklah “ *Informall Market Integrated*”. Sedangkan pedagang belum memahami maksud kehendak pemerintah kota Madiun tentang relokasi yang salah satunya untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perlawanan terbuka pedagang lebih merupakan bentuk manifestasi konflik dari pada sebagai sebab konflik, hal ini masalah senjata yang dipilih oleh pihak berkonflik untuk mengekspresikan diri permusuhan mereka (dalam Susan N, 2009). Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata dalam penelitian ini adalah

perlawanan sehari-hari terus menerus oleh pedagang kaki lima pada kelompok lain (pemerintah). Tindakan perlawanan terbuka tersebut didukung oleh anggota PKL yang cenderung serentak. Sedangkan ada kecenderungan perlawanan pada tahap awal relokasi bersifat terpadu pedagang karena mereka berusaha mempertahankan lapak dan barang dagangannya dan ada unsur kekerasan, atau perlawanan terbuka.

Dengan begitu perlawanan terang-terangan terjadi pada awal relokasi meliputi tindakan ada kekerasan dengan adu otot, adu fisik, rampas lapak, adu fisik. Dengan demikian perlawanan terang-terangan (James Scott, 1993:45) yaitu perlawanan menggunakan alat, adu fisik yang dilakukan pedagang menanggapi relokasi pedagang adalah dengan bersikap non kekerasan, demonstrasi, merusak, fasilitas, berkelahi secara fisik, yang tindakan fisik kepada aparat satpol PP pada saat perlawanan.

Mereka PKL melakukan unjuk rasa, adu otot, adu jotos dengan kebijakan relokasi oleh Pemkot Kota Madiun, atas desakan semua pihak pada pedagang, agar tidak menentang. Menolak rencana Pemkot relokasi PKL merugikan diri sendiri dan bunuh diri, sebab maksud dan tujuan secara makro baik yakni membuat Kota Madiun indah, tertib, bersih, sejuk, damai banyak ruang hijau terbuka disediakan, hal tersebut juga merupakan keinginan DPRD Kota Madiun untuk ciptakan Kota indah, sejuk, tertib, bersih, indah. Rupanya masukan dari berbagai tokoh mereka terima akhirnya bersedia relokasi ke pasar “Kotak” meskipun dengan perasaan berat hati, kurang puas, ngrundel.

Paguyuban PKL di kota Madiun berkembang dengan pesat, jumlah anggota yang terus bertambah, khususnya anggota paguyuban bekas pedagang jalan Barito, jalan Batanghari, jalan Nori. Melalui paguyuban inilah suara-suara pedagang disalurkan dan komunikasi dengan pihak luar pedagang didengar seperti unjuk rasa, demonstran termasuk masukan untuk menerima relokasi pedagang ke pasar “Kotak” dan tidak menentang atau menolak relokasi pedagang yang telah diprogramkan pemerintah kota Madiun. Sejak berdirinya paguyuban Pedagang di Kota Madiun, kegiatan, komunikasi, silaturahmi, permasalahan pedagang dapat diselesaikan dengan musyawarah. Aksi pedagang pada tahap awal merupakan aksi seecara terang-terangan karena lebih bersifat konfrontasi langsung dengan menggunakan fisik”.

BAB : IX

ANALISA DATA : MEMAHAMI PERLAWANAN PKL DARI SUDUT PANDANG PELAKU.

9.1. Pendahuluan.

Pada aksi awal relokasi cenderung bersifat memanas, karena emosi, marah pedagang masih memuncak, karena lokasi mata pencaharian harus ditinggal. Sedang pada hari berikutnya di adakan pembinaan dari pemerintah Kota Madiun, dilakukan oleh Disperindag Kota secara berkala, rupanya dengan tersalurkannya komunikasi pedagang sudah tidak perlu lagi mengadakan perlawanan terang-terangan, tetapi sudah dicampur dengan aksi perlawanan tersembunyi/ non fisik misalnya ngrasani, marah-marah, ngedumel, berkata kotor, aksi sosial oleh pedagang. Pelanggan, konsumen, pembeli nantinya akan mencari lapak langgananya, meskipun diperlukan waktu beberapa saat untuk mengembalikan konsumen, sekarang mereka masih mencari dimana langganan dahulu untuk mencari keperluannya.

Tanggapan pedagang dikatakan perlawanan pedagang adalah wajar, karena dengan adanya perlawanan PKL, orang akan berfikir dan berinteropeksi diri untuk pembenahan berikutnya, disamping perlawanan merupakan bentuk ekspresi isi –hati PKL ke perlawanan tersembunyi terhadap kebijakan pemerintah Kota kaitannya dengan program relokasi. Selanjutnya dikatakan sebenarnya secara institusi antara paguyuban PKL dengan pemerintah Kota/ Satpol PP tidak ada masalah, hanya beda penafsiran saja

Sedangkan di lapangan perlawanan PKL terhadap Relokasi merupakan perubahan tingkat emosional pedagang menanggapi perda No : 14/ tahun 2012 tentang Penataan PKL, merupakan fenomena baru dalam perlawanan pedagang. Disamping itu perlawanan tersebut berkaitan dengan kondisi emosional dan pemahaman nilai ajaran solidaritas paguyuban, hal tersebut ada pada perlawanan menurut teori James C.Scott. Perlawanan PKL di lapangan banyak di warnai perlawanan yakni perlawanan terang-terang dan tersembunyi. Namun dalam penelitian tentang relokasi di pasar “Kotak” di jumpai perlawanan campuran/ semi, yang pada pembagian perlawanan menurut jenis perlawanan Scott, tidak ada

Peneliti berpandangan bahwa fenomena peristiwa yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perlawanan itu selalu ada dan diwujudkan dalam perlawanan. Perlawanan campuran merupakan temuan baru/ novelty dalam penelitian ini sebagai wujud adanya reaksi sosial pedagang setelah pemerintah Kota Madiun mengeluarkan aksi nya dengan program Relokasi. Kasus “boyongan” pindahnya PKL dari Jalan Batanghari, jalan Nori, Jalan : Barito ke pasar “Kotak” dan merupakan pembelajaran sejarah sebelumnya, karena sudah melibatkan masyarakat, perlawanan tidak panas, non kekerasan karena sudah melalui proses lobby, negoisasi tokoh masyarakat dan paguyuban pedagang.

Dalam konteks ini kami mencoba mensinergikan fenomena kejadian di lapangan yang terkait dengan sebab-sebab perlawanan PKL terhadap pemerintah Kota Madiun, adalah terusiknya kondisi sosial, ekonomi baik dalam keluarga maupun masyarakat kecil yang berprofesi sebagai PKL. Karena itulah teori

perlawanan sangat cocok dalam analisis fenomena sosial yang terjadi pada perlawanan PKL dengan satpol PP Pemkot Madiun.

Terkait dengan peristiwa perlawanan yang berkepanjangan ini tentu ada tujuan yang tersirat didalamnya yaitu: Perlawanan sebagai bentuk unjuk kekuatan dan dilakukan secara kolektif. Mencermati pemahaman tersebut maka secara sosial perlawanan dimaknai sebagai ajang uji coba kemampuan para anggota yang merasa memiliki kepentingan untuk ungkapkan isi hati, perasaan ketidakpuasan pada program Relokasi pedagang ke pasar “Kotak” dengan cara non fisik dan memakai kekerasan. Karena program tersebut menyengsarakan, merugikan, secara ekonomi sosial keluarga yang selama menjadi tumpuan sosial ekonomi kehidupan keluarga menjadi hilang, pelanggan, konsumen hilang sebab tempat jualan diketahui pelanggan.

Pandangan pedagang lain, mengatakan bahwa perlawanan PKL di pasar “Kotak” selama ini sebagai bentuk penolakan relokasi oleh PKL. Mengapa demikian, karena mata pencaharian hilang, tidak dapat berdagang mencari uang, pembeli lenyap, pelanggan lenyap, tidak dapat makan, minum, anak tidak sekolah, pantaslah, pedagang melakukan perlawanan.

Pemaknaan perlawanan yang lain menurutnya pedagang sebagai bentuk keberanian orang kecil terhadap pengambilan keputusan yaitu Disperindag Kota dengan program relokasi nya. Keberanian melakukan perlawanan karena rasa solidaritas PKL yang kuat, senasib, seperjuangan, kebersamaan, visi dan misi sama dalam berdagang sebagai PKL. Disamping pemaknaan tersebut perlawanan

dimaknai sebagai unjuk diri, mencari identitas diri, sebagai unjuk rasa tidak puas, ulah oknum, balas dendam sebagai bentuk solidaritas kolektif PKL Kota Madiun.

9.2. Analisis Sebab-sebab perlawanan.

Dari beberapa sumber menyebutkan, bahwa perlawanan PKL, disebabkan oleh provokasi oleh pedagang lama yang pernah ditindak oleh satpol PP sebagai rasa balas dendam terhadap aparat karena berjualan di tempat yang melanggar perda. Namun mereka beralasan bahwa lokasi nya telah lama ditempati dan tindakan satpol PP tidak berdasar karena itulah sebagai rasa tidak puas, mereka provokasi PKL hasil relokasi untuk melawan saja terhadap kebijakan pemerintah kota, me Relokasi dari tempat yang sudah mapan yakni jalan, Batanghari, jalan, Nori, jalan Barito ke pasar “Kotak” Kota.

Wakil Ketua Paguyuban Nur Maksum, berpendapat lain lagi, bahwa Relokasi merupakan hukum alam yang harus disikapi dengan dewasa tanpa emosi, marah-marah, ngrundel, sakit hati, tidak puas, demonstrasi, unjuk rasa toh mereka masih diberi lokasi yang definitif sesuai peraturan perda No 14/ 2012, tooh mereka hanya nunut/ ngawulo lokasi jualan ke pemerintah Kota Madiun sudah dipikirkan lokasi baru yang menetap, merupakan kebaikan pemerintah, sebab selama ini sudah puluhan tahun bertempat dengan gratis di lokasi lama.

Relokasi ke pasar “Kotak” merupakan keniscayaan dan taqdir Allah SWT yang pasti terjadi dan dimaknai sebagai perjuangan hidup, sebagai *jihad fisabilillah* mencari rizki, sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi tanpa menyalahkan pihak-pihak tertentu. Yaa kita semua tidak puas, marah, protes dengan adanya relokasi ke tempat baru, tetapi apa boleh buat kita hanya orang

kecil yang tidak punya apa-apa, keculai hanya patuh dan ta'at *samiknawaathohna* kepada umara' walikota Madiun sebagai pengambil kebijakan khususnya tentang Relokasi PKL.

Saya memaknai semua ini sebagai perjuangan hidup mencari makan. Kalau ada perlawanan pedagang dimaknai sebagai ungkapan isi hati paling mendalam pada aspek kemanusiaan toh semua orang tahu, pejabat pemkot mengerti bahwa sesama manusia itu perlu pekerjaan, perlu makan, perlu minum mempunyai keluarga, perlawanan oleh pedagang seperti mangkel, marah-marah, ngrundel, rasan-rasan mendongkol, berkata-kata kotor tetapi semua masih manusiawi.

Kalau dilihat kebelakang sebab-sebab perlawanan yaa wajar apa yang telah dijalani selama puluhan tahun dan sudah menjadi jujugan masyarakat tentang barang loak an. Program relokasi tiba-tiba muncul, PKL disuruh pindah tanpa ada kompensasi apapun dan pedagang mulai jualan dari nol (0). Yaaaaa disikapi dimaknai sebagai perjuangan hidup.

PKL pindahan dari jalan Nori, dia memaknai relokasi sebagai menyengsarakan rakyat kecil, merampas hak rakyat berjualan, membiarkan rakyat kesulitan ekonomi, dan menjauhkan kesejahteraan dari rakyat karena lokasi yang sudah mapan, pelanggan banyak, untungkan pedagang disuruh pindah ke tempat jauh, sepi, belum dikenal. Sekdakot, bilang relokasi akan dibantu dan tempatnya lebih baik, omong kosong mas, selama ini pedagang dijanjikan akan dibantu oleh beliau tetapi pepesan kosong mas, sampai saat ini.

Oleh karena itulah adanya perlawanan pedagang yoo wajar dong, mas saat ini pulang tidak bawa uang untuk makan anak-isteri apalagi bayar SPP susah mohon tolong jenengan sing kenal MD mana janjinya. Itulah suara hati seorang pedagang dalam mensikapi kebijakan pemerintah Kota dalam Relokasi PKL. Selama relokasi tidak ada bantuan apapun dari pemkot, apalagi bantuan modal, pinjaman modal, *mboten wonten blass*, hanya dikumpulkan di kantor satpol PP katanya diberi Rp 50.000,- hanya diberi 25.000,- itu hanya saja mas.(sumber :Paguyuban PKL: 2016).

Lain lagi dengan pendapat bu Ronny penjual Rawon “Barito” yang terkenal bahwa relokasi ke pasar “Kotak” dimaknai sebagai “kebijakan tebang pilih”. Demikian komentar salah satu pedagang rawon di jalan Barito, sampai sekarang masih jualan dan dia tidak pindah ke pasar “Kotak” dan tidak ditindak oleh satpol PP. PKL jualan nasi kopi pindahan dari jalan Batanghari berkomentar relokasi sebagai maknai perjuangan hidup mengkail sesuap nasi, memperpanjang umur orang kecil, beralamat di jalan Budo Manis perumnas Manisrejo Kecamatan Taman Kota. Perlawanan PKL di pasar “Kotak” merupakan ungkapan sulitnya mencari uang sekedar nutup modal, karena sepi nya pembeli rame hanya hari Minggu, Sabtu lainnya. Aksi perlawanan semi selaras dengan teori perlawanan James C Scott.

Perlawanan PKL dalam proses Relokasi dari Jalan Batanghari, Jalan Nori dan Jalan Barito ada tiga tahap yakni tahap pertama perlawanan terang-terangan, tahap kedua perlawan semi atau campuran yakni dan perlawanan tersembunyi. Perlawanan tahap ke 3 (tiga) aksi yang terjadi di lokasi tempat baru yakni pasar

“Kotak”. Perlawanan yang terjadi di pasar “Kotak” terjadi sifat lama, bahkan sampai hari inipun masih berlangsung, berbentuk tersembunyi.

PKL hasil relokasi seluruhnya sudah kumpul di tempat baru pasar ‘Kotak’ yaitu berjumlah 90 pedagang dari ketiga lokasi lama. Kasus yang terjadi di lokasi baru PKL mulai aktivitas berdagang sesuai pembagian kapling lapak yang telah ditentukan oleh Disperindag Kota. Setiap pedagang dapat lapak berukuran 2 x 3 m dengan atap dari seng, sedang pembatas antar lapak berupa atau triplek tergantung pada pemiliknya. Barang dagangan berupa onderdil sepeda motor, alat elektronik, asesoris HP, HP loakan, kaca mata ditata dengan perlengkapan sederhana.

Sejak 1 Januari 2016, PKL hasil Relokasi sudah menempati tempat baru di pasar “Kotak” dengan situasi dan kondisi yang baru pula. Setiap hari mereka berjualan di lapak nya dengan pandangan mata kosong, harapan semu, saling merenung, bertanya pada teman-teman nya sudah laku apa belum. Pasar ‘Kotak’ ramainya hanya Minggu, Sabtu, sedang hari-hari lain kosong, sepi paling-paling orang jalan, refreshing mencari barang antic, barang kuno yang sudah tidak ada di toko.

Kasus dan peristiwa yang terjadi dalam obrolan pedagang antara lain : marah-marah, ngrasani pemkot, ngedumel, pura-pura ta’at, pura-pura patuh, ngomel ke pemkot, menangis, mengeluh, sambat, kecewa berat dengan ngomong ngalor-ngidul. Hal tersebut sesuai dengan teori perlawanan James C. Scott. Sedangkan aksi lain pedagang yakni membiarkan lapak, tidak segera merenovasi lapak, lapak diperjual belikan ke pedagang lain, lapak kotor, jorok, mogok bicara dengan petugas. Aksi-aksi pedagang tersebut terjadi pada seluruh pedagang hasil

Relokasi di pasar “Kotak”, mereka berbuat demikian karena tidak ada bantuan modal dari Pemkot Madiun.

9.3. Tujuan-tujuan Perlawanan PKL.

Sampai saat ini, PKL sudah hampir 2 tahun 1 bulan menempati lapak dan lokasi di pasar “Kotak”. Perubahan sosial ekonomi pedagang belum begitu nampak, begitu pula perubahan pada bentuk dan bangunan lapak. Jumlah pengunjung untuk mencari barang kuno, antik, loak an sedikit bertambah, sehingga mulai ramai. Namun demikian keluhan, ngedumel, ngomel, mengumpat, marah-marah, ngrasani kebijakan Pemkot Madiun masih saja terdengar, tetapi mereka hanya bicara tanpa tindakan kekerasan fisik. Peristiwa, kasus, yang terjadi di pasar “Kotak” pasca Relokasi menurut Teori perlawanan James C.Scott merupakan perlawanan tertutup, dimana perilaku yang ditunjukkan PKL hanya sebatas pasif, tanpa fisik.

Mencoba membangun kepercayaan pembeli di pasar “Kotak”, sebab sampai saat ini pembeli, konsumen mmasih belum mengetahui jika saya sudah pindah kesini, tidak di jalan : Batanghari lagi. Sabar, sabar dan sabar mas, yaa mulai lagi seperti 20 tahun lalu di jalan Batanghari, sehingga saya mencoba mencari pelanggan dengan berjualan sepanjang waktu berbagi waktu dengan mbok ne. Perlawanan PKL sebagai ungkapan rasa tidak puas, jengkel karena kebijakan relokasi pedagang sangat menyulitkan, merepotkan pedagang kaki lima mencari nafkah dengan berbagai alasan maupun sebab-sebab adanya perlawanan pedagang.

Belajar dari pengalaman relokasi di masa depan hendaknya persiapan sosialisasi relokasi lebih *intensif*, Bila dimungkinkan diberi subsidi sebagai bantuan awal bagi pedagang. Jang jelas tempat baru, situasi baru, kondisi baru. Pelanggan baru yang serta merta tidak seramai di tempat lama, masih perlu penyesuaian untuk mengembalikan pelanggan, konsumen dari pasar loak Batanghari, jalan Nori, jalan Barito ke pasar Loak “Kotak”.Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.

Penjual soto/ rawon berkomentar tentang relokasi di pasar “Kotak”, Dia berpendapat tentang makna yang tersirat dari kebijakan pemerintah kota tentang Relokasi sebagai perjuangan orang kecil untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air, demi memenuhi kewajiban keluarga. Perasaan mengeluh, grundle, protes dengan dipindahnya berjualan dari tempat lama jalan Batanghari ke pasar “Kotak” sebagaimana. Itulah bentuk keluhan, curhat pedagang dalam memaknai perlawanan PKL hasil Relokasi. Mereka sebagai pelaku langsung dalam jualan terkena akibat langsung dari kebijakan pemerintah daerah, seharusnya pemkot memberi bantuan yaa transportasi relokasi, pinjaman modal lunak untuk mengawali tempat baru. Yang pasti lokasi baru masih sepi pembeli, kehilangan pelanggan, konsumen yang selama di tempat lama sebagai konsumen tetap. Kasus tersebut selaras dengan teori James C Scott.

Tetapi bila tidak ada bantuan sama sekali juga tidak salah karena tempat lama bukan miliknya dan melanggar hukum yakni menempati trotoar jalan. Ambar berkomentar tidak ada bantuan pemkot, yen pilkada diuber-uber kon milih calon tertentu karo janji-janji muluk-muluk, yen aku dadi enak-enak sandang,

pangan, modal usaha, nyata ne aku digusur dodolan ku ke panggonan sepi, bohong omong kosong pak wali. Aksi pedagang selaras teori perlawanan, Scott.(Scott: 2000).

Pedagang kopi dan soto asal pedagang jalan Batanghari memaknai relokasi sebagai perjuangan hidup orang kecil untuk mencari penghidupan dengan jualan warteg bercerita awal mula menjadi pedagang kaki lima di jalan Batanghari 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya mewarisi dagangan ibu saya sebagai pemilik warung kopi, teh nasi di utara nya PGAN 6 tahun jalan Barito, karena kondisi ekonomi dan modal usaha akhirnya hanya dapat meneruskan usaha jualan ibu yaitu buka warung dan masa tersebut sangat laris dengan satu piring 2000.

Semakin hari jalan Batanghari menjadi tempat jujugan orang-orang pencari barang rongsok, bekas dan akhirnya jualan menjadi tumpuan ekonomi keluarga untuk biaya hidup sekolah dan lain-lain. Dengan kondisi saat ini apalagi di tempat hasil relokasi saya pesimis dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga apalagi pemerintah Kota lepas tangan dengan bantuan modal, minimal ganti transportasi dan renovasi lapak. Maka bila ada perlawanan pedagang dengan aksi-aksi mogok renovasi, membiarkan tempat terbengkalai, stand lapak dipindah tangankan ke pihak ketiga (dijual) apa boleh buat.

Pernyataan diatas wujud keluhan, rintihan rakyat kecil yaitu PKL yang terkena dampak relokasi ke pasar “Kotak” kota Madiun sebagai akibat pelaksanaan kebijakan program pemerintah kota Madiun. Hal tersebut untuk menciptakan kota yang indah, tertib, sehat, nyaman, sejuk, hijau demi mendapat anugerah Adipura Kencana Paripurna yang digadang-gadang oleh walikota.

Rencana yang tersiar lokasi lama di jalan Batanghari, jalan Nori akan digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Taman kota untuk memenuhi persyaratan sebagai adipura kencana semoga berhasil pak walikota, meskipun ada sebagian rakyatnya menangis tidak dapat makan, dan sekolah.

Peristiwa, perlawanan membuktikan bahwa dalam proses relokasi PKL dari pusat kota Madiun (Jalan Batanghari, jalan Nori, jalan Barito) ada penolakan warga khususnya mereka yang mencari mata pencaharian hidup sebagai pedagang sektor informal di lokasi tersebut, teori perlawanan James C Scott sangat relevan untuk mengupas masalah perlawanan PKL dengan satpol PP, Polisi. PKL merupakan sosok rakyat kecil yang secara ekonomi tidak mempunyai materi, harta, finansial permanent, yang diperoleh setiap bulan, seperti PNS, tetapi mereka perlu dibantu untuk dapat hidup demi anak dan keluarganya. Semua peristiwa di atas merupakan wujud adanya konflik dan perlawanan atau konflik sosial antara pedagang dengan satpol PP Pemkot Madiun sehingga hal tersebut selaras dengan teori perlawanan James C Scott.

Perlawanan yang terjadi antar pedagang dengan aparat satpol PP merupakan aksi sosial penolakan Relokasi, yang mempunyai 3 tahap perlawanan sebagaimana pendapat Scott sbb: Tahap-tahap perlawanan PKL dalam proses relokasi pedagang ke pasar “Kotak” ada 3 (tiga) yaitu tahap konsolidasi yakni pedagang mengadakan rapat/musyawarah membahas relokasi. 2) Tahap eksekusi sikap yakni tahap menerima atau menolak relokasi dan 3) tahap aksi respon yaitu perlawanan antara secara fisik dan non fisik seperti demonstrasi, unjuk rasa pedagang, dan protes melalui spanduk.

Perlawanan dipicu oleh dan dilakukan adanya relokasi pedagang oleh pemkot dalam rangka melaksanakan Perda No 14/ tahun 2012. Kesalahan dalam memahami isi perda tersebut yang membuat cara pandang isi perda tidak sama antara pedagang dengan pemerintah Kota Madiun, sehingga mengakibatkan terjadinya perlawanan PKL. Relokasi yang dilaksanakan pemkot Madiun sangat ditentang oleh paguyuban PKL jalan Batanghari, jalan Nori, jalan Barito, menimbulkan perlawanan tertutup. Secara teoritis peristiwa yang terjadi dalam relokasi pedagang kaki lima di pasar “Kotak” sejalan dengan kejadian lapangan seperti, perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, perlawanan campuran/ semi. Seperti adu fisik, adu otot, ngrasani, ngomel, umpat adu fisik, unjuk rasa, merusak fasilitas pemkot, marah-marahh, berksata kotor, pura-pura patuh, pura ta’at. Sakit hati, kecewa berat, boikot kerja sama, ngedumel, membiarkan lapak, membiarkan lapak terbengkalai.

9.4. Tahap-tahap Perlawanan PKL

Sedangkan tahap-tahap perlawanan pedagang di lapangan pada relokasi pedagang kaki lima tanggal 31 Desember 2015 antara lain :

Tahap pra gerakan dimana pedagang dkumpulkan di kantor paguyuban pedagang untuk bermusyawarah menentukan sikap menolak, menerima relokasi, tahap ini merupakan tahap pra gerakan perlawanan.

Tahap membangun kesadaran, bahwa seluruh pedagang memahami dan sadar bahwa relokasi benar-benar akan dilaksanakan, kemudian pedagang mengambil sikap dan respon atas adanya relokasi dengan musyawarah .

Tahap membangun gerakan yakni mengadakan perlawanan dengan awalnya mempengaruhi PKL bahwa kita pedagang perlu melawan kebijakan relokasi yang dikoordinir oleh paguyuban PKL sub.pasar “Kotak”. Untuk memberikan penekanan yang kuat kepada Pemkot supaya membatalkan relokasi, maka pedagang mempengaruhi seluruh pedagang agar ikut serta mengadakan gerakan perlawanan meskipun terselubung atau sembunyi, non kekerasan.

Sedangkan yang paling akhir yaitu mencari solusi pemecahan masalah supaya perlawanan terselubung tidak diteruskan dengan membangun kembali lapak, kerja sama dengan Pemkot Madiun boikot komunikasi di cabut serta diadakan forum silaturahmi melalui sarana pengajian atau arisan yang selama konflik berhenti sementara dicari jalan keluar penyelesaiannya. Tahap- tahap perlawanan PKL pada proses Relokasi pedagang selaras dengan tahap perlawanan teori James C Scott.

Hasil analisa data dan pengamatan di lapangan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yaitu mengapa terjadi perlawanan PKL. Perlawanan antara paguyuban pedagang dengan aparat Pemkot terjadi karena relokasi PKL. Dalam upaya mengungkap kasus mengapa terjadi perlawanan, berdasarkan informasi dan temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyebab perlawanan pedagang karena dipaksa pindah jualan. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang alasan mengapa perlawanan PKL berlangsung dan terjadi, maka perlu pembahasan melalui gambar ilustrasi tentang tujuan perlawanan PKL terhadap Pemkot Madiun sebagai berikut:

Bentuk perlawanan PKL dalam proses relokasi pedagang ke pasar “Kotak” ada 3 (tiga) yaitu perlawanan terbuka yakni perlawanan dengan menggunakan kekerasan atau secara fisik, missal dengan adu fisik. Gontok-gontokan merusak sarana prasarana satpol PP, adu jaotos. 2) Perlawanan tertutup yakni perlawanan dengan menggunakan cara non kekerasan/ non fisik seperti marah-marahm ngrundel, ngedumel, mogok bicara, non kooperasi dengan satpol dan perlawanan campuran (semi) yaitu perlawanan antara secara fisik dan non fisik seperti demonstrasi, unjuk rasa pedagang, dan protes melalui spanduk.

Dengan demikian bentuk-bentuk perlawanan PKL merupakan Perlawanan sebagai bentuk ketidakpuasan kebijakan isi Perda No 14/ tahun 2012. Sebagai pelaku ekonomi, pedagang cenderung mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu antar anggota pedagang, menjunjung tinggi harkat dan martabat paguyuban, hormat terhadap paguyuban berkepribadian luhur. Ada 3 (tiga) bentuk perlawannan PKL terhadap satpol PP pemerintah Kota Madiun yakni perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, dan perlawanan campuran antara terbuka dan tertutup atau perlawanan semi.(James C.Scott, 1993)

Dalam menganalisis perlawanan PKL dalam proses relokasi ke pasar ‘kotak’, penelitian menggunakan teori perlawanan james Scott. Dalam teori tersebut, ditemukan kesesuaian dalam melihat perlawanan terselubung pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemkot Madiun tentang Relokasi. Skema berikut menggambarkan alur piker dalam penelitian yang dilihat dari teori perlawanan.

BAB : X

SIMPULAN, IMPLIKASI TEORI, KETERBATASAN PENELITIAN DAN REKOMENDASI.

10.1. Kesimpulan

Sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini hendak menjawab masalah sebagai berikut: (1) Mengapa PKL melakukan perlawanan terhadap relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota? Dengan perkataan lain protes ketidakpuasan atau kekecewaan-kecewaan sosial seperti apa yang telah menjadi sumber dari kelahiran gerakan perlawanan PKL? (2) Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan PKL pemerintah kota, saat reaksi kegiatan relokasi yang dilakukan pemerintah kota. (3) Bagaimana tujuan terhadap pemerintah kota. (4) Apa tahap-tahap PKL melakukan perlawanan terhadap relokasi?.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dianalisa dengan model Interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini berusaha menjawab seluruh rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

10.1.1. Tujuan Perlawanan PKL.

Keberanian PKL untuk melakukan perlawanan adalah merupakan suatu proses akumulasi dari berbagai fenomena yang melatarbelakangi. Berbagai fenomena yang penyebab nya antara lain, *pertama* adanya penataan PKL yang menggunakan cara represif, bukan persuasif. Pendekatan represif yang digunakan adalah pendekatan dengan menggunakan kekerasan oleh satpol PP, polisi dan militer. *Kedua* adanya sikap ketidak pedulian pemerintah kota terhadap eksistensi PKL, proses marjinalisasai PKL, terus terjadinya. Kucuran dana segar dari

berbagai sumber kredit yang tidak pernah cair dan dinikmati oleh PKL. Oleh karena itu mereka merasa tidak pernah merasa diperhatikan oleh pemerintah kota. PKL juga merasa belum pernah rasakan adanya kebijakan yang nyata-nyata menguntungkan keberadannya. Eksistensi nya di masyarakat tidak pernah diakui oleh pemerintah kota akibat relasi antara PKL dan pemerintah kota yang tidak seimbang. *Ketiga*, saura PKL selalu terbungkam setiap adanya usulan, saran, masukan dari paguyuban, LSM yang disampaikan yang mengatur PKL dan selalu “mentok” diatas meja yang mengikut sertakan PKL, aspirasi nya tidak pernah didengar, aneh nya mereka selalau dipaksa mengikuti aturan yang mengatur dirinya (PKL). Aspirasinya tidak pernah didengar. (4) *Keempat*, adanya stigma negatif yang selama ini sengaja dibuat pemerintah kota yang terhadap keberadaan PKL. PKL dianggap biang kesemrawutan, kekumuhan, krtidak indahan, kotor, bikin kota tidak seha, tidak kesejukan, dan meningkatnya kriminalitas. Kadangkala PKL dianggap biang banjir, selokan “mapet” karena sampah dan kemacetan lalu lintas jalan raya.

Tujuan perlawanan PKL yakni agar tetap di ijinan dagang di lokasi lama serta relokasi PKL ke padar “Kotak” dibatalkan minimal ditunda. Dengan kondisi sosial ekonomi PKL saat ini, dimana mereka sulit mendapatkan modal, susah mendapatkan untung dari jualan barang loakan, “Boyongan paksa yang dilakukan oleh pemeritah kota sangat tidak manusiawi. Dengan kota yang mempunyai DAU (Dana Alokasi Umum) tinggi seharusnya pemerintah kota memberi bantuan pesangon, biar untuk modal di lokasi baru, sebab lokasi nya sepi, belum dikenal masyarakat dan jauh daripusat kota.

10.1.2. Bentuk-bentuk perlawanan.

10.1.2.1. Perlawanan Tersembunyi

Bentuk perlawanan yang disebabkan oleh PKL di kota Madiun sebagai akibat adanya ekspresi seni melawan dengan tingkat imajinasi tinggi. Hal ini dapat terlihat saat mereka terlibat bentrokan dari kejauhan jika ada penertiban, operasi “gropyok an”, mereka langsung mengemasi barang nyadengan cepat, kemudian lari terbirit-birit dan “hit and run”, seolah takut mendapat kekerasan dari petugas, setelah petugas pergi, situasi kondisi aman, mereka mengintip terus sampai satpol PP. Pergi, PKL kembali menggelar dagangannya kembali sambil melihat kanan-kiri masih adakah aparat, setelah itu mereka menggelar dagannya, Semua dikategorikan sebagai perlawanan tersembunyi.

Perlawanan tersembunyi lainnya yang diperankan PKL yakni pada saat mereka “kepepet” tidak dapat meloloskan diri dari petugas penertiban, semua cara dilakukan oleh PKL misal nya dengan “menyogok” petugas agar dagangannya tidak disita, dirampas pedagang. PKL berlagak, pura-pura menyerah, pasrah, bertekuk lutut” dihadapan petugas dengan harapan barang tidak disisita dan tindakannya di ma’afkan. Ada tindakan lain petugas agar perilakunya tidak tercium petugas yaitu mencari tempat sembunyi, yang sepi, dengan makam dengan maksud tidak ketahuan petugas. Dengan upaya ini mereka berharap petugas maklum sekaligus memberi toleransi terhadap keberadaannya

10.1.2.2. Perlawanan Terang-terangan.

Perlawanan agak terang-terang dilakukan oleh PKL dengan cara mendatangi camat untuk meminta ijin secara paksa. Kesan menggunakan metode memaksa dilakukan PKL dengan harapan, camat dapat diajak berembung, negosiasi, lobby agar diizinkan jualan, bersedia bagi hasil atas usaha PKL yang dibawah binaannya. Oleh para petugas lapangan satpol PP, umumnya mereka diberi ijin secara lesan, boleh berjualan sementara di lokasi, tetapi sewaktu-waktu harus pergi, menyingkir jika operasi penertiban datang, bila sudah selesai boleh dagang lagi. Sandiwara kesepakatan antara pedagang dengan satpol PP, diskenariokan terlebih dahulu disepakati dahulu, ada kesepakatan dengan petugas agar semua berjalan lancar, setiap ada operasi penertiban ada informasi dari petugas.

Tradisi perlawanan PKL umumnya dengan *hit and run* dikenal perlawanan tersembunyi, dapat disebut perlawanan “perlawanan gaya khas PKL” dapat dikategorikan kedalam “*everyday form of resistance*”. Meskipun perlawanan itu merupakan bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat informal sebagai reaksi rasional yang bersifat individual dan sikap represif pemerintah kota. Namun perlawanan yang berlabel “*hit and run*” tersebut merupakan perintah atasan dari paguyuban PKL dan suatu keharusan. Perlawanan tersembunyi bersifat non-violence pada dasarnya merupakan perlawanan alternatif yang dilakukan oleh PKL secara individual dalam rangka mempertahankan subsistensi, ketika alternatif utama gagal dijalankan dengan sangat terpaksa, jika benar gagal total baru menggunakan cara kedua yakni dengan kekerasan atau perlawanan terang-

terangan yang sifat nya membela diri, untuk mempertahankan lapak, sumber hidupnya dari sitaan satpol PP pemerintah kota.

Perlawanan secara terang-terang atau terbuka juga dilakukan PKL berupa demonstrasi, adu otot, adu jotos, ambil sitaan lapak juga dilakukan oleh PKL dari satpol PP. Semua itu dilakukan sebagai ekspresi penolakan program relokasi pedagang ke pasar “Kotak”. Perlawanan PKL baik bersifat sembunyi maupun terang-terang atau terbuka dalam organisasi paguyuban PKL tidak diikat oleh kelas, perbedaan asal-usul, etnis, lokasi asal, tetapi mereka diikat oleh kesadaran bersama solidaritas tinggi sesama PKL. Sejarah, nasib, sepenangungan yang membuat mereka “kompak”, rukun, solidaritas, setia kawan, guyub, persaudaraan kuat sesama PKL.

Dalam kasus perlawanan pada relokasi PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” ditemukan kejadian aneh, dimana perlawanan PKL tidak berupa perlawanan terang-terangan maupun perlawanan tersembunyi, sesuai jenis perlawanan menurut teori James.C. Scott. PKL melakukan perlawanan campuran antara perlawanan terang-terang an dengan perlawanan tersembunyi yaitu perlawanan “ Campuran” atau “semi”. Sehingga perlawanan campuran merupakan temuan baru diluar pendapat James C. Scott. dalam kasus perlawanan PKL terhadap PKL pada relokasi di kota.

10.1.2.3. Tahap-tahap perlawanan.

Tahap perlawanan yang terjadi selama proses relokasi PKL ke pasar “Kotak” meliputi 5 (lima) tahap sebagai berikut :

10.1.2.3.1. : Tahap Pra gerakan (*Pre-movement*)

Tahap ini muncul karena ada tekanan dan diskriminasi sosial, kondisi bersinergis dengan meningkatnya harapan, ketika harapan terus menerus meningkatkan suatu gerakan sosial akan berkembang menjadi perlawanan. Kedua faktor tersebut baik tekanan maupun harapan yang meningkatkan kombinasi menghasilkan suatu pergerakan. Jadi tahap pergerakan adalah suatu tahap adanya tekanan struktur atau kondisi sosial yang tidak memuaskan, yang dialami oleh individu, kondisi ini mengarah situasi tidak nyaman. Massa menjadi gelisah dan ini awalnya munculnya keresahan yang menyebabkan gerakan sosial.

Pada tahap ini PKL, berkumpul dan mulai merasakan adanya tekanan struktur atau kondisi sosial, himpitan, ekonomi, dampak kenaikan BBM, kebencian sosial akan memicu akan terjadinya revolusioner. Dengan demikian pada diri individu pedagang muncul kondisi tidak harmonis seperti issue moral dan keadilan. (Scott:2003)

10.1.3.2.2. Tahap membangun kesadaran. (Awakening Stage) .

Pada tahap ini terjadi membangun kesadaran untuk melakukan “mobilisasi” yaitu para pemimpin paguyuban PKL yang kharismatik, dan proses sosialisasi. Dibutuhkan pemimpin untuk proses pengembangan individu-individu PKL, sehingga mereka berani tidak takut, untuk melakukan langkah-langkah yang diarahkan pemimpinnya dalam suatu proses gerakan perlawanan. Pada tahap ini dibutuhkan upaya resosialisasi, upaya untuk membangun keyakinan seorang pemimpin atau kepercayaan diri yang memadai, ini diperlukan karena mereka terhimpit begitu saja menerima bahwa mereka lebih dan tidak berharga. Dengan

demikian mereka mampu melakukan gerakan perlawanan karena tergugah atas kemampuan sendiri membangun kesan negatif orang kecil.

10.1.3.3.3. Tahap membangun gerakan (*Building Stage*)

Pada tahap ini meliputi pengorganisasian gerakan, perumusan tujuan dan strategi mobilisasi aksi. Pada tahap ini PKL saling mengenal satu sama lain. Pada tahap ini para pemimpin paguyuban PKL saling mengenal dan membagi perasaan satu sama lain. Pada saat ini pemimpin gerakan mempunyai peranan penting untuk mempengaruhi PKL, meminta dukungan pihak lain untuk simpati PKL. Pada tahap ini terjadi proses pengorganisasian dalam bentuk formal, eksis, pemimpin jelas, tujuan semakin jelas program rutin dan jelas.

10.1.3.3.4. Tahap mempengaruhi Kelompok sasaran (*Influency Stage*)

Pada tahap ini diharapkan terbentuk semacam ideologi atau cita-cita perubahan. Aspek yang ditanamkan untuk mempengaruhi kelompok sasaran adalah suatu perubahan yang ingin dicapai oleh PKL. Kemudian dicarikan perekrutan atau pencarian anggota, simpatisan gerakan misalnya Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), yang dapat diajak untuk mewujudkan cita-cita perubahan yang dicapai. Pada tahap ini tugas gerakan adalah mengubah “public lawan” menjadi partisipan pasif menjadi kekuatan aktif.

10.1.3.3.5. *Out Come Stage* (Tingkat hasil).

Pada tahap ini dilakukan pengkonsolidasi atau pelestarian hasil capaian. Fase ini akan muncul gerakan yang dilakukan berhasil dan mampu diintegrasikan dalam jumlah struktur sosial dari masyarakat. Hasil dari gerakan dapat menjadi fenomena sosial di masyarakat yaitu perilaku kolektif PKL.

10.4. Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini terdapat berbagai keterbatasan baik, dilihat dan perspektif yang digunakan aspek atau peneliti, maupun proses pelaksanaan penelitian.

Pertama, penelitian hanya membahas perlawanan PKL terhadap program relokasi PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” . Sub kajian meliputi (a) faktor penyebab terjadinya perlawanan PKL. (b) proses terjadinya perlawanan PKL .(c) bentuk-bentuk perlawanan PKL. (c) Tujuan perlawanan PKL dan (d) Tahap-tahap perlawanan. Sub kajian penelitian sangat sempit, data digali secara mendalam dan dihasilkan kesimpulan secara tajam, valid, akurat, mampu menjangkau issue-issue penting lain seputar PKL, seperti konsep penataan, penertiban, pemberdayaan, relokasi PKL. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat PKL, jam kerja, etos kerja, kemandirian, struktur pasar, permasalahan yang dihadapi PKL, management organisasi, management akutansi PKL dan issue-issue penting lainnya.

Kedua, keterbatasan penelitian dari sudut pandang perspektif yang digunakan dengan satu tujuan yakni ingin benar—benar mendapatkan teori yang benar-benar dibangun dari proses analisis model Interaktif Miles dan Hubermann. Yakni tahap-tahap, data collection, data reduction, data display, dan Conclution. Verivying menurut pemahaman subyek penelitian yaitu PKL.

Ketiga, penelitian dilaksanakan hanya di 3 (tiga) lokasi PKL berdagang yaitu, Jl. Batanghari, Jalan Nori serta Jl. Barito. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana bukan banyaknya data, tetapi yang diutamakan adalah kedalaman data. *Explore* data mendalam diperlukan untuk menutup

kelemahan, kekurangan pengambilan data, oleh karena itu waktu pengambilan data diperpanjang dari rencana alokasi waktu semula selama 6 bulan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengambilan hanya terbatas 3 (tiga) lokasi utama pasar loak di kota, sebenarnya masih banyak lokasi dimana PKL beraktivitas seperti Jl. Merpati, Jl, Serayu, Jl, Kapten Wiratno Ring Road Timur, Alun-alun kota sehingga penelitian belum mampu menggambarkan kondisi real PKL di kota Madiun secara menyeluruh. Namun ke 3 lokasi tersebut sangat tepat sebagai tempat penelitian, karena selaras dengan tema yakni perlawanan PKL terhadap relokasi pedagang, mengingat lokasi inilah yang dijadikan obyek relokasi PKL saat ini.

Keempat, penelitian mengkaji perlawanan PKL dalam kapasitas sebagai sektor informal perkotaan. Masalah PKL di kota besar, termasuk kota Madiun menjadi sangat aktual, menarik, unik, karena menarik hati masyarakat untuk memasuki dunia informal ini tanpa repot-repot modal, lahan, akses perbankan, orang dapat langsung menggelar dagangannya, jadilah, tentunya dengan membayar pajak dari Dispenda setiap hari 2000 rupiah, dan ta'at, patuh aturan dari pemerintah kota. Oleh karena itu penelitian ini dapat digeneralisasi pada sektor lainnya. Keterbatasan masih sangat banyak, namun hasil penelitian membuka kesempatan bagi peneliti lain untuk penelitian berikutnya terutama dalam hal (1) menguji secara kuantitatif variabel yang berpengaruh pada pendapat PKL. (2) faktor-faktor yang mampu menghentikan konflik antar PKL dengan pemerintah Kota.

10.5. Proposisi

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka dapat dibangun proposisi sebagai berikut:

10.5.1. Perlawanan dapat terjadi apabila ada beberapa faktor penyebab dan faktor pemicu. Faktor penyebab bersifat akumulatif seperti penumpukan atau ketidak puasan, termasuk berbagai kejengkelan yang pernah dialami. Adapun faktor pemicu lebih bersifat pribadi seperti di “gropyok an petugas”, lapak di sita, di tangkap petugas, namun tindakan represif oleh satpol PP, sangat penting dampak keberadannya dalam memicu terjadinya perlawanan.

10.5.2. Perlawanan dapat berupa “latent”, tetapi juga dapat “terang-terangan. Perlawanan tersembunyi ini mempunyai resiko lebih kecil, tetapi jika dikoordinasi oleh seorang pimpinan yang tepat dalam suatu organisasi yang baik, akan mempunyai dampak yang tidak kalah besarnya, dibandingkan dengan perlawanan secara terang-terangan. Perlawanan terang-terangan mempunyai resiko lebih besar, sehingga hanya dapat ditempuh apabila perlawanan tersembunyi telah menemui kegagalan.

10.5.3. Obyek yang diperebutkan dalam pertikaian, dapat bersifat material, akan tetapi bisa berupa immaterial, seperti ruang ekonomi, sosial, politik. Pertikaian dengan obyek immaterial jauh lebih sulit diselesaikan dibanding dengan dengan pertikaian dengan obyek material.

10.5.4. Subyek yang merasa tertekan dalam melakukan perlawanan akan berusaha menggunakan senjata dari yang paling sederhana hingga yang paling ampuh. Ketika senjata yang paling sederhana dengan tingkat resiko paling rendah sudah berhasil mengalahkan lawan, maka PKL tidak mengeluarkan senjata lain yang lebih ampuh. Akan tetapi, ketika senjata yang paling sederhana tidak lagi berhasil, maka senjata yang lebih handal akan digunakan. Ketika keduanya juga masih gagal, maka senjata pamungkaslah yang akan digunakan, meskipun dengan resiko yang besar.

10.5.5. Menurut James C.Scott, Jenis perlawanan ada 2 (dua) yakni perlawanan tersembunyi dan perlawanan terang-terangan, namun pada kasus penelitian tentang perlawanan PKL pada peristiwa relokasi pedagang kota Madiun, ada temuan dimana terjadi integrasi antara perlawanan terang-terangan dengan perlawanan tersembunyi yakni lahirnya jenis perlawanan Campuran atau perlawanan semi.

10.6. Saran

Berdasarkan simpulan dan proposisi yang dibangun maka ada beberapa hal yang perlu disarankan yakni :

10.6.1. Secara organisasi perlu membangun sistem pengelolaan organisasi yang profesional pada organisasi PKL yang dikenal dengan “Paguyuban Pedagang Kaki Lima” .

10.6.2. Adanya pembinaan yang baik dari pemerintah Kota, khususnya Disperindagkoppar terhadap pedagang-pedagang sektor Informal.

10.6.3. Jika mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi masyarakat, hendaknya sosialisasi secara maksimal dan solusi dicarikan terlebih dahulu, jangan asal keluaran kebijakan publik.

10.6.4. Sedangkan yang berkaitan dengan management konflik, yakni bagaimana mensikapi perlawanan pedagang selama ini menjadi motivasi untuk suatu “Perubahan”. Perubahan yang dimaksud meliputi perubahan mental, cara berfikir, dan perubahan kualitas pedagang dalam berdagang dan perubahan pemerintah Kota dalam keluaran kebijakan publik.

Langkah selanjutnya perlu melakukan tahapan pendekatan sosial dalam upaya penanganan perlawanan PKL dengan tahap-tahap, yaitu :

10.6.5. Melalui upaya pencegahan perlawanan, yang bertujuan mencegah timbulnya perlawanan PKL terhadap aparat satpol PP Kota.

10.6.6. Upaya penyelesaian konflik, bertujuan mengakhiri perlawanan tersembunyi pedagang.

10.6.7. Pengelolaan solusi konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari perlawanan PKL dengan mendorong

perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

10.6.8. Upaya melalui resolusi konflik, yakni menangani sebab-sebab perlawanan dan berusaha membangun hubungan baru menjadi sebuah hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, yang berkonflik.

10.6.9. Upaya melalui transformasi konflik, yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari perlawanan PKL menjadi kekuatan sosial dan politik.

10.7. Implikasi Teoritik

Kasus perlawanan PKL hingga saat ini masih terus berlangsung, dan hal ini terus akan berlangsung selama kedua belah pihak mempertahankan *ego* masing dan kepentingannya. PKL dan satpol PP, sadar dan berhenti untuk menyudahi konflik, toh yang rugi juga mereka sendiri. Perlawanan tersembunyi PKL tidak dapat dipisahkan dari perjuangan hidup pedagang dan akan selalu melekat pada setiap individu dan masyarakat.

10.7.1 Penyebab Perlawanan.

Respon pedagang terhadap perlawanan adalah wajar, karena dengan adanya perlawanan tersembunyi pedagang, orang akan berfikir dan berinteroperasi diri untuk melakukan pembenahan berikutnya. Perlawanan tersembunyi merupakan bentuk oposisi terhadap kebijakan pemerintah kaitannya dengan program Relokasi. Selanjutnya dikatakan sebenarnya secara

organisasi antara paguyuban PKL dengan pemerintah Kota/ Satpol PP tidak ada masalah, yang terjadi hanya kesalahfahaman individu yang bersifat pribadi dalam sikap relokasi. Disamping itu perlawanan dilakukan oleh PKL yang menolak program Relokasi pedagang.

Peneliti berpandangan bahwa fenomena peristiwa yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perlawanan itu selalu ada. Penolakan Relokasi yang diwujudkan dalam perlawanan merupakan wujud adanya reaksi sosial pedagang setelah pemerintah Kota mengeluarkan aksinya dengan program Relokasi. Pemindahan PKL dari pusat kota ke pasar “Kotak” merupakan suatu keniscayaan. Hal tersebut merupakan pembelajaran sejarah, bahwa setiap aksi, pasti akan lahir reaksi seperti pada kasus Relokasi, karena sudah melibatkan masyarakat.

Dalam konteks ini kami mencoba mensinergikan fenomena kejadian di lapangan yang terkait dengan sebab-sebab perlawanan PKL terhadap pemerintah Kota Madiun. Terusiknya kondisi sosial, ekonomi baik dalam keluarga maupun masyarakat kecil yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima, melahirkan perlawanan. Karena itulah teori perlawanan Scott, sangat cocok dalam analisis fenomena sosial yang terjadi pada perlawanan tersembunyi PKL terhadap satpol PP Pemkot Madiun.

Terkait dengan peristiwa adanya perlawanan (Scott,2000:24) yang berkepanjangan ini tentu ada makna yang tersirat didalamnya, yaitu : bahwa perlawanan sebagai bentuk unjuk kekuatan dan dilakukan secara kolektif. Mencermati pemahaman tersebut maka secara sosiologis perlawanan

dimaknai sebagai ajang uji coba kemampuan. Para anggota paguyuban pedagang yang merasa memiliki kepentingan untuk ungkapkan isi hati perasaan ketidakpuasan pada program Relokasi pedagang ke pasar “Kotak”. Karena program tersebut menyengsarakan, merugikan, secara ekonomi sosial PKL keluarga yang selama ini menjadi tumpuan nafkah. Mata pencaharian keluarga hilang, pelanggan, konsumen musnah sebab tempat baru banyak tidak diketahui sepi dan pelanggan.

Pandangan pedagang lain tentang perlawanan tersembunyi PKL di pasar “Kotak” selama ini sebagai bentuk ungkapan perasaan menolak pedagang kak lima. Secara budaya orang Madiun, persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas merupakan suatu nilai fundamental yang dijunjung tinggi dan dipendam dalam-dalam oleh seorang warga termasuk para PKL.

10.7.2. Tujuan Perlawanan

Tujuan perlawanan tersembunyi sebagai bentuk keberanian orang kecil terhadap pengambilan keputusan yaitu Disperindag Kota dengan program Relokasi nya. Keberanian melakukan perlawanan terselubung karena perasaan mendesak dan tertekan PKL. Oleh karena itu, perlu PKL yang kuat, senasib, seperjuangan, kebersamaan, visi dan misi sama dalam berdagang sebagai PKL. Disamping tujuan tersebut perlawanan tersembunyi bertujuan sebagai unjuk kekuatan, mencari identitas diri, sebagai unjuk rasa tidak puas, ulah oknum, balas dendam sebagai bentuk sikap menentang PKL Kota. hal tersebut sesuai teori Perlawanan James C. Scott.

Dari beberapa sumber menyebutkan, bahwa perlawanan pedagang disebabkan oleh provokasi oleh pedagang lama. Karena pernah ditindak oleh satpol PP, sebagai rasa balas dendam terhadap aparat. Namun mereka beralasan bahwa lokasi nya telah lama ditempati. Dan tindakan satpol PP tidak berdasar, karena sebagai rasa tidak puas, mereka provokasi PKL hasil relokasi untuk melawan saja terhadap kebijakan pemkot. Relokasi dari tempat yang sudah mapan yakni jalan, Batanghari, jalan, Nori, jalan Barito ke pasar “Kotak” Kota.

Wakil Ketua Paguyuban berpendapat lain lagi, bahwa Relokasi merupakan hukum alam yang harus disikapi dengan dewasa tanpa emosi, marah-marah, ngrundel, sakit hati, tidak puas, demonstrasi, unjuk rasa. Tooh mereka masih diberi lokasi yang definitif sesuai peraturan perda No 14/ 2012, sebenarnya mereka hanya nunut/ ngawulo lokasi jualan. Pemerintah Kota Madiun sudah memikirkan lokasi baru yang menetap dan layak, hal tersebut merupakan kebaikan pemerintah, sebab selama ini sudah puluhan tahun berjualan dengan gratis di lokasi lama.

Relokasi ke pasar “Kotak” merupakan keniscayaan dan taqdir Allah SWT yang pasti terjadi dan dimaknai sebagai perjuangan hidup, sebagai *jihad fisabilillah* mencari rizki. Hal tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi tanpa menyalahkan pihak-pihak tertentu. Yaa kita semua tidak puas, marah, protes dengan adanya relokasi ke tempat baru, sebagai perlawanan tersembunyi. Tetapi apa boleh buat kita hanya orang kecil yang tidak punya apa-apa. Kecuali hanya patuh dan ta’at *samikna waathohna*

kepada umara'DPRD dan walikota Madiun berperan sebagai pengambil kebijakan khususnya tentang Relokasi PKL.

Saya memaknai semua ini sebagai perjuangan hidup mencari makan. Kalau ada perlawanan tersembunyi pedagang dimaknai sebagai ungkapan isi hati paling mendalam pada aspek kemanusiaan. Toh semua orang tahu, pejabat Pemkot mengerti bahwa sesama manusia itu perlu pekerjaan, perlu makan, perlu minum mempunyai keluarga. Perlawanan oleh pedagang hanya perlawanan tersembunyi seperti mangkel, marah-marah, ngrundel, rasan-rasan mendongkol, berkata-kata kotor tetapi semua masih manusiawi. Hal tersebut selaras dengan teori perlawanan James C. Scott. Tentang perlawanan.

Kalau dilihat kebelakang sebab-sebab perlawanan tersembunyi, yaa wajar apa yang telah dijalani selama puluhan tahun dan sudah menjadi jujukan masyarakat tentang barang loak an tiba-tiba disuruh pindah. Apalagi tanpa ada kompensasi apapun dari Pemkot Madiun dan pedagang mulai jualan dari nol (0). Yaaaaa disikapi dimaknai sebagai perjuangan hidup.

PKL pindahan dari jalan Nori, dia memaknai relokasi sebagai menyengsarakan rakyat kecil. Merampas hak rakyat berjualan, membiarkan rakyat kesulitan ekonomi, dan menjauhkan kesejahteraan dari rakyat karena lokasi yang sudah mapan, pelanggan banyak, untungkan pedagang. Pada akhir nya disuruh pindah ke tempat jauh, sepi, belum dikenal. Sekdakot, bilang relokasi akan dibantu dan tempatnya lebih baik, omong kosong mas. Selama ini pedagang dijanjikan akan dibantu oleh Pemkot tetapi pepesan kosong mas, sampai saat ini.

Oleh karena itulah adanya perlawanan pedagang yoo wajar dong, mas saat ini pulang tidak bawa uang untuk makan anak-isteri apalagi bayar SPP. Itulah suara hati seorang pedagang dalam mensikapi kebijakan pemerintah Kota dalam Relokasi PKL. Selama relokasi tidak ada bantuan apapun dari pemkot, apalagi bantuan modal, pinjaman modal, mboten wonten blass, hanya dikumpulkan di kantor satpol PP katanya diberi rp 50.000,- hanya diberi 25.000,- itu saja mas.(Sumber:Paguyuban Pedagang 2015)

Lain lagi dengan pendapat pedagang di jalan: Barito bahwa relokasi ke pasar “Kotak” dimaknai sebagai “kebijakan tebang pilih”. Demikian komentar salah satu pedagang di jalan Barito, sampai sekarang penjual rawon “Eny” masih jualan dan tidak pindah ke pasar “Kotak”, tidak ditindak oleh satpol PP. Pedagang Kaki Lima jualan nasi kopi pindahan dari jalan Batanghari berkomentar relokasi sebagai maknai perjuangan hidup mengkail sesuap nasi, memperpanjang umur orang kecil. Perlawanan PKL di pasar “Kotak” merupakan ungkapan sulitnya mencari uang sekedar nutup modal, karena sepi nya pembeli rame hanya hari Minggu, Sabtu lainnya, inilah sumber konflik dan perlawanan pedagang.

10.7.3. Senjata Perlawanan.

Mencoba membangun kepercayaan pembeli di pasar “Kotak”, sebab sampai saat ini pembeli, konsumen masih belum mengetahui jika saya sudah pindah kesini, tidak di jalan : Batanghari lagi. Sabar, sabar dan sabar mas, yaa mulai lagi seperti 20 tahun lalu di jalan Batanghari, sehingga saya mencoba mencari pelanggan dengan berjualan sepanjang waktu berbagi waktu dengan

sesama pedagang. Perlawanan PKL sebagai ungkapan rasa tidak puas, jengkel. Karena kebijakan relokasi pedagang sangat menyulitkan, merepotkan PKL mencari nafkah, sehingga menjadi sumber perlawanan pedagang.

Belajar dari pengalaman relokasi di masa depan hendaknya persiapan sosialisasi relokasi lebih *intensif*, bila dimungkinkan diberi subsidi sebagai bantuan awal bagi pedagang. Yang jelas tempat baru, situasi baru, kondisi baru, pelanggan baru yang serta merta tidak serame di tempat lama. Masih perlu penyesuaian untuk mengembalikan pelanggan, konsumen dari pasar loak Batanghari, jalan Nori, jalan Barito ke pasar Loak “Kotak”. Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Masalah relokasi pedagang akan menimbulkan perlawanan PKL.

PKL berkomentar tentang relokasi di pasar “Kotak “, Dia berpendapat tentang makna yang tersirat dari kebijakan pemerintah kota. Relokasi sebagai perjuangan orang kecil untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air, demi memenuhi kewajiban keluarga. Perasaan mengeluh, grundle, protes dengan dipindahkannya berjualan dari tempat lama jalan Batanghari ke pasar “Kotak” sebagaimana, teori perlawanan Scott.

Itulah bentuk keluhan, curhat pedagang dalam memaknai Relokasi ke pasar “kotak” inilah yang menimbulkan adanya perlawanan terselubung pedagang kaki lima hasil Relokasi. Mereka sebagai pelaku langsung dalam jualan terkena akibat langsung dari kebijakan pemerintah daerah. Seharusnya pemkot memberi bantuan yaa transportasi relokasi, pinjaman modal lunak untuk mengawali tempat baru yang pasti masih sepi. Diantaranya sepi

pembeli, kehilangan pelanggan, konsumen yang selama di tempat lama kabur. Tetapi bila tidak ada bantuan sama sekali juga tidak salah karena tempat lama bukan miliknya dan melanggar hukum yakni menempati trotoar jalan.

Salah seorang berkomentar tidak ada bantuan Pemkot, yèn Pilkada diuber-uber kon milih calon tertentu karo janji-janji muluk-muluk, yèn aku dadi enak-enak sandang, pangan, modal usaha, nyata ne aku digusur dodolan ku ke panggonan sepi, bohong omong kosong pak wali. (Tidak ada bantuan dari Pemkot, jika pemilu dicari disuruh memilihnya dengan janji tinggi, jika aku menjadi wali kota, sandang pangan cukup, ternyata setelah jadi digusur dagangannya ke lokasi sepi, bohong omong kosong pak wali)

Pedagang kopi dan soto asal pedagang jalan Batanghari memaknai relokasi sebagai perjuangan hidup orang kecil. Sebagai upaya mencari penghidupan dengan jualan warteg bercerita awal mula menjadi pedagang kaki lima di jalan Batanghari 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya mewarisi dagangan ibu saya sebagai pemilik warung kopi, teh nasi di jalan Barito. Karena kondisi ekonomi dan modal usaha akhirnya hanya dapat meneruskan usaha jualan ibu yaitu buka warung dan masa tersebut sangat laris. Semakin hari jalan Batanghari menjadi tempat jujukan orang-orang pencari barang rongsok, bekas dan akhirnya jualan menjadi tumpuan ekonomi keluarga untuk biaya hidup sekolah dan lain-lain.

Dengan kondisi saat ini apalagi di tempat hasil relokasi saya pesimis dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga apalagi pemerintah Kota lepas

tangan dengan bantuan modal, minimal ganti transportasi dan renovasi lapak. Maka bila ada perlawanan terselubung pedagang dengan aksi-aksi mogok renovasi, membiarkan tempat terbengkalai, stand lapak dipindah tangankan ke pihak ketiga (dijual) apa boleh buat.

Pernyataan diatas wujud keluhan, rintihan rakyat kecil yaitu PKL yang terkena dampak relokasi ke pasar “Kotak” kota Madiun sebagai akibat pelaksanaan kebijakan program pemerintah kota Madiun. Hal tersebut, untuk menciptakan kota yang indah, tertib, sehat, nyaman, sejuk, hijau demi mendapat anugerah Adipura Kencana Paripurna yang digadang-gadang oleh walikota.

Rencana kedepan lokasi lama di jalan Batanghari, jalan Nori akan digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Taman kota untuk memenuhi persyaratan sebagai adipura kencana semoga berhasil pak walikota, meskipun ada sebagian rakyat nya menangis tidak dapat makan, sekolah. Peristiwa, kejadian perlawanan membuktikan bahwa dalam proses relokasi PKL dari pusat kota Madiun (Jalan Batanghari, jalan Nori, jalan Barito) ada penolakan warga, khusus nya mereka yang mencari mata pencaharian hidup sebagai pedagang sektor informal di lokasi tersebut, teori perlawanan sangat relevan untuk mengupas masalah perlawanan terselubung pedagang kaki lima dengan satpol PP, Polisi.

10.7.4. Perbedaan penelitian James C.Scott dengan Peneliti.

PKL merupakan sosok rakyat kecil yang secara ekonomi tidak mempunyai materi, harta, financial permanent, yang diperoleh setiap bulan,

seperti PNS, tetapi mereka perlu dibantu untuk dapat hidup demi anak dan keluarga nya. Semua peristiwa diatas merupakan wujud adanya perlawanan PKL dengan satpol PP Pemkot Madiun, sehingga hal tersebut selaras dengan teori perlawanan, James C.Scott, berikut ini perbedaan proposisi antara Scott dan peneliti sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel : 10.1.

Perbedaan Penelitian Scott dan Penelitian peneliti

James C.Scott	! Peneliti
Senjata : Tidak menyebut senjata	! Model : <i>hit and run</i> sebagai senjata
Aspek Ruang : tidak kaitkan ruang	! Rebutan ruang sebagai konflik
Sifat : perlawanan sehari-hari	! sifat : perlawanan sehari-hari
1.Individual, informal, sering tidak terbuka	! individu atas perintah paguyuban
Strategi paling aman dalam garis lunak	! Formal, informal, p. Tertutup
hasil langsung, dan mendesak	! Hasil untuk saat ini, jangka lama
2.Strategi : spontanitas, tidak terorganisasi	! Strategi :spontanitas, terorganisir
Kerelaan rutin, sambil ngrasani dengan	! kerelaan rutin, menggerutu.
3.Faktor Penyebab : komersialisasi petani	! Faktor Penyebab : kuat nya negara
Menghindari resiko, dahulukan selamat	! Menghindari resiko,dahulukan slm

Tindakan berhasil, disembunyikan balik	! lapangan kerja, eksistensi
Merosot nya keamanan ekonomi petani.	! Menguatnya peran negara
Terbongkarnya hubungan tradisional	! Tindakan negara represif,
	! pemkot tdk perbaiki kondisi PKL.
	! Ancaman terhadap subsistensi
	!Pembatasan hak warga, kerja gagal
Tujuan : melunakkan, menolak tuntutan	: Tujuan : Di akui eksistensi nya.
Meringankan eksploitasi, menolak dominasi	! melunakkan represif.
Upaya tetap hidup dalam sistem yang ada	! Tetap diberi ruang, masuk struktur
Mempertahankan institusi tradisional	! Mempertahankan sumber ekonomi
Bukan menggulingkan sistem dominasi	! mengubah cara pandang pemkot.
<p>Proposisi menurut James C. Scott : (1) Perlawanan dapat bersifat laten, tetapi juga dapat terang-terang. Perlawanan “latent” mempunyai resiko kecil, tetapi jika dikoordinasi oleh seorang pemimpin yang tepat dapat berakibat baik, hebat tidak kalah dengan perlawanan terang-terangan dan punya resiko yang besar, bila perlawanan tersembunyi gagal. (2) Perlawanan dapat berupa terang-terangan apabila ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor tersebut meliputi faktor penyebab dan faktor pemicu. Faktor penyebab bersifat akumulatif seperti penumpukan, sakit hati kekecewaan, ketidak puasan termasuk kejengkalan yang pernah dialami. Adapun faktor pemicu lebih bersifat isidental, tetapi sangat penting keberadaan sebagai pemicu perlawanan. (3) Obyek yang diperebutkan dalam suatu konflik belum tentu bersifat material akan tetapi dapat immaterial,</p>	

seperti ruang publik, ekonomi, sosial, politik. Pertikaian immaterial jauh lebih sulit diselesaikan dari pada material.

Proposisi menurut Peneliti :

(1) Jika ekonomi semakin terancam, PKL melakukan mempertahankan dan melakukan perlawanan sosial. (2) orang akan melakukan perlawanan jika langkah tersebut merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari dominasi, kemudian melahirkan suatu moralitas yang disebut prinsip mendahulukan selamat. (3) prinsip mendahulukan selamat merupakan sumber kekuatan moral, bila PKL berhadapan pada kenyataan yang tidak memberi pilihan lain. (4) Terjadi perlawanan campuran atau semi yakni perlawanan gabungan antara tersembunyi dan perlawanan terang-terangan, dimana hal tersebut merupakan temuan baru dalam penelitian ini yang tidak ada pada jenis perlawanan menurut teori Scot

10.8. Implikasi Kebijakan.

Berdasarkan implikasi teori sebagaimana diuraikan diatas, implikasi kebijakan yang bisa dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

10.8.1. Untuk meningkatkan keberhasilan pemerintah kota dalam menata PKL, maka pemerintah, dalam setiap pembuatan kebijakan yang mengatur PKL, hendaknya ikutkan pedagang dengan cara (a) melibatkan PKL dalam setiap kebijakan yang mengatur PKL dengan kata lain, pemkot hendaknya menggunakan pendekatan *safety participatory development*, dengan demikian, PKL merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab atas peraturan tersebut dan dengan rasa tersebut PKL tidak ada alasan bagi

PKL untuk menyingkari peraturan yang telah dibuatnya sendiri. Disamping itu pemerintah kota supaya melakukan pendekatan partisipatoris kepada rakyat, jika akan mengeluarkan suatu kebijakan seperti relokasi. (b) Pemerintah kota agar menampung, menginventarisasi keluhan, keinginan PKL, supaya mereka merasa dilibatkan dan ikut memiliki setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota. (c) mengganti model penataan yang selama dilakukan pemerintah, dari model “menggropyokan pedagang” yang bersifat represif hendaknya diubah menjadi himbauan yang persuasif, relokasi ditolak PKL karena tempatnya jauh dari lokasi lama dan sangat tidak strategis, sepi, belum dikenal masyarakat dengan lokasi yang ideal dekat dengan keramaian, tidak seperti saat ini dekat dengan “kuburan”. (d) lokasi baru pasar “Kotak” diinovasi yang indah, modern dan nyaman, tidak seperti jorok, kumuh, apa adanya, semrawut, hanya beratap ‘seng’ seperti tempat yang belum siap untuk berdagang. (e) PKL melakukan perlawanan lebih berfokus kepada upaya mempertahankan eksistensi nya, citranya, tidak bersedia di relokasi, agar supaya dapat berjualan menghidupi keluarga dan keberadaannya.

10.8.2. Untuk mengurangi intensitas perlawanan PKL, pemerintah hendaknya melakukan pembinaan dengan sikap edukatif, persuasif yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercapai kemandirian PKL. Selain itu perlu pelatihan ketrampilan PKL dengan kegiatan pelatihan diverifikasi usaha sehingga tidak hanya menjadi PKL sebagai profesi satu-satunya,

dimana pemerintah menagajak perusahaan besar untuk memberikan ilmu kepada PKL dngan ketrampilan alternatif yang bermanfaat.

10.8.3. Mengingat peran PKL yang besar dalam perekonomian lokal, perlu konsep yang mampu menempatkan dan mengakomodasi keberadaan PKL dalam struktur ekonomi dan perlu mendapat ruang perhatian sehingga eksistensi PKL diperhitungkan di akui oleh pemerintah. Kalau secara sistemik keberadaan PKL di akui oleh pemerintah, maka perilaku yang menyimpang oleh PKL seperti sering melanggar hukum dapat dihindari sebagai contoh perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Untuk itu perlu pengakuan secara resmi terhadap PKL oleh pemerintah kota, wakil rakyat dengan memasukkan dalam setiap pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

10.8.4. Agar tidak terjadi perlawanan maka untuk PKL dari luar daerah yang masih belum ber KTP dilarang memasuki kota diusahakan preventifsasi agar tidak menyerbu ke kota. Jika terpaksa sudah menjadi PKL di kota diadakan pembinaan, pengarahan, sosialisasi peraturan Perda No 14/2012 tentang PKL, sehingga mereka memahami peraturan PKL di kota Madiun.

10.9. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan beberapa konsep pemikiran sesuai dengan fakta sebagai berikut :

1. Perlu membangun pola pikir (*mindset*) anggota paguyuban PKL melalui perannya sebagai pedagang yang melek ilmu dan tehnologi.

2. Perlu penataan terhadap tujuan awal organisasi paguyuban PKL yaitu membangun karakter berbudi pekerti luhur, setia kawan.
3. Perlu kesepakatan bersama untuk menghindari konflik antara PKL dengan satpol PP Kota, diwujudkan dalam bentuk sebuah MOU .
4. Perlu diberikan sanksi hukum ke para PKL yang melakukan pelanggaran hukum dan ketentuan AD/ ART paguyuban PKL.
5. Perlu adanya forum silaturahmi dan pertemuan rutin antar PKL yang di adakan oleh paguyuban pedagang sektor pasar “Kotak”.
6. Perlu diselenggarakan pembinaan, pelatihan PKL tentang *management* dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan dagang dan akuntansi keuangan.
7. Perlu diadakan pertemuan antar pedagang anggota paguyuban pedagang dengan satpol PP Kota Madiun pada saat tertentu misalnya “Halal Bi Halal “, sebagai wahana membangun kebersamaan, silaturahmi PKL.

Untuk kepentingan akademis :

1. Diharapkan para akademisi menindak lanjuti hasil penelitian ini sebagai bentuk pengembangan ilmu Sosial, khususnya Ilmu Sosiologi.
2. Diharapkan ada pengkajian penelitian khusus tentang paguyuban PKL sebagai wahana fungsi politik, sosial ekonomi.
3. Perlu pengembangan keberadaan dan fungsi PKL sebagai wahana ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL.
4. Perlu disusun buku tentang “ Makna perlawanan PKL disebabkan Relokasi” sebagai wahana pembelajaran masyarakat

BAB : X.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali.Syahbana (2005), *Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota*, Disertasi Unair 2005.
- Aldag,R.J Stearms, TM (1987). *Management*.Cinciati:Sout-Western Sosial Sciences.Bartos dan Wehr, 2003.*UsingConflikTheory*. New York : Cambridge Universitas Press.
- Biro Pusat Statistik.Kota Madiun 2014. *Madiun Dalam Angka*.Penerbit. Published by BPS.Kota Madiun.
- Basrowi 2006.*Konflik Pedagang Kaki Lima/ PKL dengan satpol PP dan Permasalahannya*, Obor Indonesia. 2006.
- Bernard Raho, SVD. *Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka. Jakarta, 200
- Bagong Suyanto, 1995. *Grounded Research Apa dan Bagaimana dalam penelitian Sosial* (Surabaya Airlangga Universitas Press 1995.)
- Coser, L 1967. *The Funtcion of Sosial Conflik*. II. Free Press. Glencoe, dari [www.2.pfeiffer.edu/iridiner/courses/Oser 1 HTML](http://www.2.pfeiffer.edu/iridiner/courses/Oser%201%20HTML) diakses pada 22 -12-2008.
- Cummings, PW, (1980), *Open Management:Guideto Succesful Practice*, New York.
- Collins, Finn, 1975. *Sosial Reality*. London : Rouledge.
- Chandra, R.I.1992. *Konflik dalam hidup sehari-hari*. Yogyakarta: Penerbitan Kanisius.
- Dahrendorf, R. 1959, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California : Stanford University Press.
- Dubrin, A.J, 1984. *Foundation of Organisasional Behaviour An Applied Perspective*. London:Practice-Hall International,Inc. .
- Dahrendorf, R1958.*Out Utopia: Toward a Reorientasi of Sociological Analysis*. American Journal of Sociology 64.

- Evers, Hans- Dieter 1982, *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi, dan Sengketa Tanah Indonesia dan Malyasia* (Jakarta : LP3ES 1982).
- Firmansyah, 1995, *Etos kerja sector informal PKL pengembangan sector Informal PKL di Perkotaan*. Dewan Riset Nasional –BAPPENAS – Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Friedman, John , 1992, *Emporwerment: The Polititucs of Alternatif Development* Blackwell, Cambriedge.
- Galtung, John 1990. *The Violence of Culture*, Journal Peace and Peace Research, vol 27. No.3 IqYo pp 291-235
diakses <http://www.jstor.org/about/terms.html>.
- Galtung, John.1975. *Vilonce, Peace, and Peace Research*. Copenhagen christian Eljer
- George Simmel, 1903. *The Sociology of Conflict*:1 (American Journal of Sociology)
- Goulet, Dennis, 1971, *The Cruel Choise : A New Concep in the Theory of Develeopment*, Atheneum, New York.
- Grove,AS. (1983) *Manajemen Output Tinggi*. Alih bahasa : Rivai.Jakarta penerbit Erlangga.
- Grenhalgh, L, 1999 “ *Menangani Konflik*” Dalam A.Dale Timpe, (ed), *Memimpin Manusia*. Alih bahasa oleh sofyan Cikmat. Jakarta PT.Gramedia.
- Giulinotti,R,Bounney,N.&Hepworth,M,1994.*Fothbal, Violence and Sosial Identity*.New York: Routledge.
- Guur, Robert Ted,(1991).*Why Men Rabel*. Princenton,NJ: University Press.
- Hart, Keith, 1973, *Informal Income Opportunis and Urban Employment in Ghana*, Journal of Africa Studies No. 11, page 6.
- Hardjana,AM., (1994) *Konflik di Tempat Kerja*.Yogjakarta Penerbit:Ganesha 1999.
- Harwanto,(2011) *Konflik Kekerasan Antar Kelompok Organisasi Persaudaraan Setia Hati Bela diri Pencak Silat diMadiun*, Disetasi S-3 Pendidikan Ke Olah Ragaan tidak dipublikasikan, Univesitas Negeri Suarabaya.

- Hubermann and Miles 1999. Analisis Penelitian Kualitatif, PT.Rosda Karya Bandung 2010.
- Hendriks,W.,1992. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Diterjemahkan oleh : Arif Santoso.Jakarta:Bumi Aksara.
- Hoffer, Eric 1988.*Gerakan Massa*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Handoko, TH., (1992) *Management*, Yogyakarta.(Edisi ke 2) Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
- Islamy, M.Irfan, 2009, *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Kartono 2005, *Fenomena Pedagang Kaki Lima/ PKL Dalam menghadapi Permasalahan*, Penerbit Obor Indonesia 2005.
- Kabra, Kamal Naya, 1995, *The Informal Sector : A Reappaisal, Journal of Contemporary Asia, Vol, 25-26*, Cides Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemeratan*, CIDES,Jkarta.
- Koencaraningrat,Saefudin, Fedyani Ahmad, (2007)*Jaringan Sosial dalam Organisasi*,Raja Grafindo Persada.
- Kusmahadi, Didik2013.Kantor Disperindagkoppar : *Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya*, Arsip Dokumentasi Disperindag, 2014.
- K..Yin, Robert, 1996.*Studi Kasus: Desain dan Metode*, Penerbit Raja Grafindo. Jakarta.
- Kepolisian Resort Kota Madiun 2016. *Data Kasus Konflik Pedagang Sektor Informal*
- Luthans, F. (1985) *Organisazion Behaviour*. New York;Mc Graw—Hill Book Dat Company.
- Lipton, Michael, 1975, *Urban bias and Food Policy in Poor Countreis*, Artikel.
- Lipsey,R..G.& Steaner, P.P. 91986), *Pengantar Ilmu Ekonomi*. (Edisi Ke enam) Alih bahasa:AnasSidik. Jakarta. Penerbit PT.Bina Aksara.

- Maksum,A,2007. *Konflik Kekerasan Antar Kelompok Perguruan Pencak Silat Studi Kasus di daerah Madiun*. Penelitian Fundamental.
- Marx K.Engels, F., 2000 . *Manifesto of TheCommunist Party*. Diakses 12 April 2009. <http://www.marxists.org/archieve/marx/work/1848/communist-anifestosi/ch01.htm>.
- Miles Matthew B, Huberman Michael.A., (1984) *Qualitative Data Analysis :A Sourcesbook of New Methods* : London. Sage Publications, Beverly Hills.
- Moore, Barrington, 2003. *Sosial and Origin of Dictatorship and Democracy* Boston : BaconPrees.
- Moore and Barrington 1999, *Sosial Research Methode Quality Approach* . (Fourth Edition.(Bolton :Allyn &Bacon 1999.
- Muhyi, 2010.*Pendidikan Karakter*, Surabaya Materi Pelatihan.
- Moore Barrington, 2003. *Sosial and Origin of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon Press.
- Nasution, (1988) *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung Transito.
- Ogburn, William F : *Social Change*, New York Viking Pers.
- Pariela D. Tonny., (2008) *Damai ditengah konflik Maluku: Perseved Sosial Capital survival sebagai basis Strategi*.Salatiga.Program Pasca Sarjana UniversitasKristenSatya Wacana press
- Polak, M.(1982) *Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Ictiar Baru.
- Pip Jones,2010. *Teori-teori Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Poloma,M.1994. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada & Yayasan Solidaritas Gajah Mada.
- Popkin. Samuel L.1996. *The National Peasant : The Political Economi of Rural Society in Vietnam*.(Berkely : University California Press 1996)
- Pruitt, Dean G, and Hee Kim, Sung. *Sosial Conflik: Escalationa, Stalemate and Statelmen*(3 rd Edition). New York : McGraw-Hill.

- Rachbini Didik dan Abdul Hamid 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. (Jakarta LP3ES 1994)
- Rendall.C, 1975, *Conflict Sosiologi: Toward and Eplanary Science*. Academic Press.
- Rule James.B. 1988. *Theorititis of Civil Violence*. Barkeley: University of California Press.
- Ritzer, George 2004, *Teori Sosiologi dari masa Post Modern sampai Modern, Jakarta Kencana 2004*.
- Sanafiah Faisal, (1990) *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*: Malang YA.3
- Sklair, Leslie, 1995. *Sociology of the Global System*, Prentice Hall,-6,London..
- Satori D.J. 2000. *Penelitian Kualitatif* . Kanisius Yogyakarta. 2000 Rational Peasant : The Political Economi of Rural Society in Vietnam.
- Samsudin. M.Din, *Etika Agama dalam membangun masyarakat Madani*..(Jakarta :Logos, 2000h.213 h.
- Sethurman SV, 1981 *The Urban Informal sector in development countries Employment poverty Emploment Poverty and Environment*, Geneve, ILO ,PAGE 1888.
- Soejono Soekanto.(1987) *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta : Penerbit universitas Indonesia.
- Susan, Stainback Wiliam, (1995) *Understanding and Conducting Qualitatief Reseach*: Iowa. Kendall/Hunt Publising Company Dubuque.Stoner,
- J.A.F &RE (1994), *Managemen*. Alih Bahasa. Wilhemus.W.Bakowtun. Jakarta:Intermedia.
- Sugijono, (2004) *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cetakan ke 4) Bandung Penerbit,V.Alfabeta.
- Susan N., 2009. *Sosiologi Konflik. Isu-isu Konflik Kontemporer*: Edisi 1 Cetakan ke 1. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Sutisna, O. (1993) *Administrasi Pendidikan: Dasar Teorititis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.

- Scott, John. 2012. *Teori Sosial, Masalah-masalah Pokok Dalam Sosiologi*, 2012
Penerbit.Pustaka.Pelajar. Jogjakarta,2012.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Penerbit : Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta 1993.
-2000, *Senjata Orang-orang kalah*, Penerbit : LPPES, Jakarta, 2000.
-1994, *Moral Ekonomi Petani*, Penerbit LPP3ES Yayasan Ilmu-ilmu
Sosial. Jakarta.
- Siahaan Hotmann 1996, *Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program
Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya mempertahankan Subsistensi*.
(Surabaya, Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Perss 1996).
- Terry, G.R. (1986) *Principles of Management*. Illinois: Richard D.Irwin.inc.
- Terry George.R.(1993) *Prinsip- Prinsip Managemen*. Penerjemah J, Smith
D.F,M. Jakarta BumiAksara.
- Undang –Undang Dasar 1945 dan GBHN 1988.
- Wahyudi, 2008. *Management Konflik dalam Organisasi*. Jakarta: Alfabeta CV
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Wahjudi., (2006) *Managemen Konflik dalam Organisasi*. Pedoman Praktis bagi
Pemimpin Vsisioner, (edisi Kedua) Bandung. Penerbit Alvabetta.
- Weber,M.(1963) *The Sociologi of Religion*, transleta by E. Fischhoff, Beacon Press
Practical, Prentice-Hall International Edition.
- Weiss, D.H. (1993). *Conflict Resolution*. New York: American Managemen
Association.
- Winardi (2007),*Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*
Bandung,Mandar Maju.
- Wolf, Eric, 1969. *Peasant war of The Twentieth Century*, New York, Harp and
Row P-ublisher, 1969.
- Todaro Micheil P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta
Erlangga 2000.

Artikel :

Feni Andani 2016, *Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Pekan Baru*, JOM, FISIP Vol. 3. No.2-Oktober 2016.

Herwanto, 2012.*Resistensi Pedagang Kaki Lima Menghadapi Penataan yang dilakukan Pemkot Surabaya*, Fisip Unair 2012.

Hefifah Syarifuddin, 2012.*Penyebab gagalnya Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan* (artikel)

Universitas Diponegoro, *Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya*, Jurnal Undip 2015.

Syamsu Hilal 2013, *Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, sumber : www syamsu hilal, blogspot.com.

Karnaji.2002 *Menata Pedagang Kaki Lima/ PKL dan bangunan Liar di kota Surabaya*. Penerbit :Suarabaya : Latfansah Media Tama 2002

Muhamad Yusuf, 2013. *Perlawanan Orang-orang rimba terhadap Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Riau*. Penerbit Graha Ilmu 2015, Yogyakarta.

Pemkot DKI Jakarta, 2016:*Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Penertiban Pemda DKI Jakarta (Studi Kasus di perempatan Ciracas)*

Suyanto, Bagong dkk. *Menata PKL dan Bangunan Liar*, Surabaya:pemerintah Kota Surabaya. 2012.

Mustafa Ali Achsan Dr.2008, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam pusaran Modernitas Malang In Trans Kerjasama dengar INSPIRE*.

Internet :

1.<http://lensaindonesia.com> diakses 18/juli/2017

2.www syamsu hilal, blogspot.com. diakses 17/7/2017.

3-herwanto-a-d-fisip.web.unair.ac.id/artikel_artikel-68474diakses20/7/2014--repository.uksw.ed/bitstream diakses 19/7/2017

5.<http://handuk-qu.blogspot.com>

diakses 12/7/207
diakses 10/7/2017

6.<http://berdikarionline.com>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pasar Lokal di Kota Madiun.
2. Jumlah Loos, Toko, lapak pasar Kota Madiun
3. Klasifikasi Pasar di Kota Madiun.
4. Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima sektor pasar “Kotak Kota Madiun.
5. Peta wilayah Kota Madiun.
6. Foto Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar “Kotak” Kota Madiun.
7. Peta wilayah Propinsi Jawa Timur.
8. Peta geografi lokasi pasar “Kotak” kota Madiun tahun 2016 Biro pusat Statistik.
9. Data pedagang kaki lima (PKL)/ sektor Non Formal di Kota Madiun
10. Data pedagang Formal Pasar di Kota Madiun.



LAMPIRAN :1.Pasar Lokal dibawah pembinaan Dinas Pasar Kota Madiun.Pasar-pasar lokal dibawah Dinas Pasar Kota Madiun.

Tabel 4.1: Pasar, alamat, Luas tanah di Kota Madiun

No.	Nama Pasar	Alamat	Luas (m ²)
1	Pasar Besar	Jalan Panglima Sudirman	16.710
2	Pasar Slekoo	Jalan Musi	8.915
3	Pasar Kawak	Jalan Kutai	1.531
4	Pasar Logam Jaya	Jalan Diponegoro	14.000
5	Pasar Hewan	Jalan Koci	7.152
6	Pasar Gamasorru	Jalan Asahan	529
7	Pasar SriJaya	Jalan Pelita Tama	15.550
8	Pasar Sri Jaya Baru	Jalan Diponegoro	4.920
9	Pasar Bunga	Jalam Sentiaki	1.729
10	Pasar Kojo	Jalan Setya Budi	1.490
11	Pasar Mojorejo	Jalan Mas Trip	1.437
12	Pasar Spoor	Jalan Pahlawan	1.320
13	Pasar Manguharjo	Gajah Mada	947
14	Pasar Sonokeling	Jalan M. Sungkono	2,252
15	Pasar Diponegoro	JalanDiponegoro	880

LAMPIRAN : 2.

1. Jumlah Toko, *Loss*., dan jumlah Pedagang Pasar.Tabel 4.2. Jumlah Pedagang, *Loss*, Toko di Pasar Kota Madiun.

No	Nama Pasar	Ruko	Kios	Bedak	Jumlah Tetap	Ojokan
Pasar Umum						
1	Pasar Besar		856	809	1665	825
2	Pasar Sleko		50	395	445	85
3	Pasar Gamasorru		55		55	
4	Pasar Kawak		24	235	239	15
5	PasarJaya/ Burung	20				212
6	Pasar Jl.Diponegoro		16		16	
7	Pasar Sonokeling			18	27	
8	Pasar Manguharjo		12	44	34	
9	Pasar Spoor		12	44	56	
Pasar Khusus						
10	Pasar Bunga			40	40	
11	Pasar Hewan			19	19	27
12	Pasar Logam	44	271	315		
	Pasar Desa					
13	Pasar Mojorejo	28	6	34		
14	Pasar Kojo		29			
	Jumlah	20	1223	2164	3.453	1.240

Sumber : Dinas Pasar Pemerintah Kota Madiun 2015.Madiun.

LAMPIRAN : 3.

2. Klasifikasi Kelas Pasar di Kota

Tabel 4.5.Klasifikasi pasar dan Lokasi Kota Madiun

No	Nama Pasar	Alamat	Kelas Pasar	Keterangan
1	Pasar Besar	Jl : Panglima Sud	I	
2	Pasar Sleko	Jl : Trunojoyo	I	
3	Pasar Kawak	Jl : Kutai	I	
4	Pasar Logam	Jl : Imam Bonjol	I	
5	Pasar Hewan	Jl : Desa Koci	I	
6	Pasar Bunga	Jl : Diponegoro	II	
7	Pasar Sri Jaya	Jl : Pelita Tama	II	
8	Pasar Kojo	Jl : Setyo Budi	III	
9	Pasar Mojorejo	Jl : Mas Trip	III	
10	Pasar Spoor	Jl : Pahlawan	III	
11	Pasar Manguharjo	Jl : Urip Sumoharjo	III	
12	Pasar Sonokeling	Jl : M,sungkono	III	
13	Pasar Dipo	Jl : Diponegoro	III	
14	Pasar Gamasorru	Jl : Opak	III	

Sumber : Dinas Pasar Kota Madiun 2015

LAMPIRAN : 4.

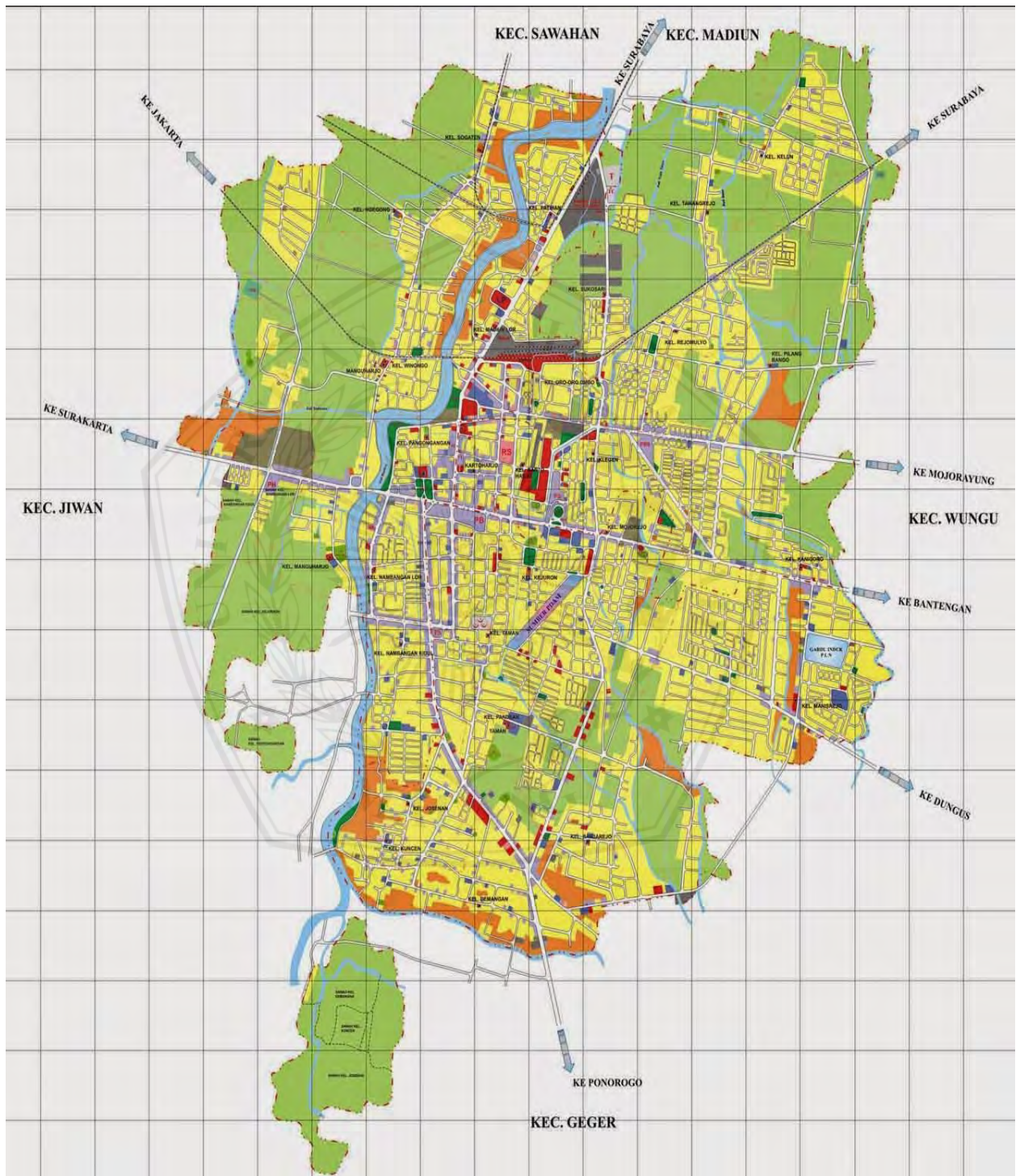
PENGURUS PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR “KOTAK”

REJOMULYO MADIUN



KETUA	: KAYEEN.
WAKIL KETUA	: NUR MAKSUM.
WAKIL KETUA	: PANGGIH.
SEKRETARIS	: SUAEB
WAKIL SEKRETARIS	: AMBAR
BENDAHARA	: PUJI
BAGIAN-BAGIAN	:
1. HUMAS DAN KOMUNIKASI	: SADI
2. PEMBINAAN ANGGUOTA	: MINAH
3. KOPERASI DAN MODAL	: MENIK
4. ROHANI DAN MENTAL SPIRITUAL	: JOHANNES
5. PENGEMBANGAN SDM PKL	: ANDIK

PETA KOTA MADIUN



Lampiran 6

PETA PROVINSI JAWA TIMUR



LAMPIRAN : 7.

FOTO-FOTO KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA
MADIUN.AKIBAT RELOKASI.



Gambar 1 : Lokasi Pedagang Kaki Lima yang lama, Jalan,Batanghari.



Gambar 2 : Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Kota tempat pengganti Pasar
Loak Jalan Batanghari.



Gambar 3 :Spanduk Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Loak Jalan Batanghari Kota Madiun.



Gambar 4 : Lapak Dagangan Pedagang Kaki Lima yang masih Kosong di pasar “Kotak” Kota Madiun



Gambar 6. Pak Maksu wakil Ketua Paguyuban pasar Loak “Kotak” sedang melayani pembeli dengan dengan masih Kosong karena tidak mempunyai modal untuk membeli suku cadan kaca mata.





Gambar 7 : Pasar “Kotak” Kota Madiun Lokasi baru Pedagang Kaki lima hasil Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Batanghari, Jalan Nori, Jalan Barito



Gambar 8 : Lokasi bekas pasar “Loak” Batanghari Kecamatan Pandean Kota Madiun setelah Relokasi.



Gambar 9 :Bekas pasar Lokasi Jalan Batanghari Kelurahan Pandean Kota Madiun pasca Relokasi



Gambar 10 : Lokasi jualan lama Jalan Nori Kota Madiun yang saat ini untuk Ruang Terbuka Hijau.



Gambar 11 : Ruang Terbuka Hijau / Taman Kota sebagai pengganti lokasi Pedagang Kaki Lima.

LAMPIRAN : 9.

Tabel 4.7 : Daftar Anggauta Pedagang Kaki Lima Kota Madiun.

Lokasi	Nama Paguyuban	Alamat	Ketua	Jumlah
Jalan: Trunojoyo	Trunojoyo Gruop	Jalan.Glatik 264 B	Nur Rohmah	31
Jalan: Sumbawa, Bali	Petro Rumkit	Jalan.Nusa Penida 1	Sentot Santoso	20
Jalan:Kompol Sunaryo	Kembang Sore	Jalan.Kompol Sunaryo	Bambang	37
Jalan:Cokro Aminoto	Cokro Indah	Jl.Cokro Aminoto 3 B	Rohman Sh	26
Jalan:Kol.Mahardi	Kolmar	Jl.Anjasromo 8	Sumiatun	21
Jalan:Dr.Cipto	Sumber Rejeki	Jl.Sendang Barat 03/2	Harjito	64
Jalan:Urip Sumoharjo	Agung Urip	Jl.Urip Sumoharjo 27	Agung Nugroh	24
Jalan:H.Agus Salim	Adu Nekat	Jl.Manyar 15 B	H.Amir	21
Jalan:Sumatra	Kartini	Jl.Kartini	Supto Sugiarto	21
Jalan:Pang.Sudirman	Pojok Kampung	Jl.Panglima Sudirman 7	M.Subiyono	39
Media. Alun-alun Timur	Tenda Biru	Jl. Kauman Gg Muria	Agus Kun W	31
Jalan:Aloon2 Madiun	Petro Alma	Jl.Sikatan,Gg.Gagak	R.Yoke S	140
Jalan:Diponegoro	Pangka Jaya	Jl.Purwosari 25	Suparno	31
Jalan: MJ.Sungkono	MJ.Sungkono	Jl.Sungkono 362	Rusman Bagus I	15

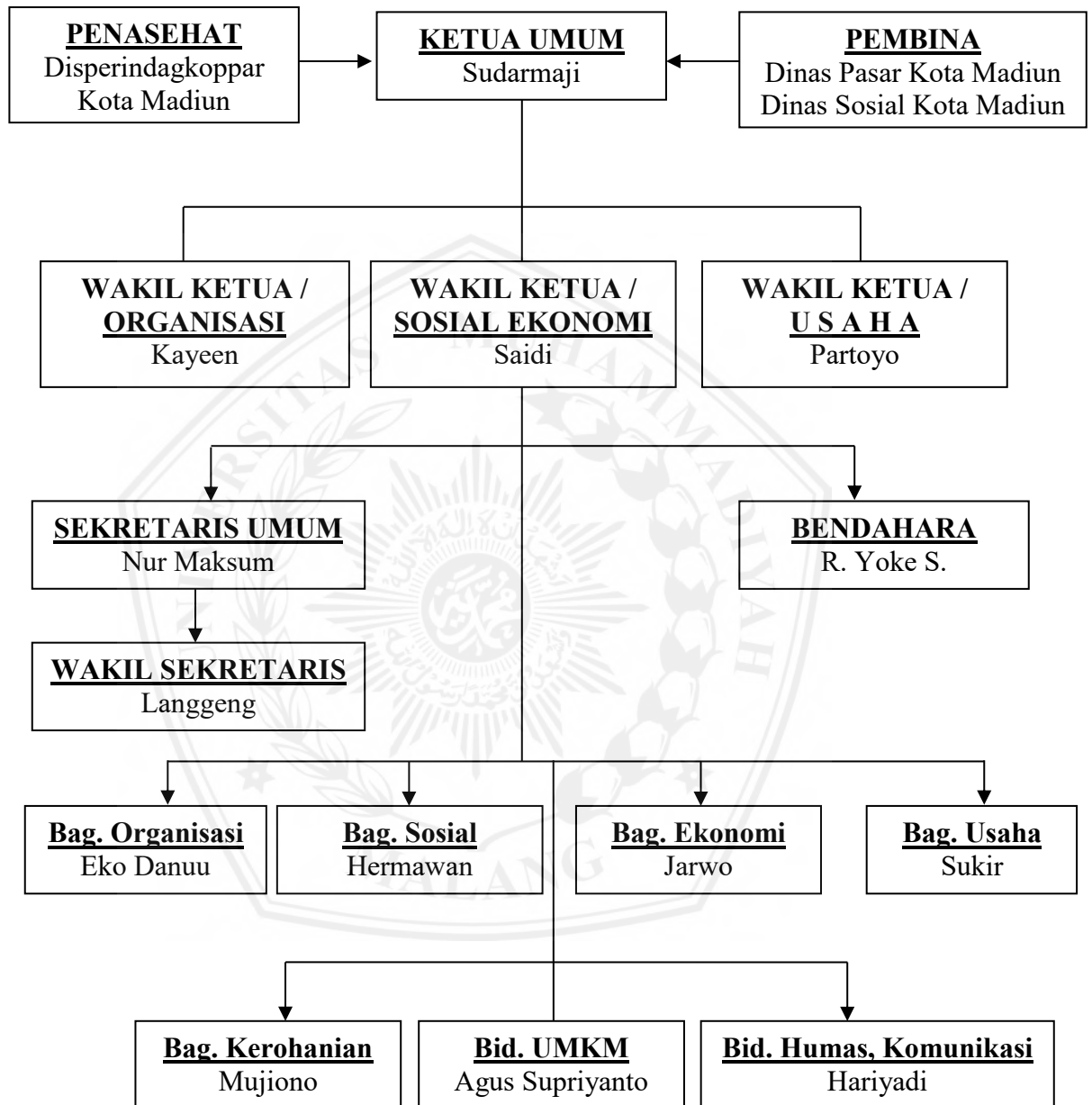
Lokasi	Nama Paguyuban	Alamat	Ketua	Jumlah
Jalan: Setia Budi	Budi Luhur	Jl.Tuno Lantaran 27	Widodo	24
Jalan: Tanjung Raya	Makmur Jaya	Jl.Tanjung Raya 8	Abdul Mutolib	9
Jalan: Bunderan Taman P	Merpati Bunderan	JL. Sedoru Banjarejo	Jarwo	59
Jalan:Stadion Wilis	Wilis Mukti	Stadion Wilis	Hari M	75
Jalan:Panjaitan,Serayu	Bunga Saroya	Jl. Bunga Saroya	Agus Supriyan	56
Jalan:Diponegoro Barat	Diponegoro Barat	Jl.Diponegoro Barat	Hermawan	34
Jalan : Rimba-Sombo	Rimba Darma	JL: Rimba Darma	Hariyadi	21
Jalan: Margo Bawero	Margomulyo	Jl.Margo Bawero 5	Sudarmaji	13
Jalan : Bantaran Kali Madiun	Bantaran Kali Madiun	Jl.Urip Sumoharjo	Sukir	16
Jalan : Merpati Madiun	Merpati	Jl. Merpati No 34	Sundoro	25
Jalan : Lapangan Gulun	Gulun Barokah	Jl. Asahan III/ 130	Mujiono	70
Jalan : Aloon Tengah	Mami Ceria	Jl. Sendang 39	Partoyo	80
Jalan : Yos Sudarso	Mandiri	Jl: Borobudur 2/4	Putut Langgeng Y.	24
Jalan : Serayu Timur	Serayu Timur 43	Jl. Serayu Timur	Eko Daanu	30
Jumlah Pedangang Kaki Lima Kota Madiun				1083

Sumber : DisperindagKoppar Kota Madiun, 2016.



LAMPIRAN : 10.

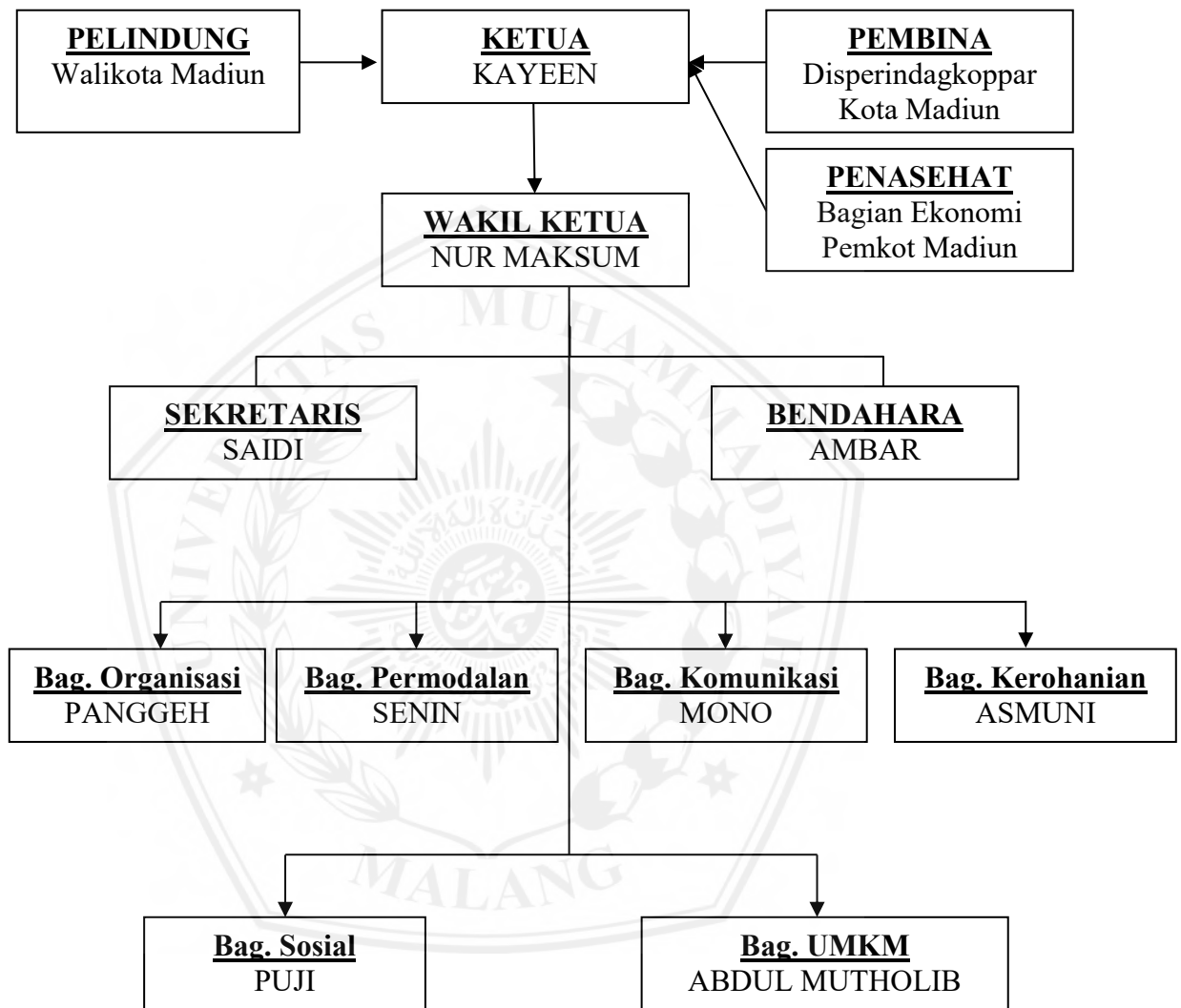
STRUKTUR PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA
“PKL KOTA MADIUN”



Sumber : Disperindagkoppar Kota Madiun 2015

Bagan 4.1 : Susunan Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Madiun

STRUKTUR PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR”KOTAK”



Sumber : Paguyuban PKL Pasar “Kotak”

Bagan 4.2 : Struktur Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasar “Kotak”

PEKERJAAN SEBELUM MENJADI PEDAGANG KAKI KAKI LIMA
KOTA MADIUN

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	Wiraswasta	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	Wiraswasta	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	Wiraswasta	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	Wiraswasta	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	Wiraswasta	
6.	Senin	Jl. Mliwis	Wiraswasta	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	Wiraswasta	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	Wiraswasta	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	Buruh	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	Wiraswasta	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	Pengangguran	
12.	Ronnie	Jl. Barito	Wiraswasta	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	Buruh	
14.	Sentot	Jl. Swoo	Wiraswasta	
15.	Partoyo	Jl Sendang	Buruh	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	Wiraswasta	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	Buruh	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	Buruh	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	Wiraswasta	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	Wiraswasta	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	Wiraswasta	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	Buruh	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	Buruh	
24.	Rusman Bagus	Jl. Mayend Sungkono 263	Wiraswasta	
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	Wiraswasta	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	Buruh	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	Wiraswasta	

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	Buruh	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	Buruh	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	Wiraswasta	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	Wiraswasta	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	Wiraswasta	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	Buruh	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	Wiraswasta	
35.	Puji	Jl. Srindit Nambangan Kidul	Wiraswasta	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	Wiraswasta	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	Buruh	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	Buruh	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	Wiraswasta	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	Buruh	
41.	Arif Joko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	Wiraswasta	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro. Gg Bebahu	Buruh	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	Buruh	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	Wiraswasta	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	Pengangguran	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	Wiraswasta	
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	Wiraswasta	
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	Wiraswasta	
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	Buruh	
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	Wiraswasta	
51.	H. Amir	Jl. Manyar 15 B	MAN	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	SMK	
53.	H. Amir	Jl. Bali	MAN	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	SMK	

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	SMA	
56.	Didik Agung Nugroho	Jl. Halmahera 22	SMA	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	SMEA	
58.	Agus Kun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	SMA	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	STM	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	SMA	
61.	Lucky	Jl. Merpati	SMEA	
62.	Wandi	Jl. Semeru	SMK	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	SMEA	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	SMA	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	SMA	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	SMK	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	SMA	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	SMK	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	SMK	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	SMK	
71.	Abdul Muntholib	Jl. Tanjung Raya	SMA	
72.	Kusno	Jl. Apel Manis	SMK	
73.	Saimin	Jl. Budo Manis	SMK	
74.	Jarwo	Jl. Bawono Manis	SMA	
75.	Kasdi	Jl. Sedor 5, Banjarejo	SMK	
76.	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	SMA	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	SMK	
78.	Reni	Jl. Salak	SMA	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	SMK	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	SMK	

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
81.	Memet	Jl. Telasih	SMA	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	SMK	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	SMA	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	SMA	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	SMEA	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	SMK	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	SMA	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	SMA	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	SMA	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	SMA	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	SMK	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	SMA	
93.	Suyanto	Jl. Jalak	SMK	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	SMA	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar30	SMA	
96.	Partoyo	Jl. Sendang 40	SMK	
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	SMK	
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	SMK	
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 44	SMA	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	SMK	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	SMA	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	SMK	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	SMA	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	SMK	

Sumber Disperindagkoppar Kota Madiun 2013.

Tabel 4.8 :Pekerjaan sebelum menjadi Pedagang Kaki Lima Kota Madiun

TINGKAT PENDIDIKAN PEDAGANG KAKI KAKI LIMA KOTA MADIUN

No	Nama	Alamat	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	SMA	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	SMA	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	STM	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	STM	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	SMEA	
6.	Senin	Jl. Mliwis	SMK	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	SMA	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	SD	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	STM	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	SMK	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	SMP	
12.	Ronnie	Jl. Barito	SMA	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	SMEA	
14.	Sentot	Jl. Swoo	SMK	
15.	Partoyo	Jl Sendang	SMA	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	SMP	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	SMK	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	SMK	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	SMA	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	SMK	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	PGAN	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	SMK	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	SMK	
24.	Rusman Bagus	Jl.Mayend Sungkono 263	SMA	

No	Nama	Alamat	Tingkat Pendidikan	Keterangan
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	SMA	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	SMK	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	SMK	
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	SMA	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	SMEA	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	SMEA	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	SMA	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	SMA	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	SMK	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	SMK	
35.	Puji	Jl.SrinditNambangan Kidul	SMEA	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	SMA	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	SMK	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	SMK	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	SMK	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	SMK	
41.	ArifJoko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	SMK	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro Gg Bebahu	SMEA	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	SMA	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	SMEA	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	SMA	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	SMK	
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	SMEA	
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	SMA	

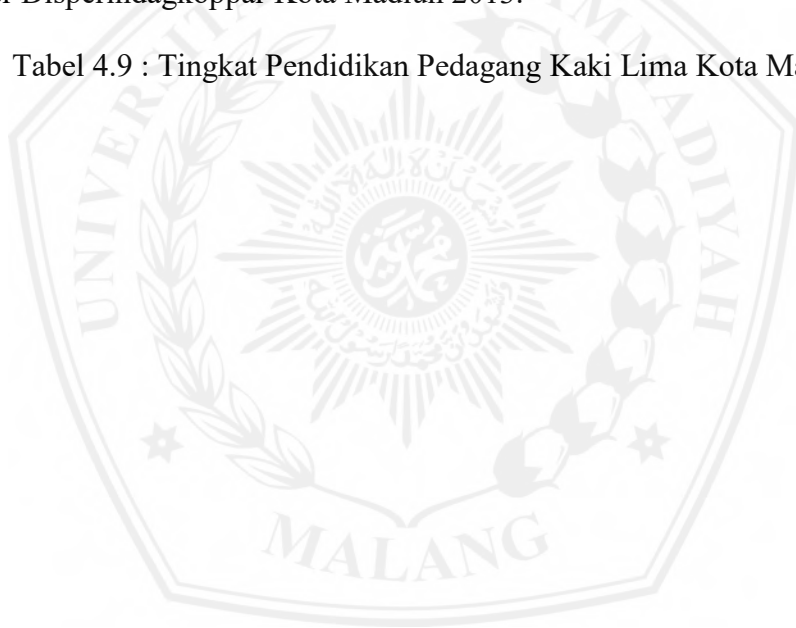
No	Nama	Alamat	Tingkat Pendidikan	Keterangan
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	SMA	
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	SMEA	
51.	H.Amir	Jl. Manyar 15 B	MAN	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	SMK	
53.	H.Amir	Jl. Bali	MAN	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	SMK	
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	SMA	
56.	DidikAgung Nugroho	Jl. Halmahera 22	SMA	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	SMEA	
58.	AgusKun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	SMA	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	STM	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	SMA	
61.	Lucky	Jl. Merpati	SMEA	
62.	Wandi	Jl. Semeru	SMK	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	SMEA	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	SMA	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	SMA	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	SMK	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	SMA	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	SMK	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	SMK	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	SMK	
71.	Abdul Muntholib	Jl. Tanjung Raya	SMA	
72.	Kusno	Jl. Apel Manis	SMK	

No	Nama	Alamat	Tingkat Pendidikan	Keterangan
73	Saimin	Jl. Budo Manis	SMK	
74	Jarwo	Jl. Bawono Manis	SMA	
75	Kasdi	Jl. Sedor 5, Banjarejo	SMK	
76	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	SMA	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	SMK	
78.	Reni	Jl. Salak	SMA	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	SMK	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	SMK	
81.	Memet	Jl. Telasih	SMA	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	SMK	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	SMA	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	SMA	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	SMEA	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	SMK	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	SMA	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	SMA	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	SMA	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	SMA	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	SMK	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	SMA	
93	Suyanto	Jl. Jalak	SMK	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	SMA	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar30	SMA	
96.	Partoyo	Jl. Sendang 40	SMK	
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	SMK	

No	Nama	Alamat	Tingkat Pendidikan	Keterangan
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	SMK	
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 44	SMA	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	SMK	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	SMA	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	SMK	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	SMA	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	SMK	

Sumber Disperindagkoppas Kota Madiun 2013.

Tabel 4.9 : Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Kota Madiun.



KEPEMILIKAN MODAL PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MADIUN

No	Nama	Alamat	Status Modal	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	Mandiri	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	Mandiri	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	Mandiri	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	Mandiri	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	Mandiri	
6.	Senin	Jl. Mliwis	Mandiri	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	Mandiri	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	Mandiri	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	Mandiri	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	Mandiri	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	Mandiri	
12.	Ronnie	Jl. Barito	Mandiri	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	Mandiri	
14.	Sentot	Jl. Swoo	Mandiri	
15.	Partoyo	Jl Sendang	Mandiri	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	Mandiri	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	Mandiri	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	Mandiri	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	Mandiri	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	Mandiri	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	Mandiri	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	Mandiri	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	Mandiri	

No	Nama	Alamat	Status Modal	Keterangan
24.	Rusman Bagus	Jl. Mayend Sungkono 263	Mandiri	
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	Mandiri	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	Mandiri	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	Mandiri	
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	Mandiri	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	Mandiri	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	Mandiri	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	Mandiri	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	Mandiri	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	Mandiri	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	Mandiri	
35.	Puji	Jl. Srindit Nambangan Kidul	Mandiri	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	Mandiri	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	Mandiri	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	Mandiri	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	Mandiri	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	Mandiri	
41.	ArifJoko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	Mandiri	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro Gg Bebahu	Mandiri	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	Mandiri	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	Mandiri	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	Mandiri	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	Mandiri	

No	Nama	Alamat	Status Modal	Keterangan
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	Mandiri	
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	Mandiri	
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	Mandiri	
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	Mandiri	
51.	H.Amir	Jl. Manyar 15 B	Kredit	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	Kredit	
53.	H.Amir	Jl. Bali	Kredit	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	Kredit	
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	Mandiri	
56.	Didik Agung Nugroho	Jl. Halmahera 22	Mandiri	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	Kredit	
58.	Agus Kun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	Kredit	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	Kredit	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	Mandiri	
61.	Lucky	Jl. Merpati	Mandiri	
62.	Wandi	Jl. Semeru	Mandiri	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	Mandiri	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	Kredit	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	Kredit	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	Mandiri	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	Mandiri	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	Mandiri	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	Kredit	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	Mandiri	
71.	Abdul	Jl. Tanjung Raya	Mandiri	

No	Nama	Alamat	Status Modal	Keterangan
	Muntholib			
72.	Kusno	Jl. Apel Manis	Kredit	
73.	Saimin	Jl. Budo Manis	Mandiri	
74.	Jarwo	Jl. Bawono Manis	Kredit	
75.	Kasdi	Jl. Sedoru 5, Banjarejo	Mandiri	
76.	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	Mandiri	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	Mandiri	
78.	Reni	Jl. Salak	Mandiri	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	Kredit	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	Mandiri	
81.	Memet	Jl. Telasih	Kredit	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	Mandiri	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	Kredit	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	Mandiri	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	Mandiri	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	Kredit	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	Mandiri	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	Kredit	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	Kredit	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	Kredit	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	Mandiri	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	Mandiri	
93.	Suyanto	Jl. Jalak	Mandiri	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	Mandiri	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar30	Mandiri	

No	Nama	Alamat	Status Modal	Keterangan
96.	Partoyo	Jl. Sendang 40	Kredit	
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	Kredit	
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	Mandiri	
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 44	Mandiri	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	Mandiri	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	Kredit	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	Kredit	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	Mandiri	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	Kredit	

Sumber Disperindagkoppar Kota Madiun 2013.

Tabel 4.10. : Kepemilikan Modal Pedagang Kaki Lima Kota Madiun.

PENDAPATAN NETTO SETIAP HARI PEDAGANG KAKI KAKI LIMA
KOTA MADIUN

No	Nama	Alamat	Besarnya Pendapatan (Rp)	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	100.000	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	100.000	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	100.000	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	150.000	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	150.000	
6.	Senin	Jl. Mliwis	100.000	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	100.000	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	200.000	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	100.000	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	100.000	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	150.000	
12.	Ronnie	Jl. Barito	150.000	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	100.000	
14.	Sentot	Jl. Swoo	140.000	
15.	Partoyo	Jl Sendang	150.000	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	130.000	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	150.000	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	130.000	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	140.000	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	140.000	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	100.000	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	100.000	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	120.000	
24.	Rusman Bagus	Jl. Mayend Sungkono	120.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Pendapatan (Rp)	Keterangan
		263		
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	150.000	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	100.000	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	140.000	
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	130.000	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	120.000	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	100.000	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	100.000	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	120.000	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	110.000	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	100.000	
35.	Puji	Jl. Srindit Nambangan Kidul	120.000	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	130.000	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	140.000	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	100.000	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	120.000	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	140.000	
41.	Arif Joko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	130.000	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro Gg Bebahu	140.000	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	120.000	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	130.000	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	120.000	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	120.000	
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	130.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Pendapatan (Rp)	Keterangan
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	140.000	
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	120.000	
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	130.000	
51.	H.Amir	Jl. Manyar 15 B	120.000	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	130.000	
53.	H.Amir	Jl. Bali	100.000	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	120.000	
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	130.000	
56.	Didik Agung Nugroho	Jl. Halmahera 22	120.000	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	200.000	
58.	Agus Kun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	140.000	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	130.000	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	140.000	
61.	Lucky	Jl. Merpati	140.000	
62.	Wandi	Jl. Semeru	120.000	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	130.000	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	110.000	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	120.000	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	100.000	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	150.000	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	140.000	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	130.000	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	140.000	
71.	Abdul Muntholib	Jl. Tanjung Raya	120.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Pendapatan (Rp)	Keterangan
72	Kusno	Jl. Apel Manis	110.000	
73	Saimin	Jl. Budo Manis	120.000	
74	Jarwo	Jl. Bawono Manis	140.000	
75	Kasdi	Jl. Sedor 5, Banjarejo	150.000	
76	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	150.000	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	160.000	
78.	Reni	Jl. Salak	130.000	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	150.000	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	100.000	
81.	Memet	Jl. Telasih	120.000	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	130.000	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	100.000	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	120.000	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	140.000	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	150.000	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	160.000	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	150.000	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	200.000	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	140.000	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	150.000	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	140.000	
93	Suyanto	Jl. Jalak	150.000	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	160.000	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar30	140.000	
96.	Partoyo	Jl. Sendang 40	150.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Pendapatan (Rp)	Keterangan
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	120.000	
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	130.000	
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 44	140.000	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	200.000	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	170.000	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	130.000	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	140.000	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	130.000	

Sumber Disperindagkoppar Kota Madiun 2016.

Tabel 4.9 : Tingkat Pendapatan netto/hari Pedagang Kaki Lima Kota Madiun.

**JUMLAH ANGGOUTA KELUARGAPEDAGANG KAKI LIMA
KOTA MADIUN**

No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	6	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	6	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	5	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	5	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	4	
6.	Senin	Jl. Mliwis	6	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	5	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	5	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	6	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	6	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	4	
12.	Ronnie	Jl. Barito	4	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	5	
14.	Sentot	Jl. Swoo	5	
15.	Partoyo	Jl Sendang	6	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	4	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	5	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	5	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	4	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	5	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	6	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	7	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	4	
24.	Rusman Bagus	Jl. Mayend Sungkono 263	5	

No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota	Keterangan
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	5	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	5	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	5	
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	5	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	4	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	4	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	4	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	4	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	4	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	5	
35.	Puji	Jl. Srindit Nambangan Kidul	4	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	4	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	5	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	4	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	5	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	5	
41.	Arif Joko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	4	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro Gg Bebahu	5	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	4	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	5	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	5	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	5	
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	4	
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	4	
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	5	

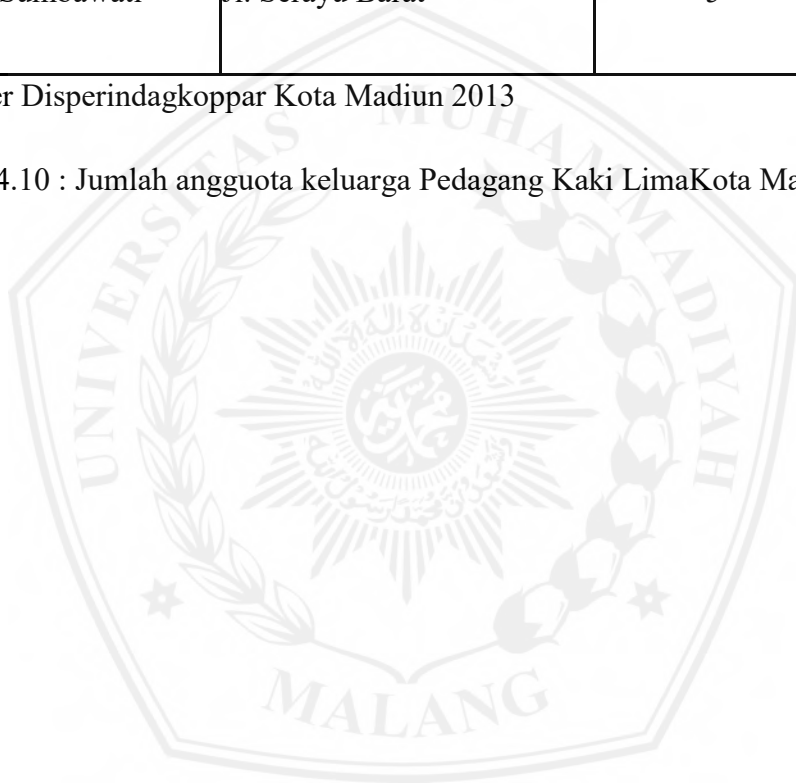
No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota	Keterangan
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	4	
51.	H.Amir	Jl. Manyar 15 B	4	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	5	
53.	H.Amir	Jl. Bali	5	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	4	
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	4	
56.	Didik Agung Nugroho	Jl. Halmahera 22	3	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	4	
58.	Agus Kun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	5	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	5	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	4	
61.	Lucky	Jl. Merpati	4	
62.	Wandi	Jl. Semeru	5	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	5	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	5	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	4	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	3	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	4	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	4	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	5	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	4	
71.	Abdul Muntholib	Jl. Tanjung Raya	5	
72.	Kusno	Jl. Apel Manis	5	
73.	Saimin	Jl. Budo Manis	4	

No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota	Keterangan
74.	Jarwo	Jl. Bawono Manis	4	
75.	Kasdi	Jl. Sedoru 5, Banjarejo	4	
76.	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	6	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	5	
78.	Reni	Jl. Salak	5	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	4	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	4	
81.	Memet	Jl. Telasih	5	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	3	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	4	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	5	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	5	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	4	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	4	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	5	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	4	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	4	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	5	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	3	
93.	Suyanto	Jl. Jalak	4	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	4	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar30	4	
96.	Partoyo	Jl. Sendang 40	4	
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	5	
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	5	

No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota	Keterangan
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 44	3	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	3	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	4	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	4	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	5	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	5	

Sumber Disperindagkoppar Kota Madiun 2013

Tabel 4.10 : Jumlah anggota keluarga Pedagang Kaki Lima Kota Madiun



JENIS DAGANGAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MADIUN

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	Makanan	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	Makanan	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	Makanan	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	Makanan	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	Makanan	
6.	Senin	Jl. Mliwis	Minuman	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	Minuman	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	Makanan	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	Makanan	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	Makanan	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	Makanan	
12.	Ronnie	Jl. Barito	Makanan	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	Makanani	
14.	Sentot	Jl. Swoo	Makanan	
15.	Partoyo	Jl Sendang	Makanan	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	Makanan	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	Minuman	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	Minuman	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	Minuman	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	Minuman	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	Minuman	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	Minuman	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	Minuman	
24.	Rusman Bagus	Jl. Mayend Sungkono 263	Minuman	

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Keterangan
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	Makanan	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	Makanan	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	Minuman	
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	Minuman	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	Minuman	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	Minuman	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	Minuman	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	Minuman	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	Makanan	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	Makanan	
35.	Puji	Jl. Srindit Nambangan Kidul	Makanan	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	Makanan	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	Peralatan	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	Minuman	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	Minuman	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	Peralatan	
41.	Arif Joko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	Peralatan	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro Gg Bebahu	Makanan	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	Makanan	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	Peralatan	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	Peralatan	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	Minuman	
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	Minuman	
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	Makanan	

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Keterangan
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	Makanan	
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	Peralatan	
51.	H.Amir	Jl. Manyar 15 B	Peralatan	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	Peralatan	
53.	H.Amir	Jl. Bali	Elektronik	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	Elektronik	
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	Elektronik	
56.	Didik Agung Nugroho	Jl. Halmahera 22	Elektronik	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	Elektronik	
58.	Agus Kun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	Elektronik	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	Elektronik	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	Elektronik	
61.	Lucky	Jl. Merpati	Makanan	
62.	Wandi	Jl. Semeru	Makanan	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	Makanan	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	Makanan	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	Makanan	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	Minuman	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	Minuman	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	Minuman	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	Minuman	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	Minuman	
71.	Abdul	Jl. Tanjung Raya	Minuman	

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Keterangan
	Muntholib			
72.	Kusno	Jl. Apel Manis	Elektronik	
73.	Saimin	Jl. Budo Manis	Elektronik	
74.	Jarwo	Jl. Bawono Manis	Elektronik	
75.	Kasdi	Jl. Sedor 5, Banjarejo	Elektronik	
76.	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	Elektronik	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	Elektronik	
78.	Reni	Jl. Salak	Makanan	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	Makanan	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	Makanan	
81.	Memet	Jl. Telasih	Makanan	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	Makanan	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	Makanan	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	Minuman	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	Minuman	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	Minuman	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	Minuman	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	Minuman	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	Minuman	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	Minuman	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	Elektronik	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	Elektronik	
93.	Suyanto	Jl. Jalak	Elektronik	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	Elektronik	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar30	Elektronik	

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Keterangan
96.	Partoyo	Jl. Sendang40	Makanan	
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	Makanan	
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	Makanan	
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 4	Makanan	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	Minuman	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	Elektronik	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	Elektronik	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	Makanan	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	Minuman	

Sumber Disperindagkoppar Kota Madiun 2013



Tabel 4.10. : Kepemilikan Modal Pedagang Kaki Lima Kota Madiun.

MODAL AWAL PEDAGANG KAKI KAKI LIMA KOTA MADIUN

No	Nama	Alamat	Besarnya Modal Awal (Rp)	Keterangan
1.	Sudarmaji	Jl. Semeru 12	1.000.000	
2.	Asmuni	Jl. Pandan 10	1.000.000	
3.	Kayeen	Jl. Raya Nglames	1.000.000	
4.	Nur Maksum	Jl. Setinggil 12	1.500.000	
5.	Ambar	Jl. Sriti Madiun	150.000	
6.	Senin	Jl. Mliwis	100.000	
7.	Sueb	Jl. Gajahmada 10	100.000	
8.	Panggeh	Jl. Bawono Manis 12	200.000	
9.	Mono	Jl. Nori No 112	100.000	
10.	Johanes	Jl. Barito 25	100.000	
11.	Tukinah	Jl. Bawono Manis	150.000	
12.	Ronnie	Jl. Barito	150.000	
13.	Nur Rohmah	Jl Gelatik 20	100.000	
14.	Sentot	Jl. Swoo	140.000	
15.	Partoyo	Jl Sendang	150.000	
16.	Harjito	Jl. Sendang 19	130.000	
17.	Bambang	Jl. Kauman 12	150.000	
18.	Sundoro	Jl. Banataran Kali	130.000	
19.	Mujiono	Jl. Nusa Penida	140.000	
20.	Hari M	Jl. Stadion Wilis	140.000	
21.	Abdul Mutholib	Jl. Tanjung Raya 8	100.000	
22.	Suparno	Jl. Purwosari No 2	100.000	
23.	Subiyono	Jl. Panglima Sudirman	120.000	
24.	Rusman Bagus	Jl.Mayend Sungkono 263	120.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Modal Awal (Rp)	Keterangan
25.	H.Amir	Jl. Manyar 15 b	150.000	
26.	Supto Sugiarto	Jl. Kartini	100.000	
27.	Widodo	Jl. Truno Lantaran 12 b	140.000	
28.	Agung Nugroho	Jl. Urip Sumoharjo	130.000	
29.	Agus Kun W	Jl. Kauman Gg Modin	120.000	
30.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro 8	100.000	
31.	Rohman Sh	Jl. Cokro Aminoto 3 b	100.000	
32.	R. Yoke S	Jl. Merpati 30	120.000	
33.	Saidi	Jl. Takeran Magetan	110.000	
34.	Ambar	Jl. Bali 20	100.000	
35.	Puji	Jl. Srindit Nambangan Kidul	120.000	
36.	Wiji Ati	Jl. Salak 100	130.000	
37.	Tuiman	Jl. Nusa Penida No.1	140.000	
38.	Soeyoto	Jl. Nusatenggara 1	100.000	
39.	Basuki	Jl. Kopol Sunaryo	120.000	
40.	Agus Suhendar	Jl. Coroaminoto Madiun	140.000	
41.	Arif Joko Prihanto	Jl. Mangga No. 50	130.000	
42.	Sumiatun	Jl. Anjasmoro Gg Bebahu	140.000	
43.	Yanto Wiyono	Jl. Merbabu	120.000	
44.	Winarsih	Jl. Pandan	130.000	
45.	Mukayyin	Jl. Merpati Gg Berkisar	120.000	
46.	Pri Haryono	Jl. Cendrawasih	120.000	
47.	Tristiana	Jl. Merpati 50	130.000	
48.	Sugiyanto	Jl. Sendang Barat 03/02	140.000	
49.	Sujarti	Jl. Sendang Timur	120.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Modal Awal (Rp)	Keterangan
50.	Rina Handayani	Jl. Seram 02	130.000	
51.	H.Amir	Jl. Manyar 15 B	120.000	
52.	Puryanto	Jl. Merak 10	130.000	
53.	H.Amir	Jl. Bali	100.000	
54.	Sukoyo	Jl. Srindit	120.000	
55.	Widodo	Jl. Pandan 20	130.000	
56.	Didik Agung Nugroho	Jl. Halmahera 22	120.000	
57.	Fatimah	Jl. Kenari 13	200.000	
58.	Agus Kun Wahyudi	Jl. : Kauman Gg Muria	140.000	
59.	Suparno	Jl. Purwosasri 25	130.000	
60.	Sakat	Jl. Majend Sungkono 362	140.000	
61.	Lucky	Jl. Merpati	140.000	
62.	Wandi	Jl. Semeru	120.000	
63.	Ira Susanti	Jl. Mliwis	130.000	
64.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 40	110.000	
65.	Faizin	Jl. Ramumenggalan	120.000	
66.	Kusno	Jl. Trunolantaran	100.000	
67.	Saimin	Jl. Setya Budi	150.000	
68.	Purnomo	Jl. Lejend Haryono	140.000	
69.	Sarwan	Jl. Husni Thamrin 100	130.000	
70.	Imam Syahri	Jl. Joiranan 20	140.000	
71.	Abdul Muntholib	Jl. Tanjung Raya	120.000	
72.	Kusno	Jl. Apel Manis	110.000	
73.	Saimin	Jl. Budo Manis	120.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Modal Awal (Rp)	Keterangan
74.	Jarwo	Jl. Bawono Manis	140.000	
75.	Kasdi	Jl. Sedoru 5, Banjarejo	150.000	
76.	Endang Sekarwati	Jl. Wilis Stadion	150.000	
77.	Agus Supriyanto	Jl. Panjaitan 100	160.000	
78.	Reni	Jl. Salak	130.000	
79.	Wiwik Indriati	Jl. Margo Bawero	150.000	
80.	Hermawan	Jl. Diponegoro	100.000	
81.	Memet	Jl. Telasih	120.000	
82.	Yarnely	Jl. Serayu	130.000	
83.	Winarko	Jl. Dwi Sutanto	100.000	
84.	Johanes Riyono	Jl. Jalan Nori	120.000	
85.	Kurni Ambarwati	Jl. Menco	140.000	
86.	Sudarmaji	Jl. Margo Bawero	150.000	
87.	Setyo Rahardi	Jl. Sidoluhur	160.000	
88.	Sukir	Jl. Bantaran Kali Madiun	150.000	
89.	Tri Retyastono	Jl. Muria	200.000	
90.	Ani Setyowati	Jl. Merapi	140.000	
91.	Sundoro	Jl. Merpati	150.000	
92.	Riyadi	Jl. Srindit	140.000	
93.	Suyanto	Jl. Jalak	150.000	
94.	Mujiono	Jl. Asahan III/ No. 130	160.000	
95.	Slamet Riyanto	Jl. Kampar 30	140.000	
96.	Partoyo	Jl. Sendang 40	150.000	
97.	Sugiyanto	Jl. Dr. Cipto Madiun	120.000	
98.	Puryadi	Jl. Seram 22	130.000	

No	Nama	Alamat	Besarnya Modal Awal (Rp)	Keterangan
99.	Putut Langgeng	Jl. Borobudur Gg II No 44	140.000	
100.	Rahmat Harianto	Jl. Yos Sudarso 22	200.000	
101.	Angga	Jl. Candi Sewu	170.000	
102.	Eko Danu	Jl. Serayu Timur	130.000	
103.	Ria	Jl. Serayu 100	140.000	
104.	Sumbawati	Jl. Serayu Barat	130.000	

Sumber Disperindagkoppar Kota Madiun 2016.

Tabel 4.9 : Modal awal Pedagang Kaki Lima Kota Madiun.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG PROGRAM PASCASARJANA

Kampus I, Jl Bandung No. 01 Malang +62-341-551253 Fax +621-341-562124
Kampus III Gedung ICT Lantai II Jl Raya Tlogomas 246 Malang, Telp. +62-341-464318-19 ext. 267. Fax. +62-341-460435

Nomor : E.7.d/264/PPs-UMM/II/2016
Lamp. : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian*

Malang, 19 Februari 2016

Kepada Yth : **Kepala Kes Bang Pol Kota Madiun Jl. Udowo Madiun**

- 1.SURAT IJIN PENELITIAN DARI KESBANGPOL KOTA MADIUN.
- 2.SURAT IJIN PELETIAN DARI PROGRAM PASCA SARJANA UMM.





PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Krida Praja Lt. III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137

Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153

Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 537 /401.203/2016

- Dasar** : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
- b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 19 Februari 2016 Nomor : E.7.d/264/PPs-UMM/II/2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama** : AGUS PRASTYA
- Tempat/tgl. Lahir** : Madiun, 05 Agustus 1963
- Alamat** : Jl. Pesanggrahan VIII No. 5 RT.037 RW.009 Mojorejo Kota Madiun
- Judul Penelitian** : Perlawanan tersembunyi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Madiun
- Tujuan penelitian** : Mengetahui manfaat relokasi dan hambatannya
- Tempat penelitian** : 1. Pasar Kotak Kota Madiun
2. Disperindagkoppar Kota Madiun
- Waktu penelitian** : Enam (6) Bulan
- Bidang penelitian** : Sosial
- Status penelitian** : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
- Anggota peneliti** : -
- Dengan ketentuan** : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidak berlaku ;
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 20 Mei 2016

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

BAMBANG SUBANTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan

Yth. 1. Bapak Walikota Madiun

(Sesuai Lampiran)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA MITRA

DALAM KEGIATAN ABDIMAS 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Ketua : Didik Kusmahadi. SE
2. Jabatan di kelompok masyarakat mitra : Sekretaris.
3. Nama Kelompok masyarakat mitra : Disperdagkoppar,
4. Bidang usaha : Perdagangan , Perindustrian,
Koperasi dan Wisata.
5. Alamat Usaha : Jalan Salak No 67 Kota Madiun

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan pelaksana Abdimas

Nama : Drs. Agus Prasetya. MSi
Fakultas : FKIP-UT.

Guna melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah disepakati sebelumnya dan bersedia memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Abdimas.

Dengan ini pula bahwa kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara saya dengan pelaksana kegiatan kegiatan program Abdimas 2016 tidak ada ikatan keluarga dan kaita usaha dalam wujud apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur yang memaksa dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Madiun. 16 Mei 2016

Disperdagkoppar Kota Madiun



Didik Kusmahadi, SE.

NIP. 19581031198403 1 006



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Krida Praja Lt. III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
 Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
 Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 537 /401.203/2016

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 19 Februari 2016 Nomor : E.7.d/264/PPs-UMM/II/2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : AGUS PRASTYA
 Tempat/tgl. Lahir : Madiun, 05 Agustus 1963
 Alamat : Jl. Pesanggrahan VIII No. 5 RT.037 RW.009 Mojorejo Kota Madiun
 Judul Penelitian : Perlawanan tersembunyi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Madiun
 Tujuan penelitian : Mengetahui manfaat relokasi dan hambatannya
 Tempat penelitian : 1. Pasar Kotak Kota Madiun
 2. Disperindagkopar Kota Madiun
 Waktu penelitian : Enam (6) Bulan
 Bidang penelitian : Sosial
 Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
 Anggota peneliti : -
 Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidak berlaku ;
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 21 Mei 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan
 Yth. ① Bapak Walikota Madiun
 (sebagai Lampiran)

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kayeen
Alamat : Nglames, Kabupaten Madiun.
Jabatan : Ketua Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan terselubung Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakan semestinya.

Madiun, 12 Februari 2016

Informan

Kayen

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Senin
 Jabatan : Anggota Paguyuban
 Alamat : Takeran, Magetan.

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansesungguhnya.

Madiun, 12 Februari 2016
 Informan

Senin

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ambar

Alamat : Perumnas Manisrejo 2 Kota Madiun.

Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansesungguhnya.

Madiun, 12 Februari 2016

Ambar

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eny
Alamat : Jalan Barito. Kota Madiun.
Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansesungguhnya.

Madiun, 12 Februari 2016

Informan

Eny

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suaeb
Alamat : Jalan Sriti, Nambangan Kidul, Kota Madiun.
Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakan semestinya.

Madiun, 12 Februari 2016

Informan

Suaeb

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Menik
Alamat : Jiwan, Madiun.
Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mhasaiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansesungguhnya.

Madiun, 12 Februari 2016
Informan

Menik

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puji
Alamat : Jalan Sriti, Madiun.
Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakan semestinya.

Madiun, 12 Februari 2016
Informan

Puji

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tanem

Alamat : Peumnas Manisrejo 1 Kota Madiun

Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakan semestinya.

Madiun, 12 Februari 2016
Informan

Tanem

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanes

Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang KakiLima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansementaranya.

Madiun, 12 Februari 2016

Informan

Johannes

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saidi.

Jabatn : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansementaranya.

Madiun, 12 Februari 2016

Informan

Saidi

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Tatiek

Jabatn : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menususn disertasisitentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansimestinya.

Madiun, 12 Februari 2016
Informan

Tatiek

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mono

Jabatn : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mhasaiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansesungguhnya.

Madiun, 12Juni 2016

Informan

Mono

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santoso

Jabatn : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti. Dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan tersembunyi Pedagang KakiLima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansesungguhnya.

Madiun, 12 Februari 2016

Informan

Raharjo

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprpto

Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti, dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan terselubung Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakan semestinya.

Madiun, 12 Februari 2016
Informan

Suprpto

Wawancara hari Minggu, 12 Februari 2016.

PERNYATAAN WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surip

Jabatan : Anggota Paguyuban

Menyatakan bahwa telah diwawancarai oleh saudara Drs.Agus Prasetya,MSi. Mahasiswa pasca sarjana / S3 Universitas Muhamadiyah Malang. Selaku peneliti dalam rangka menyusun disertasi tentang Perlawanan Rakyat Terhadap Negara (Studi Perlawanan terselubung Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Madiun pada Kebijakan Relokasi ke Pasar Kotak).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga keterangan ini dapat digunakansementaranya.

Madiun, Mei 2016
Informan

Santoso

Wawancara hari Minggu, 19 Februari 2016.

TRANSKIP WAWANCARA

PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN

RELOKASI PEMERINTAH KOTA MADIUN

(Studi Kasus :Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup)

Hasil wawancara Pedagang

1. Nama : Nur Maksum
- Pekerjaan : Pedagang Kaca Mata
- Status : Wakil Ketua Paguyuban Pedagang
- Alamat : Jalan Setinggil, Demangan Kota
- Tanggal : 12 Februari 2016, 10.00. Wib.
- Hasil wawancara :

“saya sebagai pedagang tidak dapat menolak program pemerintah kota untuk relokasi dari jalan Batanghari ke Pasar “Kotak”. Awalnya marah, kecewa, saya optimis bahwa tempat baru jualan lebih prospektif dan optimis. nantinya menjadi tempat yang baik untuk dagang. Secara hukum tempatnya sudah pasti, saya yakin pelanggan, konsumen akan datang kembali ke pasar “Kotak”.

Hormat Saya

Nur Maksum

2. Nama : Kayeen
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Nglames Kabupaten Madiun.
Tanggal wawancara : 21 Februari 2016, pukul 10.30 wib.
Status : Ketua Paguyuban.
Hasil wawancara :

“Saya harus relokasi ke pasar “Kotak” karena memenuhi pemerintah kota Madiun, tidak dapat menolak, yach bagaimana lagi sebagai pedagang yang menempati lahan pemkot, saya akhirnya relokasi daganga sebenarnya hati kecil tetap ingin berjualan di jalan Batanghari, sudah lama, ramai, pelanggan, konsumen sudah banyak, mulai lagi dari noll, kalau kecewa yaa kecewa tetapi ya harus mengikuti program pemkot”

Hormat Saya

Kayeen.

3. Nama : Senin
- Pekerjaan : Pedagang
- Alamat : Desa Takeran, Kabupaten Magetan.
- Tanggal wawancara : 21 Februari 2016 pukul 10.00 wib.
- Status : Pedagang
- Hasil wawancara :

“Tempat nya jualan hanya 2x3 Meter, yaac gimana lagi ini program pemerintah kota Madiun. Sebenarny juga kecewa, di tempat jalan Batang hari sudah lama, banyak pelanggan, konsumen sudah hafal. Kita tidak dapat menolak karena saya dan teman-teman tidak mempunyai hak milik apa-apa hanya numpang lahan milik pemkot, tempatnya sekarang sudah permanent dan legal secara hukum, yang dulu tempat tidak legal, yakni trotoar jalan”

Hormat Saya

Senin

4. Nama : Suaeb
Pekerjaan : Pedagang alat sepeda motor
Alamat : jalan Taman Kota Madiun
Tanggal Wawancara : 21 Februari 2016
Status : Anggota Paguyuban
Hasil wawancara :

“Saya hanya menempati lahan jualan Takim depan lokasi ini, saya tidak dapat menolak, program pemkot untuk relokasi pedagang dari jalan Batanghari ke pasar “Kotak”, sebenarnya kecewa juga suruh pindah dari tempat lama yang ramai, strategis pelanggan sudah banyak, Tetapi yaa gimana lagi, kita tidak dapat menghindari program pemerintah. Awal nya yaa marah-protes, akhirnya Kita terima saja kedepan lokasi pasar Kotak akan menjadi ramai pelanggan akan kembali ke tempat saya”.

Hormat Saya

Suaeb

5. Nama : Mbah Tanem
- Pekerjaan : Warung Kopi
- Alamat : Manisrejo, Taman Kota
- Tanggal wawancara : 21 Februari 2016
- Status : anggota
- Hasil wawancara :

“saya lahir tahun 1921, umur : 95 tahun, sebenarnya anak saya sudah tidak boleh jualan tetapi mengganggu tidak enak bikin saya sakit tidak bergerak, yaa saya tidak setuju relokasi sebenarnya masih enak disana jalan Batanghari, tetapi ini perintah walikota yaac ikut saja, saya yakin besok menjadi ramai awalnya kaget juga harus relokasi ke tempat baru jauh lagi lebih 10 KM, tetapi gimana lagi saya selama ini jualan numpang di jalan Batanghari illegal lagi karena tempat tersebut sebenarnya trotoar, sekarang di pasar “Kotak” legal tidak lagi di uber-uber petugas.”

Hormat saya

Mbah Tanem

Sukinem

7. Nama : Warni
- Pekerjaan : pedagang warung kopi
- Alamat : Kota Madiun.
- Tanggal wawancara : 28 Februari pukul : 25.
- Status : anggota paguyuban
- Hasil wawancara :

“ saya pedagang baru di tempat lama, jalan Batanghari baru 3 bulan karena disuruh pindah yaa pindah dari lokasi lama ke pasar “Kotak”. Di tempat baru sepi pembeli mungkin karena baru. Saya harus pindah kesini karena perintah pemerintah kota Madiun, yaa gimana lagi wong cilik harus patuh pemerintah kita kan nunut lokasi jualan. Hati marah, kecewa, mangkel ngrasani kebijakan pemerintah kota. Mbabat lagi bapak paling ramainya 2 – 5 tahun kedepan’ otomatis pendapatan kurang, sebab pelanggan, konsumen hilang.”

Hormat Saya

Warni

8. Nama : Eny “Rawon”
Pekerjaan : Warung Rawon, Pecel jalan Barito.
Alamat : Pandean Kota Madiun.
Tanggal wawancara : 14 Februari 2016.
Status : anggota paguyuban
Hasil wawancara :

“ saya sudah sejak tahun 70 an jualan pecel, rawon, dulu yang jualan Ibu saya, sehingga tempat ini sudah puluhan, wah kalau pindah gimana langganan saya, apalagi tempatnya jauh sekali 10 Km dari tempat ini. Lapak ini saya pasang sendiri bahannya saya beli sendiri, saya tidak mau relokasi makan apa nanti keluarga. Bukannya saya membandel dengan program pemerintah pokoknya tetap jualan disini wis banyak konsumennya dan strategis tempatnya, mohon bapak aparat tidak usir saya dari sini.”

Hormat Saya

Eny

9. Nama : Menik
- Pekerjaan : Warung Kopi
- Alamat : Jalan Srindit Nambangan Kidul Kota Madiun.
- Tanggal Wawancara : 29 Februari 2016
- Status paguyuban : Anggauta
- Hasil wawancara :

“saya sudah jualan warung kopi di jalan Batanghari 20 tahun, sudah mempunyai pelanggan Yang banyak,jika di tempat lama jualan ramai terus selama seminggu Karena jalan Batanghari dilalui orang sepanjang masa, di pasar kotak masih sepi pelanggan hilang semua dan tempat Lama jauh dari pasar “Kotak”, repot mas, susah mencari uang disini kadangkala sehari dapat ratusan ribu sekarang carai lima puluh ribu saja sulit ampuun, dan tidak ada pesangon dari pemkot, beginilah tempat nya apa adanya tidak ada modal mas”.

Hormat Saya

Menik

10. Nama : Puji
Pekerjaan : jualan alat-alat sepeda motor.
Alamat : Jalan gelatik Maadiun
Tanggal wawancara : 29 Februari 2016
Status di Paguyuban : anggauta
Hasil wawancara :

“tidak ada uang pesangon untuk pedagang, yang penting tanggal 31 Januari 2016 harus relokasi ke pasar “Kotak” tidak boleh ditunda jika tidak bersedia ditindak oleh aparat satpol PP. Nasib orang cilik mas diusir, diusir lagi padahal saya dan suami sudah sejak 1980. Kecewa marah yaagimana lagi padahal pelanggan saya sudah banyak nanti cari pelanggan lagi, sedang untuk buatlapak baru saja tidak mampu kecuali hanya seperti ini.”

Hormat Saya

Puji

11. Nama : Ambar
Pekerjaan : Warung Soto
Alamat : Manisrejo Perumnas 1 Kota Madiun.
Status Paguyuban : anggota paguyuban
Hasil wawancara :

“Demi Allah mas, tidak ada pesangon dari Pemkot Madiun disuruh pindah begitu saja tanpa jika tidak mau lapak di robohkan tetap direlokasi paksa ke pasar “Kotak”, mereka hanya janji ada ganti lapak, tetapi kenyataan hanya omong an saja. Kecewa, marah, bohong. Tega betul karena sudah sejak 1972 jualan kopi. Ini usaha turun temurun dari ibu saya bapak, sehingga relokasi ini hilang lah semua pelanggan, konsumen saya di tempat lama, mulai dari noll lagi.

Hormat Saya

Ambar

12 Nama : Warung Soto “ Johannes”

Pekerjaan : Warung Soto

Alamat : Jalan Siak Taman Kota Madiun

Tanggal wawancara : 20 Maret 2016

Status Paguyuban : Anggauta

Hasil wawancara :

“saya kesulitan modal, mas, karena tidak ada pesangon sedikitpun/ satu sen dari Pemkot jualan selama ini yang cukup pelanggan di Jalan Nori, harus tutup mendadak sehingga ekonomi rumah berhenti berdenyut matilah saya dan keluarga, anak-anak butuh biaya sekolah untuk beli buku, SPP, seragam, makan minum suami tidak kerja hanya andalkan jualan Soto. Pernah ketemu pejabat Pemkot, katanya ada pesangon, akan dibantu buat lapak baru ternyata nol besar. Mas. Sumpah, mas beliau janjikan sangu karena saya tetangganya, tetapi sampai saat ini tidak ada bantuan sana sekali, bahkan ada niatan jual lapak disini tetapi makan apa jika tempat jualan ini saya jualan, mau pinjam modal tidak ada yang minjami, pusing sing sing kepala.

Hormat Saya

Johannes

13. Nama : SAIDI
Alamat : Jalan Merpati Madiun.
Tanggal : 20 Maret 2016
Status : Anggauta Paguyuban
Hasil wawancara :

“Yaa sabar mas, nanti pelan-pelan ramai pelanggan kembali datang kesini. Ya tempat disini masih sepi ramainya hanya Sabtu, dan minggu, berbeda di Batanghari jalan ramai pusat kota banyak pembeli lewat. Pelanggan. Konsumen yang lama hilang semua sehingga kembalikan pelangganperlu waktu beberapa saat. Sebenarnya menolak relokasi tetapi Pemkot demikian niat kita harus patuh, iku`I 23 bila tidak kita diusir, dan tidak boleh jualan lagi. Kecewa, marah, sakit hati, yaa pasrahlah ma.”

Hormat Saya

SAIDI

14. Nama : Tatiek

Pekerjaan : Jalan Penjahit Baju

Alamat : Jalan Imam Bonjol kota Madiun.

Tanggal : 20 Maret 2016

Status : Penjahit.

Hasil wawancara :

“Saya sudah beberapa tahun menempati lokasi menjadi penjahit tetap, bukan pedagang relokasidari jalan Batanghari, jalan Nori. Saya kontrak kios ini 3 juta pertahun yaah tempat dulu sepi tapi saat ini ramai, apalagi ada pindahan dari jalan Barito, jalan Batanghari, Jalan Nori. Saya tidak ada dampak apapun karena tidak menjahit di tempat lain, yaa itu semua program pemkotuntuk menata pedagang, dan membuka ruang terbuka hijau (RTH) Maksud pemkot baik demi kota Madiun indah. Tertib, sehat, aman.”

Hormat Saya

Tatiek

15. Nama : Warung Kopi “BRI” Pojok utara Pasar “Kotak”

Alamat : Jalan Imam Bonjol Kota Madiun.

Tanggal wawancara : 20 Maret 2016

Status : Pedagang Kaki Lima.

Hasil wawancara :

“sudah lama saya jualan warung ini mas, bukan pedagang kaki lima pindahan dari jalan Batanghari, jalan Nori, Jalan Barito sehingga tempat ini bagi saya tidak ada dampak, karena saya sudah lama jualan warung kopi. Yaa maksud Pemkot Madiun baik, agar pedagang kaki lima jadi satu di pasar Kotak, tooh disini seluruh pedagang kaki lima berkumpul disini, antara lain pasar loak, pasar burung, pasar buah, sehingga tepat bila pedagang tersebut kumpul di pasar “Kotak”.

Hormat Saya

Bu BRI

16. Nama : Warung Kopi pak Ronnie
- Alamat : Jl. Barito, Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun.
- Tanggal wawancara : 27 Maret 2016/ jam 14.00 Wib.
- Status : Pedagang Kaki Lima
- Hasil wawancara :

“Sudah lama, mas saya jualan di pasar Loak Jalan Batanghari, karena usaha ini turun temurun sehingga waktu disuruh pindah yaa berat sekali, terlanjur pelanggan banyak dan tempatnya diJalan Batanghari strategis pusat kota dekat Alun-alun. Bagaimanan lagi mas, wong ora duwe kuasa, kan tempat dagang ditrotoar yaa manut saja disuruh pindah, jika tidak pasti dipaksa olehsatpol PP. Tidak ada bantuan apa-apa hanya uang kopi/teh Rp 50.000,- tetapi sewaktu kumpul di Kantor Satpol PP hanya diberikan Rp 20.000,-. Yaa “Mentolo disunat”. Tidak pesangon apapun Pemkot, Sehingga semuanya mandiri. Jika ada pedagang yang masih bertahan, diboletkan jualan yaa “itupilih kasih, ora adil. Wong regane Rawon mahal di warung e mbak eny.”

Hormat Saya

Ronnie

17. Nama : Tukinah
 Alamat : Jalan Imam Bonjol, Pasar Kotak/ asli Sragen
 Tanggal wawancara : 27 Maret 2016
 Status : Pedagang Kaki Lima
 Hasil wawancara :

“sudah lama jualan mas, di jalan Batanghari disana pelanggan banyak karena tempatnya strategis dekat Alun-alun, pasar besar, maka pembeli lalu lalang di depan warung saya. Disini sepi ramainya hanya Minggu, sedang hari-hari lain sepi. Jika tempat lama sehari dapat membawa uang sewaktu pulang sore lumayan Rp 200.000,- setiap hari, sedang disini sangat sulit banyak orang belum mengetahui dimana pasar Kotak itu. “Yaa apa boleh buat mas, orang kecil harus ta’at pemerintah wong ora duwe panggonan yen mokong pasti ditindak tegas oleh satpol PP, koyok ora ngerti ae mas watak e sat pol PP” Sebenarnya hati ini sakit, marah, kecewa disuruh pindah tidak diberi apa-apa, tempat baru perlu modal, untuk beli bahan mbangu lapak baru. Yaa gitulah mas wong cilik.”

Hormat Saya

Tukinah

18. Nama : Sarwo
Alamat : Rejomulyo
Tanggal wawancara : 27 Maret 2016/ jam 14.30 wib.
Status : Penjaga Parkir Pasar Kotak.
Hasil wawancara :

“ saya sudah lama jadi tukang parkir disini, sehingga tahu persis situasi dan kondisi disini. Ada pedagang lama, sebelum pedagang kaki lima boyongan dari jalan Batanghari, Jalan Nori, Jalan Barito, mas. Sebelumnya saya pernah bekerja di Jakarta sebagai karyawan Telkom, karena tidak krasan pulang ke Madiun yaa sebenarnya di Tekom enaak, pasti trima uang setiap hari. Pedagang Kaki lima pindahan dari tempat lama masih penyesuaian, perlu waktu untuk mapan, pembeli, pelanggan banyak, yaa harus sabar. Wajar kecewa, mengeluh, dongkol, marah karena proses pindahnya begitu cepat, sosialisasi hanya 2 bulan beda di Solo cukup lama sosialisasinya hampir 16 x pertemuan baru clear/ok. Oleh karena itu masih banyak lapak yang kosong karena tidak punya modal, uang untuk mbangun lapak, “ Nggo mangan ae angel, anak butuh SPP uang seragam kok kanggo lapak, ora duwe duit mas.”

Hormat Saya

Sarwo

19. Nama : Panggeh
- Alamat : Perumnas I Pagu Indah Manisrejo, kecamatan
Taman Kota Madiun
- Tanggal wawancara : 9 April 2016/ jam 11.00 wib.
- Status : Warung Kopi, Mie Godong/Goreng.
- Hasil wawancara :

“saya sudah 30 tahun, warung Kopi/Mie di jalan Batang hari pelanggan konsumen cukup banyak karena jalan Batanghari sangat strategis, jalur pintas menuju alun-alun dari pasar besar, pasar loak “Jaya”. Berat, sulit, aboot untuk mendapat uang di pasar “Kotak” pembeli jarang, semua mengeluh, sambat dapatkan uang dari pembeli karena pembeli jarang sekali, ramenya hanya hari minggu. Banyak pedagang yang keluh kesah sing tuku kok ora enek, sing enek mung konco-konco bakul lain yang lalu lalang. Dan mencari makan untuk sarapan yang jelas rugi-rugi mangan opo iki jualan ora laku, dan tidak ada pesangon dari Pemkot mas, hanya perintah relokasi dari satpol PP tuk pindah ke pasar Loak “Kotak”

Hormat Saya

Panggeh.

20. Nama : Joko
- Alamat : Patihan Kota Madiun.
- Tanggal wawancara : 9 April 2016/ 10.30. wib
- Status : Jualan Hand Phone dan assesoris.
- Hasil wawancara :

“sepi, sepi mas kondisi pasar kotak, blas ora ono sing laku, sing wiri para pedagang yang dodolane ora laku, untuk sarapan saja harus pakai uang modal dari rumah, gimana sampai jam 12 tidak laku sama sekali. Memang mas jauh sekali kondisinya dengan tempat lama di jalan Batanghari yang banyak jualan nya laku, sehingga tidak menguras modal dari rumah. Lokasi di pasar “Kotak” belum dikenal dan lokasinya tidak sebaik pasar Loak Jalan Batanghari semua mengeluh lokasi baru sepi-sepi pembeli. Pembeli konsumen sangat sepi, kecuali hari minggu pokok nya semua pedagang mengeluh bahwa pasar “Kota” sepi , untuk makan saja harus bawa uang dari rumah andalkan jaul laku sangat sulit dan ora mangan mas. Kecewa, marah, dongkol, dengan kondisi lokasi tempat baru, pasar “Kotak” cari uang sulit, karena pembeli tidak ada dan banyak yang belum tahu, tetapi harus berjaung mas, sabar walaupun harus tunggu 5 tahun lagi”

Hormat Saya

Joko

21. Nama : Asmuni
- Alamat : Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Tanggal wawancara : 9 April 2016./ jam 09 .30 wib.
- Status : Service dan jualan jam.

“ saya pedagang jual dan service Jam, sudah 20 tahun. Saya pedagang lama bukan pindahan dari pasar loak “Kotak” sehingga tidak ada pengaruh sama sekali dengan pendapatan. Yaa pelanggan, pedagang tidak berpengaruh karena saya tidak mengalami relokasi, itulah bedanya, sehingga saya tidak bangun lapak baru, sebagaii dagang jam dan service tidak perlu tempat luas cukup 2 x 2 lapak tuk jam. Berbeda dengan teman dari jalan Batanghari, jalan Norikehilangan tempat, pelanggan/konsumen, saya tidak seperti mereka alhamdulillah setiap hari pasti ada pembeli, pelanggan yang datang, entah batu, beli jam atau assesoris”

Hormat Saya

Asmuni

- 22 Nama : Salsa Tailor dan Permak Jin/Jas.
 Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kota Madiun.
 Tanggal wawancara : 10 APRIL 2016 / JAM 10.00 Wib.
 Status : Tukang jahit/ Penjahit.
 Hasil wawancara :

“ saya penjahit permak jas dan jean, bukan pindahan dari Jalan Batanghari sudah lama menempati lokasi di pasar “ kotak”. Tidak ada pengaruh dengan adanya relokasi, pelanggan/ konsumen tetap tidak hilang, sebenarnya tempai disini cukup rame, pelanggan datang dengan sendiri dan mencari, berbeda dengan pindahan dari jalan Batanghari, Jalan Nori, maka tidak benar jika pasar “Kotak” sepi dan lokasi di pinggir Kota, nanti jika pedagang relokasi tersebut sudah mapan dikenal oleh konsumen, pembeli datang sendiri, seperti saya alami di awal menempati pasar “Kotak”, sabar, sabar dan telaten mas. Wong kabeh iku sang dermo nglakoni, kita ora duwe opo-opo kabeh duwek e pemerintah Kota kita mung nunut lokasi jualan ora duwe hak, opop-opo, sabar-sabar ojo protes, mengeluh melulu

Hormat Saya

Salsa

23. Nama : Mono
- Tanggal Wawancara : 19 Juni 2016
- Pekerjaan : pedagang warung kopi
- Alamat : Jl. Srindit Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun.
- Hasil wawancara :

sepi pembeli di pasar “Kotak” karena tempat belum dikenal dan jauh dari lokasisemula 5 km, tidak ada bantuan apa-apa dari Pemkot Madiun baik pada waktu boyongan/pinda pesangon sebagai tambahan modal awal pedagang. Mohon bantuan bapak yang kenal Maldi agar kami pedagang diberi bantuan untuk modal awal dagangan dan biaya renovasi lapak, bila tidak ada uluran tangan dari P.Maldi sungguh berat saya mulai dagang di pasar “Kotak”

Mono

